Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023

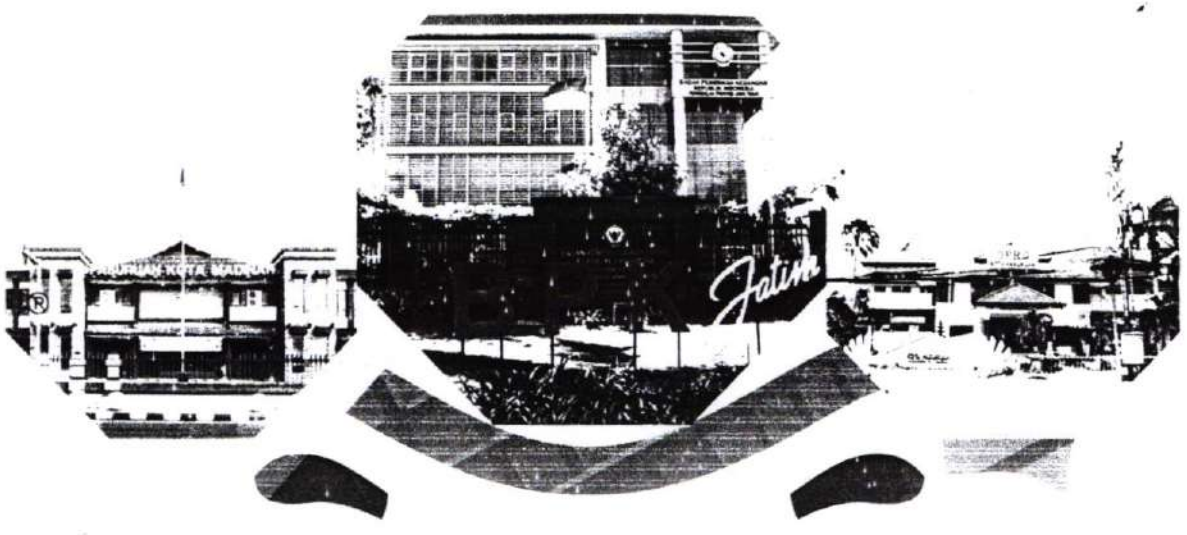

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 74.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024
Tanggal : 30 April 2024

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN 2023

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALI KOTA PASURUAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023
AUDITED

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan, yang terdiri dari Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Pasuruan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Pasuruan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pasuruan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dan perubahan saldo anggaran lebih tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, operasional dan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 74.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 30 April 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-13531

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. **Dasar Hukum Pemeriksaan**
   a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
   b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. **Standar Pemeriksaan**
   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. **Tujuan Pemeriksaan**
   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023, dengan pertimbangan:
   a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
   b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) sesuai dengan SAP;
   c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. **Entitas yang Diperiksa**
   Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Pasuruan yang memiliki 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. **Lingkup Pemeriksaan**
   Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang terdiri dari:
   a. Neraca;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
   c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah;
   d. Laporan Arus Kas (LAK);
   e. Laporan Operasional (LO);
   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

   Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:
   a. kewajaran penyajian saldo akun pada Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023;
   b. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
   c. kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
   d. kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

e. konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
f. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. **Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang *(reperformance)*, dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. **Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 56 hari yang terdiri dari:

a. Pemeriksaan interim dilakukan selama 26 hari mulai tanggal 22 Januari s.d 23 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/ST/XVIII.SBY/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 serta Surat Tugas Nomor 93/ST/XVIII.SBY/02/2024 tanggal 13 Februari 2024;

b. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 6 Maret s.d. 4 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 175/ST/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 5 Maret 2024.

8. **Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

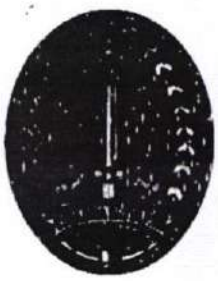

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PASURUAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Anggaran Saldo Lebih, Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 2024

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR GRAFIK ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

DAFTAR SINGKATAN v

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3
3. Neraca 4
4. Laporan Operasional (LO) 7
5. Laporan Arus Kas (LAK) 9
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 12
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .....

BAB I Pendahuluan 13

1.1 Maksud dar. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 13

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keungan 14

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keungan 16

BAB ll Ekonomi Makro,Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 18

1. Ekonomi Makro Kota Pasuruan 18

2 Kebijakan Keuangan 22

BAB lll Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 53

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 53

2 APBD dan Perubahan APBD 53

3 Realisasi APBD 56

4 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan 57

BAB IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 59

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 59

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 59
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah. 86
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 88
1. Laporan Realisasi Anggaran..... 89
2. Laporan Perubahan SAL..... 134
3. Neraca..... 135
4. Laporan Operasional (LO)..... 190
5. Laporan Arus Kas..... 210
6. Laporan Perubahan Ekuitas..... 215
BAB VI Penjelasan penting lainnya..... 217
1. *Treasury Deposit Facility (TDF)*..... 217
2. Properti Investasi..... 217
3. Piutang Jangka Panjang..... 218
4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)..... 218
BAB VII Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah..... 220
1. Letak Geografis..... 220
2. Luas Wilayah..... 220
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan..... 222
4. Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga Pemerintah Kota Pasuruan..... 223
BAB VIII PENUTUP..... 225

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Tahun 2019–2022 18

Grafik 2.2 Distribusi Presentase PDRB atas harga berlaku menurut lapangan Usaha di Kota Pasuruan 19

Grafik 2.3 Pengembangan Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan Kota Pasuruan 2015 - 2022 21

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2018–2022 19

Tabel 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Di Kota Pasuruan 21

Tabel 2.3 Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan 30

Tabel 2.4 Proyeksi Belanja Kota Pasuruan 41

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia 47

Tabel 2.6 Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi 50

Tabel 2.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah 52

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja APBD TA 2023 53

Tabel 3.2 Kenaikan Target Pendapatan Daerah TA 2023 54

Tabel 3.3 Kenaikan/penurunan Target Belanja Daerah TA 2023 55

Tabel 3.4 Kenaikan Target Pembiayaan Daerah TA 2023 56

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan TA 2023 56

Tabel 4.1 Kualitas Piutang Menurut Jenis/Obyek Piutang, Umur dan Tingkat kolekbilitasnya 65

Tabel 4.2 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 65

Tabel 4.3 Penetapan Aging Schedule, Kategori dan tingkat kolekbilitas serta prosentase penyisihan dana bergulir diragukan tidak tertagih 73

Tabel 4.4 Metode Penyusutan 77

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2023 & 2022 89

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 & 2022 90

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 & 2022 91

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 & 2022..... 97

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 & 2022 97

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 & 2022.. 101

Tabel 5.7 Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023..... 102

Tabel 5.8 Rincian Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023 103
Tabel 5.9 Rincian Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023 104
Tabel 5.10 Rincian Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 104
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 & 2022 105
Tabel 5.12 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 & 2022 105
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 & 2022 106
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 & 2022.. 109
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 &2022 110
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 & 2022..... 111
Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2023 & 2022 111
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 & 2022 112
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil tahun 2023 & 2022 115
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2023 & 2022 117
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 117
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 & 2022..... 118
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 & 2022 118
Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 & 2022..... 119
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 & 2022 121
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 & 2022..... 122
Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 & 2022..... 123
Tabel 5.28 Rincian SKPD yang melaksanakan belanja hibah 2023 & 2022..... 123
Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 & 2022 124
Tabel 5.30 Rincian SKPD yang melaksanakan belanja sosial 2023 124
Tabel 5.31 Rincian Anggaran & Realisasi belanja modal tahun 2023 & 2022... 125

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 & 2022 125
Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 & 2022 127
Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 & 2022 128
Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 & 2022 129
Tabel 5.36 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 & 2022 130
Tabel 5.37 Rincian penggunaan dana belanja tidak terduga 2023 130
Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Surplus/defisit Tahun 2023 131
Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 131
Tabel 5.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 131
Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 2023 132
Tabel 5.42 Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2023 132
Tabel 5.43 Rincian SILPA Tahun 2023 132
Tabel 5.44 Posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2023 & 2022 135
Tabel 5.45 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2023 & 2022 136
Tabel 5.46 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 & 2022 136
Tabel 5.47 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro per 31 Desember 2023 & 2022 137
Tabel 5.48 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 & 2022 138
Tabel 5.49 Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Puskesmas JKN 2023 & 2022 ... 139
Tabel 5.50 Mutasi Kas Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2023 & 2022 139
Tabel 5.51 Saldo Kas Bendahara BOS 31 Desember 2023 & 2022 140
Tabel 5.52 Mutasi Kas Bendahara BOS per 31 Desember 2023 & 2022 140
Tabel 5.53 Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 & 2022 141
Tabel 5.54 Mutasi Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 & 2022 141
Tabel 5.55 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023 & 2022 142

Tabel 5.56 Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 144
Tabel 5.57 Mutasi Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023 & 2022 146
Tabel 5.58 Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat
31 Desember 2023 & 2022 148
Tabel 5.59 Mutasi Piutang Transfer antar Daerah
per 31 Desember 2023 & 2022 149
Tabel 5.60 Mutasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 & 2022 150
Table 5.61 Kebijakan Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih 151
Table 5.62 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023..... 151
Tabel 5.63 Saldo Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2023 & 2022 152
Tabel 5.64 Mutasi Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2023 & 2022 153
Tabel 5.65 Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 & 2022 154
Tabel 5.66 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan
Per 31 desember 2023 & 2022..... 156
Tabel 5.67 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pemkot Pasuruan
Per 31 desember 2023 & 2022..... 158
Tabel 5.68 Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023 159
Tabel 5.69 Penyertaan Modal PDAM Kota Pasuruan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2023 & 2022 161
Tabel 5.70 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 & 2022 161
Tabel 5.71 Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 & 2022 162
Tabel 5.72 Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 162
Tabel 5.73 Daftar Properti Investasi tanah 2023 163
Table 5.74 Mutasi Aset tetap peralatan dan mesin
per 31 Desember 2023 & 2022 164
Table 5.75 Pergeseran Kodefikasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023 165
Table 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2023 165
Tabel 5.77 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung Bangunan
Tahun 2023..... 166
Tabel 5.78 Peralatan dan Mesin dari Hibah Tahun 2023 166

Tabel 5.79 Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan jasa..... 167
Tabel 5.80 Peralatan dan Mesin reklas ke ekstracomptable..... 168
Tabel 5.81 Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Lain - Lain 169
Tabel 5.82 Rincian aset peralatan dan Mesin reklas ke barang dan jasa..... 169
Tabel 5.83 Mutasi aset gedung dan bangunan Per 31 Desember 2023 & 2022.. 169
Tabel 5.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 170
Tabel 5.85 Daftar Rimciam PSU Tahun 2023..... 171
Table 5.86 Rincian aset Gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa..... 172
Table 5.87 Rincian Reklas ke jalan , Irigasi dan jaringan tahun 2023 173
Tabel 5.88 Rincian Reklas ke aset lainnya tahun 2023 174
Tabel 5.89 Mutasi aset jalan, irigasi dan Jaringan per 31 Desember2023 & 2022 175
Tabel 5.90 Anggaran dan realisasi belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 175
Tabel 5.91 Rincian Mutasi dari belanja modal gedung dan bangunan..... 176
Tabel 5.92 Rincian Reklas dari belanja barang dan jasa..... 177
Tabel 5.93 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2023 & 2022..... 178
Tabel 5.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2023 ... 179
Tabel 5.95 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 & 2022 180
Tabel 5.96 Mutasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 & 2022..... 180
Tabel 5.97 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap per OPD 181
Tabel 5.98 Rincian dana Cadangan per 31 Desember 2023 & 2022..... 182
Tabel 5.99 Mutasi Dana Cadangan per 31 Desember 2023 & 2022 182
Tabel 5.100 Realisasi Pembentukan dan Penggunaan dana Cadangan Tahun2022 183
Table 5.101 Saldo set Lainnya per 31 Desember 2023 & 2022 184
Tabel 5.102 Rincian Aset Lain lain 31 Desember 2023..... 187
Tabel 5.103 Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 & 2022..... 188
Tabel 5.104 Rincian Realisasi Pendapatan -LO Tahun 2023 & 2022..... 190
Tabel 5.105 Ralisasi pendapatan Asli Daerah- LO tahun 2022 & 2021..... 190

Tabel 5.106 Realisasi pendapatan pajak daerah – LO tahun 2023 & 2022 191
Tabel 5.107 Rincian selisih pendapatan pajak tahun 2023 191
Tabel 5.108 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 & 2022 192
Tabel 5.109 Rincian selisih pendapatan Retribusi Tahun 2023 193
Tabel 5.110 Realisasi Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan – LO tahun 2023 & 2022 194
Tabel 5.111 Rincian selisih pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang Dipisahkan tahun 2023 194
Tabel 5.112 Realisasi lain lain PAD yang sah – LO Tahun 2023 & 2022 195
Tabel 5.113 Rincian Selisih lain lain PAD yang sah tahun 2023 196
Tabel 5.114 Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 & 2022 197
Tabel 5.115 Realisasi pendapatan transfer Pemerintah pusat – LO tahun 2023 & 2022 197
Tabel 5.116 Rincian selisih pendapatan Pemerintah Pusat Tahun 2023 198
Tabel 5.117 Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 & 2022 199
Tabel 5.118 Rincian selisih pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 199
Tabel 5.119 Realisasi lain-lain pendapatan Daerah yang sah – LO tahun 2023 dan 2022 200
Tabel 5.120 Rincian selisih lain lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2023 200
Tabel 5.121 Realisasi Beban – LO tahun 2023 dan 2022 201
Tabel 5.122 Realisasi Beban Pegawai - LO Tahun 2023 dan 2022 202
Tabel 5.123 Perbedaan Beban Pegawai – Belanja Pegawai Tahun 2023 202
Tabel 5.124 Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2023 & 2022 203
Tabel 5.125 Perbedaan beban dengan belanja barang dan jasa tahun 2023 204
Tabel 5.126 Realisasi Beban Hibah - LO Tahun 2023 & 2022 205
Tabel 5.127 Perbedaan Beban Hibah - LO dengan LRA tahun 2023 205
Tabel 5.128 Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2023 & 2022 206
Tabel 5.129 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023 & 2022 207
Tabel 5.130 Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO tahun 2022 & 2021 207

Tabel 5.131 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per OPD – LO Tahun 2023 207
Tabel 5.132 Realisasi Beban Lain – lain - LO Tahun 2022 & 2021 208
Tabel 5.133 Rincian penghapusan pada 12 OPD – LO tahun 2023 208
Tabel 5.134 Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2023 & 2022..... 208
Tabel 5.135 Realisasi Defisit non Operasional – LO Tahun 2023 & 2022 209
Tabel 5.136 Realisasi Beban tak Terduga - LO Tahun 2023 & 2022..... 209
Tabel 5.137 Perbedaan Beban dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 209
Tabel 5.138 Rincian surplus/Defisit – LO tahun 2023 & 2022 210
Tabel 5.139 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023& 2022..... 210
Tabel 5.140 Arus Kas Aktivitas investasi Aset Non Keuangan
Tahun 2023 & 2022 211
Tabel 5.141 Arus Kas dari Aktivitas Pembiyaan Tahun 2023 & 2022 212
Tabel 5.142 Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 & 2022..... 213
Tabel 5.143 Perhitungan Kenaikan dan Penurunan Kas dalam LAK
tahun 2023 & 2022 214
Tabel 5.144 Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 dan 2022..... 214
Tabel 5.145 Saldo Akhir Kas 31 Desember 2023 dan 2022..... 214
Tabel 5.146 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022..... 215

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode dan Nama Urusan Pemerintahan pada Masing-masing OPD

Lampiran 2. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

Lampiran 3. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Lampiran 4. Dasar Hukum Pemungutan dan Tarif Masing-masing Jenis Pajak Daerah

Lampiran 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011

Lampiran 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor12 tahun 2012

Lampiran 7. Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011

Lampiran 8. Rincian Data Realisasi Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023

Lampiran 9. Rincian Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga per-OPD

Lampiran 10. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Lampiran 11. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dan BOS Tahun 2023

Lampiran 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Lampiran 13. Rincian Saldo Masing-Masing Sekolah per 1 Januari dan 31 Desember 2023

Lampiran 14. Rekapitulasi Sisa Saldo Dana BOS Tahun 2023

Lampiran 15. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Bapenda Tahun 2023

Lampiran 16. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada Disperindag, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dan BPKA Tahun 2023

Lampiran 17. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, RSUD DR. R. Soedarsono dan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Lampiran 18. Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Lampiran 19. Nilai Aktiva Tak Berwujud per OPD Tahun 2023

Lampiran 20. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah eks bengkok Per 31 Desember 2023

Lampiran 21. Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2023

Lampiran 22. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

Lampiran 23. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

Lampiran 24. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan

Lampiran 25. Laporan Keuangan PT BPR Kota Pasuruan

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**992.795.607.786,00**	**941.695.238.574,70**	**94,85**	**911.656.871.775,11**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**206.879.549.383,00**	**179.625.631.641,70**	**86,83**	**163.732.730.981,11**
4.1.1	Pajak Daerah	50.765.000.000,00	52.473.038.186,78	103,36	46.650.290.289,00
4.1.2	Retribusi Daerah	15.606.594.900,00	11.503.008.644,00	73,71	8.117.254.501,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	134.174.470.316,00	109.365.663.643,89	81,51	102.849.823.212,74
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**782.916.058.403,00**	**761.847.606.933,00**	**97,31**	**747.924.051.772,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.998.660.691,00	651.390.724.212,00	97,37	644.106.485.201,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	653.318.600.691,00	635.710.664.212,00	97,30	626.097.743.201,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	100,00	18.008.742.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.917.397.712,00	110.456.882.721,00	96,96	103.817.566.571,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	103.743.194.392,00	108.053.799.100,00	104,16	91.417.533.571,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.174.203.320,00	2.403.083.621,00	23,62	12.400.033.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.000.000.000,00**	**222.000.000,00**	**7,40**	**89.022,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	222.000.000,00	7,40	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	89.022,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**	**87,60**	**939.274.546.104,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**944.343.502.254,00**	**862.605.302.488,92**	**91,34**	**804.595.474.677,65**
5.1.1	Belanja Pegawai	403.330.138.252,00	369.520.132.167,00	91,62	378.770.674.303,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	464.480.805.962,00	423.932.933.202,92	91,27	363.508.133.547,65
5.1.5	Belanja Hibah	56.518.768.040,00	53.328.245.546,00	94,35	35.526.573.727,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.013.790.000,00	15.823.991.573,00	79,07	26.790.093.100,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**201.600.917.439,00**	**146.450.795.740,00**	**72,64**	**129.718.487.434,85**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	27.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.608.075.179,00	54.641.329.574,00	83,28	36.486.480.985,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.514.826.767,00	58.482.341.064,00	86,62	54.606.509.061,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.070.566.518,00	32.938.790.102,00	80,20	38.003.139.388,85
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	407.448.975,00	388.335.000,00	95,31	619.120.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.238.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.967.169.780,00**	**1.722.869.500,00**	**21,62**	**4.960.583.992,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00	21,62	4.960.583.992,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(161.115.981.687,00)**	**(69.083.729.154,22)**	**42,88**	**(27.617.674.329,39)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**198.171.590.848,00**	**257.171.724.533,47**	**129,77**	**200.979.067.244,78**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00	171.171.590.849,31	100,00	200.976.067.244,78
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00	86.000.133.684,16	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**37.055.609.161,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.802.066,08**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08
	PEMBIAYAAN NETTO	**161.115.981.687,00**	**257.171.724.533,47**	**159,62**	**198.789.265.178,70**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**188.087.995.379,25**	**0,00**	**171.171.590.849,31**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	**171.171.590.849,31**	**200.976.067.244,78**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	171.171.590.849,31	200.976.067.244,78
Sub Total	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	188.087.995.379,25	171.171.590.849,31
Sub Total	**188.087.995.379,25**	**171.171.590.849,31**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**188.087.995.379,25**	**171.171.590.849,31**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	19.291.173.363,90	27.631.060.593,47
Kas Dana BOSP	403.951.773,00	863.357.052,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00	996.027.962,00
Kas Lainnya	0,00	1.800.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	15.303.921.063,00	13.759.414.341,00
Piutang Retribusi Daerah	3.552.940.359,00	2.635.314.601,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.758.068.693,05	35.705.759.408,05
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.672.095.700,00	3.543.068.536,40
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	6.478.901.400,00
Piutang Lainnya	4.426.141.745,36	4.295.869.590,35
Penyisihan Piutang	(16.747.584.054,40)	(13.267.328.414,70)
Beban Dibayar Dimuka	85.661.300,14	78.775.506,85
Persediaan	26.132.090.045,35	25.215.856.108,11
JUMLAH ASET LANCAR	**256.271.330.230,75**	**249.617.775.676,37**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	74.152.809.846,22	76.786.048.812,72
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**74.152.809.846,22**	**76.786.048.812,72**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**74.152.809.846,22**	**76.786.048.812,72**
ASET TETAP		
Tanah	1.555.888.954.441,07	1.557.588.312.890,07
Peralatan dan Mesin	527.675.930.767,46	482.016.609.202,09
Gedung dan Bangunan	879.454.341.681,17	810.514.650.125,97
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	945.198.471.284,63	904.204.121.678,51
Aset Tetap Lainnya	13.580.646.030,80	13.022.407.290,80
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.641.552.648,99	25.600.898.966,00
Akumulasi Penyusutan	(1.127.055.537.120,68)	(1.029.982.870.433,68)
JUMLAH ASET TETAP	**2.803.384.359.733,44**	**2.762.964.129.719,76**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	86.000.133.684,16
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**86.000.133.684,16**
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.277.671.836,00	18.581.691.000,00
Aset Tidak Berwujud	1.007.050.016,33	1.621.049.096,00
Aset Lain-lain	25.478.427.713,00	14.072.725.037,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	39.055.000,00	22.110.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**46.802.204.565,33**	**34.297.575.133,00**
JUMLAH ASET	**3.180.610.704.375,74**	**3.209.665.663.026,01**
KEWAJIBAN		

URAIAN	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	. 553.750,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	710.469.536,66	460.151.609,83
Utang Belanja	11.860.098.180,00	9.207.824.863,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	380.825.018,00	11.108.785,60
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**12.951.392.734,66**	**9.679.639.008,43**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**12.951.392.734,66**	**9.679.639.008,43**
EKUITAS		
EKUITAS	**3.167.659.311.641,08**	**3.199.986.024.017,58**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.180.610.704.375,74**	**3.209.665.663.026,01**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

4. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN - LO**	**958.638.436.461,07**	**941.857.040.096,78**	**16.781.396.364,29**	**1,78**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**182.250.892.210,87**	**148.656.294.071,92**	**33.594.598.138,95**	**22,60**
7.1.1	Pajak Daerah-LO	54.047.740.246,29	47.107.755.303,70	6.939.984.942,59	14,73
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	12.444.061.860,33	8.399.534.123,11	4.044.527.737,22	48,15
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.283.921.167,03	6.115.362.978,37	168.558.188,66	2,76
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	109.475.168.937,22	87.033.641.666,74	22.441.527.270,48	25,78
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**761.977.904.421,60**	**759.856.127.023,40**	**2.121.777.398,20**	**0,28**
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	657.999.923.100,60	655.142.154.312,40	2.857.768.788,20	0,44
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	103.977.981.321,00	104.713.972.711,00	(735.991.390,00)	(0,70)
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	**14.409.639.828,60**	**33.344.619.001,46**	**(18.934.979.172,86)**	**(56,79)**
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	14.409.639.828,60	33.344.529.979,46	(18.934.890.150,86)	(56,79)
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	89.022,00	(89.022,00)	(100,00)
8	**BEBAN**	**979.927.705.268,29**	**943.135.734.444,38**	**36.791.970.823,91**	**3,90**
8.1.1	Beban Pegawai	373.259.522.337,00	370.409.364.401,00	2.850.157.936,00	0,77
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	422.303.799.111,66	375.034.890.441,46	47.268.908.670,20	12,60
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	53.315.739.949,20	38.700.549.804,00	14.615.190.145,20	37,76
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	15.823.991.573,00	26.998.133.100,00	(11.174.141.527,00)	(41,39)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	3.794.728.575,50	1.510.265.623,80	2.284.462.951,70	151,26
8.1.8	Beban Lain-lain	12.817.791.410,93	31.523.603.337,00	(18.705.811.926,07)	(59,34)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.298.327.892,00	45.219.268.017,00	(1.920.940.125,00)	(4,25)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.381.550.510,00	14.777.184.601,00	604.365.909,00	4,09
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.150.969.464,00	37.295.054.128,12	1.855.915.335,88	4,98

NO URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	66.777.981,00	0,00	66777981,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	714.506.464,00	1.667.420.991,00	(952.914.527,00)	(57,15)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(21.289.268.807,22)**	**(1.278.694.347,60)**	**(20.010.574.459,62)**	**1.564,92**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(21.289.268.807,22)**	**(1.278.694.347,60)**	**(20.010.574.459,62)**	**1.564,92**
	POS LUAR BIASA			-	-
8 .4 .1	Beban Tak Terduga	2.103.469.500,00	879.227.100,00	1.224.242.400,00	139,24
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**2.103.469.500,00**	**879.227.100,00**	**1.224.242.400,00**	**139,24**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(23.392.738.307,22)**	**(2.157.921.447,60)**	**(21.234.816.859,62)**	**984,04**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULRAH YUSUF

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	52.473.038.186,78	46.650.290.289,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.498.780.644,00	8.117.254.501,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.283.921.167,03	6.115.362.978,37
Lain-lain PAD Yang Sah	109.036.755.043,89	102.135.407.031,74
Dana Bagi Hasil Pajak	52.499.578.024,00	25.013.386.007,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	37.712.217.041,00	104.899.779.909,00
Dana Alokasi Umum	427.076.974.462,00	400.677.921.887,00
Dana Alokasi Khusus	118.421.894.685,00	95.506.655.398,00
Dana Penyesuaian	15.680.060.000,00	18.008.742.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.053.799.100,00	91.417.533.571,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	2.403.083.621,00	12.400.033.000,00
Pendapatan Hibah	222.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	-	89.022,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**941.362.101.974,70**	**910.942.455.594,11**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	369.512.860.112,00	378.770.674.303,00
Belanja Barang dan Jasa	423.940.205.257,92	363.508.133.547,65
Belanja Hibah	53.328.245.546,00	35.526.573.727,00
Belanja Bantuan Sosial	15.823.991.573,00	26.790.093.100,00
Belanja Tak Terduga	1.722.869.500,00	4.960.583.992,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**864.328.171.988,92**	**809.556.058.669,65**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**77.033.929.985,78**	**101.386.396.924,46**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	525.371.881,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan	139.445.000,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Bangunan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	0,00	97.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	192.881.600,00	90.499.300,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya	810.000,00	795.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**333.136.600,00**	**714.416.181,00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.641.329.574,00	36.486.480.985,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.482.941.064,00	54.606.509.061,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.938.790.102,00	38.003.139.388,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	388.335.000,00	619.120.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	3.238.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**146.450.795.740,00**	**129.718.467.434,85**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**(146.117.659.140,00)**	**(129.004.071.253,85)**
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	86.000.133.684,16	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**86.000.133.684,16**	**3.000.000,00**
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.189.802.066,08
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**2.189.802.066,08**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**86.000.133.684,16**	**(2.186.802.066,08)**
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	56.312.449.232,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Kelebihan Transfer pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	0,00	1.987.852,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**56.314.437.084,07**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	56.311.895.482,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Saldo sisa Kas BLUD Akademi Keperawatan	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Setoran Pajak pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	553.750,00	0,00
Saldo sisa Kas BOP Paud	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**553.750,00**	**56.311.895.482,07**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	**(553.750,00)**	**2.541.602,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**16.915.850.779,94**	**(29.801.934.793,47)**
Saldo Awal Kas	**171.172.144.599,31**	**200.974.079.392,78**
Saldo Akhir Kas	**188.087.995.379,25**	**171.172.144.599,31**
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	19.291.173.363,90	27.631.060.593,47
Kas Dana BOSP	403.951.773,00	863.357.052,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00	996.027.962,00
Kas Lainnya	0,00	1.800.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	**3.199.986.024.017,58**	**3.187.385.532.609,39**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(23.392.738.307,22)**	**(2.157.921.447,60)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**(8.933.974.069,28)**	**14.758.412.855,79**
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.933.974.069,28)	14.758.412.855,79
EKUITAS AKHIR	**3.167.659.311.641,08**	**3.199.986.024.017,58**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pasuruan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporanyang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non

keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Pasuruan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kota Pasuruan, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
s. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023;
t. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
u. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023;
v. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
w. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;
x. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika dalam penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi Makro Kota Pasuruan
2. Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. APBD dan Perubahan APBD
3. Realisasi APBD
4. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA
   a. Pendapatan – LRA
   b. Belanja
   c. Transfer
   d. Surplus/Defisit – LRA
   e. Pembiayaan
   f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Lebih (LPSAL)
   a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
   b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
   c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
   d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
   e. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
   a. Aset
      1) Aset Lancar
      2) Investasi Jangka Panjang
      3) Aset Tetap
      4) Dana Cadangan
      5) Aset Lainnya
   b. Kewajiban
   c. Ekuitas
4. Laporan Operasional
   a. Pendapatan – LO
   b. Beban
   c. Surplus/Defisit - LO

5. Laporan Arus Kas
   a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
   b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
   c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan
   d. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran (Transitoris)
   e. Kenaikan /Penurunan Kas
   f. Saldo Awal Kas
   g. Saldo Akhir Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan dan Belanja LRA dengan Pendapatan dan Beban LO Laporan Perubahan Ekuitas
   a. Pendapatan Pajak Daerah
   b. Pendapatan Retribusi Daerah
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   d. Lain-lain PAD yang Sah
   e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
   f. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
   h. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO
   i. Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
   j. Pendapatan Hibah –LO
   j. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
   k. Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai
   l. Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa
   m. Belanja Hibah dan Beban Hibah
   n. Belanja Bantuan Sosial
   o. Belanja Tak Terduga dengan Beban Tak Terduga
   p. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Bab VI **Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**

1. Letak Geografis
2. Luas Wilayah
3. Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Bab VII **Penutup**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro Kota Pasuruan

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan dihitung dengan pendekatan produksi. Nilainya didasarkan pada harga berlaku maupun konstan. Nilai yang didasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi secara riil pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2023, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pasuruan sebesar nilai 10,39 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 9,95 persen, jika di banding tahun 2022, dengan nilai dari 9,45 triliun. Berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023, PDRB atas dasar harga konstan untuk Kota Pasuruan adalah 6,63 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,65% sebagaimana disajikan pada Grafik 2.1 berikut:

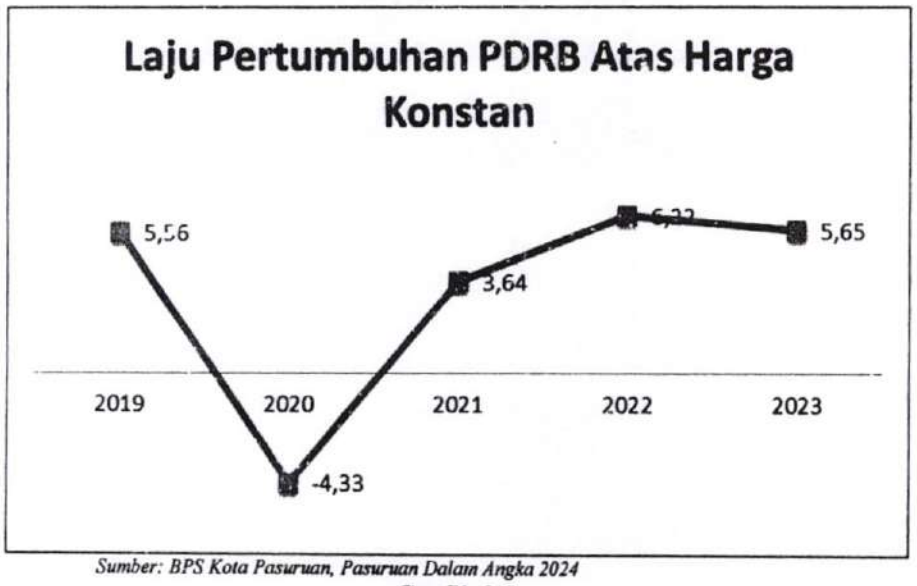

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Pasuruan Dalam Angka 2024

Grafik 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Tahun 2019-2023

Berdasarkan perhitungan PDRB atas Dasar Harga Konstan, sejatinya perekonomian Kota Pasuruan pada 2023 mengalami kenaikan atau ekspansi, meskipun sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terbilang wajar mengingat keadaan ekonomi Indonesia secara umum pun terbilang lebih stabil dibandingkan 2022, sehingga fluktuasinya pun menjadi lebih *smooth*. Ekonomi Kota Pasuruan pada 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,65 persen dibandingkan 2022. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar -72,83 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar -2,13 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,33 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,64

persen, Jasa Perusahaan sebesar 8,09 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,60 persen.

Melesatnya Transportasi dan Pergudangan tidak lepas dari tingginya arus pengiriman barang dan jasa baik dari maupun ke luar Kota Pasuruan. Salah satu pendorongnya adalah menggeliatnya *online shop* yang terindikasi dari meningkatnya produksi pada Informasi dan Komunikasi. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Industri Pengolahan secara eksplisit juga ikut melonjak, seiring maraknya event tingkat Nasional yang digelar di Kota Pasuruan pada 2023.

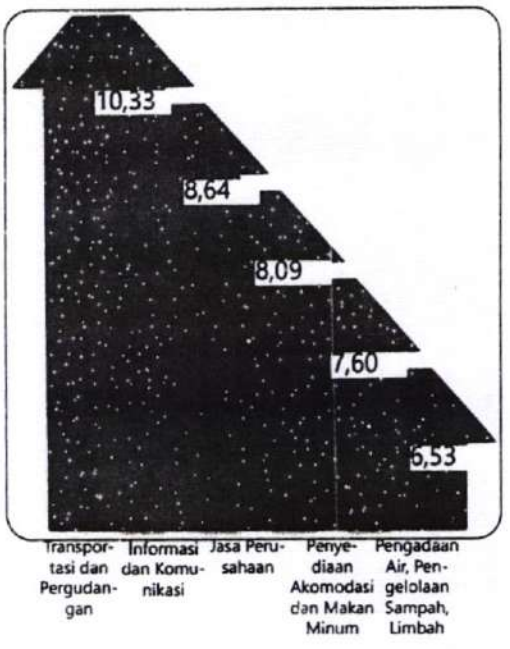

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2023

Grafik 2.2

Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi 2023

Struktur perekonomian di Kota Pasuruan pada 2023 tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Sama seperti pada 2022, peringkat tertinggi pada struktur ini masih menjadi milik Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan share sebesar 29,64 persen. Di tempat kedua disusul oleh Industri Pengolahan yang turut memberi andil sebesar 20,15 persen pada perekonomian Kota Pasuruan. Perubahan sedikit terjadi pada peringkat ketiga, di mana Transportasi dan Pergudangan berhasil memberikan peran yang lebih tinggi pada 2023 dibandingkan Informasi dan Komunikasi yang sebelumnya berada di posisi ini. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa arus keluar-masuk penumpang dan barang meningkat pesat di Kota Pasuruan. Hal ini tidak lepas dari posisi Kota Pasuruan yang terbilang strategis di Provinsi Jawa Timur, serta peran serta Pemerintah Kota dalam membangun infrastruktur transportasi dan pariwisata. Adapun tabel distribusi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagai berikut :

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2021-2023

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2021	2022	2023

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	193,47	213,93	228,86	124,49	129,41	132,52
2	Pertambangan dan Penggalian	2,01	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	1670,74	1883,73	2.095,17	1.104,13	1.194,93	1.263,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,93	6,44	6,59	4,89	5,26	5,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,59	19,51	20,99	16,08	15,74	16,77
6	Konstruksi	504,44	547,28	571,11	357,61	372,29	387,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2478,65	2807,57	3.082,27	1.674,97	1.806,32	1.909,93
8	Transportasi dan Pergudangan	525,26	695,59	861,10	356,17	422,31	465,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	451,20	505,47	558,35	286,66	309,07	332,55
10	Informasi dan Komunikasi	724,88	741,82	812,22	651,31	658,66	715,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	617,58	661,44	708,07	430,44	442,37	458,95
12	Real Estate	217,88	227,43	237,49	154,01	158,88	163,27
13	Jasa Perusahaan	53,84	55,77	62,11	36,77	36,71	39,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,46	391,66	404,39	243,68	244,37	244,88
15	Jasa Pendidikan	360,77	366,44	395,66	260,28	262,23	273,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,31	85,82	89,22	61,79	62,23	60,90
17	Jasa lainnya	214,13	242,92	266,27	150,02	161,58	166,24
	Total	**8491,14**	**9452,82**	**10.399,89**	**5914,59**	**6.282,38**	**6.637,08**

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, disebutkan bahwa Kota Pasuruan mengalami kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,59 poin yaitu dari 77,71 di tahun 2022 menjadi 78,30 di tahun 2023. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,64 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,64 menjadi 13,66 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,67 tahun menjadi 9,78 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 447 ribu rupiah (3,24 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Sepanjang Tahun 2016-2023, tingkat kemiskinan Kota Pasuruan cenderung fluktuatif, dengan laju yang variatif. Berdasarkan data pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun 2022 dari 13.020 penduduk menjadi 13.560 penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pasuruan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	362 224	14,93	7,62
2017	378 593	14,85	7,53
2018	415 171	13,45	6,77
2019	434 435	12,92	6,46
2020	441 531	13,40	6,66
2021	461 624	13,97	6,88
2022	486 893	13,02	6,37
2023	529 512	13,56	6,60

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Kota Pasuruan Dalam Angka 2024

Tingkat kesenjangan penduduk miskin dapat diketahui melalui Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada Tahun 2023, indeks keparahan kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar 0,33. Grafik 2.3 menyajikan perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan.

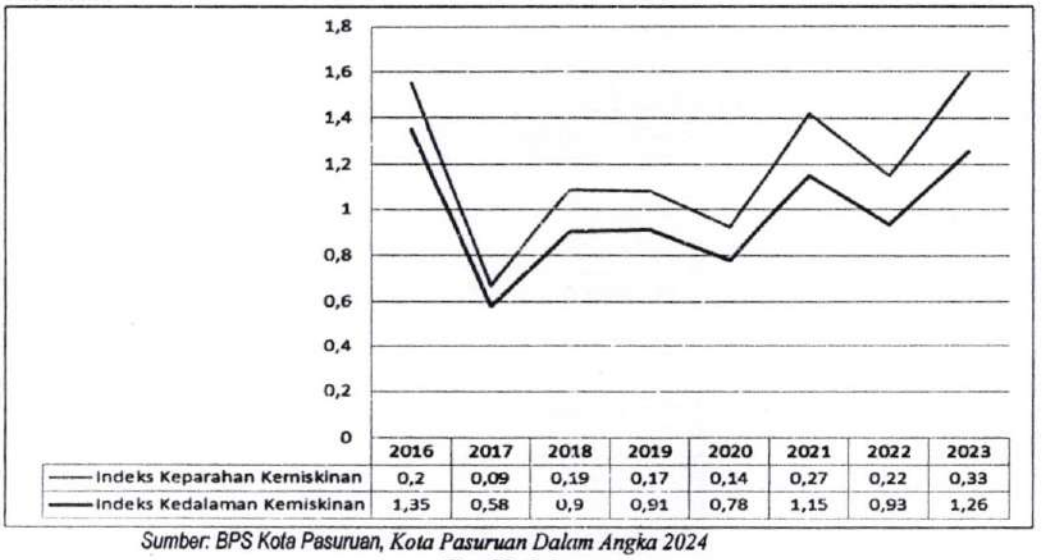

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,2	0,09	0,19	0,17	0,14	0,27	0,22	0,33
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,35	0,58	0,9	0,91	0,78	1,15	0,93	1,26

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Kota Pasuruan Dalam Angka 2024

Grafik 2.3

Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Pasuruan Tahun 2016-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada Tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar 1,26.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Setiap organisasi sekecil apapun bentuknya dalam upaya menjalankan kegiatan organisasi pasti membutuhkan sumber pembiayaan. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya pasti membutuhkan sejumlah anggaran. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki sebagian besar pemerintah daerah di satu sisi, serta semakin membesarnya tugas dan kewenangan pemerintah daerah seiring makin meningkatnya tuntutan pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah di sisi lainnya, memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut utamanya terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah yang mana sumber-sumber pembiayaan daerah telah diatur dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka sebelum merencanakan program kegiatan pembangunan daerah harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan pembiayaan daerah berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, maka perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan telah menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Sedangkan jenis Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Hakikat pemberian otonomi daerah dengan menerapkan asas desentralisasi adalah bertujuan agar daerah mampu mengakumulasikan pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimilikinya untuk menjadi kekuatan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capasity*). Dengan demikian, proses pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga akan muncul suatu kekuatan ekonomi yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal yang dimiliki oleh daerah sangat tergantung terhadap potensi sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kota Pasuruan sadar bahwa potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembelanjaan yang harus dilakukan dalam satu tahun anggaran. Sebagian besar pendanaan atas belanja daerah masih dipenuhi dari dana transfer pemerintah berupa pendapatan perimbangan daerah. Ketimpangan yang terjadi terhadap sumber pembiayaan tersebut menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dibandingkan dengan kebutuhan daerah, dana perimbangan yang ditransfer ke daerah belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan daerah. Dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang mencerminkan prinsip otonomi daerah terbatas jumlahnya. Setiap tahun pemerintah telah menaikkan penerimaan Dana Alokasi Umum. Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum tersebut terutama terkait dengan kebijakan terhadap belanja pegawai baik kebijakan terhadap kebutuhan kenaikan gaji PNS maupun untuk pengadaan pegawai baru berikut tunjangan dan tambahan penghasilannya.

Dalam rangka menggali sumber pendanaan daerah, baik yang berasal dari pemerintah maupun berasal dari potensi daerah, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yakni sebagai berikut:

1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

(1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpengaruh terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(3) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

(4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) termasuk bagi hasilnya kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, termasuk bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

(6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan dari provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen)

realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional.

(7) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

(8) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

(9) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(10) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(11) Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

(1) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

(2) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

(1) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

(2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana Cadangan maupun selain dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian objek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

(4) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

(5) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT tiga tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-

Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi *(lifting)* minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal peraturan presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila peraturan presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai peraturan presiden tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023.

Apabila peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek hibah Dana BOS, rincian objek hibah Dana BOS masing-masing satuan pendidikan negeri sesuai kode rekening berkenaan.

b) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

e) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

f) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau peraturan menteri keuangan mengenai alokasi dana darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

g) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam objek dan rincian objek pendapatan berkenaan.

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan potensi yang ada. Proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**992.795.607.786,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**206.879.549.383,00**
4.1.01	Pajak Daerah	50.765.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.606.594.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.484.167,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	134.174.470.316,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**206.879.549.383,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**782.916.058.403,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.998.660.691,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	653.318.600.691,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**653.318.600.691,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00
4.2.01.02.01	DID	15.680.060.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	**15.680.060.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.917.397.712,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	103.743.194.392,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	103.743.194.392,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.174.203.320,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	10.174.203.320,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**113.917.397.712,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**782.916.058.403,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.000.000.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**3.000.000.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**992.795.607.786,00**

Sumber: Bapenda dan BPKA Kota Pasuruan Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023 total pendapatan Kota Pasuruan diproyeksikan sebesar Rp992.795.607.786,00. Total pendapatan tersebut berasal dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp206.879.549.383,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp782.916.058.403,00 dan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00. Berdasarkan pada Tabel 2.3 tersebut, sumber pendapatan Kota Pasuruan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan baru diikuti proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komposisi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas, sehingga perlu upaya pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah selain yang telah ada.

Dalam rangka pencapaian target seperti tersebut di atas, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Intensifikasi
   a) Melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang Pendapatan Asli Daerah untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
   b) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
2) Melakukan Ekstensifikasi
   a) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
   b) Melakukan upaya penggalian potensi baru terhadap objek Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Upaya-upaya lain
   a) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   b) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
   c) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai satuan/unit kerja penghasil;
   d) Melakukan pembinaan dengan mengoptimalkan Tim Intensifikasi PAD khususnya Pajak Bumi Bangunan dengan memberikan insentif kepada kecamatan/kelurahan yang menunjukkan kinerja baik dan memperhitungkan realisasi penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh kelurahan terhadap besaran alokasi Dana Pembangunan Kelurahan.

a. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka

penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID*-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran Belanja Daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   1) Belanja Pegawai

      Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, dan honorarium.

      Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

      a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
      b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
      c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
      d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan objek dan rincian objek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;
d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022;
e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah setempat/rumah sakit umum pusat di daerah;
f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
g) Penganggaran belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

   Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan memedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

   (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;
   (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
   (5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
   (6) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID*-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID*-19).

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum memedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4) Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka pelaksanaan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga,

(7) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; dan

(8) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

h) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

(1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

(2) Pimpinan dan anggota DPRD; dan

(3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli

diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

i) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

j) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;

b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum memedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4) Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka pelaksanaan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga,

kebijakan secara khusus yang diambil oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pejabat negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas/THR;

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

(3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak dianggarkan dalam APBD;

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

(6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(7) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, dan diuraikan ke dalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public obligation*). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;

c) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD memedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan social;

d) Belanja Bagi Hasil

Tidak ada penganggaran Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah;

e) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Belanja bantuan keuangan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antar daerah sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah pendudukan, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Belanja bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan rincian objek Belanja Nama Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Aministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:

(1) Kepala daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari Belanja Tidak Terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
(2) Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
(3) Kepala daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; dan
(4) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan.

Dengan memperhitungkan pada perkiraan kemampuan keuangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023, maka diperkirakan total alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.153.911.589.473,00 dengan alokasi untuk penganggaran Belanja Operasi sebesar Rp944.343.502.254,00 atau mencapai 81,84%, Belanja Modal sebesar Rp201.600.917.439,00 atau 17,47%, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.967.169.780,00 atau 0,69%. rincian alokasi belanja Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Proyeksi Belanja Kota Pasuruan
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN
5	**BELANJA DAERAH**	**1.153.911.589.473,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**944.343.502.254,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	403.330.138.252,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.480.805.962,00
5.1.05	Belanja Hibah	56.518.768.040,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.013.790.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**944.343.502.254,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**201.600.917.439,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.608.075.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.514.826.767,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.070.566.518,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	407.448.975,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**201.600.917.439,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.967.169.780,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.967.169.780,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**7.967.169.780,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.153.911.589.473,00**

b. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2023 adalah tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yang disusun dengan mengacu pada visi Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan, yakni untuk mewujudkan ***"Menjadikan Pasuruan Kota Madinah yaitu Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya"***. Guna mewujudkan impian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang antara lain berisi visi dan misi kepala/wakil kepala daerah. Lebih lanjut, RPJMD tersebut akan digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023. Penyusunan substansi materi dalam RKPD Kota Pasuruan 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada agenda-agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2018-2023, RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, RPJP Kota Pasuruan serta memperhatikan kondisi eksisting, permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Visi "Menjadikan Pasuruan Kota Madinah yaitu Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya", terdapat terdapat fokus penting dari setiap poin visi sebagai guiden Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat mencapainya yang dimanifestasikan kedalam 9 Agenda Prioritas. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :

1. **Maju Ekonominya**
   a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;
   b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
   c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
   d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih.
2. **Indah Kotanya**
   a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar;
   b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel.
3. **Harmonis Warganya**
   a. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis;
   b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta perlindungan daricovid-19;
   c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan.

Berikut merupakan keterkaitan pokok-pokok visi dengan misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang sekaligus menggambarkan keterkaitan visi dan misi Kota Pasuruan

Visi RPJMD 2021-2026	Pokok Visi	Misi
Pasuruan Kota Madinah "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"	Maju Ekonominya	**Misi I :** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
	Indah Kotanya	**Misi II :** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
	Harmonis Warganya	**Misi III :** Memantabkan Kehidupan Masyarakat MultikulturalYang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
		Misi IV : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Visi pembangunan Kota Pasuruan diwujudkan melalui misi-misi pembangunan yang telah ditetapkan dapat dipahami secara lebih operasional oleh para pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan. Tujuan dan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan pembangunan Kota Pasuruan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1) Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
2) Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
3) Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses PendidikanDan Kesehatan Yang Merata;
4) Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Adapun sasaran strategis pembangunan yang ingin dicapai oleh Kota Pasuruan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pasuruan, antara lain:

1) Pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar secara merata;
2) Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana, SDM pada sektor perdagangan, perindustrian, periwisata dan usaha mikro;
3) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan iklim investasi dan kondisi pendukung daya saing ekonomi daerah;
5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah;
6) Penurunan tingkat pengangguran terutama kelompok pengangguran terdidik;
7) Pembinaan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
8) Mewujudkan susasana kehidupan yang aman, tentram, tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta penguatan mitigasi bencana;
9) Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman;
10) Peningkatan konektifitas, dan mobilitas orang dan barang yang didukung oleh sistem transportasi cerdas;
11) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan layak fungsi;
12) Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan seluruh elemen masyarakat;
13) Pengarustamaan gender;
14) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kota Pasuruan, maka tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah ***"Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Potensi Lokal"***. Makna utama dalam tema ini adalah pemerataan hasil pembangunan, sehingga dapat dinikmati oleh segenap masyarakat Kota Pasuruan, dengan penjabaran ke dalam unsur pokok tema, sebagai berikut:

1) Mengembangkan diversifikasi produk dan branding produk unggulan industry olahan;
2) Pengembangan pariwisata terintegrasi;
3) Pemenuhan sarana prasarana hidup layak;
4) Penguatan sarana prasarana social dan kesiapsiagaan bencana;
5) Penguatan keberdayaan seluruh elemen masyarakat dalam partisipasi pembangunan;
6) Pemenuhan dan peningkatan kualitas SPM;
7) Pengembangan antar daerah dalam pengembangan pasar;
8) Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif.

Penyusunan prioritas pembangunan daerah mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, selain itu dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 disertai dengan sembilan Agenda Pembangunan (Nawacita) kedua dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu:

Cita 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Cita 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
Cita 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
Cita 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
Cita 5 : Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
Cita 6 : Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Cita 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
Cita 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
Cita 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Prioritas pembangunan nasional untuk Tahun 2023 berdasarkan pada Pembangunan Tahun 2020-2024 terdiri dari 7 prioritas, yaitu:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4) Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dari tujuan pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi I Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan, tema pembangunan Tahun 2022 dititikberatkan pada Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 dan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi. Peningkatan jumlah event dan Pengembangan tempat wisata seperti revitalisasi alun-alun dan pembangunan payung madinah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan. Misi I mempunyai satu tujuan dengan tiga indikator dan dua sasaran dengan empat indikator yaitu antara lain :

1. Tujuan Misi 1 adalah Meningkatkan kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang berbasis Pemberdayaan Ekonomi lokal. Program dan kegiatan yang mendukung tujuan ini adalah kemudahan dalam fasilitasi perijinan usaha, pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro, revitalisasi pasar, fasilitasi jaringan pemasaran online serta pemberian bantuan kepada masyarakat. Ketercapaian tujuan dalam Misi I dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
   a. **Gini Ratio**

      Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Tingkat ketimpangan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dengan nilai terendah di Tahun 2020 sebesar 0,3. Pada Tahun 2023 Rasio Gini Kota Pasuruan meningkat 0,018 poin dari 0,36 menjadi 0,378. Meski demikian, capaian indeks gini Kota Pasuruan Tahun 2023 masih berada di bawah Nasional dan Provinsi.
   b. **Angka Kemiskinan,**

      Angka kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2018-2023 fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid kemudian turun menjadi 6,37 di Tahun 2022. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Pasuruan meningkat menjadi 6,6 tetapi masih dibawah angka kemiskinan nasional dan provinsi.
   c. **Pertumbuhan Ekonomi,**

      Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan 5 (lima) Tahun terakhir (2018-2023) tumbuh positif dengan nilai 3,7%. Pada Tahun 2020 akibat dampak Covid 19 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan terkontaksi hingga -4,33 dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39% dan rata-rata Nasional sebesar -2,07. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat sigifikan dari 3,64 di Tahun 2021 menjadi 6,22. Capaian tersebut berada diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian rata-rata Nasional. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan melambat menjadi 5,65%, meski begitu capaian ini masih berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur.
2. Sasaran satu pada misi I adalah Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi. Program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini adalah pelatihan bagi pencari kerja, pemagangan, pelaksanaan Job Fair dan program padat karya. Ketercapaian sasaran satu pada Misi I dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

   Pencapaian target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 adalah sebesar 5,64 dari target RPJMD sebesar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 6,18 menjadi 5.64.

3. Sasaran dua pada Misi I adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan penunjang pendapatan asli daerah. Program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini adalah fasilitasi pembiayaan dan permodalan, peningkatan kapasitas UMKM sektor unggulan dan penyelenggaraan event-event yang dapat medorong peningkatan pendapatan UMKM. Ketercapaian sasaran dua pada Misi I dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:
   a. **PDRB per kapita**
      Target PDRB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2023 sebesar Rp. 44.545.000,65 dan terealisasi Rp.10.399.888.000,00
   b. **Rasio PAD terhadap Pendapatan**
      Target rasio PAD terhadap Pendapatan Tahun 2023 sebesar 21% dan terealisasi 18,98%.

II. Untuk mewujudkan misi II yaitu Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan, tema pembangunan Tahun 2023 dititikberatkan pada Penataan Ruang yang Ramah Lingkungan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar. Misi II mempunyai satu tujuan dengan satu indikator dan dua sasaran dengan tiga indikator yaitu antara lain:
   1. Tujuan dari Misi II adalah Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Ketercapaian tujuan pada Misi II diukur dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). Target IKLI Kota Pasuruan pada Tahun 2023 adalah 3,6 dan terealisasi 4,16. Skor ini masuk ke dalam mutu pelayanan kategori Baik
   2. Sasaran satu pada Misi II meningkatnya pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang merata. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan jalan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Ketercapaian sasaran satu pada Misi II diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur. Target Indeks Infrastruktur Kota Pasuruan pada Tahun 2023 adalah 73,05 dan terealisasi 75,02.
   3. Sasaran dua pada Misi II meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup. Program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini adalah pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan seperti optimalisasi pengelolaan persampahan di TPA, reduksi persampahan dan pengaktifan kembali bank sampah. Ketercapaian sasaran dua pada Misi II diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan hidup dan Indeks Resiko Bencana. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan pada Tahun 2023 sebesar 60,78 dan terealisasi 57,73. Target [illegible] sebesar 102,25.

III. Untuk mewujudkan misi III yaitu Memantabkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, tema pembangunan Tahun 2023 dititikberatkan pada Penguatan Penanganan kesejahteraan Sosial melalui sistem Data Terpadu, Penguatan Sistem Kesehatan secara Preventif dan Promotif serta Peningkatan Akses Layanan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pendidikan, Penguatan Sistem Mitigasi Bencana dan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban. Misi III mempunyai dua tujuan dengan dua indikator dan tujuh sasaran dengan delapan indikator yaitu antara lain:
   1. Tujuan I pada Misi III adalah Meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Ketercapaian tujuan satu pada Misi III diukur dengan indikator Indeks

Pembangunan Manusia. Target IPM tahun 2023 sebesar 76,32 dan terealisasi 78,3. Berdasarkan data BPS, Kota Pasuruan mengalami kenaikan IPM sebesar 1,76 poin yaitu dari 76,54 di tahun 2022 menjadi 78,3 di tahun 2023. Adapun data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
IPM	75,62	76,54	78,3

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023

2. Tujuan 2 pada Misi III adalah Mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis. Ketercapaian tujuan dua pada Misi III diukur dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial. Target IKS tahun 2023 sebesar 75,45 dan terealisasi 88,47. Capaian ini masuk dalam kategori sangat tinggi.
3. Sasaran 1 pada Misi III adalah Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan ini adalah peningkatan angka partisipasi kasar (APK), fasilitasi kejar paket A, B dan C serta peningkatan akreditasi lembaga pendidikan. Ketercapaian sasaran satu pada misi III diukur dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Target harapan lama sekolah tahun 2023 sebesar 13,65 dan terealisasi 13,66. Target rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 9,15 dan terealisasi 9,78.
4. Sasaran 2 pada Misi III adalah Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan. Ketercapaian sasaran dua pada misi III diukur dengan indikator angka harapan hidup. Target angka harapan hidup tahun 2023 sebesar 71,94 dan terealisasi 72,31.
5. Sasaran 3 pada Misi III adalah Meningkatnya daya beli masyarakat yang diukur dengan indikator pengeluaran perkapita. Program dan kegiatan yang mendukung capaian tujuan ini adalah peningkatan produksi dan pengeluaran makanan per kapita. Target pengeluaran perkapita tahun 2023 sebesar Rp14.251.000,57 dan terealisasi Rp14.250.000,00. Berdasarkan Kota Pasuruan Dalam Angka (BPS Kota Pasuruan; 2023), diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita terbesar penduduk Kota Pasuruan adalah untuk pengeluaran bukan makanan, yaitu sebesar 51,53 persen. Sedangkan untuk rata-rata pengeluaran per kapita makanan sebesar 48,47 persen. Terjadi pergeseran pengeluaran dominan dari yang sebelumnya lebih banyak pengeluaran untuk makanan menjadi pengeluaran non makanan, dimana 23,01 persen untuk perumahan, bahan bakar dan penerangan; 13,58 persen untuk barang dan jasa; 4,00 persen untuk pakaian; 5,07 persen untuk barang tahan lama.
6. Sasaran 4 pada Misi III adalah Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang diukur dengan indikator indeks pembangunan gender. Target indeks pembangunan gender tahun 2023 sebesar 96,21 dan terealisasi 96,27
7. Sasaran 5 pada Misi III adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang diukur dengan indikator indeks stabilitas. Target indeks stabilitas tahun 2023 sebesar 76,05 dan terealisasi 89,68.
8. Sasaran 6 pada Misi III adalah Terwujudnya toleransi antar umat beragama yang diukur dengan indikator indeks toleransi. Target indeks toleransi tahun 2023 sebesar 75,35 dan terealisasi 86,77

9. Sasaran 7 pada Misi III adalah terwujudnya solidaritas sosial masyarakat yang diukur dengan indikator indeks solidaritas sosial. Target indeks solidaritas sosial tahun 2023 sebesar 73,25 dan terealisasi 83,35.

IV. Untuk mewujudkan misi IV yaitu Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif, tema pembangunan Tahun 2023 dititikberatkan pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sistem Digital. Misi IV mempunyai satu tujuan dengan satu indikator dan dua sasaran dengan enam indikator yaitu antara lain:

1. Tujuan I pada Misi IV adalah mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Target IRB tahun 2023 sebesar 66,22 dan terealisasi 80,08
2. Sasaran 1 pada Misi IV adalah Membangun kapasitas manajemen pemerintahan yang adaptif dan profesional. Ketercapaian sasaran 1 pada Misi IV diukur dengan indikator sebagai berikut :
   a. **Nilai SAKIP**
      Target Nilai SAKIP Kota Pasuruan tahun 2023 adalah BB dan dapat terealisasi
   b. **Opini BPK terhadap LKPD**
      Target Opini BPK terhadap LKPD tahun 2022 adalah WTP dan dapat terealisasi.
   c. **Level Maturitas SPIP**
      Target Level Maturitas SPIP tahun 2023 adalah sebesar 3. Nilai level Maturitas SPIP 2023 terealisasi dengan nilai 3.
   d. **Indeks Profesionalisme Aparatur**
      Target Indeks Profesiosionalisme Aparatur sebesar 54,25 dan terealisasi 64,22.
3. Sasaran 2 pada Misi IV adalah Integrasi digitalisasi pada Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Indeks SPBE dan Nilai IKM. Target Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 2,81 dan terealisasi 3,43. Target nilai IKM tahun 2023 sebesar 82,44 dan terealisasi 90,25.

Sedangkan prioritas pembangunan Kota Pasuruan ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yaitu:

1) Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2) Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5) Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
7) Peningkatan tata kelola, kelancaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

c. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) bidang urusan pemerintahan meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan 7 urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi logis terhadap hal tersebut, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan melalui program-program pembangunan.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, maka pada tahun Anggaran 2023 kebijakan belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan masih diprioritaskan untuk menjalankan urusan wajib. Alokasi Anggaran untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar diproyeksikan sebesar Rp664.168.324.618,00, urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp160.501.170.894,00, urusan pilihan sebesar Rp94.654.561.521,00. Sedangkan alokasi anggaran untuk unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp99.865.165.621,00, unsur penunjang urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp48.578.618.474,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp8.962.867.316,00, unsur kewilayahan sebesar Rp65.737.654.087,00 dan unsur pemerintahan umum sebesar Rp11.443.226.942,00.

. Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota sebanyak 6 urusan yang akan dilaksanakan oleh 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar merupakan pendukung terhadap pelaksanaan urusan wajib sebanyak 17 Urusan yang akan dilaksanakan oleh 17 OPD, Urusan Pilihan sebanyak 5 Urusan yang akan dilaksanakan oleh 5 OPD,unsur pendukung urusan pemerintahan sebanyak 2 urusan yang akan dilaksanakan oleh 2 OPD, unsur penunjang urusan pemerintahan pilihan sebanyak 5 urusan yang akan dilaksanakan oleh 5 OPD, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebanyak 1 urusan yang akan dilaksanakan oleh 1 OPD, unsur kewilayahan sebanyak 1 unsur yang akan dilaksanakan oleh 4 kecamatan, dan unsur

pemerintahan umum sebanyak 1 urusan yang akan dilaksanakan oleh 1 OPD sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

Tabel 2.6
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**664.168.324.618,00**	**589.571.542.231,92**	**88,77**	**528.429.151.492,50**
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	216.739.296.728,00	203.171.787.649,00	93,74	183.154.924.281,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	273.030.801.929,00	263.251.473.585,92	96,42	225.524.777.394,65
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.135.225.723,00	70.473.397.248,00	62,85	63.403.412.333,85
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.073.255.058,00	16.638.884.772,00	92,06	16.021.206.313,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.285.077.210,00	17.611.483.218,00	82,74	18.346.035.474,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	22.904.667.970,00	18.424.515.759,00	80,44	21.978.795.696,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**160.501.170.894,00**	**147.344.589.819,00**	**91,80**	**140.140.098.449,00**
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.769.806.811,00	5.574.361.970,00	82,34	5.205.773.142,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.425.983.475,00	6.754.451.779,00	90,96	6.731.622.955,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.764.496.580,00	1.608.691.340,00	91,17	713.740.100,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	574.253.200,00	436.818.165,00	76,07	522.714.826,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	42.510.804.522,00	40.462.154.138,00	95,18	40.193.510.406,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.502.174.309,00	5.792.838.569,00	89,09	5.926.564.398,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.412.257.544,00	3.791.993.229,00	85,94	3.951.932.196,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	29.717.238.749,00	27.237.271.225,00	91,65	28.136.286.642,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.942.694.578,00	20.874.059.662,00	95,13	17.113.866.993,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.371.143.015,00	5.441.738.369,00	85,41	4.852.148.351,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.956.098.756,00	14.254.798.275,00	95,31	12.022.130.412,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	345.144.480,00	340.438.350,00	98,64	445.240.920,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	108.928.920,00	100.467.988,00	92,23	65.677.675,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.089.407.644,00	3.560.638.532,00	87,07	2.566.821.149,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.445.625.313,00	4.603.207.646,00	84,53	4.606.383.634,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	340.622.920,00	299.384.365,00	87,89	253.513.598,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**94.654.561.521,00**	**73.706.064.359,00**	**77,87**	**78.268.016.889,00**
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.779.376.654,00	6.049.500.195,00	89,23	4.847.340.478,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	33.778.376.320,00	29.407.498.516,00	87,06	24.850.886.300,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.735.570.778,00	12.762.068.592,00	81,10	9.958.481.146,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.852.086.279,00	19.235.862.341,00	92,25	26.041.147.307,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	17.509.151.490,00	6.251.134.715,00	35,70	12.570.161.658,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**99.865.165.621,00**	**83.669.816.054,00**	**83,78**	**72.829.694.201,00**
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	52.179.479.982,00	44.428.337.549,00	85,15	35.858.964.240,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	47.685.685.639,00	39.241.478.505,00	82,29	36.970.729.961,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**48.578.618.474,00**	**36.848.077.173,00**	**75,85**	**41.226.689.449,00**
5.01	PERENCANAAN	7.482.633.436,00	6.997.633.382 00	93,52	7.069.362.189,00
5.02	KEUANGAN	28.712.127.762,00	19.884.922.013,00	69,26	22.656.590.311,00
5.03	KEPEGAWAIAN	7.467.069.316,00	6.392.420.983,00	85,61	6.265.881.154,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.241.312.980,00	2.915.721.085,00	68,75	4.244.612.565,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	675.474.980,00	657.379.710,00	97,32	990.243.230,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**8.962.867.316,00**	**8.217.517.856,00**	**91,68**	**7.212.319.455,00**
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.962.867.316,00	8.217.517.856,00	91,68	7.212.319.455,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**65.737.654.087,00**	**61.192.627.253,00**	**93,09**	**62.618.003.270,00**
7.01	KECAMATAN	65.737.654.087,00	61.192.627.253,00	93,09	62.618.003.270,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**11.443.226.942,00**	**10.228.732.983,00**	**89,39**	**8.550.572.899,00**
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.443.226.942,00	10.228.732.983,00	89,39	8.550.572.899,00
JUMLAH		**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**	**87,60**	**939.274.546.104,50**

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan penyeimbang atas perbedaan pendapatan dan belanja. Apabila pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah. Pada Tahun 2023 diproyeksikan bahwa pendapatan daerah masih di bawah kebutuhan belanja daerah, dengan demikian akan terjadi defisit anggaran. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan akibat defisit tersebut, maka kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2022.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4) Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah Kota Pasuruan tidak melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan.
5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6) Kebijakan terhadap SiLPA Tahun Berjalan:
   a) Pemerintah daerah menetapkan SiLPA Tahun Anggaran 2023 bersaldo nol.
   b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
   c) Dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 2.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**198.171.590.848,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**37.055.609.161,00**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**161.115.981.687,00**

Sumber: BPKA 2023

Berdasarkan pada target pendapatan daerah dan belanja daerah bahwa Tahun Anggaran 2023 proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp992.795.607.786,00 sedangkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp1.153.911.589.473,00. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka struktur APBD Tahun Anggaran 2023 akan mengalami defisit anggaran yakni sebesar (Rp161.115.981.686,00). Untuk menutup kekurangan (defisit) anggaran tersebut akan digunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana Tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan satuan nominal, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat disebabkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar SKPD, antarkegiatan dan antarjenis belanja.

Realisasi pendapatan Tahun 2023 secara umum melampaui target Anggaran yang ditetapkan. Dana perimbangan hanya merupakan komponen pendukung, akan tetapi kenyataannya Pendapatan Daerah sendiri selama ini jumlahnya relatif sangat kecil, sehingga praktis belum dapat berperan dalam kegiatan pembangunan.

Realisasi belanja pada Tahun 2023 secara umum realisasinya dibawah plafon Anggaran. Hal ini dikarenakan adanya kontrol belanja yang selain ditujukan Pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan yang tidak perlu.

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah Pemerintah Kota Pasuruan hendaknya meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. APBD dan Perubahan APBD

Target APBD dan Perubahan APBD Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
APBD dan Perubahan APBD TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.503.811.064	206.879.549.384	43.375.738.319	26,53
4.1.01	Pajak Daerah	50.765.000.000	50.765.000.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.444.519.900	15.606.594.900	162.075.000	1,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.144.359.245	6.333.484.167	189.124.922	3,08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.149.931.919	134.174.470.317	43.024.538.397	47,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	744.699.658.370	782.916.058.403	38.216.400.033	5,13
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	641.215.809.800	668.998.660.691	27.782.850.891	4,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.483.848.570	113.917.397.712	10.433.549.142	10,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	0,00

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
	Jumlah Pendapatan	**911.203.469.434**	**992.795.607.787**	**81.592.138.352**	**8,95**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**926.950.173.809**	**944.343.502.254**	**17.393.328.445**	**1,88**
5.1.01	Belanja Pegawai	416.744.456.079	403.330.138.252	(13.414.317.827)	(3,22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.653.387.230	464.480.805.962	22.827.418.732	5,17
5.1.05	Belanja Hibah	44.815.230.500	56.518.768.040	11.703.537.540	26,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.737.100.000	20.013.790.000	(3.723.310.000)	(15,69)
5.2	**BELANJA MODAL**	**204.053.080.074**	**201.600.917.439**	**(2.452.162.635)**	**(1,20)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.450.000.000	27.000.000.000	(450.000.000)	(1,64)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.441.688.509	65.608.075.179	(833.613.330)	(1,25)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.760.532.647	67.514.826.767	(1.245.705.880)	(1,81)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.004.345.918	41.070.566.518	66.220.600	0,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	391.013.000	407.448.975	16.435.975	4,20
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.500.000	0,00	(5.500.000)	(100,00)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.000.000.000**	**7.967.169.780**	**(32.830.220)**	(0,41)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	7.967.169.780	(32.830.220)	(0,41)
	Jumlah Belanja	**1.139.003.253.883**	**1.153.911.589.473**	**14.908.335.590**	**1,31**
	Total Surplus/(Defisit)	**(227.799.784.449)**	**(161.115.981.686)**	**66.683.802.762**	**(29,27)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**227.799.784.449**	**198.171.590.848**	**(29.628.193.601)**	**(13,01)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.349.784.449	171.171.590.848	(29.178.193.601)	(14,56)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	27.450.000.000	27.000.000.000	(450.000.000)	(1,64)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.799.784.449	198.171.590.848	(29.628.193.601)	(13,01)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**37.055.609.162**	**37.055.609.162**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	37.055.609.162	37.055.609.162	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	37.055.609.162	37.055.609.162	0,00
	Pembiayaan Netto	**227.799.784.449**	**161.115.981.687**	**(66.683.802.762)**	**(29,27)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL APBD	**1.139.003.253.883**	**1.190.967.198.635**	**51.963.944.752**	**4,56**

Terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada Perubahan APBD sebesar Rp81.592.138.352,00 atau 8,95% dari yang semula ditargetkan awal tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Kenaikan/Penurunan Target Pendapatan Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.503.811.064	206.879.549.384	43.375.738.319	26,53
4.1.01	Pajak Daerah	50.765.000.000	50.765.000.000	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.444.519.900	15.606.594.900	162.075.000	1,05

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.144.359.245	6.333.484.167	189.124.922	3,08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.149.931.919	134.174.470.317	43.024.538.397	47,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	744.699.658.370	782.916.058.403	38.216.400.033	5,13
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	641.215.809.800	668.998.360.691	27.782.850.891	4,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.483.848.570	113.917.397.712	10.433.549.142	10,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**911.203.469.434**	**992.795.607.787**	**81.592.138.352**	**8,95**

Sedangkan untuk belanja Pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp17.393.328.445,00 atau 1,86% dari yang semula dianggarkan awal tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Kenaikan/Penurunan Target Belanja Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**926.950.173.609**	**944.343.502.254**	**17.393.328.445**	**1,88**
5.1.01	Belanja Pegawai	416.744.456.079	403.330.138.252	(13.414.317.827)	(3,22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.653.387.230	464.480.805.962	22.827.418.732	5,17
5.1.05	Belanja Hibah	44.815.230.500	56.518.768.040	11.703.537.540	26,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.737.100.000	20.013.790.000	(3.723.310.000)	(15,69)
5.2	**BELANJA MODAL**	**204.053.080.074**	**201.600.917.439**	**(2.452.162.635)**	**(1,20)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.450.000.000	27.000.000.000	(450.000.000)	(1,64)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.441.688.509	65.608.075.179	(833.613.330)	(1,25)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.760.532.647	67.514.826.767	(1.245.705.880)	(1,81)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.004.345.918	41.070.566.518	66.220.600	0,16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	391.013.000	407.448.975	16.435.975	4,20
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.500.000	0,00	(5.500.000)	(100,00)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.000.000.000**	**7.967.169.780**	**(32.830.220)**	(0,41)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	7.967.169.780	(32.830.220)	(0,41)
	Jumlah Belanja	**1.139.003.253.883**	**1.153.911.589.473**	**14.908.335.590**	**1,31**

Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai defisit bertambah tinggi dari Anggaran induk yang semula dianggarkan sebesar (Rp227.799.784.449,00) menjadi dianggarkan sebesar (Rp161.115.981.686,00). Penurunan defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan daerah melalui pemanfaatan SiLPA.

Sedangkan untuk pembiayaan Pada perubahan APBD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Kenaikan/ Penurunan Target Pembiayaan Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
				Rp	%
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**227.799.784.449**	**198.171.590.848**	**(29.628.193.601)**	**(13,01)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.349.784.449	171.171.590.848	(29.178.193.601)	(14,56)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	27.450.000.000	27.000.000.000	(450.000.000)	(1,64)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	227.799.784.449	198.171.590.848	(29.628.193.601)	(13,01)
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**37.055.609.162**	**37.055.609.162**	**0,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	37.055.609.162	37.055.609.162	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	37.055.609.162	37.055.609.162	0,00
	Pembiayaan Netto	**227.799.784.449**	**161.115.981.687**	**(66.683.802.762)**	**(29,27)**

3. Realisasi APBD

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp941.695.238.574,70 atau 94,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp992.795.607.786,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.010.778.967.728,92 dari Anggaran sebesar Rp1.153.911.589.473,00 atau 87,60%. Realisasi pembiayaan sebesar Rp257.171.724.533,47 dari Anggarannya sebesar Rp161.115.981.687,00 atau 159,62%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2023

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**992.795.607.786,00**	**941.695.238.574,70**	**94,85**	**911.656.871.775,11**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**206.879.549.383,00**	**179.625.631.641,70**	**86,83**	**163.732.730.981,11**
4.1.1	Pajak Daerah	50.765.000.000,00	52.473.038.186,78	103,36	46.650.290.289,00
4.1.2	Retribusi Daerah	15.606.594.900,00	11.503.008.644,00	73,71	8.117.254.501,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	134.174.470.316,00	109.365.663.643,89	81,51	102.849.823.212,74
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**782.916.058.403,00**	**761.847.606.933,00**	**97,31**	**747.924.051.772,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.998.660.691,00	651.390.724.212,00	97,37	644.106.485.201,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	653.318.600.691,00	635.710.664.212,00	97,30	626.097.743.201,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	100,00	18.008.742.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.917.397.712,00	110.456.882.721,00	96,96	103.817.566.571,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	103.743.194.392,00	108.053.799.100,00	104,16	91.417.533.571,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.174.203.320,00	2.403.083.621,00	23,62	12.400.033.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.000.000.000,00**	**222.000.000,00**	**7,40**	**89.022,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	222.000.000,00	7,40	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	89.022,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**	**87,60**	**939.274.546.104,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**944.343.502.254,00**	**862.605.302.488,92**	**91,34**	**804.595.474.677,65**

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.1.1	Belanja Pegawai	403.330.138.252,00	369.520.132.167,00	91,62	378.770.674.303,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	464.480.805.962,00	423.932.933.202,92	91,27	363.508.133.547,65
5.1.5	Belanja Hibah	56.518.768.040,00	53.320.245.546,00	94,35	35.526.573.727,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.013.790.000,00	15.823.991.573,00	79,07	26.790.093.100,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**201.600.917.439,00**	**146.450.795.740,00**	**72,64**	**129.718.487.434,85**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	27.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.608.075.179,00	54.641.329.574,00	83,28	36.486.480.985,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.514.826.767,00	58.482.341.064,00	86,62	54.606.509.061,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.070.566.518,00	32.938.790.102,00	80,20	38.003.139.388,85
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	407.448.975,00	388.335.000,00	95,31	619.120.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.238.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.967.169.780,00**	**1.722.869.500,00**	**21,62**	**4.960.583.992,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00	21,62	4.960.583.992,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(161.115.981.687,00)**	**(69.083.729.154,22)**	**42,88**	**(27.617.674.329,39)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**198.171.590.848,00**	**257.171.724.533,47**	**129,77**	**200.979.067.244,78**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00	171.171.590.849,31	100,00	200.976.067.244,78
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00	86.000.133.684,16	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**37.055.609.161,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.802.066,08**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08
	PEMBIAYAAN NETTO	**161.115.981.687,00**	**257.171.724.533,47**	**159,62**	**198.789.265.178,70**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**188.087.995.379,25**	**0,00**	**171.171.590.849,31**

Uraian tentang penyebab terjadi kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan Pada bab berikutnya, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan Anggarannya antara lain disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan dana Pada Anggaran mendatang dan antisipasi terhadap pengeluaran yang tak terduga. Selain itu terdapat kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa.

4. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan Tahun 2023, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kurangnya Kesadaran dan kejujuran wajib pajak masih belum optimal, sehingga pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan realita transaksi yang ada di lapangan;
b) Masyarakat sebagai wajib pajak masih belum memahami pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Pasuruan;
c) Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 sehingga memunculkan regulasi berupa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/159/423.011/2023 tentang Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78;

d) Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 sehingga memunculkan regulasi berupa Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/158/423.011/2022 tentang Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78;
e) Pengelolaan penetapan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan belum memadai;
f) Masih tingginya piutang Pajak dan Retribusi Daerah yang belum terselesaikan;
g) Dana Transfer dari Pemerintah Pusat belum sepenuhnya direalisasikan;
h) Belum optimalnya kinerja BUMD dalam penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
i) Perlu peningkatan efisiensi dan efektivitas unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
j) Masih kurangnya kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
k) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
l) Perlunya optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta evaluasi peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan daerah;
m) Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah;
n) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan indikator yang terukur untuk penilaian kinerja belanja daerah; dan
o) Belum optimalnya pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Keuangan, bidang belanja Tahun 2023 secara umum sudah baik meskipun masih ditemui kendala antara lain Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Seluruh belanja telah semaksimal mungkin dilakukan dalam batas plafon Anggaran yang ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dalam pengeluaran belanja.

Selain kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pencapaian target belanja antara lain reformasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berjalan dengan cepat, kepekaan, kemampuan dan kecerdasan sumber daya manusia yang memadai baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban serta perangkat keras untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tersedia masih terbatas.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang dilakukan dalam Tahun 2023 adalah:

a. Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak, wajib retribusi agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya;
b. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan; dan
e. Meningkatkan dukungan perangkat keras dalam rangka pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna Anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan Pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan, maka Kota Pasuruan resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 didasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan sebagai pengganti Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2017.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya Pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui Pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui Pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

1) Akuntansi Pendapatan

a) Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(2) Pendapatan Transfer; dan
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengakuan:

(1) Kas atas pendapatan telah diterima Pada RKUD.
(2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
(3) Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh satuan kerja/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening

Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.

(4) Kas atas Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(5) Kas atas Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

(6) Kas atas pendapatan yang diterima satuan kerja/SKPD/BLUD tanpa mekanisme Anggaran/APBD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, maka SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

b) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(2) Pendapatan Transfer; dan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pengakuan:

(1) Pendapatan-LO diakui Pada saat:

(i) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

(ii) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

(2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui Pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

(3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui Pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

(4) Pendapatan-LO yang diakui Pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

(5) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu Pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

2) Akuntansi Belanja

a) Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan:

(1) Belanja diakui Pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi Pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
(3) Pengeluaran Kas yang digunakan satker/SKPD tanpa melalui pengesahan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
(4) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu Pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b) Beban – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui Pada:
(1) Saat timbulnya kewajiban;
(2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
(3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d) Surplus atau defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

3) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik Pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
a) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Pengakuan:

a) Penerimaan pembiayaan diakui Pada saat diterima Pada Rekening Kas Umum Daerah.

b) Pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pada tanggal tertentu. Komponen utama Neraca terdiri dari:

1) Aset Lancar;
2) Investasi Jangka Panjang;
3) Aset Tetap;
4) Dana Cadangan;
5) Aset Lainnya;
6) Kewajiban Jangka Pendek;
7) Kewajiban Jangka Panjang;
8) Ekuitas Dana Lancar;
9) Ekuitas Dana Investasi; dan
10) Ekuitas Dana Cadangan.

Penjelasan komponen utama Neraca

a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non Anggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang

pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, Kas terdiri dari:

(i) Kas di Kas Daerah;
(ii) Kas di Bendahara Pengeluaran;
(iii) Kas di Bendahara Penerimaan;
(iv) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
(v) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN;
(vi) Kas lainnya; dan
(vii) Kas di BOSP.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas Pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

(a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening Pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
(b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan:

(i) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah.
(ii) Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

(iii) Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas dan tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

(2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan Pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Piutang diakui Pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu Pada saat:

(i) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
(ii) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

(i) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
(ii) jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

(i) Kualitas Piutang Lancar;
(ii) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
(iii) Kualitas Piutang Diragukan; dan
(iv) Kualitas Piutang Macet.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/objek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kualitas Piutang Menurut Jenis/Objek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitasnya

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak daerah/wajib retribusi/nasabah/debitur/badan/perorangan/dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih Pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2.	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan	0 %	20 %	40 %	70%	100%

	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
	Pajak Propinsi					
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi Pada akhir Tahun baru dibebankan Pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan Pada akhir periode pelaporan.

Apabila kualitas piutang masih sama Pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

(3) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

(a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

(b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan [illegible] barang [illegible] habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku [illegible]

[illegible] persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya obat kedaluarsa yang belum ada Berita Acara Penghapusan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui Pada saat:

(a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

(b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan Pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

(a) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di SKPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian *First In First Out* (FIFO).

(b) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan Pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

(4) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual-beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

(b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
(c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:

(a) Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
(b) Surat Utang Negara (SUN);
(c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
(d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi Pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen,
(b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

(a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(c) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
(d) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) Pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham Pada perusahaan yang bukan perseroan;
(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan Pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen:

(a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
(b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
(c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal Pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

(a) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi Pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
(b) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar prosentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan Pada kriteria sebagai berikut:

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
(d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian Pada perusahaan *investee*, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
(c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

(a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
(b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
(c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
(e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penetapan *Aging Schedule*, Kategori Dan Tingkat Kolektibilitas Serta Prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Nomor	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 2 Bln	Lancar	0 %
2	>2 Bln s.d 4 Bln	Kurang Lancar	20 %
3	>4 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	60 %
4	>12 Bln	Macet	100 %

(5) Aset Tetap

Definisi

(a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset Pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(c) Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

(d) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh Pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

(e) Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(f) Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

(g) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(h) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

(a) Tanah;
(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya;
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui Pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat

diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Berwujud;
(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
(f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras Pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 2.**

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagaimana **Lampiran 3.**

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka Pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya di bawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana di atas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), namun tetap dicatat Pada Laporan Barang Milik Daerah.

Nilai Perolehan Aset Tetap

(a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan Pada nilai wajar Pada saat perolehan.
(b) Penggunaan nilai wajar Pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya

perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan Pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan Pada saat perolehan awal.

(c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

(d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

(e) Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:

- Biaya Konstruksi Fisik
  Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
- Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
- Biaya Pengawasan Konstruksi
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
- Biaya Pengelolaan Kegiatan
  Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
  Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
  - Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
    Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya;
  - Biaya operasional unsur Pengelola Teknis; dan
  - Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

(a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, Pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

(b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar Pada saat aset tersebut diperoleh.

(c) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang *(developer)* dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar Pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(a) Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

(b) Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

(c) Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan Pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian Pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

(a) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(b) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

(c) Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian

potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan/atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan yang praktis, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per Tahun.

Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap Tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Metode Penyusutan

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan per Tahun
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat/Besar	10	10%
Alat-alat Angkutan Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2 %

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan per Tahun
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	50	2 %
Rambu-rambu	5	20%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Pelengkap Jalan lainnya	5	20%
Bangunan Air Bersih/Air Kotor/Irigasi/ Air Rawa	25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/Telepon/Gas/Keamanan, dll)	25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/Telepon/Gas,dll)	20	5%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung Pada akhir Tahun;

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab Pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

Besarnya penyusutan setiap Tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

(6) **Dana Cadangan**

Definisi

(a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa Tahun Anggaran untuk kebutuhan belanja Pada masa datang. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

(b) Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

(c) Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

(d) Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang

berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

(a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
(b) Dana Cadangan diakui Pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud.
(c) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
(d) Pencairan Dana Cadangan diakui Pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(e) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

(a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
(b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian

(a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca Pada kelompok Aset Non Lancar.
(b) Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
(c) Dana Cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan

(a) Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
    (i) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
    (ii) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
    (iii) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
    (iv) Besaran dan rincian Tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
    (v) Sumber Dana Cadangan; dan
    (vi) Tahun Anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
(b) Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.

(c) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
(d) Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
(e) Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

(7) **Aset Lainnya**

Definisi

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

(a) Tagihan piutang penjualan angsuran;
(b) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
(c) Kemitraan dengan pihak ketiga;
(d) Aset tidak berwujud; dan
(e) Aset lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

(a) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
(b) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
(b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
(c) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(d) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

(a) Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS); dan
(b) Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG)

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu di mana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak *merk*, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

(a) S*oftware* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu Tahun;
(b) Lisensi dan *franchise*; dan
(c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, aset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

Aset Bersejarah (*Heritage Aset*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah, yaitu:

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan Tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada Pada periode berjalan.

(8) Kewajiban

Definisi

(a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
(b) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
(c) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
(d) Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
(e) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong

pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, atau Taperum.

(f) Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

(g) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah Pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera Pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi

Kewajiban dikelompokan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut Pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

(a) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

(b) Kewajiban diakui Pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul.

(c) Kewajiban dapat timbul dari:
   (i) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   (ii) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   (iii) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
   (iv) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

(a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Pada tanggal neraca.

(b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah Pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera Pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam Tahun pelaporan berikutnya.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit Anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Pengakuan

(a) Kewajiban jangka panjang diakui Pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau Pada saat kewajiban timbul

(b) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang Pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

(9) Ekuitas

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Pada tanggal laporan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan kedalam:

(a) Ekuitas; dan

(b) Ekuitas SAL.

Pengukuran

(a) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

(b) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

(c) Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

(10) **Laporan Arus Kas**

Definisi

(a) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas Pada Bendahara Umum Daerah.

(b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

(c) Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

(d) Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran.

(e) Aktivitas non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

(f) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

(g) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas

(a) Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

(b) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari

manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas

(a) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

(b) Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

Transaksi Bukan Kas

(a) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui Pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui Pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional (LO).

Dalam hal Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui Pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui Pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan Anggaran

(lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa perhitungan Anggaran tergantung Pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat Pada saat terjadinya transaksi, atau Pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh Pada keuangan pemerintah daerah, bukan Pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan Pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi Anggaran oleh pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Peristiwa Luar Biasa

Dampak yang signifikan terhadap realisasi Anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar Anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran Anggaran secara mendasar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang disediakan dapat dipahami serta untuk memudahkan pembaca maka perlu diberikan penjelasan atas masing-masing pos pada laporan keuangan ini. Sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**992.795.607.786,00**	**941.695.238.574,70**	**94,85**	**911.656.871.775,11**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**206.879.549.383,00**	**179.625.631.641,70**	**86,83**	**163.732.730.981,11**
4.1.1	Pajak Daerah	50.765.000.000,00	52.473.038.186,78	103,36	46.650.290.289,00
4.1.2	Retribusi Daerah	15.606.594.900,00	11.503.008.644,00	73,71	8.117.254.501,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	134.174.470.316,00	109.365.663.643,89	81,51	102.849.823.212,74
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**782.916.058.403,00**	**761.847.606.933,00**	**97,31**	**747.924.051.772,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	668.998.660.691,00	651.390.724.212,00	97,37	644.106.485.201,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	653.318.600.691,00	635.710.664.212,00	97,30	626.097.743.201,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	100,00	18.008.742.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113.917.397.712,00	110.456.882.721,00	96,96	103.817.566.571,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	103.743.194.392,00	108.053.799.100,00	104,16	91.417.533.571,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.174.203.320,00	2.403.083.621,00	23,62	12.400.033.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.000.000.000,00**	**222.000.000,00**	**7,40**	**89.022,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	222.000.000,00	7,40	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	89.022,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**	**87,60**	**939.274.546.104,50**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**944.343.502.254,00**	**862.605.302.488,92**	**91,34**	**804.595.474.677,65**
5.1.1	Belanja Pegawai	403.330.138.252,00	369.520.132.167,00	91,62	378.770.674.303,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	464.480.805.962,00	423.932.933.202,92	91,27	363.508.133.547,65
5.1.5	Belanja Hibah	56.518.768.040,00	53.328.245.546,00	94,35	35.526.573.727,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.013.790.000,00	15.823.991.573,00	79,07	26.790.093.100,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**201.600.917.439,00**	**146.450.795.740,00**	**72,64**	**129.718.487.434,85**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	27.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.608.075.179,00	54.641.329.574,00	83,28	36.486.480.985,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.514.826.767,00	58.482.341.034,00	86,62	54.606.509.061,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.070.566.518,00	32.938.790.102,00	80,20	38.003.139.388,85
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	407.448.975,00	388.335.000,00	95,31	619.120.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.238.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.967.169.780,00**	**1.722.869.500,00**	**21,62**	**4.960.583.992,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00	21,62	4.960.583.992,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(161.115.981.687,00)**	**(69.083.729.154,22)**	**42,88**	**(27.617.674.329,39)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**198.171.590.848,00**	**257.171.724.533,47**	**129,77**	**200.979.067.244,78**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00	171.171.590.849,31	100,00	200.976.067.244,78
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00	86.000.133.684,16	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**37.055.609.161,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.802.066,08**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08
	PEMBIAYAAN NETTO	**161.115.981.687,00**	**257.171.724.533,47**	**159,62**	**198.789.265.178,70**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**188.087.995.379,25**	**0,00**	**171.171.590.849,31**

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
   a. **Pendapatan - LRA**

Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	992.795.607.786,00	**941.695.238.574,70**	**911.656.871.775,11**

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada tahun 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp992.795.607.786,00 dan terealisasi sebesar Rp941.695.238.574,70. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.038.366.799,59 dari tahun 2022 terealisasi sebesar Rp911.656.871.775,11 sebesar atau 3,19%, adapun rinciannya pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	PENDAPATAN DAERAH	**992.795.607.786,00**	**941.695.238.574,70**	**94,85**	**911.656.871.775,11**
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.879.549.383,00	179.625.631.641,70	86,83	163.732.730.981,11
2	PENDAPATAN TRANSFER	782.916.058.403,00	761.847.606.933,00	97,31	747.924.051.772,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	222.000.000,00	7,40	89.022,00

1) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	206.879.549.383,00	**179.625.631.641,70**	**163.732.730.981,11**

Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp206.879.549.383,00 dan terealisasi sebesar

Rp179.625.631.641,70 atau 86,83%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.892.900.660,59 dari tahun 2022 realisasi sebesar Rp163.732.730.981,11 atau sebesar 8,85%.

Untuk Pendapatan Asli Daerah, secara langsung juga terpengaruh oleh dampak pandemi Covid-19. Beberapa obyek pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Namun demikian pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan juga mengeluarkan kebijakan terkait pemulihan ekonomi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Dalam menyikapi pemulihan ekonomi dampak terjadinya pandemi yang dituangkan dalam bentuk ketentuan yaitu:

a. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 188/159/423.011/2023 tentang Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78;
b. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 188/158/423.011/2023 tentang Penundan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.

Berikut ini adalah rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023.

Tabel 5.2.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**206.879.549.383,00**	**179.625.631.641,70**	**86,83**	**163.732.730.981,11**
4.1.1	Pajak Daerah	50.765.000.000,00	52.473.038.186,78	103,36	46.650.290.289,00
4.1.2	Retribusi Daerah	15.606.594.900,00	11.503.008.644,00	73,71	8.117.254.501,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	134.174.470.316,00	109.365.663.643,89	81,51	102.849.823.212,74

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah - LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	50.765.000.000,00	**52.473.038.186,78**	**46.650.290.289,00**

Penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp52.473.038.186,78 dari anggaran sebesar Rp50.765.000.000,00 atau 103,36%. Pajak daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.708.038.186,78 dari tahun 2022. Hal ini didukung oleh peningkatan penerimaan pada tahun 2022 dari sektor hotel, rumah makan/ restoran yang dari tahun lalu terkendala oleh pandemi *Covid-19* terkait pembatasan jarak antar manusia (*social distancing)* serta didukung oleh penerimaan pada sektor pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah adalah peneriman yang berasal dari pajak yang dipungut Pemerintah Daerah masih berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pemungutan 9 jenis pajak

daerah. Kesembilan jenis pajak tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dari kesembilan jenis pajak diatas dapat dijelaskan yang berwenang memungutnya adalah Badan Pendapatan Daerah.

Pemungutan pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 4**. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kota Pasuruan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp52.473.038.186,78 atau sebesar 103,36% dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.765.000.000,00. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp5.822.747.897,78 atau 11,10% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp46.650.290.289,00. Adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Pajak Daerah	**50.765.000.000,00**	**52.473.038.186,78**	**103,36**	**46.650.290.289,00**
1	Pajak Hotel	1.600.000.000,00	1.743.792.310,00	108,99	1.156.424.407,00
2	Pajak Restoran	6.238.617.000,00	6.517.775.391,45	104,47	3.948.532.948,00
3	Pajak Hiburan	170.000.000,00	96.581.325,00	56,81	89.967.750,00
4	Pajak Reklame	1.160.375.000,00	835.488.062,00	72,00	884.629.713,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.300.000.000,00	17.487.016.486,00	101,08	17.119.559.934,00
6	Pajak Parkir	350.000.000,00	332.046.597,33	94,87	131.204.000,00
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	79.931.053,00	79,93	86.327.666,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.346.008.000,00	6.455.714.471,00	101,73	5.023.778.031,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.500.000.000,00	18.924.692.491,00	108,14	18.209.865.840,00

Dari tabel diatas rata-rata penerimaan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan realisasinya melebihi target yang diharapkan pada tahun 2023. Dengan artian bahwa masyarakat Kota Pasuruan sudah sadar akan kewajiban yang dibebankan Pada setiap wajib pajak. Diharapkan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Pasuruan setiap Tahun akan lebih meningkat untuk pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Pasuruan memungut beberapa jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut dengan sistem *self assesment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak tersebut Pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dipungut dengan sistem *official asessment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.600.000.000,00	1.743.792.310,00	1.156.424.407,00

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Kota Pasuruan dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Objek tersebut juga termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajaknya adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan besaran pokok pajak terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Untuk Pajak Hotel dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	6.238.617.000,00	6.517.775.391,45	3.948.532.948,00

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp500.000,00 setiap bulan tidak termasuk dalam pelayanan yang menjadi objek pajak. Subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Cara penghitungan besaran pokok Pajak Restoran yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Restoran dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	170.000.000,00	**96.581.325,00**	**89.967.750,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian (musik, tari, dan/busana), kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, karaoke, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, pagelaran kesenian dan pertandingan olahraga yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dan kegiatan sosial/amal yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikecualikan dari jenis hiburan yang penyelenggaraannya termasuk objek pajak. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan untuk tontonan film, pagelaran musik, tari dan/atau busana, pameran, sirkus, akrobat dan sulap, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 15%. Tarif Pajak Hiburan untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20%. Tarif Pajak Hiburan untuk refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 50% . Cara penghitungan besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dimaksud. Untuk Pajak Hiburan dipungut dengan sistem self assessment yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.160.375.000,00	**835.488.062,00**	**884.629.713,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak tersebut diantaranya reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat dan stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk Pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau

Badan tersebut. Begitu juga untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebutlah yang menjadi wajib pajak.

Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah sama dengan Nilai Jual Objek Reklame ditambah Nilai Strategis Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20%. Untuk Pajak Reklame dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

(5) Pajak Penerangan Jalan

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	**17.300.000.000,00**	**17.487.016.486,00**	**17.119.559.934,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan , dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Cara penghitungan besaran pokok pajak yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan sistem self assessment yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

(6) Pajak Parkir

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Parkir	**350.000.000,00**	**332.046.597,33**	**131.204.000,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaran tempat parkir. Tarif Pajak

Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Cara pernghitungan besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Pajak Parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

(7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	100.000.000,00	**79.931.053,00**	**86.327.666,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan peribadatan. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor–faktor yaitu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Cara penghitungan besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Untuk Pajak Air Tanah dihitung dengan menggunakan sistem official assessment, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

(8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	6.346.008.000,00	**6.455.714.471,00**	**5.023.778.031,00**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek dari pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 Tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setuap Tahun sesuai dengan perkembangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebesar 0,05% untuk NJOP di bawah Rp2.000.000.000,00 dan sebesar 0,1% untuk NJOP mulai dari Rp2.000.000.000,00. Penghitungan besaran pokok pajak yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak. Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00.

(9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	17.500.000.000,00	18.924.692.491,00	18.209.865.840,00

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah - LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	15.606.594.900,00	11.503.008.644,00	8.117.254.501,00

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat tiga objek Retribusi Daerah diantaranya:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp11.503.008.644,00 atau 73,71% dari Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.606.594.900,00. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp3.385.754.143,00 atau 29,43% dari realisasi Tahun 2022. Adapun rincian penerimaan retribusi daerah sebagaimana tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Anggaran Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Retribusi Daerah	**15.606.594.900,00**	**11.503.008.644,00**	**73,71**	**8.117.254.501,00**
1	Retribusi Jasa Umum	10.364.922.600,00	7.379.377.872,00	71,20	4.941.051.114,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.241.672.300,00	2.928.228.453,00	69,03	2.388.135.405,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.195.402.319,00	119,54	788.067.982,00

Dari tabel di atas retribusi perijinan tertentu merupakan obyek dengan persentase realisasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 119,54%. Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha merupakan obyek retribusi dengan persentase realisasi yang paling rendah jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu 69,03%. Adapun rincian dari tiga objek retribusi daerah di atas antara lain:

- **Retribusi Jasa Umum**

  Retribusi Jasa Umum Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 adalah Rp10.364.922.600,00 dan terealisasi Rp7.379.377.872,00 atau 71,20%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	OPD Penghasil
	Retribusi Jasa Umum	**10.364.922.600,00**	**7.379.377.872,00**	**71,20**	**4.941.051.114,00**	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	522.647.000,00	842.872.300,00	161,27	351.620.700,00	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.883.892.000,00	1.421.135.100,00	75,44	789.474.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	43.750.000,00	30.350.000,00	69,37	39.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.940.000.000,00	2.772.995.000,00	70,38	1.958.560.000,00	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.616.479.600,00	2.033.982.572,00	56,24	1.485.016.014,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	342.132.000,00	260.352.500,00	76,10	298.655.000,00	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.222.000,00	5.230.000,00	100,15	5.230.000,00	BPBD
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.800.000,00	12.460.400,00	115,37	12.995.400,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada beberapa rincian tabel diatas belum seluruhnya melampaui target yang telah ditetapkan. Ada beberapa penerimaan retribusi jasa usaha yang melampaui target yang telah

ditetapkan, diantaranya retribusi pelayanan Kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan pemakanan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan tera. Akan tetapi beberapa retribusi mengalami penurunan realisasi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp260.352.500,00 atau 14,71% dari tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp298.655.000,00. Pemungutan retribusi daerah jasa umum salah satunya terkait retribusi pelayanan pasar diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 5**.

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum Pada Pemerintah Kota Pasuruan ada 9 jenis, yaitu :

(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	522.647.000,00	**842.872.300,00**	**351.620.700,00**

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD dan di Puskesmas.

Pemungutan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing-masing pelayanan yang diberikan. Instansi yang berwenang melakukan pemungutan atas retribusi ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Soedarsono.

(b) Retribusi Pelayanan Persampahan

Retribusi Pelayanan Persampahan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.883.892.000,00	**1.421.135.100,00**	**789.474.000,00**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi persampahan/kebersihan.

Pemungutan retribusi ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan

mengenai tarif dari masing-masing lokasi pemungutan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

(c) **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	43.750.000,00	30.350.000,00	39.500.000,00

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengajukan izin sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat ke SKPD. Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sewa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dari Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk penyewa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pemungutan retribusi ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif dari masing-masing lokasi pemungutan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(d) **Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	3.940.000.000,00	2.772.995.000,00	1.958.560.000,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pemungutan retribusi ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(e) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	3.616.479.600,00	2.033.982.572,00	1.485.016.014,00

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi ini adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pemakaian los, kios, halaman/pelataran. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan wajib retribusinya orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar tradisional/sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungut/pemotong retribusi.

(f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	342.132.000,00	260.352.500,00	298.655.000,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggaraan oleh Pemerintah Daerah meliputi pendaftaran, pengujian kendaraan bermotor, pelayanan mutasi keluar, pelayanan numpang uji ke luar daerah, pelayanan uji pertama kali, pelayanan perubahan bentuk, dan pelayanan perubahan fungsi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pemungutan retribusi ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	5.222.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota.

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pemungutan retribusi ini didasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tarif berdasarkan jenis kendaraan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(h) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	10.800.000,00	**12.460.400,00**	**12.995.400,00**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas pembayaran pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi ini merupakan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh pedagang dan/atau produsen dalam transaksi perdagangan dan/atau kegaitan usaha di wilayah daerah. Sedangkan subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan Jenis pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Anggaran Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar Rp4.241.672.300,00 dan terealisasi sebesar Rp2.928.228.453,00 atau 69,03%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.6.

Tabel 5.6.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	OPD Penghasil
	Retribusi Jasa Usaha	**4.241.672.300,00**	**2.928.228.453,00**	**69,03**	**2.388.135.405,00**	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.236.318.300,00	2.315.139.953,00	71,54	1.924.752.705,00	Dinas Perkim, BPKA, Disparpora, Setda, DPUPR
2	Retribusi Terminal	6.079.000,00	4.548.500,00	74,82	6.867.000,00	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	936.100.000,00	521.615.000,00	55,72	372.140.700,00	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	63.175.000,00	86.925.000,00	137,59	84.375.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Secara keseluruhan retribusi jasa usaha sudah hampir memenuhi target, hanya retribusi terminal yang jauh tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Retribusi terminal pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.548.500,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.079.000,00 atau 74,82%. Pemungutan retribusi jasa usaha salah satunya retribusi pemakaian

kekayaan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 6.**

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha. Retribusi Jasa Usaha Pada Pemerintah Kota Pasuruan ada 4 jenis, yaitu :

a) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	3.236.318.300,00	**2.315.139.953,00**	**1.924.752.705,00**

Retribusi Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas barabg-barang bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Kota yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan. Sedangkan subyek retribusinya adalah pemakaian tanah, ruangan/ gedung, bangunan tempat usaha (ruko, toko, kios/ bedak/ kantin), lapangan, stadion, dan GOR, serta alat berat. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPKA, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 dapat disampaikan pada tabel 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7.
Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	OBYEK/LOKASI	OPD PENGHASIL	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
a	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Warung/ Depot	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.180.000,00
b	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Pemakaian Bangunan BPR Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	80.440.500,00
c	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Kontribusi SPBU Bakalan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	330.000.000,00
d	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Kios dan Ponten Parkir Wisata	Dinas Perhubungan	73.620.000,00
e	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Bedak dan Kios Ayam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.425.800,00
f	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Bedak dan Kios Kartini	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.925.000,00
g	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Retribusi Jasa Senkuko	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.640.000,00
h	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Sewa Bedak dan Kios Veteran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.970.000,00
i	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Gedung Gradhika	Sekretariat Daerah	15.000.000,00
j	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	GOR Unsur, Stadion Unsur, Lapangan Wijaya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	456.550.000,00
k	Retribusi Penyewaan Tanah	Sewa Tanah Eks Bengkok dan Tanah Sawah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	466.315.550,00
l	Retrbusi Penyewaan Bangunan	Sewa Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	778.072.103,00
m	Retrbusi Pemakaian	Sewa Alat-alat Berat	Dinas Perumahan Rakyat	22.800.000,00

NO		URAIAN	OBYEK/LOKASI	OPD PENGHASIL	REALISASI
		Laboratorium		dan Kawasan Permukiman	
	n	Retribusi Pemakaian Laboratorium	UPTD Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.473.000,00
	o	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Bus Pemkot	Sekretariat Daerah	3.500.000,00
	p	Retribusi Pemakaian Tanah eks Bengkok	Tanah Eks Bengkok	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.228.000,00
Jumlah					2.315.139.953,00

b) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	6.079.000,00	4.548.500,00	6.867.000,00

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang, serta perpindahan moda angkutan. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Rincian realisasi retribusi terminal tahun 2023 dapat disampaikan pada tabel 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8.
Rincian Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	OBYEK/LOKASI	OPD PENGHASIL	REALISASI
2		Retribusi Terminal			
	a	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Parkir MPU Sub Terminal Karangketug	Dinas Perhubungan	426.500,00
	b	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Retribusi Angkutan Kota	Dinas Perhubungan	4.122.000,00
Jumlah					4.548.500,00

c) Retribusi tempat khusus parkir

Retribusi tempat khusus parkir	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	936.100.000,00	521.615.000,00	372.140.700,00

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Rincian realisasi retribusi tempat khusus parkir tahun 2023 dapat disampaikan pada tabel 5.9 dibawah ini:

Tabel 5.9.
Rincian Realisasi Retribusi tempat khusus parkir Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	OBYEK/LOKASI	OPD PENGHASIL	REALISASI
3		Retribusi Tempat Khusus Parkir			
	a	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir Taman Pekuncen, Taman Lansia, Taman Sekargadung	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	23.659.000,00
	b	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir GOR dan Stadion Unsur	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	23.970.000,00
	c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir Terminal Wisata	Dinas Perhubungan	198.485.000,00
	d	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Parkir Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	275.501.000,00
Jumlah					**521.615.000,00**

d) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	63.175.000,00	**86.925.000,00**	**84.375.000,00**

Retribusi rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas. Pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Rincian realisasi retribusi tempat khusus parkir tahun 2023 dapat disampaikan pada tabel 5.10 dibawah ini:

Tabel 5.10.
Rincian Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO		URAIAN	OBYEK/LOKASI	OPD PENGHASIL	REALISASI
4		Retribusi Rumah Potong Hewan			
		Retribusi Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86.925.000,00
JUMLAH					**86.925.000,00**

- **Retribusi Perijinan Tertentu**

Retribusi Perijinan Tertentu	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.000.000.000,00	**1.195.402.319,00**	**788.067.982,00**

Anggaran Retribusi Perijinan Tertentu adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.195.402.319,00 atau 119,54%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.11.

Tabel 5.11.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	OPD Penghasil
	Retribusi Perizinan Tertentu	**1.000.000.000,00**	**1.195.402.319,00**	**119,54**	**788.067.982,00**	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.195.402.319,00	119,54	787.367.982,00	DPMPTSP
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	700.000,00	DPMPTSP

Pemungutan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan salah satunya sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 7.**

c) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	6.333.484.167,00	**6.283.921.167,03**	**6.115.362.978,37**

Tahun 2023 Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan adalah sebesar Rp6.333.484.167,00 dan terealisasi sebesar Rp6.283.921.167,03 atau 99,22%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.12.

Tabel 5.12.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**6.333.484.167,00**	**6.283.921.167,03**	**99,22**	**6.115.362.978,37**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.333.484.167,00	6.283.921.167,03	99,22	6.115.362.978,37

Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) tahun 2023 sebagai berikut :

- Pembagian deviden dari Bank Jatim sebesar Rp5.313.022.470,03;
- Pembagian deviden dari Bank UMKM Jawa Timur sebesar Rp91.050.000,00;
- Pembagian deviden dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan sebesar Rp879.848.697,00;
- PDAM Kota Pasuruan tidak membagikan deviden dikarenakan rugi.

Berdasarkan surat Direksi Bank Jatim Nomor: 062/378/PSR/FO/SRT perihal pelimpahan deviden PT Bank Jatim Tahun buku 2022 dan penyampaian Akta No 25 tanggal 12 April 2023 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, disampaikan bahwa telah dilimpahkan deviden Pemerintah Kota Pasuruan tahun buku 2022 ke Rekening RKUD Kota Pasuruan (0231020322) pada hari jumat tanggal 12 mei 2023 sebesar Rp5.313.022.470,03. Berdasarkan surat dari Bank UMKM Jawa Timur Nomor : 263/Pmr.Tre/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal

pembagian deviden disampaikan bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tahun buku 2022 yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2023, bahwa deviden Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp91.050.000,00 dan disetorkan pada Rekening RKUD Kota Pasuruan tanggal 09 Mei 2023 sebesar Rp91.050.000,00. Sedangkan BPR Kota Pasuruan sesuai dengan surat dari PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan tanggal 15 Mei 2023 Nomor : 193/SPB/423.500.02/2023 Perihal : Pemebritahuan Pembagian Deviden Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 April 2023 maka dengan ini diberitahukan bahwa dari hasil Laporan tahun buku 2022 PT BPR Kota Pasuruan dapat memberikan setoran deviden kepada pemegang saham (Pemerintah Kota Pasuruan) sebesar Rp879.848.697,00 tanggal 04 Mei 2023.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	134.174.470.316,00	**109.365.663.643,89**	**102.849.823.212,74**

Pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp134.174.470.316,00 dan terealisasi sebesar Rp109.365.663.643,89 atau 81,51%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp6.515.840.431,15 atau 5,96% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp102.849.823.212,74, dengan rincian sebagaimana tabel 5.13.

Tabel 5.13.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Lain-lain PAD yang Sah	**134.174.470.315,00**	**109.365.663.643,89**	**81,51**	**102.849.823.212,74**
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	427.780.000,00	333.136.600,00	77,88	714.416.181,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	859.399.400,00	825.207.500,00	96,02	373.082.919,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	119.115.700,00	243.951.460,00	204,80	61.627.804,00
4	Jasa Giro	39.653.539.035,00	3.737.083.009,63	9,42	1.912.915.544,74
5	Pendapatan Bunga	974.589.041,00	1.843.319.075,19	189,14	1.969.198.629,79
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.157.331.219,00	805.870.053,54	69,63	994.438.486,17
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	612.059.540,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	325.310.810,00	292.276.428,55	89,85	285.667.606,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	9.814.960,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	671.532.828,00	1.707.518.007,63	254,27	75.730.655,00
11	Pendapatan BLUD	77.876.624.282,00	89.478.938.216,35	114,90	86.797.596.378,04
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.109.248.000,00	10.057.303.712,00	83,05	9.043.274.509,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	41.059.575,00	0,00	0,00

Dari beberapa rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah rata-rata realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Dari realisasi Lain-lain PAD yang sah dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp427.780.000,00 yang terealisasi sebesar Rp333.136.600,00 atau 77,88% yang terdiri dari :
   a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 atau 0,00%;
   b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp139.445.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 atau 1.394,45%;
   c) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp192.881.600,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp187.000.000,00 atau 103,15%;
   d) Hasil Penjualan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp810.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp780.000,00 atau 103,85%;

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp859.399.400,00 terealisasi sebesar Rp825.207.500,00 atau 96,02%. Realisasi tersebut atas penerimaan dari :
   a) Pendapatan atas hasil sewa Senkuko tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00;
   b) Pembayaran Kontribusi atas Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan jasa (Rest Area) Jl. Soekarno Hatta - Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2022 sebesar Rp345.938.000,00;
   c) Pembayaran Kontribusi atas Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan jasa (Rest Area) Jl. Soekarno Hatta - Gadingrejo Kota Pasuruan Tahun 2023 sebesar Rp356.086.000,00;
   d) Pendapatan atas sewa ponten pasar tahun 2023 sebesar Rp65.841.000,00;
   e) Pembayaran Sewa Tanah untuk Penempatan Jaringan BTS Microcell dan Fiber Optic (PT. Bali Towerindo Sentra Tbk) Tahun 2023 sebesar Rp38.812.500,00;
   f) Pendapatan atas sewa lahan pasar tahun 2023 sebesar Rp3.530.000,00.

(3) Penerimaan hasil kerjasama daerah yaitu penerimaan atas kompensasi atas tanah makam tahun 2023, terealisasi sebesar Rp243.951.460,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp119.115.700,00 atau 204,80%.

(4) Penerimaan Jasa Giro Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp39.653.539.035,00 yang terealisasi sebesar Rp3.737.083.009,63 atau 9,42% yang terdiri dari :
   a) Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp1.204.996.033,56 dari yang dianggarkan sebesar Rp242.604.532,00;
   b) Jasa Giro Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp2.532.086.967,07 dari yang dianggarkan sebesar Rp39.410.934.502,00.

(5) Penerimaan Bunga Deposito pada Bank yang ditempatkan selama Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.843.319.075,19 dari yang dianggarkan sebesar Rp974.589.041,00 atau 189,14%, yang terdiri atas :
   a) Bunga Deposito atas TDF-DBH tahun 2023 sebesar Rp239.962.911,00;
   b) Bunga Deposito atas penempatan Deposito selama tahun 2023 sebesar Rp1.603.356.164,19.

(6) Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu penerimaan terkait denda atas penyelesaian fisik pekerjaan yang terlambat tahun-tahun lalu yang menjadi temuan dari auditor internal dan eksternal sesuai dengan kontrak kerja dan diwajibkan setor ke kas daerah, terealisasi sebesar Rp805.870.059,54 dari yang dianggarkan sebesar Rp1.157.331.219,00 atau 69,63%. Adapun mekanisme penganggaran pendapatan denda keterlambatan pekerjaan adalah berdasarkan MDP tender PK (Dok Tender, Paskakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, telah diatur bahwa penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak tersebut. Berdasarkan MDP tersebut, besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak dan 1% (satu perseribu) dari harga kontrak sebelum PPN, dengan rincian sebagaimana **Lampiran 8**;

(7) Pendapatan denda pajak daerah yaitu penerimaan atas denda pajak yang melewati masa pajaknya selama Tahun 2023, pendapatan denda pajak Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp292.276.428,55 dari yang dianggarkan sebesar Rp325.310.810,00 atau 89,85%;

(8) Pendapatan dari Pengembalian pada tahun 2023 yaitu pendapatan atas pengembalian kelebihan belanja selama tahun 2023 sebesar Rp1.707.518.007,63 dari yang dianggarkan sebesar Rp671.532.828,00;

(8) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD di Kota Pasuruan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp77.876.624.282,00 dan terealisasi sebesar Rp89.478.938.216,35 atau 114,90%, merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Dr R Soedarsono;

(9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.057.303.712,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp12.109.248.000,00 atau 83,05%;

(10) Pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/ kontrak yaitu pendapatan atas pertanggungan asuransi Barang Milik Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp41.059.575,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	782.916.058.403,00	**761.847.606.933,00**	**747.924.051.772,00**

Pendapatan Transfer pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp782.916.058.403,00 dan terealisasi sebesar Rp761.847.606.933,00 atau 97,31%. Realisasi Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp13.923.555.161,00 atau 1,83% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp747.924.051.772,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagaimana tabel 5.14.

Tabel 5.14.
Anggaran dan Realiasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	PENDAPATAN TRANSFER	**782.916.058.403,00**	**761.847.606.933,00**	**97,31**	**747.924.051.772,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**668.998.660.691,00**	**651.390.724.212,00**	**97,37**	**644.106.485.201,00**
1	Dana Perimbangan	653.318.600.691,00	635.710.664.212,00	97,30	626.097.743.201,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	100,00	18.008.742.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**113.917.397.712,00**	**110.456.882.721,00**	**96,96**	**103.817.566.571,00**
1	Pendapatan Bagi Hasil	103.743.194.392,00	108.053.799.100,00	104,16	91.417.533.571,00
2	Bantuan Keuangan	10.174.203.320,00	2.403.083.621,00	23,62	12.400.033.000,00

Kebijakan Transfer Keuangan ke Daerah tahun 2023 yang juga telah berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik didaerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Arah kebijakan dana transfer tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;
2) Memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan;
3) Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah *(local taxing power)* dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesehjateraan masyarakat;
4) Mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui :
   a) Pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan Obligasi Daerah, dan/atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha);
   b) Melakukan *Integrated funding* (kerjasama pembangunan antar daerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
   c) Pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	668.998.660.691,00	**651.390.724.212,00**	**644.106.485.201,00**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap Tahun Anggaran dalam APBN. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp651.390.724.212,00 dari total Anggaran sebesar Rp668.998.660.691,00 atau 97,37%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan 1,12% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp644.106.485.201,00.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan rincian Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 untuk Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tabel 5.15.

Tabel 5.15.
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**668.998.660.691,00**	**651.390.724.212,00**	**97,37**	**644.106.485.201,00**
1	**Dana Perimbangan**	**653.318.600.691,00**	**635.710.664.212,00**	**97,30**	**626.097.743.201,00**
a	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.062.138.743,00	90.211.795.065,00	99,07	129.913.165.916,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	424.376.271.000,00	427.076.974.462,00	100,64	400.677.921.887,00
c	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.274.608.000,00	36.244.880.377,00	72,09	33.551.889.313,00
d	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.605.582.948,00	82.177.014.308,00	93,80	61.954.766.085,00
2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**15.680.060.000,00**	**15.680.060.000,00**	**100,00**	**18.008.742.000,00**
a	DID	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	100,00	18.008.742.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp651.390.724.212,00 dari Anggaran sebesar Rp668.998.660.691,00 atau 97,37%. Untuk Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, DAU, dan DAK menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam merealisasikan kepada daerah.

(1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	53.349.921.702,00	**52.499.578.024,00**	**47.515.541.325,00**

Tahun 2023 Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp53.349.921.702,00 dan terealisasi sebesar Rp52.499.578.024,00 atau 98,41%. Rincian Anggaran Dana Bagi

Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan rincian Anggaran dan realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023. Rincian Anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak Pada Tahun 2023 sebagaimana tabel 5.16.

Tabel 5.16.
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak**	**53.349.921.702,00**	**52.499.578.024,00**	**98,41**	**47.515.541.325,00**
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.263.656.605,00	3.297.487.937,00	101,04	5.578.568.675,00
b	DBH PPh Pasal 21	15.799.150.643,00	16.034.419.643,00	101,49	15.929.726.909,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.091.989.890,00	1.856.720.890,00	88,75	3.505.090.423,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.195.124.564,00	31.310.949.554,00	97,25	22.502.155.318,00

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak/ SDA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	37.712.217.041,00	**37.712.217.041,00**	**82.397.624.591,00**

Tahun 2023 Anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Alam adalah sebesar Rp37.712.217.041,00 dan terealisasi sebesar Rp37.712.217.041,00 atau 100%. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan rincian Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebagaimana tabel 5.17. berikut.

Tabel 5.17.
Anggaran Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA**	**37.712.217.041,00**	**37.712.217.041,00**	**100,00**	**82.397.624.591,00**
a	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.890.481.005,00	32.703.466.005,00	668,72	72.732.258.874,00
b	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.207.134.246,00	2.394.149.246,00	7,93	4.175.690.966,00
c	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.494.320,00	15.494.320,00	100,00	46.240.672,00
d	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	938.550.591,00	697.905.291,00	74,36	3.049.142.985,00
e	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	240.645.300,00	-	0
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	182.057.668,00	182.057.668,00	100,00	435.980.094,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.478.499.211,00	1.478.499.211,00	100,00	1.958.311.000,00

(3) **Dana Alokasi Umum**

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dana Alokasi Umum	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
	424.376.271.000,00	**427.076.974.462,00**	**400.677.921.887,00**

Pada Tahun 2023 Anggaran Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp424.376.271.000,00 dan terealisasi sebesar Rp427.076.974.462,00 atau sebesar 100,64%. Rincian Anggaran Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Arah kebijakan Alokasi Dana Alokasi Umum tahun 2023 sebagai berikut :

a) Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU;
b) Perhitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 tahun 202 tentang HKPD;
c) Meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya *(earmarked)*.

(4) **Dana Alokasi Khusus**

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Dana Alokasi Khusus	**(Rp)**	**(Rp)**	**(Rp)**
	137.880.190.948,00	**118.421.894.685,00**	**95.506.655.398,00**

Pada Tahun 2023 Anggaran Dana Alokasi Khusus adalah Rp137.880.190.948,00 dan terealisasi sebesar Rp118.421.894.685,00 atau sebesar 85,89%. Rincian Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan rincian Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023. Rincian Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebagaimana tabel 5.18.

Tabel 5.18.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**50.274.608.000,00**	**36.244.880.377,00**	**72,09**	**33.551.889.313,00**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	441.572.000,00	354.768.200,00	80,34	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	1.913.135.800,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.483.749.000,00	2.051.600.590,00	82,60	3.329.934.700,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	12.445.401.000,00	3.062.642.910,00	24,61	186.815.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.183.720.424,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	8.956.240.171,00	0,00	92.100.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	583.238.208,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	379.804.548,00
9	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	12.691.225.000,00	5.664.050.200,00	44,63	8.953.109.700,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.600.000.000,00	1.400.000.000,00	87,50	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.939.402.000,00	3.743.883.647,00	63,03	4.645.398.900,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.181.698.000,00	650.399.423,00	9,06	3.400.289.524,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	5.027.188.600,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.169.772.000,00	111.614.196 00	9,54	5.364.085.009,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	818.840.400,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.556.010.000,00	80.225.040,00	1,76	2.924.284.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	3.189.207.000,00	0,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.137.625.000,00	1.134.220.000,00	99,70	595.973.500,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	628.154.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**87.605.582.948,00**	**82.177.014.308,00**	**93,80**	**61.954.766.085,00**
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.677.402.948,00	25.920.437.427,00	84,49	19.838.722.394,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	740.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.679.203.000,00	33.853.581.350,00	100,52	31.404.896.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.053.000.000,00	700.500.000,00	66,52	837.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	163.200.000,00	4.656.121.202,00	2.853,02	137.400.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	904.635.900,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.745.123.000,00	10.756.084.229,00	91,58	3.952.287.513,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	381.542.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.576.426.000,00	1.288.213.000,00	50,00	1.861.392.778,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	25.190.600,00	5,99	2.466.677.800,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.804.116.000,00	1.655.124.600,00	91,74	959.146.600,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	365.200.000,00	239.538.200,00	65,59	338.843.000,00
13	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	550.741.600,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
14	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.000.000.000,00	1.416.661.200,00	35,42	0,00
15	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	210.185.000,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	158.400.000,00

Dana Alokasi Khusus Pada Tahun 2023 dibagi atas dua rincian yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Untuk DAK di Kota Pasuruan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik penunjang operasional Pemerintah Kota Pasuruan, Sedangkan DAK Non Fisik untuk menunjang kegiatan non fisik di tahun 2023 oleh SKPD yang menerima dana tersebut. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 kurang dari yang ditargetkan dikarenakan DAK terealisasi atas laporan penggunaan dana tahap sebelumnya yang memenuhi ketentuan sesuai aturan dan Pemerintah Pusat akan mentransfer dana tahap selanjutnya. Kesadaran setiap SKPD penerima DAK berbeda-beda yang mempengaruhi tingkat penyerapan Dana Alokasi Khusus sebelumnya.

Arah kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2023 sebagai berikut :

a) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan :
   - Pencapaian Prioritas Nasional (PN);
   - Percepatan Pembangunan Daerah;
   - Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
   - Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
b) Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* optimal
c) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK
d) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan
e) Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber daya lainnya.

Arah kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2023 sebagai berikut :

a) Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK NonFisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;
b) Memperkuat kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis *unit cost* majemuk untuk dana BOSP, serta perluasan target *output* tunjangan guru;
c) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer;

d) Memperkuat kebijaka DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

b) Pendapatan Dana Insentif Daerah

Pendapatan Dana Insentif Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	15.680.060.000,00	**15.680.060.000,00**	**18.008.742.000,00**

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp15.680.060.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.680.060.000,00, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2023.

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	103.743.194.392,00	**108.053.799.100,00**	**91.417.533.571,00**

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp103.743.194.392,00 dan terealisasi sebesar Rp108.053.799.100,00 atau 104,16%. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tabel 5.19.

Tabel 5.19.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**103.743.194.392,00**	**108.053.799.100,00**	**104,16**	**91.417.533.571,00**
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.341.825.382,00	29.732.616.600,00	89,18	27.760.157.640,00
b	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.875.844.043,00	13.787.638.700,00	107,08	12.599.481.960,00
c	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.740.870.925,00	23.261.452.300,00	117,83	16.082.736.600,00
d	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	251.174.042,00	371.019.100,00	147,71	271.449.960,00
e	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.533.480.000,00	40.901.072.400,00	108,97	34.703.707.411,00

(1) Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menerima Dana Bagi Hasil sesuai dengan penerimaan selama tahun 2023, dasar penerimaan dana bagi hasil selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(a) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/180/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2023;

(b) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/288/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023;

(c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/525/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2023;

(d) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/688/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Bulan Oktober dan November Tahun Anggaran 2023;

(e) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Definitif Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;

(2) Bagi Hasil Pajak Rokok

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menerima Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan penerimaan selama tahun 2023, dasar penerimaan dana bagi hasil pajak rokok selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

(a) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/182/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I Tahun Anggaran 2023;

(b) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/292/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II Tahun Anggaran 2023;

(c) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/556/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2023;

(d) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/743/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Bagian Bulan Oktober dan Nopember Tahun Anggaran 2023;

(e) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/987/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;

(f) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bulan Desember Tahun Anggaran 2022.

d) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	10.174.203.320,00	**2.403.083.621,00**	**14.400.033.000,00**

Tahun 2023 Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur dianggarkan sebesar Rp10.174.203.320,00 dan terealisasi sebesar Rp2.403.083.621,00 atau 23,62%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.20.

Tabel 5.20.
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Bantuan Keuangan	**10.174.203.320,00**	**2.403.083.621,00**	**23,62**	**12.400.033.000,00**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.174.203.320,00	2.403.083.621,00	23,62	12.400.033.000,00

Adapun rincian Bantuan Keuangan Tahun 2023 berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana rincian berikut:

(1) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk honorarium kinerja guru non PNS selama 2 bulan TA 2023 sebesar Rp16.000.000,00;

(2) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 Bulan TA. 2023 sebesar Rp75.600.000,00;

(3) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan, Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 bulan, dan Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP selama 10 bulan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.276.100.000,00;

(4) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat (Santri Jatim Sehat dan Berkah/SAJADAH) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.383.621,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	3.000.000.000,00	**222.000.000,00**	**89.022,00**

Pada Tahun 2023 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.000.000,00 atau 7,40%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.21.

Tabel 5.21.
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**3.000.000.000,00**	**222.000.000,00**	**7,40**	**89.022,00**
a	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	222.000.000,00	7,40	0,00
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	89.022,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.000.000,00 atau 7,40%. Pendapatan hibah tahun 2023 atas penerimaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1/MK.7/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal penetapan pemberian hibah untuk program Hibah Air Limbah setempat (ALS)/ Hibah sanitasi yang bersumber dari penerimaan Dalam Negeri TA 2023.

b. Belanja

Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.153.911.589.473,00	**1.010.778.967.728,92**	**939.274.546.104,50**

Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi belanja daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp1.010.778.967.728,92 atau 87,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.153.911.589.473,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar Rp71.504.421.624,42 atau 7,07%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 sebagaimana tabel 5.22.

Tabel 5.22.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA DAERAH	**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**	**87,60**	**939.274.546.104,50**
BELANJA OPERASI	944.343.502.254,00	862.605.302.488,92	91,34	804.595.474.677,65
BELANJA MODAL	201.600.917.439,00	146.450.795.740,00	72,64	129.718.487.434,85
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00	21,62	4.960.583.992,00

Adapun rincian Anggaran dan realisasi Belanja Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 9**.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	944.343.502.254,00	**862.605.302.488,92**	**804.595.474.677,65**

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp862.605.302.488,92 dari yang dianggarkan sebesar Rp944.343.502.254,00 atau 91,34%. Realisasi belanja operasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.009.827.811,27 atau 6,72% dari Tahun 2022. Rincian Anggaran dan realisasi belanja operasi Tahun 2023 sebagaimana tabel 5.23.

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA OPERASI	**944.343.502.254,00**	**862.605.302.488,92**	**91,34**	**804.595.474.677,65**
Belanja Pegawai	403.330.138.252,00	369.520.132.167,00	91,62	378.770.674.303,00
Belanja Barang dan Jasa	464.480.805.962,00	423.932.933.202,92	91,27	363.508.133.547,65
Belanja Hibah	56.518.768.040,00	53.328.245.546,00	94,35	35.526.573.727,00
Belanja Bantuan Sosial	20.013.790.000,00	15.823.991.573,00	79,07	26.790.093.100,00

Rincian masing-masing belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	403.330.138.252,00	**369.520.132.167,00**	**378.770.674.303,00**

Penganggaran belanja pegawai diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun PPPK, penganggaran terkait tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan penganggaran 4% pembayaran premi asuransi BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp403.330.138.252,00 dan terealisasi sebesar Rp369.520.132.167,00 atau 91,62%. Belanja pegawai tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagaimana tabel 5.24.

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Pegawai	**403.330.138.252,00**	**369.520.132.167,00**	**91,62**	**378.770.674.303,00**
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**217.711.847.422,00**	**201.430.523.601,00**	**92,52**	**199.722.516.133,00**
a	Belanja Gaji Pokok ASN	163.600.214.725,00	153.424.832.436,00	93,78	152.231.182.083,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.775.345.066,00	13.620.324.560,00	92,18	13.515.865.921,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.161.497.802,00	5.536.379.950,00	89,85	5.729.310.000,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.782.099.059,00	7.463.120.430,00	95,9	7.127.103.000,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.943.578.288,00	3.520.180.000,00	89,26	3.422.891.898,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.032.589.933,00	8.781.938.880,00	87,53	8.668.543.112,00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	204.354.336,00	175.822.355,00	86,04	177.152.185,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.416.100,00	2.185.237,00	90,44	2.115.035,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.171.455.114,00	7.642.266.040,00	83,33	7.600.230.708,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	353.769.756,00	315.869.216,00	89,29	312.030.805,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.061.302.107,00	947.604.497,00	89,29	936.091.386,00
l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	623.225.136,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**105.258.007.330,00**	**92.485.943.648,00**	**87,87**	**89.579.881.589,00**
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	23.635.942.788,00	20.313.087.980,00	85,94	25.483.214.386,00
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.625.953.425,00	2.703.675.316,00	74,56	2.943.803.401,00
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	93.934.904,00	88.231.878,00	93,93	121.532.250,00
d	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	77.902.176.213,00	69.380.948.474,00	89,06	61.031.331.552,00
3	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**42.616.233.310,00**	**39.180.965.856,00**	**91,94**	**43.714.028.356,00**
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	341.600.700,00	341.600.700,00	100	1.498.487.253,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.968.300,00	11.103.600,00	25,84	42.033.350,00
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.924.223.850,00	31.468.919.600,00	95,58	33.515.074.740,00
d	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	531.000.000,00	306.750.000,00	57,77	756.250.000,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
e	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.309.383.000,00	2.318.114.856,00	70,05	2.331.419.459,00
f	Belanja Honorarium	3.838.294.000,00	3.243.506.600,00	84,5	5.570.763.554,00
g	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.769.460,00	0,00	0,00	0,00
h	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	996.744.000,00	939.630.500,00	94,27	0,00
i	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	624.250.000,00	551.340.000,00	88,32	0,00
4	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**15.678.669.390,00**	**13.961.003.918,00**	**89,04**	**14.380.437.393,00**
a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.026.019.974,00	665.490.000,00	64,86	665.490.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	99.015.000,00	83.435.100,00	84,27	83.970.600,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.593.000,00	88.424.820,00	80,68	89.511.120,00
d	Belanja Uang Paket DPRD	74.415.000,00	57.267.000,00	76,96	57.267.000,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.058.294.566,00	960.393.000,00	90,75	960.393.000,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.230.000,00	101.215.800,00	81,47	101.581.200,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.222.500,00	0,00	0,00	2.968.875,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.966.750.000,00	3.759.000.000,00	94,76	3.759.000.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	996.300.000,00	924.000.000,00	92,74	903.000.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.435.000,00	393.932,00	27,45	393.932,00
k	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14.350,00	0,00	0,00	0,00
l	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.807.380.000,00	3.940.384.266,00	81,97	4.375.861.666,00
m	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.402.000.000,00	3.381.000.000,00	99,38	3.381.000.000,00
5	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**900.795.800,00**	**581.128.223,00**	**64,51**	**806.099.082,00**
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.792.496,00	54.600.000,00	92,87	54.600.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.394.750,00	7.644.000,00	91,06	7.644.000,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	107.932.496,00	98.280.000,00	91,06	98.280.000,00
d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.907.654,00	8.111.040,00	91,06	6.952.320,00
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	338.870,00	292.728,00	86,38	265.210,00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148,00	1.040,00	90,59	960
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.111.384,00	5.503.680,00	90,06	5.503.680,00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	124.728,00	112.320,00	90,05	112.320,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	374.172,00	336.960,00	90,05	336.960,00
j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	681.574.992,00	406.246.455,00	59,6	632.403.632,00
k	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	28.243.110,00	0,00	0,00	0,00
6	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**757.710.000,00**	**741.600.000,00**	**97,87**	**741.600.000,00**
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	217.710.000,00	201.600.000,00	92,6	201.600.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00	540.000.000,00	100	540.000.000,00
7	***Belanja Pegawai BOS***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.278.650.000,00**
a	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.278.650.000,00
8	**Belanja Pegawai BLUD**	**20.406.875.000,00**	**21.138.966.921,00**	**103,59**	**26.547.461.750,00**
a	Belanja Pegawai BLUD	20.406.875.000,00	21.138.966.921,00	103,59	26.547.461.750,00

b) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	464.480.805.962,00	**423.932.933.202,92**	**363.508.133.547,65**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja Barang dan Jasa diuraikan dalam obyek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masayarakat. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp464.480.805.962,00 dan terealisasi sebesar Rp423.932.933.202,92 atau 91,27%. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 dan 2022 sebagaimana tabel 5.25 berikut,

Tabel 5.25.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Barang dan Jasa	**464.480.805.962,00**	**423.932.933.202,92**	**91,27**	**363.508.133.547,65**
1	**Belanja Barang**	**92.983.522.322,00**	**79.941.506.362,00**	**85,97**	**58.956.607.641,00**
a	Belanja Barang Pakai Habis	92.983.522.322,00	79.941.506.362,00	85,97	58.914.218.591,00
b	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	42.389.050,00
2	**Belanja Jasa**	**228.740.064.207,00**	**206.057.286.826,00**	**90,08**	**185.846.332.693,00**
a	Belanja Jasa Kantor	162.613.360.322,00	145.922.946.905,00	89,74	125.091.858.452,00
b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.110.905.000,00	39.328.485.172,00	98,05	38.233.214.093,00
c	Belanja Sewa Tanah	483.100.000,00	397.933.119,00	82,37	437.574.000,00
d	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.064.206.415,00	2.718.731.700,00	66,89	1.222.635.875,00
e	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	294.950.000,00	117.000.000,00	39,67	6.529.270.808,00
f	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	386.751.800,00	266.340.000,00	68,87	52.996.000,00
g	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.429.000.000,00	7.663.070.015,00	90,91	5.903.735.354,00
h	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.761.290.670,00	5.087.330.296,00	88,30	4.513.174.131,00
i	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.596.500.000,00	4.555.449.619,00	69,06	3.857.832.700,00
j	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	4.041.280,00
3	**Belanja Pemeliharaan**	**22.084.015.894,00**	**19.940.942.604,00**	**90,30**	**16.426.413.655,00**
a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.326.761.500,00	14.384.753.982,00	88,11	10.630.348.743,00
b	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.402.744.394,00	5.239.440.887,00	96,98	5.575.091.012,00
c	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	354.510.000,00	316.747.735,00	89,35	220.973.900,00
4	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.576.618.080,00**	**33.808.781.422,00**	**81,32**	**28.048.012.863,00**
a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.576.618.080,00	33.808.781.422,00	81,32	28.048.012.863,00
5	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**5.002.838.700,00**	**4.088.800.600,00**	**81,73**	**4.987.683.246,00**
a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.922.838.700,00	3.056.800.600,00	77,92	1.529.252.400,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.080.000.000,00	1.032.000.000,00	95,56	3.458.430.846,00
6	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**16.740.051.842,00**	**16.354.613.751,00**	**97,70**	**13.022.635.336,00**
a	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.740.051.842,00	16.354.613.751,00	97,70	13.022.635.336,00
7	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**57.353.694.917,00**	**63.741.001.637,92**	**111,14**	**56.220.448.113,65**
a	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.353.694.917,00	63.741.001.637,92	111,14	56.220.448.113,65

Adapun rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebagaimana terlampir Pada **Lampiran 10** dan **Lampiran 11**.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	56.518.768.040,00	**53.328.245.546,00**	**35.526.573.727,00**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintaha pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan. Anggaran Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp56.518.768.040,00 dan terealisasi sebesar Rp53.328.245.546,00 atau 94,35%. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel 5.26.

Tabel 5.26.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Hibah	**56.518.768.040,00**	**53.328.245.546,00**	**94,35**	**35.526.573.727,00**
1	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.846.163.500,00**	**5.872.366.356,00**	**74,84**	**2.967.678.302,00**
a	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.843.119.000,00	1.813.619.000,00	98,40	1.708.425.000,00
b	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.003.044.500,00	4.058.747.356,00	67,61	1.259.253.302,00
2	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**48.114.749.440,00**	**46.898.024.090,00**	**97,47**	**32.001.040.325,00**
a	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.140.000,00	7.349.577.089,00	99,99	3.849.377.025,00
b	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.005.396.600,00	34.074.428.415,00	97,34	24.810.555.000,00
c	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.759.212.840,00	5.474.018.586,00	95,05	3.341.108.300,00
3	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**557.855.100,00**	**557.855.100,00**	**100,00**	**557.855.100,00**
a	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.855.100,00	557.855.100,00	100,00	557.855.100,00

Rincian belanja hibah dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.27;

Tabel 5.27.
Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Hibah	**56.518.768.040,00**	**53.328.245.546,00**	**94,35**	**35.526.573.727,00**
1	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.846.163.500,00**	**5.872.366.356,00**	**74,84**	**2.967.678.302,00**
a	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.843.119.000,00	1.813.619.000,00	98,40	1.708.425.000,00
b	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.003.044.500,00	4.058.747.356,00	67,61	1.259.253.302,00
2	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**48.114.749.440,00**	**46.898.024.000,00**	**97,47**	**32.001.040.325,00**
a	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.140.000,00	7.349.577.089,00	99,99	3.849.377.025,00
a.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.350.140.000,00	7.349.577.089,00	99,99	3.815.574.025,00
a.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				33.803.000,00
b	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.005.396.600,00	34.074.428.415,00	97,34	24.810.555.000,00
b.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.325.271.000,00	33.584.024.415,00	97,84	20.600.520.000,00
b.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	680.125.600,00	490.404.000,00	72,10	4.210.035.000,00
c	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.759.212.840,00	5.474.018.586,00	95,05	3.341.108.300,00
c.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.284.432.040,00	5.023.020.790,00	95,05	2.692.978.000,00
c.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	474.780.800,00	450.997.796,00	94,99	648.130.300,00
2	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**557.855.100,00**	**557.855.100,00**	**100,00**	**557.855.100,00**
a	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.855.100,00	557.855.100,00	100,00	557.855.100,00
a.1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.855.100,00	557.855.100,00	100,00	557.855.100,00

Table 5.28.
Rincian SKPD yang melaksanakan belanja hibah tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Hibah	SKPD	Jumlah
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	759.835.000,00
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.053.784.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.058.747.356,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	DINAS KESEHATAN	823.283.339,00
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	50.000.000,00
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.000.000.000,00
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.160.000.000,00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	316.293.750,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	255.424.000,00

No	Jenis Belanja Hibah	SKPD	Jumlah
	dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.829.024.415,00
		DINAS SOSIAL	145.000.000,00
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	234.980.000,00
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	595.000.000,00
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.269.432.040,00
		SEKRETARIAT DAERAH	1.753.588.750,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	DINAS PERIKANAN	92.925.000,00
		DINAS SOSIAL	347.600.000,00
		KECAMATAN PANGGUNGREJO	10.472.796,00
8	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	557.855.100,00
TOTAL			**53.328.245.546,00**

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	20.013.790.000,00	**15.823.991.573,00**	**26.790.093.100,00**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sudah dialokasikan kepada SKPD masing-masing. Tahun 2023 anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp20.013.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.823.991.573,00 atau 79,07%. Tahun 2023 Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp10.966.101.527,00 atau 69,30%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.29.

Tabel 5.29.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Bantuan Sosial	**20.013.790.000,00**	**15.823.991.573,00**	**79,07**	**26.790.093.100,00**
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.013.790.000,00	15.823.991.573,00	79,07	20.047.093.100,00
a	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.710.700.000,00	12.728.031.041,00	81,02	19.189.576.350,00
b	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.303.090.000,00	3.095.960.532,00	71,95	857.516.750,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.743.000.000,00
a	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.743.000.000,00

Tabel 5.30.
SKPD yang melaksanakan belanja bantuan sosial 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Bantuan Sosial	SKPD	Jumlah
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	DINAS KESEHATAN	84.131.041,00
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	7.648.725.532,00
		DINAS SOSIAL	7.701.340.000,00
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	389.795.000,00
TOTAL			**15.823.991.573,00**

2) **Belanja Modal**

Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	201.600.917.439,00	**146.450.795.740,00**	**129.718.487.434,85**

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Tahun 2023 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp201.600.917.439,00 dan terealisasi sebesar Rp146.450.795.740,00 atau 72,64%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.732.308.305,15 atau 11,43% dari realisasi Tahun 2022. Rincian belanja modal Pada Tahun 2022 terinci sebagaimana tabel 5.31.

Tabel 5.31.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA MODAL	**201.600.917.439,00**	**146.450.795.740,00**	**72,64**	**129.718.487.434,85**
Belanja Modal Tanah	27.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.608.075.179,00	54.641.329.574,00	83,28	36.486.480.985,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.514.826.767,00	58.482.341.064,00	86,62	54.606.509.061,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.070.566.518,00	32.938.790.102,00	80,20	38.003.139.388,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	407.448.975,00	388.335.000,00	95,31	619.120.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	-	3.238.000,00

a) **Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	27.000.000.000,00	**0,00**	**0,00**

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp27.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%.

b) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	65.608.075.179,00	**54.641.329.574,00**	**36.486.480.985,00**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp65.608.075.179,00 dan terealisasi sebesar Rp54.641.329.574,00 atau 83,28%, dengan rincian sebagaimana **Lampiran 12.**

Tabel 5.32.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**65.608.075.179,00**	**54.641.329.574,00**	**83,28**	**36.486.480.985,00**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Belanja Modal Alat Besar	961.910.800,00	932.747.000,00	96,97	1.034.607.499,00
	Belanja Modal Alat Besar Darat	48.238.800,00	36.000.000,00	74,63	507.255.099,00
	Belanja Modal Alat Bantu	913.672.000,00	896.747.000,00	98,15	527.352.400,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.546.347.561,00	2.465.817.740,00	96,84	2.073.986.160,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.939.150.661,00	1.861.058 840,00	95,97	2.028.856.260,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	607.196.900,00	604.758.900,00	99,60	45.129.900,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.716.003.800,00	537.655.700,00	6,17	1.523.845.496,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.423.902.200,00	246.394.000,00	2,92	548.302.274,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	686.400,00	686.400,00	100,00	969.848.222,00
	Belanja Modal Alat Ukur	291.415.200,00	290.575.300,00	99,71	5.695.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	247.544.100,00	208.826.800,00	84,36	196.997.500,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	247.544.100,00	208.826.800,00	84,36	196.997.500,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.488.851.002,00	8.727.528.713,00	91,98	6.905.995.472,00
	Belanja Modal Alat Kantor	4.037.295.045,00	3.686.663.540,00	91,32	2.314.577.206,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.033.611.857,00	4.640.106.573,00	92,18	4.314.294.466,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	417.944.100,00	400.758.600,00	95,89	277.123.800,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.335.871.500,00	4.144.005.000,00	95,57	309.858.400,00
	Belanja Modal Alat Studio	4.197.441.600,00	4.009.560.000,00	95,52	200.745.900,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	132.963.400,00	129.145.000,00	97,13	109.112.500,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.466.500,00	5.300.000,00	96,95	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.809.858.550,00	24.363.463.371,00	94,40	6.035.250.368,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.809.858.550,00	24.363.463.371,00	94,40	6.035.250.368,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	463.525.400,00	439.342.460,00	94,78	900.603.676,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	552.020.636,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	388.363.400,00	364.842.500,00	93,94	347.293.040,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	25.162.000,00	24.500.000,00	97,37	1.290.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.999.960,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Komputer	5.873.762.208,00	5.587.947.000,00	95,13	8.857.464.180,00
	Belanja Modal Komputer Unit	4.287.365.005,00	4.133.176.300,00	96,40	6.147.088.392,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.536.397.203,00	1.454.770.700,00	91,70	2.710.375.788,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	303.650.500,00	260.440.570,00	85,77	1.534.369.007,00
	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	1.330.130.397,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	303.650.500,00	260.440.570,00	85,77	203.438.610,00
	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12	Belanja Modal Alat Perega	0,00	0,00	0,00	750.000,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	543.594.400,00	519.084.000,00	95,49	1.036.915.570,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	543.594.400,00	519.084.000,00	95,49	1.036.915.570,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.197.200,00	21.800.000,00	93,98	66.800.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.197.200,00	21.800.000,00	93,98	66.800.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.358.048.158,00	3.350.360.742,00	99,77	2.711.107.612,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.358.048.158,00	3.350.360.742,00	99,77	2.711.107.612,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99	3.297.930.045,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99	3.297.930.045,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	67.514.826.767,00	**58.482.341.064,00**	**54.606.509.061,00**

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp67.514.826.767,00 dan terealisasi sebesar Rp58.482.341.064,00 atau 86,62%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.33.

Tabel 5.33.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**67.514.826.767,00**	**58.482.341.064,00**	**86,62**	**54.606.509.061,00**
1	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**37.795.610.599,00**	**29.190.729.474,00**	**77,23**	**37.896.199.205,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**37.795.610.599,00**	**29.190.729.474,00**	**77,23**	**37.896.199.205,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.950.304.299,00	24.587.431.367,00	74,62	25.378.214.156,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.257.708.151,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.737.371.000,00	2.609.715.830,00	95,34	4.540.570.299,00
	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	107.150.000,00	106.757.210,00	99,63	0,00
	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.000.000,00	138.998.640,00	99,28	0,00
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	179.570.250,00
	Belanja Modal Taman	1.860.785.300,00	1.747.826.427,00	93,93	6.540.136.349,00
	Belanja Modal Monumen	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00	92,01	0,00
	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00	92,01	0,00
	Belanja Modal Tugu	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00	92,01	0,00
2	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**1.118.546.200,00**	**1.113.784.631,00**	**99,57**	**14.366.663.509,00**
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**1.118.546.200,00**	**1.113.784.631,00**	**99,57**	**14.366.663.509,00**
	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.988.800.274,00
	Belanja Modal Pagar	1.118.546.200,00	1.113.784.631,00	99,57	1.377.863.235,00
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**8.688.029.968,00**	**9.855.992.659,00**	**113,44**	**2.343.646.347,00**
3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**8.688.029.968,00**	**9.855.992.659,00**	**113,44**	**2.343.646.347,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.688.029.968,00	9.855.992.659,00	113,44	2.343.646.347,00

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	41.070.566.518,00	**32.938.790.102,00**	**38.003.139.388,85**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebesar Rp41.070.566.518,00 dan terealisasi sebesar Rp32.938.790.102,00 atau 82,20%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.34.

Tabel 5.34.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**41.070.566.518,00**	**32.938.790.102,00**	**80,20**	**38.003.139.388,85**
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**25.028.429.018,00**	**20.998.676.648,00**	**83,90**	**19.459.625.594,85**
	Belanja Modal Jalan	**24.800.819.018,00**	**20.777.383.913,00**	**83,78**	**19.459.625.594,85**
	Belanja Modal Jalan Kota	11.642.387.778,00	10.028.420.773,00	86,14	11.813.079.389,85
	Belanja Modal Jalan Desa	11.750.509.000,00	9.565.034.149,00	81,40	7.467.320.010,00
	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.407.922.240,00	1.183.928.951,00	84,09	179.226.195,00
	Belanja Modal Jembatan	227.610.000,00	221.292.735,00	97,22	0,00
	Belanja Modal Jembatan Lainnya	227.610.000,00	221.292.735,00	97,22	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air	**7.539.081.000,00**	**6.983.687.958,00**	**92,63**	**10.159.380.879,00**
1	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**3.025.207.000,00**	**3.018.270.680,00**	**99,77**	**3.105.468.483,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.802.128.000,00	2.796.720.688,00	99,81	3.105.468.483,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	223.079.000,00	221.549.992,00	99,31	
2	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.761.175,00**
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	766.761.175,00
3	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**192.100.000,00**	**190.635.308,00**	**99,24**	**109.253.350,00**
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	192.100.000,00	190.635.308,00	99,24	109.253.350,00
4	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**4.321.774.000,00**	**3.774.781.970,00**	**87,34**	**6.177.897.871,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.234.103.000,00	1.234.102.298,00	100,00	6.177.897.871,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.087.671.000,00	2.540.679.672,00	82,28	0,00
	Belanja Modal Instalasi	**3.500.786.000,00**	**3.200.183.596,00**	**91,41**	**8.384.132.915,00**
1	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**1.169.772.000,00**	**930.454.596,00**	**79,54**	**5.285.218.460,00**
	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	1.169.772.000,00	930.454.596,00	79,54	5.285.218.460,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
2	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.200.000,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.200.000,00
3	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.500.000,00**
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
4	**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**2.176.000.000,00**	**2.117.400.000,00**	**97,31**	**2.637.172.800,00**
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.176.000.000,00	2.117.400.000,00	97,31	2.637.172.800,00
5	**Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik**	**155.014.000,00**	**152.329.000,00**	**98,27**	**223.041.655,00**
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	155.014.000,00	152.329.000,00	98,27	223.041.655,00

e) Belanja Modal Aset Tetap lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	407.448.975,00	**388.335.000,00**	**619.120.000,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp407.448.975,00 dan terealisasi sebesar Rp338.335.000,00 atau 95,31%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.35.

Tabel 5.35.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**407.448.975,00**	**388.335.000,00**	**95,31**	**619.120.000,00**
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	166.125.375,00	160.917.000,00	96,86	194.640.000,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	166.125.375,00	160.917.000,00	96,86	194.640.000,00
2	Belanja Modal Tanaman	9.323.600,00	0,00	0,00	197.580.000,00
	Belanja Modal Tanaman	9.323.600,00	0,00	0,00	197.580.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	230.000.000,00	225.418.000,00	98,01	149.850.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	230.000.000,00	225.418.000,00	98,01	149.850.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	77.050.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	77.050.000,00

f) Belanja Modal Aset lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 tidak dianggarkan atau Rp0,00.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	7.967.169.780,00	**1.722.869.500,00**	**4.960.583.992,00**

Anggaran Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.967.169.780,00 dan terealisasi sebesar Rp1.722.869.500,00 atau 21,62%, Belanja Tidak terduga pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.237.714.492,00 atau 187,93%. Penurunan realisasi Belanja Tidak terduga Pada

Tahun 2023 ini karena pandemic *covid-19* pada tahun 2023 sudah menurun, dengan rincian sebagaimana tabel 5.32.

Tabel 5.36.
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.967.169.780,00**	**1.722.869.500,00**	**21,62**	**4.960.583.992,00**
Belanja Tidak Terduga	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00	21,62	4.960.583.992,00

Penganggaran Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam,bencana non-alam, bendana social dan/ atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public. Tahun 2023 Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp1.722.869.500,00 digunakan untuk pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.37.

Tabel 5.37.
Rincian Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NAMA OPD	JUMLAH
1	BTT untuk Perbaikan Rumah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	263.263.700,00
2	BTT untuk Bantuan Bibit Ikan dan Perbaikan Tambak	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	156.000.000,00
3	BTT untuk HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN PEMAKAMAN DAN HONOR LEMBUR PNS PENANGANAN COVID 2019	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	19.120.000,00
4	BTT untuk Santunan Kematian	DINAS SOSIAL	837.000.000,00
5	BTT yang direalisasikan PPKD	BPKA PPKD	447.485.800,00
JUMLAH			**1.722.869.500,00**

Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2023 yang direalisasikan oleh BPKA selaku SKPKD sebesar Rp447.485.800,00 adalah pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan tahun 2021.

c. Transfer

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Transfer	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anggaran Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut.

d. Surplus/Defisit LRA

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
Surplus/ Defisit	**(161.115.981.687,00)**	**(69.083.729.154,22)**	**(27.617.674.329,39)**

Anggaran Surplus/Defisit Tahun 2023 adalah sebesar (Rp161.115.981.687,00) dan terealisasi sebesar Rp(69.083.729.154,22) atau 42,88%, dengan perhitungan sebagaimana terlampir pada tabel 5.38,

Tabel 5.38.
Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENDAPATAN DAERAH	992.795.607.786,00	941.695.238.574,70	94,85	911.656.871.775,11
BELANJA DAERAH	1.153.911.589.473,00	1.010.778.967.728,92	87,60	939.274.546.104,50
SURPLUS / (DEFISIT)	**(161.115.981.687,00)**	**(69.083.729.154,22)**	**42,88**	**(27.617.674.329,39)**

e. Pembiayaan

Pembiayaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	161.115.981.687,00	**257.171.724.533,47**	**198.789.265.178,70**

Anggaran Pembiayaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp161.115.981.687,00 dan terealisasi sebesar Rp257.171.724.533,47 atau 159,62%. Pembiayaan Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.382.459.354,77 atau 22,70%. Adapun rincian pembiayaan sebagaimana terlampir pada tabel 5.39,

Tabel 5.39.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**198.171.590.848,00**	**257.171.724.533,47**	**129,77**	**200.979.067.244,78**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00	171.171.590.849,31	100,00	200.976.067.244,78
Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00	86.000.133.684,16	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**37.055.609.161,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.802.066,08**
Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08
PEMBIAYAAN NETTO	**161.115.981.687,00**	**257.171.724.533,47**	**159,62**	**198.789.265.178,70**

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	198.171.590.848,00	**257.171.724.533,47**	**200.979.067.244,78**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2023 sebesar Rp257.171.724.533,47 dari yang ditetapkan sebesar Rp198.171.590.848,00 atau 129,77%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.40.

Tabel 5.40.
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**198.171.590.848,00**	**257.171.724.533,47**	**129,77**	**200.979.067.244,78**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.171.590.848,00	171.171.590.849,31	100,00	200.976.067.244,78
Pencairan Dana Cadangan	27.000.000.000,00	86.000.133.684,16		0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	3.000.000,00

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp171.171.590.849,31, Sedangkan untuk pencairan dana Cadangan terealisasi sebesar Rp86.000.133.684,16.

2) **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	37.055.609.161,00	**0,00**	**2.189.802.066,08**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp37.055.609.161,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagaimana tabel 5.41.

Tabel 5.41.
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**37.055.609.161,00**	**0,00**	**0,00**	**2.189.802.066,08**
Pembentukan Dana Cadangan	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08

f. Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
	0,00	**188.087.995.379,25**	**171.171.590.849,31**

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp188.087.995.379,25, dengan rincian perhitungan sebagaimana tabel 5.42.

Tabel 5.42.
Rincian Perhitungan SiLPA Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	992.795.607.786,00	941.695.238.574,70	94,85	911.656.871.775,11
2	BELANJA DAERAH	1.153.911.589.473,00	1.010.778.967.728,92	87,60	939.274.546.104,50
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(161.115.981.687,00)	(69.083.729.154,22)	42,88	(27.617.674.329,39)
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	198.171.590.848,00	257.171.724.533,47	129,77	200.979.067.244,78
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.055.609.161,00	0,00	0,00	2.189.802.066,08
6	PEMBIAYAAN NETTO	161.115.981.687,00	257.171.724.533,47	159,62	198.789.265.178,70
7	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	188.087.995.379,25	-	171.171.590.849,31

Tabel 5.43.
Rincian SiLPA Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO
1	Kas di Kasda	166.740.240.792,35
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00

NO	URAIAN	SALDO
4	Kas di BLUD	19.291.173.363,90
5	Kas di BOSP	403.951.773,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00
8	**SILPA**	**188.087.995.379,25**

Silpa tahun 2023 dapat diuraikan berdasarkan sumber dana dapat diketahui bahwa :

A. DAU yang ditentukan penggunaannya

(dalam rupiah)

Uraian	Pendapatan	Belanja	%	Sisa Dana
Bidang Pendidikan	43.759.556.000,00	41.455.049.100,00	94,73%	2.304.506.900,00
Bidang Kesehatan	26.984.969.000,00	21.613.519.098,00	80,09%	5.371.449.902,00
Bidang Pekerjaan Umum	7.300.000.000,00	6.645.647.700,00	91,04%	654.352.300,00
Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.800.000.000,00	5.067.458.177,00	74,52%	1.732.541.823,00
Dukungan Penggajian PPPK Daerah	18.023.628.000,00	6.394.871.942,00	35,48%	11.628.756.058,00

B. DAK Fisik

(dalam rupiah)

Uraian	Sisa DAK Fisik
s.d Tahun 2018	
Air Minum	1.001.033.200,00
Jalan	309.926.552,00
Kelautan dan Perikanan	17.743.000,00
Kesehatan	1.742.031.287,00
Pertanian	8.245.000,00
Perumahan dan Permukiman	135.010.900,00
Sanitasi	528.977.400,00
s.d Tahun 2019	
Air Minum	747.501.400,00
Jalan	47.530.500,00
Kelautan dan Perikanan	815.000,00
Kesehatan	1.125.111.435,00
Pendidikan	200.000,00
Perumahan dan Permukiman	323.500.800,00
Sanitasi	97.721.500,00
s.d Tahun 2020	
Kesehatan	5.088.101,00
Pendidikan	2.500,00
Perumahan dan Permukiman	910.734.000,00
Sanitasi	436.706.000,00
s.d Tahun 2021	
Jalan	70.568.500,00
Kesehatan	5.682.000,00
Sanitasi	21.764.000,00

Uraian	Sisa DAK Fisik
s.d Tahun 2022	
Air Minum	78.866.549,00
Jalan	28.015.863,00
Pariwisata	19.918.949,89
Pendidikan	36.000,00
Total	**7.662.730.436,89**

C. Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

Uraian Bantuan Keuangan	Nilai	Penggunaan	Sisa	Keterangan
Bidang Sarana Prasarana Tahun 2022	10.000.000.000,00	3.258.614.610,00	6.741.385.390,00	Telah diusulkan ke Pemprov dengan surat yang kedua kepada TAPD pada tanggal 22 Desember 2023 Nomor 900/3276/423.116/2023 perihal Permohonan Usulan Penggunaan Kembali Sisa Dana BK TA. 2022.
Bidang Pendidikan Tahun 2023	2.367.700.000,00	1.987.100.000,00	380.600.000,00	Akan disetor ke RKUD Prov. Jatim pada Tahun 2024

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu Tahun Anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Saldo Anggaran Lebih	**(Rp)**	**(Rp)**
	171.171.590.849,31	**200.976.067.244,78**

Nilai SAL awal sebesar Rp200.976.067.244,78 merupakan saldo Anggaran lebih akhir Tahun 2022. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Tahun 2023.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Penggunaan SAL	**(Rp)**	**(Rp)**
	171.171.590.849,31	**200.976.067.244,78**

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2022 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2023, yaitu sebesar Rp171.171.590.849,31.

c. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

SiLPA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	188.087.995.379,25	**171.171.590.849,31**

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp188.087.995.379,25, yang diuraikan sebagai berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Surplus / (Defisit)	(69.083.729.154,22)
2	Pembiayaan *Netto*	257.171.724.533,47
3	SiLPA Tahun berjalan	188.087.995.379,25

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	0,00	**0,00**

Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

e. Lain-lain

Lain-lain	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	(0,00)	**(0,00)**

Lain-lain Pada laporan LPSAL Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

f. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	188.087.995.379,25	**171.171.590.849,31**

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp188.087.995.379,25.

3. Neraca

Tahun 2023 secara umum posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.44.
Posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET	3.180.610.704.375,74	3.209.665.663.026,01
JUMLAH KEWAJIBAN	12.951.392.734,66	9.679.639.008,43
EKUITAS	3.167.659.311.641,08	3.199.986.024.017,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.180.610.704.375,74**	**3.209.665.663.026,01**

a. Aset

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.180.610.704.375,74	**3.209.665.663.026,01**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.180.610.704.375,74 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.45.
Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET LANCAR	256.271.330.230,75	249.617.775.676,37
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	74.152.809.846,22	76.786.048.812,72
JUMLAH ASET TETAP	2.803.384.359.733,44	2.762.964.129.719,76
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	86.000.133.684,16
JUMLAH ASET LAINNYA	46.802.204.565,33	34.297.575.133,00
JUMLAH ASET	**3.180.610.704.375,74**	**3.209.665.663.026,01**

(1) Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	256.271.330.230,75	249.617.775.676,37

Aset lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan. Dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain dan Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 sebesar Rp256.271.330.230,75 dengan rincian sebagaimana tabel 5.46.

Tabel 5.46.
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	19.291.173.363,90	27.631.060.593,47
Kas Dana BOSP	403.951.773,00	863.357.052,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00	996.027.962,00

URAIAN	2023	2022
Kas Lainnya	0,00	1.800.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	15.303.921.063,00	13.759.414.341,00
Piutang Retribusi Daerah	3.552.940.359,00	2.635.314.601,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.758.068.693,05	35.705.759.408,05
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.672.095.700,00	3.543.068.536,40
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	6.478.901.400,00
Piutang Lainnya	4.426.141.745,36	4.295.869.590,35
Penyisihan Piutang	(16.747.584.054,40)	(13.267.328.414,70)
Beban Dibayar Dimuka	85.661.300,14	78.775.506,85
Persediaan	26.132.090.045,35	25.215.856.108,11
JUMLAH ASET LANCAR	**256.271.330.230,75**	**249.617.775.676,37**

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	166.740.240.792,35	**141.679.898.891,84**

Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Pasuruan yang berupa rekening giro dan deposito. Rekening giro tersebut berada di Bank Jawa Timur Cabang Pasuruan. Akan tetapi dalam aktivitas operasional belanja Pemerintah Kota Pasuruan hanya melalui Bank Jawa Timur Cabang Pasuruan. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.740.240.792,35 dalam rekening giro sebesar Rp166.740.240.792,35 dengan rincian masing-masing sebagaimana tabel 5.47.

Tabel 5.47.
Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Giro/Bilyet	31-Des-23	31-Des-22
Kas di Kas Daerah			
Rekening Giro			
Giro Bank Jatim	231020322	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Giro Bank Jatim	231000377	0,00	0,00
TOTAL GIRO		**166.740.240.792,35**	**141.679.898.891,84**

Rekening giro di Bank Jatim, terdiri dari:

(a) Rekening giro di Bank Jatim Nomor 0231020322 merupakan Rekening Kas Umum Daerah yang dipergunakan menampung transaksi keuangan di Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan. Pada 31 Desember 2023 menunjukkan saldo sebesar Rp166.740.240.792,35.

(b) Rekening giro di Bank Jatim nomor 0231000377 merupakan rekening PAD yang dipergunakan menampung segala transaksi pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan/SKPD unit penghasil. Rekening ini

bersifat transitoris, dimana setiap hari dilakukan penutupan kas/pemindahbukuan ke rekening Kas Umum Daerah sehingga selalu bersaldo nihil. Namun sesuai surat Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 900/235/423.201/2023 dan surat keterangan penutupan Rekening Giro nomor 0231000377 pada tanggal 28 Februari 2023 dari PT Bank Jatim Cabang Pasuruan Nomor 062/231/Psr/SA/Srt. Penutupan rekening dikarenakan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah hanya pada satu rekening yaitu Rekening giro di Bank Jatim Nomor 0231020322 merupakan Rekening Kas Umum Daerah.

a) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan posisi saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 saldo sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.

c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	19.291.173.363,90	**27.631.060.593,47**

Kas di BLUD merupakan tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran BLUD Pemerintah Kota Pasuruan. Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.291.173.363,90 terdiri dari BLUD RSUD Dr. Soedarsono dengan rincian sebagaimana tabel 5.48.

Tabel 5.48.
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Rekening/Tunai	31-Des-23	31-Des-22
	Kas BLUD Dr. R. Soedarsono			
1	Rek Kas Umum BLUD RSUD	0231026894	19.260.377.916,57	27.606.544.821,22
2	Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	231911103	0,00	0,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran BLUD	Tunai	0,00	0,00
4	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	Tunai	26.436.663,00	23.084.780,00
5	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	BCA 894000011	3.760.284,33	877.242,25
6	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	BRI 006501002795304	598.500,00	553.750,00
	Jumlah Kas BLUD		**19.291.173.363,90**	**27.631.060.593,47**

Saldo Kas umum BLUD RSUD dr. R. Soedarsono per 31 Desember 2023 Rp19.291.173.363,90 yang terdiri dari Saldo Kas umum BLUD RSUD dr. R. Soedarsono pada BPD JATIM dengan nomor rekening 0231026894 sebesar Rp19.260.377.916,57 , Saldo Kas tunai yang berada di Bendahara Penerimaan BLUD atas pendapatan tunai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp26.436.663,00 dan Saldo BLUD RSUD dr. R. Soedarsono pada BCA dengan nomor rekening 894000011 per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.760.284,33, serta Kas di Bendahara Penerimaan di BRI dengan Nomor Rekening 006501002795304 sebesar Rp598.500,00.

d) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	673.472.477,00	**996.027.962,00**

Posisi Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kota Pasuruan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp673.472.477,00. Adapun rincian Kas di Bendahara JKN adalah sebagaimana tabel 5.49.

Tabel 5.49.
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	JKN Puskesmas Karangketug	80.208.047,00	97.814.298,00
2	JKN Puskesmas Gadingrejo	50.342.619,00	206.557.258,00
3	JKN Puskesmas Kandangsapi	113.622.180,00	136.607.058,00
4	JKN Puskesmas Kebonagung	60.122.307,00	71.420.698,00
5	JKN Puskesmas Kebonsari	84.869.925,00	73.146.504,00
6	JKN Puskesmas Bugul Kidul	3.267.490,00	93.657.045,00
7	JKN Puskesmas Trajeng	162.735.289,00	193.339.290,00
8	JKN Puskesmas Sekargadung	118.304.620,00	123.485.811,00
	Jumlah	**673.472.477,00**	**996.027.962,00**

Tabel 5.50.
Mutasi Kas Dana KapitasPer 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	97.814.298,00	1.290.945.491,00	1.308.551.742,00	80.208.047,00
2	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	206.557.258,00	1.249.313.638,00	1.405.528.277,00	50.342.619,00
3	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	136.607.058,00	1.274.685.350,00	1.297.670.228,00	113.622.180,00
4	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	71.420.698,00	1.373.973.560,00	1.385.271.951,00	60.122.307,00
5	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	73.146.504,00	1.169.640.650,00	1.157.917.229,00	84.869.925,00
6	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	93.657.045,00	1.399.772.617,00	1.490.162.172,00	3.267.490,00
7	UPT PUSKESMAS TRAJENG	193.339.290,00	1.162.656.563,00	1.193.260.564,00	162.735.289,00
8	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	123.485.811,00	1.136.315.843,00	1.141.497.034,00	118.304.620,00
	JUMLAH	**996.027.962,00**	**10.057.303.712,00**	**10.379.859.197,00**	**673.472.477,00**

e) **Kas Dana BOSP**

Kas Dana BOSP	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	403.951.773,00	**863.357.052,00**

Saldo Kas Dana BOSP pada Neraca sebesar Rp403.951.773,00 adalah saldo kas pada rekening bendahara dana BOS Pada 57 sekolah di Kota Pasuruan sebesar Rp399.603.047,00 dan sisa kas pada rekening bendahara BOP Paud TK Negeri Pembina I sebesar Rp4.348.726,00 . Tahun 2023 saldo kas di Bendahara BOS dan sisa kas bendahara BOP Paud diakui Pada Kas Dana BOSP Pada Neraca. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara BOSP tahun 2023 sebagaimana tabel 5.51.

Tabel 5.51.
Saldo Kas di Bendahara BOSP 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal 2023	863.357.052,00
2	Pendapatan Dana BOS	19.084.369.214,00
3	Belanja Dana BOS	19.548.123.219,00
4	Jasa Giro BOS	0,00
5	**Saldo Akhir Tahun 2023**	**399.603.047,00**

Adapun rincian saldo rekening untuk masing-masing sekolah terdapat Pada **Lampiran 13.**

Tabel 5.52.
Mutasi Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 31-Des-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Des-23
Saldo Awal	**114.077.606,00**	**863.357.052,00**	**114.077.606,00**	**863.357.052,00**
Pendapatan Dana BOS (LRA)				
a. Pendapatan BOS	19.838.722.394,00	19.084.369.214,00	19.838.722.394,00	19.084.369.214,00
b. Bunga Tabungan	-	-	-	-
c. Utang PFK Tahun	-	-	-	-
Belanja Dana BOS (LRA)				
a. Belanja BOS	- 19.089.442.948,00	- 19.548.123.219,00	- 19.089.442.948,00	- 19.548.123.219,00
b. Setor Jasa Giro	-	-	-	-
c. Biaya Adm Bank	-	-	-	-
Jumlah	**863.357.052,00**	**399.603.047,00**	**863.357.052,00**	**399.603.047,00**

Adapun rincian saldo masing – masing sekolah sebagaimana dalam **Lampiran 14.**

f) **Kas Dana BOK Puskesmas**

Kas Dana BOK Puskemas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	979.156.973,00	**1.800.100,00**

Saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang ada pada Puskesmas tahun 2023 sebesar 979.156.973,00, yaitu sisa kas dari Rekening Bank pada 8 Puskemas di Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun rincian sisa Dana BOK Puskesmas sebagaimana tabel 5.53 berikut ini,

Tabel 5.53.
Saldo Dana BOK pada Puskesmas
per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	BOK Puskesmas Karangketug	147.836.889,00	0,00
2	BOK Puskesmas Gadingrejo	145.142.690,00	0,00
3	BOK Puskesmas Kandangsapi	68.510.304,00	0,00
4	BOK Puskesmas Kebonagung	229.275.979,00	0,00
5	BOK Puskesmas Kebonsari	64.217.476,00	0,00
6	BOK Puskesmas Bugul Kidul	75.200.803,00	0,00
7	BOK Puskesmas Trajeng	126.156.372,00	0,00
8	BOK Puskesmas Sekargadung	122.816.460,00	0,00
	Jumlah	**979.156.973,00**	**0,00**

Tabel 5.54.
Mutasi Dana BOK pada Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
1	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	0,00	638.938.000,00	491.101.111,00	147.836.889,00
2	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	0,00	759.887.000,00	614.744.310,00	145.142.690,00
3	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	0,00	805.825.000,00	737.314.696,00	68.510.304,00
4	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	0,00	655.255.000,00	425.979.021,00	229.275.979,00
5	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	0,00	608.108.000,00	543.890.524,00	64.217.476,00
6	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	0,00	874.069.000,00	798.868.197,00	75.200.803,00
7	UPT PUSKESMAS TRAJENG	0,00	717.978.000,00	591.821.628,00	126.156.372,00
8	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	0,00	800.836.000,00	678.019.540,00	122.816.460,00
	JUMLAH	**0,00**	**5.860.896.000,00**	**4.881.739.027,00**	**979.156.973,00**

g) Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	**1.800.100,00**

Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 Pada Neraca sebesar Rp0,00..

h) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	15.303.921.063,00	**13.759.414.341,00**

Pada akhir Tahun 2023 terdapat piutang Pajak Daerah yang diakibatkan oleh tunggakan pajak bumi dan bangunan, PPJU, pajak parkir, pajak warung, pajak rumah makan, pajak rumah kost dan pajak air tanah. Adapun rincian piutang pajak sebagaimana tabel 5.55.

Tabel 5.55.
Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
1			**Piutang Pajak Daerah**	**13.759.414.341,00**	**3.821.436.088,00**	**2.276.929.366,00**	**15.303.921.063,00**
	a		**Badan Pendapatan Daerah**	**13.759.414.341,00**	**3.821.436.088,00**	**2.276.929.366,00**	**15.303.921.063,00**
		1)	**Piutang PBB**	**12.156.183.145,00**	**2.167.989.210,00**	**808.591.922,00**	**13.515.580.433,00**
			PBB Tahun 2011	877.116.018,00	0,00	16.690.139,00	860.425.879,00
			PBB Tahun 2012	1.191.936.891,00	0,00	33.836.887,00	1.158.100.004,00
			PBB Tahun 2013	680.857.744,00	0,00	22.423.906,00	658.433.838,00
			PBB Tahun 2014	649.269.762,00	0,00	29.268.744,00	620.001.018,00
			PBB Tahun 2015	791.291.806,00	0,00	30.340.508,00	760.951.298,00
			PBB Tahun 2016	843.908.354,00	0,00	34.215.294,00	809.693.060,00
			PBB Tahun 2017	868.332.477,00	0,00	35.337.286,00	832.995.191,00
			PBB Tahun 2018	1.024.342.428,00	0,00	52.410.418,00	971.932.010,00
			PBB Tahun 2019	1.120.959.057,00	0,00	65.411.949,00	1.055.547.108,00
			PBB Tahun 2020	1.370.118.174,00	0,00	107.580.695,00	1.262.537.479,00
			PBB Tahun 2021	1.308.527.311,00	0,00	134.709.777,00	1.173.817.534,00
			PBB Tahun 2022	1.429.523.123,00	0,00	246.366.319,00	1.183.156.804,00
			PBB Tahun 2023	0,00	2.167.989.210,00	0,00	2.167.989.210,00
		2)	**Pajak Penerangan Jalan**	**1.460.367.399,00**	**1.612.081.552,00**	**1.460.367.399,00**	**1.612.081.552,00**
			Pajak Penerangan Jalan 2022	1.460.367.399,00	0,00	1.460.367.399,00	0,00
			Pajak Penerangan Jalan 2023	0,00	1.612.081.552,00	0,00	1.612.081.552,00
		3)	**Pajak Parkir**	**14.843.175,00**	**1.936.200,00**	**962.075,00**	**15.817.300,00**
			Pajak Parkir 2017	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
			Pajak Parkir 2018	1.515.600,00	0,00	0,00	1.515.600,00
			Pajak Parkir 2019	3.186.500,00	0,00	236.000,00	2.950.500,00
			Pajak Parkir 2020	3.829.775,00	0,00	196.875,00	3.632.900,00
			Pajak Parkir 2021	2.038.200,00	0,00	69.000,00	1.969.200,00
			Pajak Parkir 2022	3.713.100,00	0,00	460.200,00	3.252.900,00
			Pajak Parkir 2023	0,00	1.936.200,00	0,00	1.936.200,00
		4)	**Pajak Warung (Restoran)**	**35.026.085,00**	**4.239.425,00**	**1.945.700,00**	**37.319.810,00**
			Pajak Warung (Restoran) 2017	2.448.590,00	0,00	0,00	2.448.590,00
			Pajak Warung (Restoran) 2018	4.680.685,00	0,00	0,00	4.680.685,00
			Pajak Warung (Restoran) 2019	3.372.575,00	0,00	0,00	3.372.575,00
			Pajak Warung (Restoran) 2020	8.768.510,00	0,00	0,00	8.768.510,00
			Pajak Warung (Restoran) 2021	7.213.000,00	0,00	200.000,00	7.013.000,00
			Pajak Warung (Restoran) 2022	8.542.725,00	0,00	1.745.700,00	6.797.025,00
			Pajak Warung (Restoran) 2023	0,00	4.239.425,00	0,00	4.239.425,00
		5)	**Piutang Pajak Restoran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Piutang Pajak Restoran (Catering 10%) 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			Piutang Pajak Restoran (Catering 5%) 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		6)	**Pajak Rumah Makan**	**51.282.959,00**	**31.897.090,00**	**3.316.855,00**	**79.863.194,00**
			Pajak Rumah Makan 2017	3.752.950,00	0,00	0,00	3.752.950,00
			Pajak Rumah Makan 2018	11.360.100,00	0,00	0,00	11.360.100,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
			Pajak Rumah Makan 2019	6.585.850,00	0,00	0,00	6.585.850,00
			Pajak Rumah Makan 2020	18.253.899,00	0,00	0,00	18.253.899,00
			Pajak Rumah Makan 2021	5.287.850,00	0,00	60.000,00	5.227.850,00
			Pajak Rumah Makan 2022	6.042.310,00	0,00	3.256.855,00	2.785.455,00
			Pajak Rumah Makan 2023	0,00	31.897.090,00	0,00	31.897.090,00
		7)	**Pajak Rumah Kost**	**16.123.750,00**	**640.000,00**	**209.000,00**	**16.554.750,00**
			Pajak Rumah Kost 2017	73.250,00	0,00	0,00	73.250,00
			Pajak Rumah Kost 2018	1.879.250,00	0,00	0,00	1.879.250,00
			Pajak Rumah Kost 2019	3.649.250,00	0,00	0,00	3.649.250,00
			Pajak Rumah Kost 2020	3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00
			Pajak Rumah Kost 2021	3.571.500,00	0,00	0,00	3.571.500,00
			Pajak Rumah Kost 2022	3.726.500,00	0,00	209.000,00	3.517.500,00
			Pajak Rumah Kost 2023	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
		8)	**Pajak Hotel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Pajak Hotel 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hotel 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		9)	**Pajak Hiburan**	**9.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.075.000,00**
			Pajak Hiburan 2020	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00
			Pajak Hiburan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hiburan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pajak Hiburan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		10)	**Piutang Pajak Air Tanah**	**16.512.828,00**	**2.652.611,00**	**1.536.415,00**	**17.629.024,00**
			Pajak Air Tanah 2013	541.051,00	0,00	0,00	541.051,00
			Pajak Air Tanah 2014	1.985.387,00	0,00	0,00	1.985.387,00
			Pajak Air Tanah 2015	3.911.634,00	0,00	0,00	3.911.634,00
			Pajak Air Tanah 2016	2.309.829,00	0,00	0,00	2.309.829,00
			Pajak Air Tanah 2017	474.333,00	0,00	0,00	474.333,00
			Pajak Air Tanah 2018	864.285,00	0,00	0,00	864.285,00
			Pajak Air Tanah 2019	427.028,00	0,00	0,00	427.028,00
			Pajak Air Tanah 2020	803.978,00	0,00	0,00	803.978,00
			Pajak Air Tanah 2021	1.557.779,00	0,00	0,00	1.557.779,00
			Pajak Air Tanah 2022	3.637.524,00	0,00	1.536.415,00	2.101.109,00
			Pajak Air Tanah 2023	0,00	2.652.611,00	0,00	2.652.611,00

Penambahan piutang pajak selama Tahun 2023 sebesar Rp3.821.436.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.167.989.210,00;
(2) Penambahan dari Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember yang belum dibayarkan di Tahun 2023 sebesar Rp1.612.081.552,00;
(3) Penambahan dari piutang pajak parkir Tahun 2023 sebesar Rp1.936.200,00;
(4) Penambahan dari piutang pajak warung Tahun 2023 sebesar Rp4.239.425,00;

(5) Penambahan dari piutang pajak rumah makan Tahun 2023 sebesar Rp31.897.090,00;
(6) Penambahan dari piutang pajak rumah kos Tahun 2023 sebesar Rp640.000,00;
(7) Penambahan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp2.652.611,00;

Pengurangan Piutang pajak selama Tahun 2022 sebesar Rp2.373.622.243,00 dengan rincian sebagai berikut:
(1) Pembayaran atas Piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2011-2022 sesuai data dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp808.591.922,00;
(2) Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember yang belum dibayarkan di Tahun 2023 sebesar Rp1.460.367.399,00;
(3) Pembayaran atas Piutang Pajak Parkir sebesar Rp962.075,00;
(4) Pembayaran atas Piutang Pajak Warung sebesar Rp1.945.700,00;
(5) Pembayaran atas Piutang Pajak Rumah Makan sebesar Rp3.316.855,00;
(6) Pembayaran atas Piutang Pajak rumah kos sebesar Rp209.000,00;
(7) Pembayaran atas Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp1.536.415,00.

i) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.552.940.359,00	**2.635.314.601,00**

Mutasi Piutang Retribusi TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.56.
Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
2			**Piutang Retribusi**	**2.635.314.601,00**	**1.115.494.945,00**	193.641.187,00	**3.552.940.359,00**
	a		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.547.174.166,00**	**1.058.869.945,00**	**146.031.187,00**	**2.460.012.924,00**
		1)	Retribusi Pelayanan Pasar Trajeng	15.942.000,00	0,00	0,00	15.942.000,00
		2)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2018	352.307.617,00	0,00	19.914.950,00	332.392.667,00
		3)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2019	204.926.328,00	0,00	14.594.550,00	190.331.778,00
		4)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2020	138.766.496,00	0,00	10.250.591,00	128.515.905,00
		5)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2021	413.043.513,00	0,00	38.089.968,00	374.953.545,00
		6)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2022	422.188.212,00	0,00	63.181.128,00	359.007.084,00
		7)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2023	0,00	1.058.869.945,00	0,00	1.058.869.945,00
	b		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**2.930.000,00**	**12.300.000,00**	**2.930.000,00**	**12.300.000,00**
		1)	Rusunawa Tambaan 2022	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00
		2)	Rusunawa Tambaan 2023	0,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
	c		**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**	**1.040.530.435,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.302.435,00**
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2004-2013	819.380.435,00	0,00	4.228.000,00	815.152.435,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Kepel 2017	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
		3)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2018 593,1/33/423,01/2020	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
		4)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2019 593,1/34/423,01/2020	51.800.000,00	0,00	0,00	51.800.000,00
		5)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2020 593,1/35/423,01/2020	61.550.000,00	0,00	0,00	61.550.000,00
	d		**Dinas Kesehatan**	**44.680.000,00**	**33.525.000,00**	**44.680.000,00**	**33.525.000,00**
		1)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2022	44.680.000,00	0,00	44.680.000,00	0,00
		2)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2023	0,00	33.525.000,00	0,00	**33.525.000,00**
	e		**Dinas Perhubungan**	**0,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**10.800.000,00**
		1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Parkir Wisata)	0,00	10.800.000,00	0,00	**10.800.000,00**

Pada Tahun 2023 saldo piutang retribusi sebesar Rp3.552.940.359,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Mutasi penambahan piutang retribusi sebesar Rp1.115.494.945,00 merupakan piutang dari SKPD yang terdiri atas,
   a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas tunggakan atas pendapatan retribusi pelayanan sewa pasar Tahun 2023 sebesar Rp1.058.869.945,00;
   b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas sewa Rusunawa tambaan tahun 2023 sebesar Rp12.300.000,00;
   c) Dinas Kesehatan atas klaim dana non kapitasi tahun 2023 sebesar Rp33.525.000,00;
   d) Dinas Perhubungan atas Piutang sewa Kios Parkir Wisata tahun 2023 sebesar Rp10.800.000,00.

(2) Mutasi pengurangan piutang retribusi sebesar Rp193.641.187,00 merupakan piutang dari SKPD yang terdiri atas :
   a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas pembayaran tunggakan atas pendapatan retribusi sewa pasar tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar Rp146.031.187,00;
   b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas pembayaran tunggakan sewa rusunawa tahun 2022 sebesar Rp2.930.000,00;
   c) Dinas Kesehatan atas pembayaran klaim dana non kapitasi tahun 2022 sebesar Rp44.680.000,00;
   d) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas pembayaran piutang tanah eks bengkok sebesar Rp4.228.000,00.

j) Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	29.758.068.693,05	**35.705.759.408,05**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp29.758.068.693,05, yang mana piutang ini

adalah tunggakan pembayaran pendapatan atas lain-lain PAD yang sah pada beberapa OPD. Berikut rincian piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2023 :

Tabel 5.57.
Mutasi Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
3			**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**35.705.759.408,05**	**7.705.540.739,00**	**13.676.098.251,00**	**29.758.068.693,05**
	a		**RSUD Dr. Soedarsono**	**35.100.761.931,00**	**7.684.720.739,00**	**13.330.160.251,00**	**29.455.322.419,00**
		1)	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau bagian lancar piutang kemitraan	0,00	0,00	0,00	0,00
		2)	Jasa Marga 2020	49.955.600,00	0,00	0,00	49.955.600,00
		3)	Jasa Marga 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		4)	BPJS 2020	179.377.321,00	0,00	0,00	179.377.321,00
		5)	BPJS 2021	79.384.500,00	0,00	66.518.500,00	12.866.000,00
		6)	BPJS 2022	7.578.181.842,00	0,00	4.849.472.742,00	2.728.709.100,00
		7)	BPJS 2023	0,00	4.914.470.061,00	0,00	4.914.470.061,00
		8)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2020	136.451,00	0,00	0,00	136.451,00
		9)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	0,00	1.480.257,00	0,00	1.480.257,00
		10)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	0,00	4.180.042,00	0,00	4.180.042,00
		11)	PT. TELKOM 2022	1.618.245,00		1.618.245,00	-
		12)	PT. TELKOM 2023	0,00	1.995.565,00	0,00	1.995.565,00
		13)	PT. JASA RAHARJA 2020	683.978,00	0,00	0,00	683.978,00
		14)	PT. JASA RAHARJA 2021	16.575.708,00	0,00	2.173.272,00	14.402.436,00
		15)	PT. JASA RAHARJA 2022	439.594.497,00	0,00	439.187.757,00	406.740,00
		16)	PT. JASA RAHARJA 2023	0,00	139.557.006,00	0,00	139.557.006,00
		17)	PT. MANDIRI INHEALTH 2021	260.000,00	0,00	260.000,00	-
		18)	PT. MANDIRI INHEALTH 2023	0,00	2.590.803,00	0,00	2.590.803,00
		19)	BPJSTK 2021	1.040.516,00	0,00	0,00	1.040.516,00
		20)	BPJSTK 2022	12.925.850,00	0,00	0,00	12.925.850,00
		21)	BPJSTK 2023	0,00	465.521.246,00	0,00	465.521.246,00
		22)	Piutang Pasien Umum 2019	24.676.640,00	0,00	0,00	24.676.640,00
		23)	Piutang Pasien Umum 2020	22.084.427,00	0,00	0,00	22.084.427,00
		24)	Piutang Pasien Umum 2021	26.938.967,00	0,00	0,00	26.938.967,00
		25)	Piutang Pasien Umum 2022	26.805.323,00	0,00	6.000.000,00	20.805.323,00
		26)	Piutang Pasien Umum 2023	0,00	35.052.403,00	0,00	35.052.403,00
		27)	PT Avrist Assurance 2020	1.705.131,00	0,00	0,00	1.705.131,00
		28)	PT Taspen 2022	1.168.246,00	0,00	1.168.246,00	-
		29)	PT Taspen 2023	0,00	468.183,00	0,00	468.183,00
		30)	Covid Kemenkes 2021	18.853.607.600,00	0,00	0,00	18.853.607.600,00
		31)	Covid Kemenkes 2022	7.575.489.900,00	1.089.898.200,00	7.176.864.600,00	1.488.523.500,00
		32)	Covid Kemenkes 2023	0,00	765.372.700,00	636.095.700,00	129.277.000,00
		33)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2022	37.852.673,00	0,00	37.852.673,00	-
		34)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2023	0,00	84.895.358,00	0,00	84.895.358,00
		35)	Piutang Lahan Kantin 2021	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		36)	Piutang Lahan Kantin 2022	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		37)	Piutang Lahan Kantin 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		38)	PT ASURANSI RAMAYANA 2022	7.519.221,00	0,00	7.519.221,00	0,00
		39)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2022	5.429.295,00	0,00	5.429.295,00	0,00
		40)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2023	0,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
		41)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2022	123.750.000,00	20.500.000,00	100.000.000,00	44.250.000,00
		42)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2023	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
		43)	PT. Cheil Jedang 2023	0,00	7.768.340,00	0,00	7.768.340,00
		44)	yayasan kita bisa 2023	0,00	12.910.575,00	0,00	12.910.575,00
	b		**BPKA (SPKD)**	**376.590.577,05**	**20.820.000,00**	**345.938.000,00**	**51.472.577,05**
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan				
		1)	Piutang Bali Towerindo 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
		2)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2021	2.910.937,50	0,00	0,00	2.910.937,50
		3)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2022	2.910.937,50	0,00	0,00	2.910.937,50
		4)	Piutang Tower Bersama 2022	13.119.452,05	0,00	0,00	13.119.452,05
		5)	Piutang Tower Bersama 2022	0,00	13.012.500,00	0,00	13.012.500,00
		6)	Piutang Tower Bersama - Denda 2021	3.903.750,00	0,00	0,00	3.903.750,00
		7)	Piutang Tower Bersama - Denda 2022	7.807.500,00	0,00	0,00	7.807.500,00
		8)	Piutang Tower Bersama - Denda 2023	0,00	7.807.500,00	0,00	7.807.500,00
		9)	Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan	345.938.000,00	0,00	345.938.000,00	0,00
			perdagangan dan jasa jalan Soekarno Hatta (Rest Area)				
	c		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**228.406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**228.406.900,00**
			Piutang Pemberian Pinjaman dan atau bagian lancar pemberian pinjaman	**228.406.900,00**	**0,00**	**0,00**	**228.406.900,00**
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2014	102.540.400,00	0,00	0,00	102.540.400,00
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2015	125.866.500,00	0,00	0,00	125.866.500,00
	d		**Piutang TPP 2023**	**0,00**	**22.866.797,00**	**0,00**	**22.866.797,00**
		1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
		2)	Dinas Kesehatan	0,00	4.047.900,00	0,00	4.047.900,00
		3)	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	446.100,00	0,00	446.100,00
		4)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	-
		5)	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.200.600,00	0,00	2.200.600,00
		6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.039.400,00	0,00	1.039.400,00
		7)	Dinas Sosial	0,00	171.800,00	0,00	171.800,00
		8)	Dinas tenaga kerja	0,00	285.121,00	0,00	285.121,00
		9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
		10)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	351.200,00	0,00	351.200,00
		11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
		12)	Dinas Perhubungan	0,00	2.138.800,00	0,00	2.138.800,00
		13)	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00
		14)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	242.900,00	0,00	242.900,00
		15)	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	518.100,00	0,00	518.100,00
		16)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	435.941,00	0,00	435.941,00
		17)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.663.500,00	0,00	1.663.500,00
		18)	Dinas Perikanan	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
		19)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.806.800,00	0,00	1.806.800,00
		20)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	472.800,00	0,00	472.800,00
		21)	Sekretariat Daerah	0,00	882.100,00	0,00	882.100,00
		22)	Inspektorat	0,00	659.000,00	0,00	659.000,00
		23)	Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	928.100,00	0,00	928.100,00
		24)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00	198.814,00	0,00	198.814,00
		25)	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		26)	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	473.984,00	0,00	473.984,00
		27)	Sekretariat DPRD	0,00	214.923,00	0,00	214.923,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
		28)	Kecamatan Gadingrejo	0,00	891.500,00	0,00	891.500,00
		29)	Kecamatan Panggungrejo	0,00	831.226,00	0,00	831.226,00
		30)	Kecamatan Bugul Kidul	0,00	0,00	0,00	0,00
		31)	Kecamatan purworejo	0,00	506.900,00	0,00	506.900,00
		32)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	87.688,00	0,00	87.688,00

Pada Tahun 2023 saldo piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp29.758.068.693,05 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi penambahan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.705.540.739,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Penambahan piutang lain-lain PAD yang sah adalah dari piutang pembayaran pihak ketiga yang bekerjasama dengan RSUD Dr R Soedarsono tahun 2023 sebesar Rp7.684.720.739,00;
   b) Penambahan piutang atas kemitraan dan bagian lancar kemitraan BPKA sebesar Rp20.820.000,00;
   c) Penambahan piutang TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun 2023 sebesar Rp22.866.797,00.
2. Mutasi pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp13.676.098.251,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah pada RSUD Dr. R Soedarsono tahun 2023 sebesar Rp13.330.160.251,00;
   b) Pengurangan piutang lain-lain PAD yang sah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2023 sebesar Rp345.938.000,00.

k) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.672.095.700,00	**3.543.068.536,40**

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp5.672.095.700,00, yang mana piutang ini adalah transfer dana pusat atau dana perimbangan yang belum ditransfer kepada daerah Kota Pasuruan sampai dengan akhir tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan. Berikut rincian piutang transfer pemerintah pusat tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 5.58,

Tabel 5.58.
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
4			**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**3.543.068.536,40**	**2.131.703.000,00**	**2.675.836,40**	**5.672.095.700,00**
	a		**BPKA (PPKD)**	**3.543.068.536,40**	**2.131.703.000,00**	**2.675.836,40**	**5.672.095.700,00**
		1)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No. 25/PMK.07/2021	2.556.438.415,00	0,00	0,00	2.556.438.415,00
		2)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK	0,00	0,00	0,00	0,00

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
			No 129/PMK.07/2021				
			-DBH Kehutanan PSDH TA. 2019	8.245.516,00	0,00	0,00	8.245.516,00
			-DBH Kehutanan PPH pasal 21 TA. 2020	975.708.769,00	0,00	0,00	975.708.769,00
		3)	Piutang remunerasi Treasury Deposite Facilities (TDF) 2022	2.675.836,40	0,00	2.675.836,40	0,00
		4)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai denganPMK 159 Tahun 2023 tentang DBHCHT	0,00	2.131.703.000,00	0,00	2.131.703.000,00

Pengurangan piutang transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.675.836,40 adalah sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1.14.1/7481/Keuda Nomor : 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitasi *Treasury Deposite Facilities (TDF)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Pasuruan mendapat alokasi penyaluran nontunai berupa *Treasury Deposite Facilities (TDF)* remunerasi bulan desember tahun 2022 sebesar Rp2.675.836,40.

Penambahan piutang transfer pusat sebesar Rp2.131.703.000,00 adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

l) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	**6.478.901.400,00**

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,00.

Tabel 5.59.
Mutasi Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
5			**Piutang Transfer Antar Daerah**	**6.478.901.400,00**	**0,00**	**6.478.901.400,00**	**0,00**
	a		**BPKA (PPKD)**	**6.478.901.400,00**	**0,00**	6.478.901.400,00	**0,00**
		1)	Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA.2021	6.478.901.400,00	0,00	6.478.901.400,00	0,00
			sesuai SK Gubernur Nomor : 188/987/KPTS/013/2022	0,00	0,00	0,00	0,00

m) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.426.141.745,36	**4.295.869.590,35**

Rincian Mutasi Piutang Lainnya pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 5.60 berikut.

Tabel 5.60.
Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No			Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
				31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
6			**Piutang Lainnya**	**4.295.869.590,35**	**130.272.155,01**	**0,00**	**4.426.141.745,36**
	a		**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**592.811.952,35**	**0,00**	**0,00**	**592.811.952,35**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Piutang Pengamanan Produksi Padi Tahun 2001	275.461.730,00	0,00	0,00	275.461.730,00
		2)	Piutang Penguatan Modal Tahun 2002	8.078.450,00	0,00	0,00	8.078.450,00
		3)	Kredit Alat Pengolahan Hasil 2002	4.333.000,00	0,00	0,00	4.333.000,00
		4)	Piutang Kemitraan Pupuk Tahun 2003	6.930.748,00	0,00	0,00	6.930.748,00
		5)	Piutang Kemitraan Jamur Merang Tahun 2005	34.563.300,00	0,00	0,00	34.563.300,00
		6)	Piutang Kemitraan Kulit Tahun 2001	122.045.025,00	0,00	0,00	122.045.025,00
		7)	Piutang Kendaraan Roda Tiga Tahun 2003	23.510.000,00	0,00	0,00	23.510.000,00
		8)	Piutang kredit Pengolahan Hasil Tahun 2002	23.818.462,00	0,00	0,00	23.818.462,00
		9)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Pohjentrek pada tujuh OPD Th. 2017	35.835.201,77	0,00	0,00	35.835.201,77
		10)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	30.524.909,70	0,00	0,00	30.524.909,70
		11)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	27.711.125,88	0,00	0,00	27.711.125,88
	b		**Dinas Koperasi dan UKM**	**2.293.387.357,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293.387.357,00**
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Koperasi & PKM)	2.293.387.357,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00
	c		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**1.042.158.715,00**	**0,00**	**0,00**	1.042.158.715,00
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.042.158.715,00	0,00	0,00	1.042.158.715,00
	d		**Sekretariat Daerah**	**285.410.351,00**	**0,00**	**0,00**	285.410.351,00
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Piutang Fasos/Fasum Bagian Perekonomian	285.410.351,00	0,00	0,00	285.410.351,00
	e		**Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang**	**82.101.215,00**	**130.272.155,01**	0,00	212.373.370,01
			Piutang Lain-Lain				
		1)	Kurvol pekerjaan peningkatan jalan patimura 2018	82.101.215,00	0,00	0,00	82.101.215,00
		2)	Kelebihan Bayar atas Pembangunan	0,00	125.913.770,01	0,00	125.913.770,01
			Gedung Depo Arsip (Lanjutan) 2023				
		3)	Kelebihan Bayar atas Pengawasan Teknis	0,00	4.358.385,00	0,00	4.358.385,00
			Pembangunan Gedung Depo Arsip (Lanjutan) 2023				

Piutang lainnya Pada Tahun 2023 sebesar Rp4.426.141.745,36 merupakan penambahan dan pengurangan dari piutang lain-lain, yang berasal

dari mutasi penambahan Piutang Lainnya sebesar Rp130.272.155,01 merupakan penambahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kelebihan pembayaran gedung depo arsip (lanjutan) tahun 2023 dan kelebihan bayar atas pengawasan teknis pembangunan gedung depo arsip (lanjutan) tahun 2023 sebesar Rp4.358.385,00.

n) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(16.747.584.054,40)	**(13.267.328.414,70)**

Perhitungan penyisihan piutang Kota Pasuruan didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan perhitungan persentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagaimana tabel 5.61

Tabel 5.61.
Kebijakan Perhitungan Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100%
2	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	0 %	20 %	40 %	70%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60%	100%

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh saldo penyisihan piutang Tahun 2023 sebesar (Rp16.747.584.054,40). Adapun rincian penyisihan piutang per jenis piutang terlampir pada tabel 5.62.

Tabel 5.62.
Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian Rincian Piutang	Penyisihan Piutang
		31-Des-23
I	**Piutang Pajak**	7.923.141.959,70
1	Dinas Pendapatan Daerah	7.923.141.959,70
II	**Piutang Retribusi**	1.796.446.431,50

Nomor	Uraian Rincian Piutang	Penyisihan Piutang
		31-Des-23
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	778.608.996,50
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.017.837.435,00
5	Dinas Kesehatan	0,00
6	Dinas Perhubungan	0,00
III	**Piutang Lain-Lain PAD yang sah**	**2.211.662.777,05**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	681.468,75
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	228.406.900,00
3	RSUD Dr. R. Soedarsono	1.982.574.408,30
4	Piutang TPP	0,00
IV	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**553.303.781,80**
1	BPKA	553.303.781,80
V	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**0,00**
1	BPKA	0,00
VI	**Piutang Lainnya**	**4.263.029.104,35**
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	592.811.952,35
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.293.387.357,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.042.158.715,00
4	Sekretariat Daerah	285.410.351,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.260.729,00
	Total Penyisihan Piutang	**16.747.584.054,40**

Adapun rincian penyisihan piutang Tahun 2023 sebagaimana terlampir Pada **Lampiran 15 s.d Lampiran 17.**

o) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	85.661.300,14	78.775.506,85

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.661.300,14 merupakan belanja barang/jasa asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2023 yang barang/jasa (manfaatnya) baru diterima pada Tahun berikutnya, dengan rincian sebagaimana tabel 5.63 berikut.

Tabel 5.63.
Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 Jan 2022

(dalam rupiah)

Uraian Rincian Piutang	Saldo Akhir	Saldo Akhir
	31-Dec-22	31-Dec-23
Beban Dibayar dimuka	**78.775.506,85**	**85.661.300,14**
BPKA (SKPD)	***78.775.506,85***	***85.661.300,14***
- Piutang Premi Asuransi BMD	***78.775.506,85***	***85.661.300,14***
Pembayaran LS Belanja Premi Asuransi BMD sesuai SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023		
- Bangunan Pasar/Mall	14.741.820,82	16.135.739,64
- Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	23.698.602,74	29.384.787,89
- Kendaraan Roda Empat	27.071.560,00	34.031.176,61
- Kendaraan Roda Dua	13.263.523,29	6.109.596,00

Mutasi beban dibayar dimuka selama TA 2023 adalah sebagaimana tabel 5.64 dibawah ini.

Tabel 5.64.
Mutasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Dibayar Dimuka	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
		31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
1	Pembayaran LS Belanja Premi Asuransi BMD sesuai SPK No. 027/546/423.201/PPKm/2022 Tanggal 28 April 2022				
	- Bangunan Pasar/Mall	14.741.820,82	0,00	14.741.820,82	0,00
	- Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	23.698.602,74	0,00	23.698.602,74	0,00
	- Kendaraan Roda Empat	27.071.560,00	0,00	27.071.560,00	0,00
	- Kendaraan Roda Dua	13.263.523,29	0,00	13.263.523,29	0,00
2	Pembayaran LS Belanja Premi Asuransi BMD sesuai SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023				
	- Bangunan Pasar/Mall	0,00	16.135.739,64	0,00	16.135.739,64
	- Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	0,00	29.384.787,89	0,00	29.384.787,89
	- Kendaraan Roda Empat	0,00	34.031.176,61	0,00	34.031.176,61
	- Kendaraan Roda Dua	0,00	6.109.596,00	0,00	6.109.596,00
	JUMLAH	**78.775.506,85**	**85.661.300,14**	**78.775.506,85**	**85.661.300,14**

Penambahan Beban Dibayar Dimuka Pada Tahun 2023 sebesar Rp85.661.300,14 berasal dari:

(1) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023 sebesar Rp34.031.176,61;
(2) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 2 SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023 sebesar Rp6.109.596;
(3) Belanja Asuransi Bangunan Pasar/Mall SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023 sebesar Rp16.135.739,64;
(4) Belanja Asuransi Bangunan Kantor Pemerintah Daerah SPK No. 000.3.3/73.2/423.201/PPK/2023 Tanggal : 29 Mei 2023 sebesar Rp29.384.787,89;

Pengurangan Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2022 sebesar Rp78.775.506,85 berasal dari:

(1) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 4 SPK No. 027/546/423.201/PPKm/2022 Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp27.071.560,00;
(2) Belanja Asuransi Kendaraan Roda 2 SPK No. 027/546/423.201/PPKm/2022 Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp13.263.523,29;
(3) Belanja Asuransi Bangunan Pasar/Mall SPK No. 027/546/423.201/PPKm/2022 Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp14.741.820,82;
(4) Belanja Asuransi Bangunan Kantor Pemerintah Daerah SPK No. 027/546/423.201/PPKm/2022 Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp23.698.602,74.

p) **Persediaan**

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	26.132.090.045,35	**25.215.856.108,11**

Total Persediaan Pemerintah Kota Pasuruan sampai akhir Tahun 2023 sebesar Rp26.132.090.045,35 dengan rincian sebagai 5.65 berikut.

Tabel 5.65.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2022	2023
	Persediaan dari Belanja Rutin		
1	Persedian Alat Tulis Kantor	276.657.010,00	156.468.738,00
2	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	569.929.599,00	532.917.836,00
3	Persediaan Perangko, Materai, Pos Lain	6.960.000,00	6.160.000,00
4	Persediaan Alat Listrik	828.457.189,00	766.216.831,00
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.399.500,00	81.000,00
6	Persediaan Seragam Dinas	3.870.520,00	3.691.570,00
7	Persediaan Bahan Bangunan	471.795.915,26	546.320.771,95
8	Persediaan Alat/Perlengkapan Olahraga Pakai Habis	1.050.000,00	0,00
9	Persediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Vandel/Plakat)	27.841.000,00	8.729.000,00
10	Persediaan Bahan Laboratorium/kimia	559.103.808,00	318.706.066,00
11	Persediaan Barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga	3.548.773.804,00	3.570.279.400,80
12	Persediaan Alat Kesehatan habis pakai	49.775.000,00	49.525.000,00
13	Persediaan Perabot Kantor	215.140.219,00	425.936.070,00
14	Persediaan Penyediaan Bahan Komputer	266.209.080,00	252.726.860,00
15	Persediaan Obat	9.419.750.792,05	10.294.112.695,71
16	Persediaan Obat Lainnya	183.603.116,60	1.160.039.360,00
17	Persediaan Kertas dan Cover	23.190.500,00	84.201.300,00
18	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	4.723.186.669,95	3.376.689.398,27
19	Persediaan Natura dan pakan- pakan lainnya	5.330.000,00	18.244.000,00
20	Persediaan Bahan Alat Kantor Lainnya	0,00	16.688.736,00
21	Bahan lainnya	177.214.474,00	48.397.059,00
22	Persediaan Bibit	1.058.000,00	2.030.000,00
23	Persediaan Cetakan Benda Berharga	3.387.700,00	814.700,00
24	Persediaan Bahan Bakar	1.428.800,00	140.000,00
25	Persediaan Makanan dan Minuman	0,00	166.958.871,00
	JUMLAH	**21.365.112.696,86**	**21.806.075.263,73**
	Persediaan dari Belanja Donasi		
1	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	674.638,00	49.343.189,00
2	Persediaan Obat dan Bahan Medis	8.932.249,44	8.683.556,00
3	Persediaan Alat Kontrasepsi	20.341.020,00	59.590.706,00
4	Persediaan Barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga	1.215.008.434,00	1.649.978.302,00
5	Persediaan Bahan Laboratorium/kimia	1.909.000,00	2.737.000,00
6	Persediaan Obat	2.197.643.314,21	1.581.025.924,40
7	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	0,00	933.906.104,22

NO	Uraian	2022	2023
8	Bahan lainnya	40.750.000,00	40.750.000,00
	JUMLAH	**3.485.258.655,65**	**4.326.014.781,62**
	Persediaan dari Belanja Tidak Terduga		
1	Persedian Alat Tulis Kantor	14.200,00	0,00
2	Persediaan Bahan Laboratorium/kimia	579.500,00	0,00
3	Persediaan Suku Cadang alat kedokteran	3.408.000,00	0,00
4	Persediaan Obat	361.483.055,60	0,00
	JUMLAH	**365.484.755,60**	**0,00**
	TOTAL	**25.215.856.108,11**	**26.132.090.045,35**

Sesuai tabel diatas jumlah sisa persediaan pada Tahun 2023 dibagi atas 3 sumber, yaitu :

a) Sisa persediaan dari Belanja rutin atau belanja yang dikeluarkan oleh APBD dan pada akhir tahun memperoleh sisa persediaan barang sebesar Rp21.806.075.263,73;

b) Sisa persediaan dari Donasi yang Pada Tahun 2023 untuk mendukung kegiatan pencegahan pandemi *Covid-19* dan pada akhir tahun memperoleh sisa persediaan sebesar Rp4.326.014.781,62;

c) Sisa persediaan dari kegiatan Belanja Tidak Terduga yang mana pada Tahun 2023 digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan pandemi *Covid-19* dan pada akhir tahun memperoleh saldo sebesar Rp0,00,

Sehingga total saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.132.090.045,35 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pasuruan yang masih ada sampai dengan per 31 Desember 2023.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah hal-hal yang perlu diuangkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan salah satunya adalah nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Berikut ini adalah persediaan pada tahun 2023 yang diungkapkan dalam kondisi rusak atau usang, pada :

a) Dinas Kesehatan menyajikan persediaan bahan cetakan berupa karcis yang sudah usang sebesar Rp675.120,00 dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sebesar Rp1.530.684,00;

b) RSUD Dr R Soedarsono menyajikan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sebesar Rp349.602.174,00;

c) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyajikan bahan cetakan berupa karcis yang sudah usang sebesar Rp97.664,00;

d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyajikan bahan cetakan berupa karcis yang sudah usang sebesar Rp1.107.075,00;

e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyajikan bahan cetakan berupa karcis yang sudah usang sebesar Rp23.370,00;

f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyajikan bahan cetakan yang sudah usang sebesar Rp3.270.000,00 dan makanan tambah gizi, lauk pauk yang sudah kadaluarsa sebesar Rp34.217.780,00;

g) DP3AKB menyajikan alat kontrasepsi dan alan non kontrasepsi yang sudah kadaluarsa sebesar Rp99.585.835,00.

Adapun rincian persediaan Pada SKPD per 31 Desember 2023 sebagaimana Pada **Lampiran 18**.

(2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	74.152.809.846,22	**76.786.048.812,72**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan merupakan Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagaimana berikut.

a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	**0,00**

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	74.152.809.846,22	**76.786.048.812,72**

Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.152.809.846,22 merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada empat BUMD dengan rincian sebagaimana tabel 5.66 berikut.

Tabel 5.66.
Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian	Saldo 31-12-23	Saldo 31-12-22
1	BPD Jatim	25.018.941.750,00	25.018.941.750,00
2	BPR Kota	10.218.058.382,22	10.157.739.429,99
3	BPR Jatim	3.268.673.000,00	3.268.673.000,00
4	PDAM	35.647.136.714,00	38.340.694.632,73
Jumlah		**74.152.809.846,22**	**76.786.048.812,72**

Tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan bahwa total investasi permanen Pemerintah Kota Pasuruan Pada Tahun 2023 sebesar Rp74.152.809.846,22 yang terdiri dari BPD Jatim sebesar

Rp25.018.941.750,00, BPR Kota Pasuruan sebesar Rp10.218.058.382,22, BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00 dan PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp35.647.136.714,00, sedangkan Pada Tahun 2022 investasi permanen Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp73.840.011.993,77. Penyertaan tersebut terdiri dari BPD Jatim sebesar Rp25.018.941.750,00, BPR Kota Pasuruan sebesar Rp10.157.739.429,99, BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00 dan PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp35.394.657.813,78. Selama Tahun 2023 tidak ada penambahan dan pengurangan investasi permanen Pada BPD Jatim dan BPR Jatim sehingga saldo investasi permanen Pada BPD Jatim dan BPR Jatim tidak terjadi perubahan yakni sebesar Rp25.018.941.750,00 dan BPR Jatim sebesar Rp3.268.673.000,00. sedangkan pada PDAM Kota Pasuruan setelah dihitung menggunakan metode ekuitas Investasi Permanen Pemerintah Kota Pasuruan pada PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp35.647.136.714,00. Pada BPR Kota Pasuruan terdapat Peningkatan nilai Investasi Permanen Kota Pasuruan yang diakibatkan dari perhitungan dengan metode ekuitas dimana Pada Tahun 2023 BPR Kota Pasuruan dengan perhitungan metode ekuitas penyertaan modal Kota Pasuruan Pada BPR Kota Pasuruan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp10.218.058.382,22.

(1) PT Bank Jatim

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2022 sebesar Rp25.018.941.750,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPD Jatim dilakukan dengan menggunakan metode biaya *(cost methode)*, penggunaan metode biaya dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada BPD Jatim hanya sebesar 0,67% dari total kepemilikan saham (dibawah dari 20% total kepemilikan saham).

Adapun jumlah rincian penyetoran ke Bank Jatim per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

- Saldo Per 31 Desember 2011	Rp	7.046.000.000,00
- Penambahan Tahun 2012	Rp	7.500.000.000,00
- Cadangan yang dikonversi	Rp	10.472.941.750,00
- **Jumlah**	**Rp**	**25.018.941.750,00**
- Sisa Hasil dari Cadangan Konversi	Rp	5,61

Terdapat sisa hasil cadangan konversi sebesar Rp5,61 yang belum dicatat sebagai setoran saham karena belum memenuhi kewajiban 1 lembar saham yakni Rp250,00.

(2) PT. BPR Kota Pasuruan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Dimana untuk Penyertaan modal Pada BPR Kota Pasuruan per 31 Desember 2023

sebesar Rp7.120.000.000,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPR Kota Pasuruan dilakukan dengan menggunakan metode Ekuitas *(equity metode)*, penggunaan metode ekuitas dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada BPR Kota Pasuruan sebesar 99,10% dari total kepemilikan saham (lebih dari 20% total kepemilikan saham). Adapun penyertaan modal pada BPR Kota Pasuruan berdasarkan Laporan Keuangan *unaudited* BPR Kota Pasuruan Tahun 2023 dan 2022 dengan menggunakan metode ekuitas adalah sebagaimana tabel 5.67 berikut.

Tabel 5.67.
Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pemkot Pasuruan pada BPR per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31-12-23	Saldo 31-12-22
1	Modal disetor	7.185.000.000,00	7.185.000.000,00
	- Pemerintah Kota Pasuruan	7.120.000.000,00	7.120.000.000,00
	- Koperasi Perdana	65.000.000,00	65.000.000,00
2	Cadangan Umum	1.370.629.294,00	1.209.203.975,00
3	Cadangan Tujuan	1.222.995.255,00	1.061.569.936,00
4	Saldo Laba tahun sebelumnya	-	-
5	Laba/Rugi Tahun Berjalan	1.412.080.235,00	1.614.253.183,00
6	Deviden	(879.848.697,00)	(820.037.760,00)
Saldo Akhir		10.310.856.087,00	10.249.989.334,00
Prosentase Penyertaan Modal		0,99	0,99
Penyertaan Modal Pemda berdasarkan Metode Ekuitas		**10.218.058.382,22**	**10.157.739.429,99**

(3) PT BPR Jatim

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan. Penyertaan modal kepada PT BPR Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar Rp3.268.673.000,00. Penghitungan penyertaan modal Pada BPR Jatim dilakukan dengan menggunakan metode biaya (*cost metode*) berdasarkan laporan keuangan *unaudited*. Penggunaan metode biaya dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan Pada BPR Jatim hanya sebesar 0,78% dari total kepemilikan saham (di bawah dari 20% total kepemilikan saham).

(4) PDAM Kota Pasuruan

Investasi Permanen PDAM Pada Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pasuruan kepada PDAM Kota Pasuruan Nomor 900/370/423.201/2024 dan 900/333/423.500.01/2024 tidak ada penambahan selama tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023 Investasi Permanen kepada PDAM Kota Pasuruan adalah sebesar Rp42.811.766.043,33.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan diatur sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT BPR Jawa Timur, PT BPR Kota Pasuruan dan PDAM Kota Pasuruan, dimana untuk Penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan sebesar Rp42.811.766.043,33. Penghitungan penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan dilakukan dengan menggunakan metode Ekuitas *(equity methode)*, penggunaan metode ekuitas dilakukan karena penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada PDAM Kota Pasuruan sebesar 49% dari total kepemilikan saham (lebih dari 20% total kepemilikan saham). Berdasarkan perhitungan ekuitas maka didapatkan saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2023 adalah Rp35.647.136.714,00 pada Tahun 2022 dan sebesar Rp38.340.694.632,73. Pencatatan berdasarkan metode ekuitas tersebut diperoleh dari perkalian saldo akhir penyertaan modal pada laporan keuangan *unaudited* PDAM Tahun 2023 dengan prosentase kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Angka penyertaan modal yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan unaudited. Adapun rincian penyertaan modal PDAM sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.68.
Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Tahun	Uraian	Nominal (Rp)
1983	**Modal Awal PDAM Tahun 1983**	**661.444.841,00**
	- Modal Awal Tahun 1983 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982	661.444.841,00
2000	**Penyertaan Modal**	**340.464.000,00**
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Gadingrejo dan Pengadaan Water Meter Metil	97.680.000,00
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Purworejo	122.650.000,00
	- Perluasan Jaringan Pipa Tersier Kecamatan Bugul Kidul	86.679.000,00
	- Biaya Administrasi Proyek	10.271.000,00
	- Biaya Perencanaan Teknis Proyek	13.284.000,00
	- Biaya Pengawasan Proyek	9.900.000,00
2001	**Penyertaan Modal**	**1.455.330.400,00**
	- Penggantian Jaringan Pipa Distribusi (Jl Unsur - Jl Veteran)	541.521.800,00
	- Pengadaan dan Pemasangan pipa lingkungan terminal blandongan	821.297.000,00
	- Biaya Administrasi Proyek	42.697.600,00
	- Biaya Perencanaan Teknis Proyek	28.465.000,00
	- Biaya Pengawasan Proyek	21.349.000,00
2002	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	1.505.232.000,00
2003	Pendampingan Manajemen	226.666.000,00
2003	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	3.500.000.000,00
2004	Pendampingan Manajemen	113.334.000,00
2005	Pembangunan Sarana Air Bersih/Sharing Program	332.645.050,00
2006	Pembangunan Sarana Air Bersih/Sharing Program	1.052.625.000,00
2006	Lanjutan Pembangunan Pipa Distribusi Air Minum	130.575.000,00
2007	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	2.127.242.250,00

Tahun	Uraian	Nominal (Rp)
2008	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	1.680.908.919,00
2008	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	1.041.817.000,00
2010	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	1.987.673.100,00
2010	Penyertaan Modal / Investasi Jangka Panjang	4.000.000.000,00
2012	Koreksi Audit BPKP	(563.978.466,67)
2012	Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK T.A 2011)	545.301.550,00
2012	Pengemb. Jaringan Distribusi Pipa Air Minum T.A. 2011	345.392.000,00
2014	Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Air minum TA 2013	291.838.750,00
2014	Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK TA 2013)	357.974.950,00
2015	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2014	1.042.826.000,00
2017	Koreksi atas Peningkatan Jaringan Air Minum 2014	(1.042.826.000,00)
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2014 DAK (sesuai BA No.900/2021/423.032/2016	1.039.477.500,00
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Th 2015 Bantuan Propinsi sesuai BA No.900/2020/423.032/2016	1.558.683.250,00
2017	Peningkatan Jaringan Air Minum Tahun 2015 DAK (sesuai BA No.900/2022/423.032/2016	934.553.750,00
2017	Penyertaan Modal atas Penyediaan Layanan Air Minum Tahun 2017	1.500.000.000,00
2018	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan untuk sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.355.000.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Tahun 2017	389.985.000,00
2019	Penyertaan Modal atas program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tahun 2016	410.330.000,00
2019	Penyertaan Modal Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016	1.491.504.000,00
2019	Penyertaan Modal Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Tahun Anggaran 2017	1.552.990.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Program Lingkungan Perumahan Tahun Anggaran 2016	609.070.700,00
2019	Penyertaan Modal atas Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum (DAU) Kota Pasuruan TA 2018	1.880.197.000,00
2019	Penyertaan Modal atas Kegiatan Kegiatan Pemanfaatan Idle Capacity SPAM (DAK Reguler dan DAK Penugasan) Kota Pasuruan TA 2018	2.074.127.500,00
2019	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan Untuk Sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.355.000.000,00
2020	Perluasan SPAM Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun	1.407.824.000,00
2020	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Layanan Air Minum Perpipaan untuk Sambungan Rumah MBR pada PDAM Kota Pasuruan	1.500.000.000,00
2022	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Kelurahan Pohjentrek Dia 350 mm DAK Tahun 2021	2.376.916.000,00
2022	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum Dia. 2 Kelurahan Tambaan dan Ngemplakrejo DAU Tahun 2021	243.621.000,00
	Total Penyertaan Modal PDAM	**42.811.766.043,33**

Adapun perhitungan penyertaan modal Pada PDAM Kota Pasuruan berdasarkan metode ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69.
Penyertaan Modal Pada PDAM Kota Pasuruan
Berdasarkan Metode Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No		Uraian	Saldo 31-12-23	Saldo 31-12-22
1		**Modal disetor**	**87.393.663.280,00**	**87.393.663.280,00**
	A	Penyertaan Pemda yang dipisahkan	47.828.726.982,00	47.828.726.982,00
		- Penyertaan Provinsi	5.016.960.939,00	5.016.960.939,00
		- Pemerintah Kota Pasuruan	42.811.766.043,00	42.811.766.043,00
	B	Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	38.591.404.336,00	38.591.404.336,00
	C	Modal Hibah	973.531.962,00	973.531.962,00
2		Cadangan Umum	2.421.658.409,00	2.421.658.409,00
3		Saldo laba	(16.249.391.869,00)	(10.777.911.390,00)
4		Laba rugi tahun berjalan	(816.671.220,00)	(791.094.722,00)
5		Deviden	0,00	0,00
Saldo Akhir			**72.749.258.600,00**	**78.246.315.577,00**
Persentase Penyertaan Modal			**0,49**	**0,49**
Penyertaan Modal Pemda berdasarkan Metode Ekuitas			**35.647.136.714,00**	**38.340.694.632,73**

(3) Aset Tetap

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap	**2.803.384.359.733,44**	2.762.964.129.719,76

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.803.384.359.733,44 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 Rp2.762.964.129.719,76. Sehingga pada Tahun 2023 terdapat kenaikan aset tetap sebesar Rp40.420.230.013,68.

Rincian saldo aset tetap per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70.
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
		31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
1	Tanah	1.557.588.312.890,07	75.040.801,00	1.774.399.250,00	1.555.888.954.441,07
2	Peralatan dan Mesin	482.016.609.202,09	57.741.935.606,37	12.082.614.101,00	527.675.930.767,46
3	Gedung dan Bangunan	810.514.650.125,97	87.804.795.842,11	18.865.104.286,91	879.454.341.681,17
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	904.204.121.678,51	58.164.717.156,43	17.170.367.550,31	945.198.471.284,63
5	Aset Tetap Lainnya	13.022.407.290,80	831.437.900,00	273.199.160,00	13.580.646.030,80
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.600.898.966,00	3.008.011.594,00	19.967.357.911,01	8.641.552.648,99
7	Akumulasi Penyusutan	(1.029.982.870.433,68)	(102.783.735.451,00)	(5.711.068.764,00)	(1.127.055.537.120,68)
	Jumlah	**2.762.964.129.719,76**	**104.842.203.508,91**	**64.421.973.495,23**	**2.803.384.359.733,44**

a) **Tanah**

Tabel 5.71.
Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Tanah	1.557.588.312.890,07	75.040.801,00	1.774.399.250,00	1.555.888.954.441,07

Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 memiliki jumlah bidang tanah dengan jumlah 2.043 dengan total keseluruhan luas sebesar 5,290,391 m² atau 5290.391 Ha. Pada Tahun 2023 tanah Pemerintah Kota Pasuruan yang memiliki sertifikat adalah berjumlah 906 bidang dengan rincian 901 Bidang adalah Hak Pakai, 5 Bidang adalah Hak Pengelolaan. Selain tanah yang sudah bersertifikat ada pula tanah yang belum bersertifikat sejumlah 1.137 bidang. Dengan nilai aset keseluruhan Pada Tahun 2023 sebesar Rp1.555.888.954.441,07, sedangkan untuk nilai aset tetap tanah Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.557.588.312.890,07, sehingga Pada Tahun 2023 nilai aset tanah bertambah sebesar Rp75.040.801,00 dan berkurang sebesar Rp1.774.399.250,00. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

Bertambahnya nilai aset tetap tanah Pada Tahun 2023 sebesar Rp75.040.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tidak ada penambahan aset tanah dari belanja modal pada tahun 2023;
(2) Penambahan nilai aset tanah pada tahun 2022 karena Penambahan Aset Yang Belum Tercatat sesuai hasil penelusuran pada 2 OPD yaitu :

Tabel 5.72
Penambahan Aset Yang Belum Tercatat

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	64.240.801,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.800.000,00
JUMLAH		**75.040.801,00**

Penambahan atas pencatatan aset tanah yang belum tercatat sesuai hasil penelusuran sebesar Rp75.040.801,00 yaitu:

a. Pada Dinas Pendidikan berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sesuai sertifikat HP nomor 78 tanggal 11 Juli 2023 luas 1.012 m² alamat Jl. Jambangan No 2 Kec Purworejo Pasuruan (SDN Purworejo III) sebesar Rp64.240.801,00.
b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.800.000,00 berupa Tanah Untuk Jalan Kotamadya sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No 028/1684/423.401/2023 tgl 9 oktober 2023 (sebagian tanah persil Nomor 2a Leter C Nomor 1121 Klas S-III).

Berkurangnya nilai aset tetap tanah Pada Tahun 2023 sebesar Rp1.774.399.250,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Koreksi Tanah pada Kecamatan Bugul Kidul atas pencatatan ganda hasil inventarisasi sesuai surat pernyataan Camat Bugul Kidul Nomor 300/1407/423.401/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan identitas Sertifikat Hak Pakai tanggal 05/03/2009 No. 14, sudah dihapuskan atas hibah ke

Menkumham (Lapas Kota Pasuruan) sesuai SK Penghapusan nomor 188/320/423.011/2022 (tercatat awal di Dispora) Desember 2022 sebesar Rp71.000.000,00.

b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Kemitraan) sesuai Nomor 130.1/17.1/423.013/2019 - 019.1/KPRI.PEMKOT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 (SPBU Bakalan) pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset sebesar Rp374.875.000,00.

c. Penghapusan atas tanah tercatat ganda sesuai SK nomor 188/1083/423.201/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp1.328.524.250,00.

Selain mutasi tambah dan mutasi kurang atas asset tetap tanah sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Pasuruan juga memiliki asset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan seluas 33.033 m² dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 3 tanggal 21 April 2009 senilai Rp18.581.691.000,00 yang di kerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah sesuai Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Citra Bangun Sarana Mojokerto Tentang Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa Jl. Soekarno - Hatta (Rest Area) Kecamatan Gadingrejo - Kota Pasuruan Nomor 188/19/423.031/2010, 01/SPKT/CBS-KOTPSRN/RA/X/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 selama 30 Tahun.

b. Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan seluas 2.999 m² senilai Rp374.875.000,00 yang dikerjasamakan dalam bentuk Sewa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) 54.671.32 di Jalan Hos. Cokroaminoto Kelurahana Bakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 130.1/17.1/423.013/2019, 019.1/KPRI.Pemkot/IV/2019.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi menyebutkan bahwa property investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Berikut ini adalah daftar property investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2023 dapat disampaikan sesuai tabel 5.73,

Tabel 5.73.
Daftar Properti Investasi
Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai Sewa(Rp)	Jangka waktu
1	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Bakalan	61.548.500	1 tahun
2	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Blandongan	35.090.000	1 tahun
3	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Bugul Kidul	17.173.600	1 tahun
4	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Kepel	44.364.400	1 tahun
5	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Krampyangan	22.000.000	1 tahun
6	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Tapaan	11.940.100	1 tahun
7	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Bukir	20.760.000	1 tahun

NO	Uraian	Nilai Sewa(Rp)	Jangka waktu
8	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Gadingrejo	41.510.500	1 tahun
9	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Gentong	25.724.400	1 tahun
10	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karangketug	50.192.000	1 tahun
11	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Krapyakrejo	49.245.000	1 tahun
12	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Petahunan	23.418.000	1 tahun
13	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Randusari	6.111.000	1 tahun
14	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Sebani	21.000.000	1 tahun
15	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Kebonagung	26.240.200	1 tahun
16	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Pohjentrek	27.500.000	1 tahun
17	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Purutrejo	0	
18	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Purworejo	43.165.000	1 tahun
19	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Sekargadung	0	
20	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Tembokrejo	29.230.000	1 tahun
21	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Wrogunan	16.000.000	1 tahun
22	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Bugul Lor	39.665.000	1 tahun
23	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Karanganyar	9.803.500	1 tahun
24	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Kebonsari	8.380.000	1 tahun
25	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Mayangan	4.199.300	1 tahun
26	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Ngemplakrejo	4.463.900	1 tahun
27	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Pekuncen	1.000.000	1 tahun
28	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Petamanan	4.478.000	1 tahun
29	Tanah Eks Bengkok Kelurahan Trajeng	11.052.000	1 tahun
JUMLAH		655.254.400	

b) Peralatan dan Mesin

Tabel 5.74.
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Peralatan dan Mesin	482.016.609.202,09	57.741.935.666,37	12.082.614.101,00	527.675.930.767,46

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp527.675.930.767,46, sedangkan untuk nilai aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp482.016.609.202,09, sehingga Pada Tahun 2023 nilai aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp57.741.935.666,37.

Bertambahnya nilai aset peralatan dan mesin Pada Tahun 2023 disebabkan karena terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 dikarenakan pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.201.500,00 pada :

Tabel 5.75.
Pergeseran kodefikasi Peralatan dan Mesin tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	39.572.000,00
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	98.240.000,00
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	66.829.500,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	30.560.000,00
5	KECAMATAN PURWOREJO	12.000.000,00
	JUMLAH	**247.201.500,00**

(2) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp54.641.329.574,00, sebagaimana tabel 5.74. berikut :

Tabel 5.76.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**65.608.075.179,00**	**54.641.329.574,00**	**83,28**
1	Belanja Modal Alat Besar	961.910.800,00	932.747.000,00	96,97
	Belanja Modal Alat Besar Darat	48.238.800,00	36.000.000,00	74,63
	Belanja Modal Alat Bantu	913.672.000,00	896.747.000,00	98,15
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.546.347.561,00	2.465.817.740,00	96,84
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.939.150.661,00	1.861.058.840,00	95,97
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	607.196.900,00	604.758.900,00	99,60
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.716.003.800,00	537.655.700,00	6,17
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.423.902.200,00	246.394.000,00	2,92
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	686.400,00	686.400,00	100,00
	Belanja Modal Alat Ukur	291.415.200,00	290.575.300,00	99,71
4	Belanja Modal Alat Pertanian	247.544.100,00	208.826.800,00	84,36
	Belanja Modal Alat Pengolahan	247.544.100,00	208.826.800,00	84,36
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.488.851.002,00	8.727.528.713,00	91,98
	Belanja Modal Alat Kantor	4.037.295.045,00	3.686.663.540,00	91,32
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.033.611.357,00	4.640.106.573,00	92,18
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	417.944.100,00	400.758.600,00	95,89
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.335.871.500,00	4.144.005.000,00	95,57
	Belanja Modal Alat Studio	4.197.441.600,00	4.009.560.000,00	95,52
	Belanja Modal Alat Komunikasi	132.963.400,00	129.145.000,00	97,13
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.466.500,00	5.300.000,00	96,95
	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.809.858.550,00	24.363.463.371,00	94,40
	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.809.858.550,00	24.363.463.371,00	94,40
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	463.525.400,00	439.342.460,00	94,78
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	388.363.400,00	364.842.500,00	93,94
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	25.162.000,00	24.500.000,00	97,37
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	40.000.000,00	39.999.960,00	100,00

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
9	Belanja Modal Komputer	5.873.762.208,00	5.587.947.000,00	95,13
	Belanja Modal Komputer Unit	4.287.365.005,00	4.133.176.300,00	96,40
	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.586.397.203,00	1.454.770.700,00	91,70
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	303.650.500,00	260.440.570,00	85,77
	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	303.650.500,00	260.440.570,00	85,77
	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	543.594.400,00	519.084.000,00	95,49
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	543.594.400,00	519.084.000,00	95,49
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.197.200,00	21.800.000,00	93,98
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.197.200,00	21.800.000,00	93,98
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.358.048.158,00	3.350.360.742,00	99,77
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.358.048.158,00	3.350.360.742,00	99,77
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99

(3) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp266.472.939,47, pada :

Tabel 5.77.
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin dari Gedung Bangunan tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.613.979,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	56.582.287,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	4.484.439,47
4	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	189.792.234,00
	JUMLAH	266.472.939,47

(4) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari Hibah tahun 2023 pada sebesar Rp1.146.387.085,00, yaitu pada :

Tabel 5.78.
Peralatan dan Mesin dari Hibah tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	RSUD DR R SOEDARSONO	515.006.500,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	248.800.000,00
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	186.717.585,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	195.863.000,00
	TOTAL	1.146.387.085,00

a) RSUD Dr Soedarsono menerima hibah dari Yayasan BUMN untuk Indonesia sesuai dengan BA Hibah Nomor BA 020/PL/YB-02/V/2023 senilai Rp515.006.500,00;
b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Nomor 360/C.XII.100/208.3/2023 senilai Rp248.800.000,00;
c) Dinas Perpustakaan dan Arsip menerima hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Pemerintah Daerah Nomor 5291/4.2/PLK.03.07/XII/2023 senilai Rp186.717.585,00;
d) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menerima hibah dari KPRI Pemerintah Kota Pasuruan dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 028/KPRI PEMKOT/VI/2023 Rp195.863.000,00.

(5) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp113.147.597,90.

Tabel 5.79.
Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.430.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	749.351,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1.500.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	7.770.692,90
5	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.397.554,00
6	SEKRETARIAT DPRD	5.000.000,00
7	KECAMATAN PURWOREJO	83.300.000,00
	JUMLAH	**113.147.597,90**

(6) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset lain-lain tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp246.400.000,00. Reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap (Stationary Generating Set) sesuai dokumen surat pernyataan nomor: 028/02/423.104/2023 tanggal 13/11/2023.

(7) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset lain-lain tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp554.384.319,00. Koreksi Reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap (asphalt equipment lainnya - Bimax / Mesin Gilas, M6t6, mg6) sesuai dokumen surat pernyataan nomor: 000.2.5/2037.5/423.108/2023 tanggal 25/07/2023;

(8) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset lain-lain tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp522.448.550,00. Koreksi Reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap (alat angkutan - Truck) sesuai dokumen surat pernyataan nomor: 000.2.1.1/1795/423.110/2023 tanggal 16/06/2023.

(9) Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset lain-lain tahun 2023 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perolehan biaya atribusi sebesar Rp4.164.101,00.

Berkurangnya nilai aset peralatan dan mesin Pada Tahun 2023 sebesar Rp12.082.614.101,00 disebabkan karena terdapat pengurangan nilai aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp3.889.747.255,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.102.697,00 dan RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp3.874.644.558,00;

(2) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp5.874.419.157,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.170.961,00 dan RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp5.856.248.196,00;

(3) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp71.888.500,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp388.500,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp71.500.000,00;

(4) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi menjadi aset ekstracomptable sebesar Rp668.780.136,00 pada beberapa OPD sesua tabel 5.74 dibawah ini :

Tabel 5.80.
Peralatan dan Mesin reklas ke ekstracomptable

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	276.141.800,00
2	DINAS KESEHATAN	69.431.780,00
3	RSUD DR R SOEDARSONO	75.456.860,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.600.000,00
6	DINAS SOSIAL	15.645.000,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1.500.000,00
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	158.419.000,00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.300.000,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.940.696,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	11.200.000,00
12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	10.195.000,00
13	KECAMATAN PURWOREJO	25.950.000,00
	TOTAL	**668.780.136,00**

(5) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin reklasifikasi menjadi aset lain-lain sebesar Rp1.032.312.133,00, dengan rincian pada beberapa OPD sebagai berikut :

Tabel 5.81.
Peralatan dan Mesin reklas ke aset lain-lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	380.313.500,00
2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	522.624.800,00
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	129.373.833,00
	TOTAL	**1.032.312.133,00**

(6) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena penghapusan selama tahun 2023 sebesar Rp10.000.000,00 pada Sekretariat Daerah sesuai dengan Penghapusan Sepeda Motor (Pencatatan Ganda) sesuai SK nomor 188/1083/423.201/2023 tanggal 4/07/2023;

(7) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi barang dan jasa dikarenakan tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp342.203.920,00, sesuai tabel 5.82 dibawah ini :

Tabel 5.82.
Rincian aset peralatan dan mesin reklas ke barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.730.000,00
2	DINAS KESEHATAN	184.189.000,00
3	RSUD DR R SOEDARSONO	47.032.920,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.712.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	30.450.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	590.000,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	44.500.000,00
	TOTAL	**342.203.920,00**

(8) Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp193.263.000,00 reklasifikasi ke aset lainnya kemitraan kepada pihak ketiga sesuai Nomor 130.1/17.1/423.013/2019 - 019.1/KPRI.PEMKOT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019.

c) Gedung dan Bangunan

Tabel 5.83.
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Gedung dan Bangunan	810.514.650.125,97	87.804.795.842,11	18.865.104.286,91	879.454.341.681,17

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp879.454.341.681,17, sedangkan untuk nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp810.514.650.125,97, sehingga pada Tahun 2023 nilai aset Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp87.804.795.842,11.

Bertambahnya nilai aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 disebabkan karena terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dikarenakan pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp671.300.000,00

(2) Penambahan berdasarkan laporan realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp58.482.341.064,00. Rincian belanja modal tahun 2023 dapat disampaikan sebagaimana tabel 5.84 berikut,

Tabel 5.84.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**67.514.826.767,00**	**58.482.341.064,00**
1	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**37.795.610.599,00**	**29.190.729.474,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	**37.795.610.599,00**	**29.190.729.474,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.950.304.299,00	24.587.431.367,00
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.737.371.000,00	2.609.715.830,00
	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	107.150.000,00	106.757.210,00
	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.000.000,00	138.998.640,00
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00
	Belanja Modal Taman	1.860.785.300,00	1.747.826.427,00
	Belanja Modal Monumen	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00
	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00
	Belanja Modal Tugu	19.912.640.000,00	18.321.834.300,00
2	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**1.118.546.200,00**	**1.113.784.631,00**
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	**1.118.546.200,00**	**1.113.784.631,00**
	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00
	Belanja Modal Pagar	1.118.546.200,00	1.113.784.631,00
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**8.688.029.968,00**	**9.855.992.659,00**
3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**8.688.029.968,00**	**9.855.992.659,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.688.029.968,00	9.855.992.659,00

(3) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp3.889.747.255,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.102.697,00 dan RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp3.874.644.558,00;

(4) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari hibah selama tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.018.177.078,00 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen Koreksi Hibah dari Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Pembangunan RKBS SDN Gentong sesuai BAST nomor 534.1/BA/DC/2020 - 900/4494/423.102/2020 tanggal 4 Desember 2020;

(5) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari hibah selama tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa penyerahan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar Rp1.194.708.882,00, antara lain :

Tabel 5.85.
Daftar Rincian PSU Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Permanen; Koreksi Hibah dari PT Belirang Kalisari Berita Acara Nuansa Candi Permai 2,3,4 sesuai BAST nomor 600/9730/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (11 Bidang/Unit)	502.463.718,00
2	Gedung Pos Jaga Permanen; Koreksi Hibah dari PT Belirang Kalisari Berita Acara Nuansa Candi Permai 2,3,4 sesuai BAST nomor 600/9730/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (2 Bidang/Unit)	15.000.000,00
3	Taman Permanen; Koreksi Hibah dari PT Belirang Kalisari citra candi permai 3 sesuai BAST nomor 600/9731/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (2 Bidang/Unit)	32.116.000,00
4	Gedung Pos Jaga Permanen; Koreksi Hibah dari PT Belirang Kalisari citra candi permai 3 sesuai BAST nomor 600/9731/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (1 Bidang/Unit)	23.200.000,00
5	Taman Permanen; Koreksi Hibah dari PT Compok Indah Lestari Perumahan Sekar Asri sesuai BAST nomor 600/9732/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (1 Bidang/Unit)	26.812.500,00
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen; Koreksi Hibah dari PT Compok Indah Lestari Perumahan Sekar Asri sesuai BAST nomor 600/9732/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (1 Bidang/Unit)	5.635.860,00
7	Taman Permanen; Koreksi Hibah dari PT Metro Nusantara Cipa Properti Berita acara Perumahan Graha Ashafa sesuai BAST nomor 600/9733/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (3 Bidang/Unit)	197.617.600,00
8	Gedung Pos Jaga Permanen; Koreksi Hibah dari PT Metro Nusantara Cipa Properti Berita acara Perumahan Graha Ashafa sesuai BAST nomor 600/9733/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (1 Bidang/Unit)	3.712.000,00
9	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen; Koreksi Hibah dari PT Belirang Kalisari Berita Acara Nuansa Candi Permai 2,3,4 sesuai BAST nomor 600/9730/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (2 Bidang/Unit)	220.300.000,00
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen; Koreksi Hibah dari PT Compok Indah Lestari Perumahan Sekar Asri sesuai BAST nomor 600/9732/423.109/PSU/BA-P/2022 tanggal 23 Desember 2022 (1 Bidang/Unit)	88.851.204,00
11	Gedung Pos Jaga Permanen; Hibah dari PT Sekar Drajat Makmur sesuai BAST nomor 600/10589/423.109/PSU/BA-STF/2023 tanggal 24 Nopember 2023 (2 Bidang/Unit)	30.000.000,00
12	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen; Hibah dari PT Sekar Drajat Makmur sesuai BAST nomor 600/10589/423.109/PSU/BA-STF/2023 tanggal 24 Nopember 2023 (1 Bidang/Unit)	47.000.000,00
13	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst); Hibah dari PT Legenda Tanah Impian sesuai BAST nomor 600/10593/423.109/PSU/BA-STF/2023 tanggal 24 Nopember 2023 (1 Bidang/Unit)	2.000.000,00
TOTAL		**1.194.708.882,00**

(6) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari hibah selama tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.332.906.100,00 sesuai Hibah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai Nomor BAST Nomor 71/M-DAG/BAST/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Pasar Rakyat Kebonagung Luas 1.041);

(7) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari hibah selama tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp73.919.100,00 berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen; Bangunan Hibah dari KPRI Kota Pasuran sesuai Nomor BAST Nomor 028/KPRI PEMKOT/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (SPBU Bakalan);

(8) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi belanja belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp3.415.811.450,11 pada beberapa SKPD berikut :

Tabel 5.86.

Rincian aset gedung dan bangunan dari belanja barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	585.878.182,50
2	DINAS KESEHATAN	141.152.529,00
3	RSUD DR R SOEDARSONO	203.879.724,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	584.142.113,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	81.139.316,98
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	187.675.516,37
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	38.850.000,00
8	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	455.770.216,26
9	DINAS PERIKANAN	124.326.400,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	53.057.000,00
11	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	313.861.600,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	111.474.000,00
13	INSPEKTORAT	108.863.000,00
14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	14.041.500,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	69.391.584,00
16	KECAMATAN GADINGREJO	195.608.768,00
17	KECAMATAN PURWOREJO	146.700.000,00
TOTAL		**3.415.811.450,11**

(9) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp115.889.600,00 dari Atribusi atas Perencanaan dan Pengawasan rehabilitasi OK Central;

(10) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.026.742.371,00 dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada 2 proyek fisik yaitu pada biaya atribusi perencanaan dan pengawasan di kelurahan krampyangan sebesar Rp78.298.359,00 dan pembangunan gedung PLUT sebesar Rp1.948.444.012,00;

(11) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp424.640.149,00 Kontruksi Dalam Pengerjaan TPS3R Krapyakrejo;

(12) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.059.622.993,00 reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (Payung Hidrolik);

(13) Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp98.989.800,00 berupa Atribusi atas Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan UPT Logam.

Nilai aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 berkurang sebesar Rp18.865.104.286,91, karena terdapat pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset Gedung dan bangunan karena pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp247.201.500,00;

(2) Pengurangan nilai aset Gedung dan bangunan karena pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.454.819.562,00;

(3) Pengurangan nilai aset Gedung dan bangunan karena pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp330.790.000,00;

(4) Pengurangan nilai aset ke KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp266.472.939,47,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa aset peralatan dan mesin pada OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.613.979,00, Dinas Lingkungan Hidup. Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp56.582.287,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp4.484.439,47, dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp189.792.234,00;

(5) Pengurangan nilai aset ke KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.357.836.379,45,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang berupa aset Jalan, Jaringan Irigasi pada 6 OPD yaitu :

Tabel 5.87.
Rincian Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	723.646.996,00
2	RSUD DR R SOEDARSONO	2.010.712.779,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	937.087.588,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	272.366.880,73
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	735.776.704,50
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.678.245.431,22
	TOTAL	**6.357.836.379,45**

(6) Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp48.242.860,00 dikarenakan masuk kriteria barang ekstracomptable, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.527.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp42.715.860,00;

(7) Pengurangan nilai aset ke KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.801.892.318,00 karena reklasifikasi belanja modal Gedung dan bangunan yang sudah rusak berat pada :

Tabel 5.88.
Rincian Reklas ke aset lainnya tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS KESEHATAN	342.068.175,00
2	RSUD DR R SOEDARSONO	150.377.200,00
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	404.019.000,00
4	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	726.318.600,00
5	KECAMATAN GADINGREJO	75.228.343,00
6	KECAMATAN PURWOREJO	103.881.000,00
	TOTAL	**1.801.892.318,00**

(8) Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.345.135.200,00 karena penghapusan set gedung dan bangunan pada 3 OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp272.956.550,00, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp94.611.600,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp977.567.050,00;

(9) Pengurangan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp6.012.713.528,00 karena mutasi lain-lain pada 4 OPD, sebagaimana berikut :

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp52.745.941,00 direklas ke belanja barang dan jasa;
b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp256.402.792,00 direklas ke belanja barang dan jasa berupa Rehabilitasi Gedung Dalmas (Polres Pasuruan Kota);
c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp130.272.155,01 Pembangunan Depo Arsip (Lanjutan) / (plus atribusi Perencanaan dan Pengawasan);
d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.877.739.438,99 Reklasifikasi dari Aset Tetap (Rumdin Ketua DPRD, Rehabilitasi SDN Purutrejo II, Depo Arsip);
e) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp658.136.075,00 Pelunasan Hutang (Payung Hidrolik TA 2022);
f) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.262.126,00 biaya atribusi Perencanaan dan Pengawasan;
g) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp2.033.155.000,00 direklas ke aset lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga).

Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi menyebutkan bahwa property investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Di aset Gedung dan Bangunan property investasi belum dilakukan inventarisasi.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.89.
Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	904.204.121.678,51	58.164.717.156,43	17.170.367.550,31	945.198.471.284,63

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp945.198.471.284,63, sedangkan untuk nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp904.204.121.678,51, sehingga pada Tahun 2023 nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah sebesar Rp58.164.717.156,43.

Bertambahnya nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pada Tahun 2023 disebabkan karena terdapat penambahan dan pergurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.454.819.562,00;
(2) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal pengadaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp32.938.790.102,00;

Tabel 5.90.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**41.070.566.518,00**	**32.938.790.102,00**
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**25.028.429.018,00**	**20.998.676.648,00**
	Belanja Modal Jalan	**24.800.819.018,00**	**20.777.383.913,00**
	Belanja Modal Jalan Kota	11.642.387.778,00	10.028.420.773,00
	Belanja Modal Jalan Desa	11.750.509.000,00	9.565.034.149,00
	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.407.922.240,00	1.183.928.991,00
	Belanja Modal Jembatan	227.610.000,00	221.292.735,00
	Belanja Modal Jembatan Lainnya	227.610.000,00	221.292.735,00
	Belanja Modal Bangunan Air	**7.539.081.000,00**	**6.983.687.958,00**
1	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**3.025.207.000,00**	**3.018.270.680,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.802.128.000,00	2.796.720.688,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	223.079.000,00	221.549.992,00
2	**Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00
3	**Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**192.100.000,00**	**190.635.308,00**
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	192.100.000,00	190.635.308,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
4	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**4.321.774.000,00**	**3.774.781.970,00**
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.234.103.000,00	1.234.102.298,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.087.671.000,00	2.540.679.672,00
	Belanja Modal Instalasi	**3.500.786.000,00**	**3.200.183.596,00**
1	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**1.169.772.000,00**	**930.454.596,00**
	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	1.169.772.000,00	930.454.596,00
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00
2	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00
3	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**	**0,00**	**0,00**
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	0,00	0,00
4	**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**2.176.000.000,00**	**2.117.400.000,00**
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.176.000.000,00	2.117.400.000,00
5	**Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik**	**155.014.000,00**	**152.329.000,00**
	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	155.014.000,00	152.329.000,00

(2) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang yang direklasifikasi menjadi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.874.419.157,00. Yaitu terinci pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.170.961,00 dan RSUD Dr R Soedarsono sebesar Rp5.856.248.196,00;

(3) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang yang direklasifikasi menjadi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.357.836.379,44, Yaitu terinci pada tabel 5.91;

Tabel 5.91.
Rincian mutasi dari belanja modal gedung dan bangunan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	723.646.996,00
2	RSUD DR R SOEDARSONO	2.010.712.779,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	937.087.588,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	272.366.880,72
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	735.776.704,50
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.678.245.431,22
	TOTAL	**6.357.836.379,44**

(4) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Hibah sebesar Rp4.621.102.582,00,00, yaitu terinci pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.543.602.581,50 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp77.500.000,00;

(5) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari reklas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.371.369.761,99, yaitu pada :

Tabel 5.92.
Rincian reklas dari belanja barang dan jasa

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	184.880.527,50
2	DINAS KESEHATAN	1.781.371,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.263.005.703,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	752.196.408,02
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	65.117.244,73
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	97.439.907,74
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	6.948.600,00
TOTAL		**2.371.369.761,99**

(6) Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari mutasi tambah lain di tahun 2023, sebagai berikut:
   a) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp176.340.150,00;
   b) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan dari biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp126.419.822,00;
   c) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.722.400,00;
   d) Pembayaran utang belanja pembangunan jalan paving dan saluran Papan Bestari II Kelurahan Tembokrejo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp478.281.587,00;
   e) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pembangunan jalan khusus inspeksi TPS3R Krapyakrejo pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp199.200.000,00;
   f) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pembangunan Payung Hidrolik pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.546.317.629,00;
   g) Biaya atribusi perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp98.025,00.

Berkurangnya nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Pada Tahun 2023 sebesar Rp17.170.367.550,31, disebabkan karena terdapat pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah menjadi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp671.300.000,00, yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan;

(2) Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas barang-barang yang direklasifikasi menjadi aset ekstrakomptable sebesar Rp858.121.411,38,

pada 3 SKPD, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp659.365.219,38, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp190.635.308,00, dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8.120.884,00;

(3) Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dikarenakan penghapusan BMD tahun 2023 sebesar Rp9.264.954.802,93, yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.164.954.802,93 dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp100.000.000,00;

(4) Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp6.274.971.336,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain, Reklas Ke Persediaan (Barang Yang Akan diberikan kepada Pihak Ketiga/Lainnya) Pengadaan/Perolehan Tahun 2022 pada PDAM yang belum terbit BAST;

(5) Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp23.520.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Belanja Modal lampu LED 70 watt di reklas ke belanja barang dan jasa;

(6) Pengurangan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp77.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset direklas ke aset lainnya berupa Kemitraan pada pihak ketiga.

e) Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.93.
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Aset Tetap Lainnya	13.022.407.290,80	831.437.900,00	273.199.160,00	13.580.646.030,80

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Pasuruan menyajikan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.580.646.030,80, sedangkan untuk nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp13.022.407.290,80, sehingga pada Tahun 2023 nilai Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp831.437.900,00.

Bertambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 disebabkan karena terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan pergeseran kodefikasi menurut Permendagri Nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dari aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp330.790.000,00;

(2) Penambahan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat belanja modal yang tergolong Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp388.335.000,00.

Tabel 5.94.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**407.448.9.'5,00**	**388.335.000,00**
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	166.125.375,00	160.917.000,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	166.125.375,00	160.917.000,00
2	Belanja Modal Tanarnan	9.323.600,00	0,00
	Bela.ıja Modal Tanaman	9.323.600,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	230.000.000,00	225.418.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	230.000.000,00	225.418.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.000.000,00	2.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.000.000,00	2.000.000,00

(3) Penambahan nilai aset tetap lainnya berdasarkan mutasi tambah yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang yang direklasifikasi menjadi asset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp71.888.500,00, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp388.500,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp71.500.000,00;

(4) Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp40.424.400,00 berupa Buku; Hibah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10290/4.2/PLK.03.07/XII.2023 Tanggal 1 Desember 2023 700 Eksemplar.

Berkurang nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp273.199.160,00 disebabkan karena terdapat pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengurangan nilai aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi ke aset ekstracomptable sebesar Rp38.671.160,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp625.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp38.046.160,00;

(2) Pengurangan aset tetap lainnya pada tahun 2023 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.750.000,00 dikarenakan Reklasifikasi ke aset Lain-lain karena perubahan kondisi BMD menjadi Rusak Berat berdasarkan BA Perubahan Kondisi No 030/7096/423.112/2023 Tanggal 13 September 2023;

(3) Pengurangan nilai aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya di reklasifikasi menjadi aset tidak berwujud pad 3 SKPD, yaitu Dinas Perhubungan sebesar Rp28.000.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp77.418.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp120.000.000,00;

(4) Pengurangan nilai aset Tetap Lainnya karena penghapusan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp6.360.000,00 berupa Hewan Ternak Penghapusan Aset Tetap Lainnya sesuai Sk nomor 188/947/423.201/2023 tanggal 07/06/2023.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.95.
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Neraca 2022	Mutasi		Neraca 2023
		Tambah	Kurang	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.600.898.966,00	2.877.739.438,99	19.837.085.756,00	8.641.552.648,99

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 yaitu Pekerjaan Fisik yang belum selesai sebesar 100% dari nilai fisik bangunan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp8.641.552.648,99. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah Reklasifikasi dari Aset Tetap Rumah Dinas Ketua DPRD, Rehabilitasi SDN Purutrejo II dan Depo Arsip yang masih belum selesai pengerjaannya sebesar Rp2.877.739.438,99.

Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 sebesar Rp19.837.085.756,00 disebabkan pengurangan selama tahun 2023 antara lain :

(1) Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.153.231.512,00 di reklas ke asset tetap atas Pembangunan Gedung PLUT sebesar Rp1.948.444.012,00, perencanaan kelurahan krampyangan pekerjaan fisik tahun 2023 sebesar Rp78.298.359,00, perencanaan SDAD dan Binamarga dan kelurahan krampyangan pekerjaan fisik tahun 2023 sebesar Rp126.419.822,00, perencanaan kelurahan krampyangan pekerjaan fisik tahun 2023 sebesar Rp69.319,00, dan Pembangunan Depo Arsip (Lanjutan) / (plus atribusi Perencanaan dan Pengawasan) sebesar Rp130.272.155,01;

(2) Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.722.400,00 atas Pekerjaan Jalan khusus lainnya Jl Erlangga Gg 19A sebesar Rp16.071.300,00 dan Instalasi air kotor lainnya jl erlangga Gg depan SDN Purworejo II sebesar Rp3.651.100,00;

(3) Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp623.840.149,00 atas Pekerjaan TPS 3R Krapyakrejo sebesar Rp424.640.149,00 dan Pembangunan jalan khusus inspeksi sebesar Rp199.200.000,00;

(4) Pengurangan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp16.776.687.995,00 atas pekerjaan fisik Payung Madinah.

Rincian kontruksi dalam pengerjaan terdapat pada lampiran **lampiran 23.**

g) Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.96.
Mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi		Saldo Akhir
	31-Des-22	Tambah	Kurang	31-Des-23
Akumulasi Penyusutan	(1.029.982.870.433,68)	(102.783.735.451,00)	(5.711.068.764,00)	(1.127.055.537.120,68)

Kebijakan Akuntansi Kota Pasuruan menyatakan bahwa Metode Penyusutan Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus dengan pendekatan bulanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun 2023 melakukan penyusutan aset tetap yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.127.055.537.120,68 Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel 5.97.

Tabel 5.97.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

(dalam rupiah)

NO	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI	TOTAL PER OPD
1	SEKRETARIAT DPRD	8.643.042.637,00	3.812.876.939,00	110.363.395,00	12.566.282.971,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	26.353.520.792,00	7.419.125.080,00	4.311.055.052,00	38.083.700.924,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.316.195.126,00	1.004.580.964,00	408.092.500.621,25	418.413.276.711,25
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.754.558.398,00	11.508.821.493,00	100.398.775.737,12	115.662.155.628,12
5	DINAS PERHUBUNGAN	21.533.715.937,00	1.804.706.350,00	9.790.965.110,00	33.129.387.397,00
6	DINAS KESEHATAN	35.468.857.225,49	13.086.451.630,00	725.294.894,00	49.280.603.749,49
7	RSUD R.SOEDARSONO	145.161.423.921,00	14.534.516.789,00	1.430.453.951,00	161.126.394.661,00
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.485.160.294,00	36.681.361.510,00	272.879.231,00	78.439.401.035,00
9	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.804.942.139,00	8.808.969.454,00	127.009.419,00	10.740.921.012,00
10	DINAS TENAGA KERJA	1.553.841.288,00	392.907.649,00	30.718.093,00	1.977.467.030,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	4.213.495.858,00	1.071.829.310,00	62.270.205,00	5.347.595.373,00
12	DINAS SOSIAL	1.666.420.216,00	145.019.677,00	1.084.838,00	1.812.524.731,00
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.880.017.113,00	674.624.766,00	277.112.196,00	7.831.754.075,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.354.076.440,00	203.965.782,00	113.993.880,00	3.672.036.102,00
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5.892.271.347,00	3.084.056.231,00	10.090.637.661,00	19.066.965.239,00
16	DINAS PERIKANAN	1.425.418.183,00	1.151.112.774,00	4.025.397.117,00	6.601.928.074,00
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.180.975.001,00	8.546.905.401,00	1.055.483.705,00	14.783.364.107,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.885.981.700,00	4.470.616.491,00	72.525.690,00	7.429.123.881,00
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	914.611.732,00	181.910.659,00	15.280.919,00	1.111.803.310,00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.843.692.703,00	138.420.216,00	17.819.470,00	3.999.932.389,00
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.649.997.969,00	1.031.001.277,00	352.532.596,00	4.033.531.842,00
22	INSPEKTORAT	1.931.198.500,00	309.065.273,00	132.776.787,00	2.373.040.560,00
23	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.987.689.384,00	948.700.134,00	430.242.522,00	3.366.632.040,00
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	24.319.020.257,00	28.038.831.641,00	2.723.777.238,00	55.081.629.136,00
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	624.886.509,00	542.987.773,00	46.314.009,00	1.214.188.291,00
26	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.469.321.503,00	237.455.475,00	0,00	2.706.776.978,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.872.612.695,00	546.709.556,00	13.001.000,00	2.432.323.251,00
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.982.152.799,00	947.285.802,00	169.241.174,00	5.098.679.775,00
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	11.477.741.641,00	387.173.160,00	43.703.922,00	11.908.618.723,00

NO	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI	TOTAL PER OPD
30	KECAMATAN GADINGREJO	2.008.916.678,46	2.719.868.721,00	1.458.461.637,00	6.187.247.036,46
31	KECAMATAN PURWOREJO	1.926.554.410,00	1.310.479.878,00	6.941.769.151,00	10.178.803.439,00
32	KECAMATAN BUGUL KIDUL	1.816.249.800,00	2.252.289.641,00	8.099.961.120,00	12.168.500.561,00
33	KECAMATAN PANGGUNGREJO	4.621.793.871,36	3.065.740.228,00	11.541.412.989,00	19.228.947.088,36
TOTAL		393.020.354.067,31	161.060.367.724,00	572.974.815.329,37	1.127.055.537.120,68

(3) Dana Cadangan

Dana Cadangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	86.000.133.684,16

Rincian saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.98.
Rincian Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-23	31-Des-22
Deposito	0,00	60.000.000.000,00
Giro	0,00	26.000.133.684,16
Total	**0,00**	**86.000.133.684,16**

Mutasi dana cadangan selama TA 2023 adalah sebagaimana tabel 5.99.

Tabel 5.99.
Mutasi Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
	31-Des-22			31-Des-23
Pokok Dana Cadangan	60.000.000.000,00	0,00	60.000.000.000,00	0,00
Bunga Dana Cadangan	35.633.056.684,16	0,00	35.633.056.684,16	0,00
- Jasa Giro Rekening	1.949.046.413,03	0,00	1.949.046.413,03	0,00
- Bunga Deposito	33.684.010.271,13	0,00	33.684.010.271,13	0,00
Penggunaan Dana Cadangan	(9.632.923.000,00)	0,00	(9.632.923.000,00)	0,00
Jumlah	**86.000.133.684,16**	**0,00**	**86.000.133.684,16**	**0,00**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun Anggaran.

Dana Cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.000.133.684,16 merupakan dana yang disisihkan guna mendanai program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017. Program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan dengan total dana sebesar Rp60.000.000.000,00 dimulai pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022. Dana Cadangan sebesar Rp86.000.133.684,16 dimaksud tersimpan dalam bentuk Deposito sebesar Rp60.000.000.000,00 dan Giro sebesar Rp36.633.056.684,16 dimana termasuk jasa giro dan bunga deposito karena penempatan dana cadangan yang dicatat menambah dana cadangan.

Sampai dengan akhir Tahun 2022 dana cadangan telah dipergunakan sebesar Rp9.632.923.000,00 untuk keperluan Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp4.038.609.000,00;
b) Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp3.192.691.000,00;
c) Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp2.401.623.000,00;
d) Tahun 2018 tidak terdapat realisasi penggunaan dana cadangan;
e) Tahun 2019 tidak terdapat realisasi penggunaan dana cadangan;
f) Tahun 2020 tidak terdapat realisasi penggunaan dana cadangan;
g) Tahun 2021 tidak terdapat realisasi penggunaan dana cadangan, dan;
h) Tahun 2022 tidak terdapat realisasi penggunaan dana cadangan

Realisasi pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2022 terlampir sebagaimana tabel 5.100.

Tabel 5.100.
Realisasi Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Jenis	No Bilyet	Jumlah
1	- Dana Cadangan 2013	Deposito	DB 238451	17.500.000.000,00
2	- Dana Cadangan 2014	Deposito	DB 238500	17.500.000.000,00
3	- Dana Cadangan 2015	Deposito	DB 268049	10.000.000.000,00
4	- Dana Cadangan 2015	Deposito	DB 268050	5.000.000.000,00
5	- Dana Cadangan 2017	Deposito	DB 361726	10.000.000.000,00
	Bunga Dana Cadangan			**35.633.056.684,16**
	- *Giro*			*1.949.046.413,03*
	- *Deposito*			*33.684.010.271,13*
	Pengunaan Dana Cadangan s.d. Tahun 2017			**(9.632.923.000,00)**
1	Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2018			0,00
2	Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2019			0,00
3	Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2020			0,00
4	Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2021			0,00
5	Penggunaan Dana Cadangan Tahun 2022			0,00
	Jumlah			**86.000.133.684,16**

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Adapun dasar penarikan dana cadangan tahun 2023 sebesar Rp86.000.133.684,16 sebagaimana berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, dimana dalam perda dimaksud berakhir di tahun 2021 dan pada Pasal II disebutkan bahwa "Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dilaksanakan atau dibiayai dari dana di luar dana cadangan dan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang ada, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan pembiayaan dana cadangan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD, setelah disetujui oleh DPRD atas usul Walikota melalui PPKD".
2. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 tentang pembentukan dana cadangan tanah jalan lingkar utara, disebutkan pada pasal 4 ayat (2) bahwa pembentukan

dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

3. Atas dasar dimaksud, telah disampaikan surat permohonan persetujuan pemindahbukuan dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan Nomor 900/1817/423.201/2023 tanggal 18 Desember 2023 kepada Ketua DPRD Kota Pasuruan.
4. Selanjutnya, atas dasar surat permohonan tersebut sesuai dengan surat dari Ketua DPRD Kota Pasuruan tanggal 29 Desember 2023 Nomor : 100.1.6.1/2523/423.040/2023 menyetujui terkait permohonan persetujuan pemindahbukuan dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menindaklanjuti surat dari ketua DPRD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan selaku BUD mengajukan surat pencairan deposito dan pemindahbukuan rekening dana cadangan ke RKUD kepada pimpinan PT Bank Jatim Cabang Pasuruan tanggal Pada tanggal 29 Desember 2023, Nomor : 900/1870/423.201/2023.

   Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara pasal 4 menyatakan bahwa pembentukan dana cadangan sebesar Rp37.055.609.161,93 yang berasal dari penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/keuntungan /capital gain atas penempatan Dana Cadangan dalam rekening dan/atau dalam protofolio yang diterima sampai dengan 31 Juli 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

(4) Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	46.802.204.565,33	**34.297.575.133,00**

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Aset Lainnya sebesar Rp46.802.204.565,33. Adapun Rincian Aset Lainnya terlampir pada tabel 5.101.

Tabel 5.101.
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20.277.671.836,00	18.581.691.000,00
Aset Tidak Berwujud	1.007.050.016,33	1.621.049.096,00
Aset Lain-lain	25.478.427.713,00	14.072.725.037,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	39.055.000,00	22.110.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**46.802.204.565,33**	**34.297.575.133,00**

a) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Tagihan Jangka Panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah. Tahun 2023 Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan memiliki saldo sebesar Rp0,00.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	20.277.671.836,00	18.581.691.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset berupa *Rest Area* Gadingrejo dengan tanah seluas 33.033m² berupa Bangun Guna Serah (BGS) tahun 2022 senilai Rp18.581.691.000,00. Kemitraan dengan pihak ketiga antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Citra Bangun Sarana Mojokerto Nomor 188/21/423.031/2010 dan Nomor 02/SPKT/CBS-KOTPSRN/RA/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa Jl. Soekarno-Hatta (*Rest Area*) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selama 30 (tiga puluh) Tahun yang dimulai tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2040.

Dengan adanya kemitraan ini, Pemerintah Kota Pasuruan berhak antara lain:

(1) memperoleh kontribusi sebesar Rp248.000.000,00 per Tahun selama 30 (tiga puluh) Tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani yaitu Pada tanggal 15 Oktober 2010;
(2) menerima kenaikan kontribusi setiap Tahun sebesar 2/3 dari tingkat inflasi nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari besarnya kontribusi Tahun sebelumnya.

Tahun 2023 nilai saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp20.277.671.836,00. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga bertambah sebesar Rp1.695.980.836,00 dengan rincian :

1) Mutasi tambah dari aset tetap tahun 2023 sebesar Rp2.480.340.589,00 atas kemitraan SPBU Bakalan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 130.1/17.1/423.013/2019 - 019.1/KPRI.PEMKOT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019;
2) Mutasi tambah dari aset ekstracomptable tahun sebelumnya sebesar Rp2.600.000,00;
3) Mutasi kurang atas penyusutan aset lainnya reklas ke kemitraan sebesar Rp786.959.753,00.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.007.050.016,33	1.621.049.096,00

Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.007.050.016,33 atau mengalami penurunan

sebesar Rp613.999.079,67 dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.621.049.096,00. Rincian penambahan aset tidak berwujud tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Modal Aset tidak berwujud berupa Software pada Dinas Perhubungan sebesar Rp28.000.000,00;
2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp77.418.000,00;
3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp120.000.000,00;
4) Koreksi nilai buku software pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp16.133.333,33;
5) Reklasifikasi Belanja barang dan Jasa ke Aset tidak berwujud pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp54.556.500,00.

Adapun pengurangan aset tidak berwujud tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Pengurangan aset tidak berwujud berupa software adanya reklasifikasi ATB ke Aset Lain-lain dikarenakan sudah tidak aktif tahun 2023 sebesar Rp73.366.666,00 pada Badan Pendapatan Daerah sesuai Surat Pernyataan Nomor 800/1825/423.203/2023 Tanggal 23 November 2023 dan BA Pemeriksaan Nomor 000.2.4/1824/423.203/2023 Tanggal 23 November 2023;
2) Terdapat Penghapusan Aset Lainnya (ATB) karena usang/tidak aktif Sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1852/423.201/2023 tanggal 7 November 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.599.450,00;
3) Terdapat Penghapusan Aset Lainnya (ATB) karena usang/tidak aktif Sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1851/423.201/2023 tanggal 7 Nopember 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp84.634.333,00;
4) Beban Amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp714.506.464,00;
5) Pengembangan SIM PKB sesuai No 027/898/423.106/PPKM/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 pada Dinas Perhubungan yang tidak menjadi kapitalisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp28.000.000,00.

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud SKPD tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 19**.

d) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	25.478.427.713,00	**14.072.725.037,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.478.427.713,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp11.432.711.935,00. Kenaikan tersebut setelah perhitungan ulang terkait aset lain-lain OPD Tahun 2023 aset rusak dari aset tetap maupun aset tak berwujud Pada OPD di Kota Pasuruan bersama dengan nilai penyusutannya. Rincian Aset Lain-lain dapat disajikan sebagaimana terlampir pada tabel 5.102.

Tabel 5.102.
Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Nilai Perolehan per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023	Nilai Buku 31 Des 2023
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.887.851.219,00	20.261.724.693,00	626.126.526,00
2	DINAS KESEHATAN	5.787.090.644,53	5.064.646.559,53	722.444.085,00
3	RSUD DR R SOEDARSONO	1.381.250.164,00	1.168.340.561,00	212.909.603,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.779.491.333,00	2.758.580.305,00	20.911.028,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6.317.839.636,00	83.396.381,00	6.234.443.255,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.512.972.995,00	1.286.891.830,00	226.081.165,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	508.325.000,00	505.902.381,00	2.422.619,00
8	DINAS SOSIAL	405.009.500,00	405.009.500,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	658.819.500,00	658.819.500,00	0,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	2.204.855.198,00	2.174.393.531,00	30.461.667,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.797.827.898,00	1.685.492.625,00	112.335.273,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.147.773.050,00	1.077.155.753,00	70.617.297,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	725.578.673,00	532.764.288,00	192.814.385,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	652.461.857,00	639.818.057,00	12.643.800,00
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	292.995.750,00	292.995.750,00	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	414.550.281,00	406.315.281,00	8.235.000,00
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	800.379.102,00	787.781.186,00	12.597.916,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	312.762.530,00	303.569.322,00	9.193.208,00
19	DINAS PERIKANAN	483.158.145,00	470.680.062,00	12.478.083,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	2.025.724.189,00	1.637.968.478,00	387.755.711,00
21	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.724.853.652,00	2.091.691.597,00	633.162.055,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	1.677.875.257,00	1.619.770.178,00	58.105.079,00
23	INSPEKTORAT	869.869.425,00	862.889.841,00	6.979.584,00
24	BAPPELIBANGDA	246.014.925,00	242.414.925,00	3.600.000,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	552.352.238,66	548.368.075,66	3.984.163,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	750.909.264,00	726.756.765,00	24.152.499,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	239.276.716,00	237.881.716,00	1.395.000,00
28	SEKRETARIAT DPRD	2.551.808.810,00	2.551.328.810,00	480.000,00
29	KECAMATAN GADINGREJO	1.186.465.081,00	1.050.724.358,00	135.740.723,00
30	KECAMATAN PANGGUNGREJO	891.210.211,18	877.337.178,18	13.873.033,00
31	KECAMATAN BUGUL KIDUL	1.499.005.687,00	1.457.019.719,00	41.985.968,00
32	KECAMATAN PURWOREJO	1.203.227.172,00	1.065.653.415,00	137.573.757,00
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	656.577.395,00	646.817.164,00	9.760.231,00
	TOTAL	**66.146.162.498,37**	**56.180.899.785,37**	**9.965.262.713,00**

Termasuk didalam aset lain-lain dijelaskan bahwa terdapat pengakuan Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF sesuai dengan Lampiran Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang rincian penyaluran Dana *Treasury Deposite Facilities (TDF)* dalam rangka mendukung belanja daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota

Pasuruan memberikan penjelasan bahwa mendapat alokasi penyaluran nontunai berupa *Treasury Deposite Facilities (TDF)* bulan desember tahun 2023 sebesar Rp.15.513.165.000,00.

e) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.578.426.259,67	**7.058.752.335,00**

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.578.426.259,67 atau mengalami penurunan sebesar Rp480.326.075,33 dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.058.752.335,00. Adapun rincian akumulasi amortisasi aset tidak berwujud disajikan Pada **Lampiran 19**.

f) Kas yang dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	39.055.000,00	**22.110.000,00**

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp39.055.000,00 yang terdiri uang jaminan atas sewa rusunawa tahun 2023 yang dikelola UPT Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

b. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	12.951.392.734,66	**9.679.639.008,43**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.951.392.734,66 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.103.
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	553.750,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	710.469.536,66	460.151.609,83
Utang Belanja	11.860.098.180,00	9.207.824.863,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	380.825.018,00	11.108.785,60
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**12.951.392.734,66**	**9.679.639.008,43**

a. Pendapatan diterima dimuka pada tahun 2023 sebesar Rp710.469.536,66, Adapun rincian pendapatan diterima dimuka di tahun 2023 adalah sebagai berikut :
   a) Tahun 2023 terdapat penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp734.797.901,66 dengan rincian sebagai berikut:
      (i) Pendapatan diterima dimuka sewa tanah eks bengkok tahun 2023 sebesar Rp32.557.016,67
      (ii) Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantor BPR Kota Pasuruan Pada Tahun 2023 sebesar Rp33.516.875,00;
      (iii) Pendapatan diterima atas kerjasama tower Bali Towerindo tahun 2023 sebesar Rp29.109.375,00;
      (iv) Pendapatan diterima dimuka atas kerjasama rest area gadingrejo tahun 2023 sebesar Rp280.198.819,67;
      (v) Pendapatan diterima dimuka atas pembayaran pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp289.235.547,32;
      (vi) Pendapatan diterima dimuka atas uang jaminan sewa rusunawa tahun 2023 yang dikelola UPT Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.945.000,00;
      (vii) Pendapatan diterima dimuka RSUD Dr R Soedarsono atas Jasa Raharja dan PT Central Motor Wheel Indonesia sebesar Rp6.796.903,00.

   b) Adapun pengurangan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2023 sebesar Rp438.041.609,83 dengan rincian sebagaimana berikut :
      (i) Setoran sewa tanah eks bengkok Pada BPKA Tahun 2022 sebesar Rp62.687.850,00;
      (ii) setoran atas pembayaran sewa dari Bali Towerindo tahun 2022 sebesar Rp29.109.375,00;
      (iii) Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantor BPR Kota Pasuruan sebesar Rp26.813.500,00;
      (iv) Pendapatan diterima dimuka atas pembayaran sewa pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp319.430.884,83.

b. Utang Belanja adalah kewajiban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai tanggal neraca. Utang belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.860.098.180,00. Rincian utang belanja tahun 2023 dapat dirinci sebagaimana berikut :
   - Utang Belanja Pegawai sebesar Rp6.088.410.132,00;
   - Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.284.406.461,00;
   - Utang Belanja hibah sebesar Rp9.000.000,00;
   - Utang belanja yang menjadi asset sebesar Rp478.281.587,00.

c. Utang jangka pendek lainnya tahun 2023 sebesar Rp380.825.018,00, saldo tersebut dapat dijelaskan atas sisa dana Bantuan Keuangan Khusus Kota Pasuruan tahun 2023 yang belum disetor Kembali ke Provinsi Jawa Timur sebesar Rp380.600.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No:900.1.15.3/Kota Pasuruan/BA-TRIPARTIT/2024. Serta kelebihan pembayaran dari PT Jasa Raharja tahun 2023 sebesar Rp225.018,00.
   Rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana terlampir pada **lampiran 22**.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

c. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	3.167.659.311.641,08	**3.199.986.024.017,58**

Ekuitas Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.167.659.311.641,08 mengalami kenaikan sebesar Rp32.326.712.376,50 dari ekuitas tahun 2022.

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	958.638.436.461,07	**941.857.040.096,78**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pasuruan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp958.638.436.461,07 Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.104.
Rincian Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	**958.638.436.461,07**	**941.857.040.096,78**	**16.781.396.364,29**	**1,78**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	182.250.892.210,87	148.656.294.071,92	33.594.598.138,95	22,60
PENDAPATAN TRANSFER-LO	761.977.904.421,60	759.856.127.023,40	2.121.777.398,20	0,28
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	14.409.639.828,60	33.344.619.001,46	(18.934.979.172,86)	(56,79)

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp182.250.892.210,87 Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi empat jenis pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.105.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**182.250.892.210,87**	**148.656.294.071,92**	**33.594.598.138,95**	**22,60**
Pajak Daerah-LO	54.047.740.246,29	47.107.755.303,70	6.939.984.942,59	14,73
Retribusi Daerah-LO	12.444.061.860,33	8.399.534.123,11	4.044.527.737,22	48,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.283.921.167,03	6.115.362.978,37	168.558.188,66	2,76
Lain-lain PAD yang Sah-LO	109.475.168.937,22	87.033.641.666,74	22.441.527.270,48	25,78

a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2023 Pajak Daerah - LO terealisasi sebesar Rp54.047.740.246,29. Total realisasi Pajak Daerah LO mengalami kenaikan sebesar 14,73% atau 6.939.984.942,59 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp47.107.755.303,70. Adapun rincian pendapatan pajak daerah – LO terlampir pada tabel 5.106.

Tabel 5.106.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel	1.744.223.310,00	1.126.304.623,00	617.918.687,00	54,86
2	Pajak Restoran	6.548.649.351,45	3.770.384.608,00	2.778.264.743,45	73,69
3	Pajak Hiburan	96.581.325,00	83.682.375,00	12.898.950,00	15,41
4	Pajak Reklame	865.683.399,51	800.164.289,70	65.519.109,81	8,19
5	Pajak Penerangan Jalan	17.638.730.639,00	17.184.976.110,00	453.754.529,00	2,64
6	Pajak Parkir	333.020.722,33	130.482.050,00	202.538.672,33	155,22
7	Pajak Air Tanah	81.047.249,00	88.450.110,00	(7.402.861,00)	(8,37)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.815.111.759,00	5.713.445.298,00	2.101.666.461,00	36,78
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.924.692.491,00	18.209.865.840,00	714.826.651,00	3,93
	TOTAL	**54.047.740.246,29**	**47.107.755.303,70**	**6.939.984.942,59**	**14,73**

Pendapatan Pajak Daerah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan pajak – LO dengan pajak – LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih pendapatan pajak tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 5.107.

Tabel 5.107.
Rincian selisih Pendapatan Pajak Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Pajak Hotel	1.743.792.310,00	1.744.223.310,00	(431.000,00)
2	Pajak Restoran	6.517.775.391,45	6.548.649.351,45	(30.873.960,00)
3	Pajak Hiburan	96.581.325,00	96.581.325,00	0,00
4	Pajak Reklame	835.488.062,00	865.683.399,51	(30.195.337,51)
5	Pajak Penerangan Jalan	17.487.016.486,00	17.638.730.639,00	(151.714.153,00)
6	Pajak Parkir	332.046.597,33	333.020.722,33	(974.125,00)
7	Pajak Air Tanah	79.931.053,00	81.047.249,00	(1.116.196,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.455.714.471,00	7.815.111.759,00	(1.359.397.288,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.924.692.491,00	18.924.692.491,00	0,00
	TOTAL	**52.473.038.186,78**	**54.047.740.246,29**	**(1.574.702.059,51)**

Selisih Pajak Daerah LRA dengan Pajak Daerah LO Tahun 2023 sebesar (Rp1.574.702.059,51). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

- Penambahan Piutang PBB 2023 Rp 2.167.989.210,00
- Penambahan Piutang PPJU 2023 Rp 1.612.081.552,00
- Penambahan Piutang Pajak Parkir 2023 Rp 1.936.200,00

• Penambahan Piutang Pajak Warung 2023	Rp	36.136.515,00
• Penambahan Piutang Pajak Rumah Kost 2023	Rp	640.000,00
• Penambahan Piutang Pajak Air Tanah 2023	Rp	2.652.611,00
• Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022 Pajak Reklame	Rp	319.430.885
Total Penambahan	**Rp**	**4.140.866.972,83**
Pengurangan :		
• Pengurangan dari pembayaran PBB sampai dengan tahun 2023	Rp	808.591.922,00
• Pengurangan dari pembayaran piutang PPJU sampai dengan tahun 2023	Rp	1.460.367.399,00
• Pengurangan dari pembayaran Pajak Parkir sampai dengan tahun 2023	Rp	962.075,00
• Pengurangan dari pembayaran Pajak Warung sampai dengan tahun 2023	Rp	5.262.555,00
• Pengurangan dari pembayaran Pajak Rumah Kost sampai dengan tahun 2023	Rp	209.000
• Pengurangan dari pembayaran Pajak Air Tanah sampai dengan tahun 2023	Rp	1.536.415,00
• Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022 atas Pajak Reklame	Rp	289.235.547,32
Total Pengurangan	**Rp**	**2.566.164.913,32**
Selisih	**Rp**	**1.574.702.059,51**

b) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Daerah - LO terealisasi sebesar Rp12.444.061.860,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Retribusi Daerah				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	831.717.300,00	359.510.700,00	472.206.600,00	131,35
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.421.135.100,00	789.474.000,00	631.661.100,00	80,01
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.350.000,00	39.500.000,00	(9.150.000,00)	(23,16)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.772.995.000,00	1.958.560.000,00	814.435.000,00	41,58
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.946.821.330,00	1.759.827.611,00	1.186.993.719,00	67,45
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	260.352.500,00	298.655.000,00	(38.302.500,00)	(12,82)
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	-
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.460.400,00	12.995.400,00	(535.000,00)	(4,12)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.354.509.411,33	1.924.330.730,11	430.178.681,22	22,35
10	Retribusi Terminal	4.548.500,00	6.867.000,00	(2.318.500,00)	(33,76)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	521.615.000,00	372.140.700,00	149.474.300,00	40,17
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	86.925.000,00	84.375.000,00	2.550.000,00	3,02
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.195.402.319,00	787.367.982,00	408.034.337,00	51,82
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	700.000,00	(700.000,00)	(100,00)
	TOTAL	**12.444.061.860,33**	**8.399.534.123,11**	**4.044.527.737,22**	**48,15**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar 48,15% dari Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp8.399.534.123,11 sehingga realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp12.444.061.860,33.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan retribusi – LO dengan retribusi – LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih pendapatan retribusi tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 5.109.

Tabel 5.109.
Rincian selisih Pendapatan Retribusi Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	Retribusi Daerah			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	842.872.300,00	831.717.300,00	11.155.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.421.135.100,00	1.421.135.100,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.772.995.000,00	2.772.995.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.033.982.572,00	2.946.821.330,00	(912.838.758,00)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	260.352.500,00	260.352.500,00	0,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.460.400,00	12.460.400,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.315.139.953,00	2.354.509.411,33	(39.369.458,33)
10	Retribusi Terminal	4.548.500,00	4.548.500,00	0,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	521.615.000,00	521.615.000,00	0,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	86.925.000,00	86.925.000,00	0,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.195.402.319,00	1.195.402.319,00	0,00
14	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**11.503.008.644,00**	**12.444.061.860,33**	**(941.053.216,33)**

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Retribusi Daerah LO sebesar (Rp941.053.216,33). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

• Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2023	Rp	33.525.000,00
• Penambahan dari Piutang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah tahun 2023	Rp	23.100.000,00
• Penambahan dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2023	Rp	1.058.869.945,00
• Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022 atas retribusi pemakaian kekayaan daerah		89.501.350,00
Total Penambahan	**Rp**	**1.204.996.295,00**

Pengurangan :

• Pengurangan dari pembayaran piutang Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan tahun 2023	Rp	146.031.187,00
• Pengurangan dari pembayaran piutang Retribusi Pemakaian	Rp	2.930.000,00

kekayaan Daerah sampai dengan tahun 2023

•	Pengurangan dari pembayaran piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan tahun 2023	Rp	44.680.000,00
•	Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2023 atas retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp	66.073.891,67
•	Pengurangan atas pembayaran piutang tanah eks bengkok di BPKA	Rp	4.228.000,00
Total Pengurangan		**Rp**	**263.943.078,67**
Selisih		**Rp**	**941.053.216,33**

c) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO

Tahun 2023 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan - LO terealisasi sebesar Rp6.283.921.167,03 dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 5.110.

Tabel 5.110.
Realisasi Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bank Jatim	5.313.022.470,03	5.214.948.218,37	98.074.251,66	1,88
2	BPR Bank Jatim	91.050.000,00	80.377.000,00	10.673.000,00	13,28
3	BPR Kota Pasuruan	879.848.697,00	820.037.760,00	59.810.937,00	7,29
4	PDAM Kota Pasuruan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.283.921.167,03**	**6.115.362.978,37**	**168.558.188,66**	**2,76**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,76% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.115.362.978,37 sehingga realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.283.921.167,03.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan LO dengan LRA tahun 2023 tidak terdapat selisih, rincian realisasi terlampir pada tabel 5.111.

Tabel 5.111.
Rincian selisih Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Bank Jatim	5.313.022.470,03	5.313.022.470,03	0,00
2	BPR Bank Jatim	91.050.000,00	91.050.000,00	0,00
3	BPR Kota Pasuruan	879.848.697,00	879.848.697,00	0,00
4	PDAM Kota Pasuruan	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**6.283.921.167,03**	**6.283.921.167,03**	0,00

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO terealisasi sebesar Rp109.475.168.937,22. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 25,78% atau sebesar Rp22.441.527.270,48 sehingga realisasi tahun 2023 sebesar Rp109.475.168.937,22.

Adapun rincian tersebut disajikan dalam tabel 5.112.

Tabel 5.112.
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Lain-lain PAD yang Sah				
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	525.371.881,00	(525.371.881,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	139.445.000,00	97.750.000,00	41.695.000,00	42,65
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	192.881.600,00	90.499.300,00	102.382.300,00	113,13
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	810.000,00	795.000,00	15.000,00	1,89
5	Hasil Sewa BMD	42.342.500,00	903.820.696,33	(861.478.196,33)	(95,32)
6	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	162.548.180,33	75.471.304,00	87.076.876,33	115,38
7	Hasil dari Bangun Guna Serah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8	Hasil Kerja Sama Daerah	243.951.460,00	61.627.804,00	182.323.656,00	295,85
9	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.737.083.009,63	1.692.312.108,45	2.044.770.901,18	120,83
10	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	220.603.436,29	(220.603.436,29)	(100,00)
11	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.843.319.075,19	1.969.198.629,79	(125.879.554,60)	(6,39)
12	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	612.059.540,00	(612.059.540,00)	(100,00)
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	805.870.059,54	994.438.486,17	(188.568.426,63)	(18,96)
14	Pendapatan Denda Pajak Daerah	292.276.428,55	285.667.606,00	6.608.822,55	2,31
15	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	9.814.960,00	(9.814.960,00)	(100,00)
16	Pendapatan dari Pengembalian	1.730.384.804,63	75.730.655,00	1.654.654.149,63	2.184,92
17	Pendapatan BLUD	90.170.893.532,35	70.360.205.750,71	19.810.687.781,64	28,16
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.057.303.712,00	9.043.274.509,00	1.014.029.203,00	11,21
19	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	41.059.575,00	0,00	41.059.575,00	(41.059.575,00)
	TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**109.475.168.937,22**	**87.033.641.666,74**	**22.441.527.270,48**	**25,78**

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO dengan Lain-lain PAD yang sah – LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih Lain-lain PAD yang sah tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 5.113.

Tabel 5.113.
Rincian selisih Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	Lain-lain PAD yang Sah			
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	139.445.000,00	139.445.000,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	192.881.600,00	192.881.600,00	0,00
4	Hasil Penjualan Aset Lainnya	810.000,00	810.000,00	0,00
5	Hasil Sewa BMD	42.342.500,00	42.342.500,00	0,00
6	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	767.865.000,00	162.548.180,33	605.316.819,67
7	Hasil dari Bangun Guna Serah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8	Hasil Kerja Sama Daerah	243.951.460,00	243.951.460,00	0,00
9	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.737.083.009,63	3.737.083.009,63	0,00
10	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.843.319.075,19	1.843.319.075,19	0,00
12	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	805.870.059,54	805.870.059,54	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Daerah	292.276.428,55	292.276.428,55	0,00
15	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian	1.707.518.007,63	1.730.384.804,63	(22.866.797,00)
17	Pendapatan BLUD	89.478.938.216,35	90.170.893.532,35	(691.955.316,00)
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.057.303.712,00	10.057.303.712,00	0,00
19	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00
20	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00
21	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	0,00	0,00	0,00
22	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	41.059.575,00	41.059.575,00	0,00
	TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**109.365.663.643,89**	**109.475.168.937,22**	**(109.505.293,33)**

Selisih Lain-lain PAD yang sah LRA dengan lain-lain PAD yang sah LO sebesar (Rp109.505.293,33) Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :

- Penambahan Piutang RSUD (BLUD) tahun 2023 Rp 7.676.124.639,00
- Penambahan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD tahun 2023 Rp 20.820.000,00
- Penambahan Piutang Pengembalian Belanja TPP tahun 2023 Rp 22.866.797,00
- Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022 atas Pendapatan Hasil Sewa BMD Rp 29.109.375,00

Total Penambahan **Rp 7.748.920.811,00**

Pengurangan :

- Pembayaran Piutang lain-lain PAD yang sah sampai dengan Tahun 2023 Rp 345.938.000,00
- Pembayaran atas Piutang RSUD (BLUD) sampai dengan tahun 2023 Rp 6.977.147.402,00
- Pendapatan diterima Dimuka Tahun 2022 Pendapatan Hasil Rp 309.308.194,67

Kerjasama Pemanfaatan BMD - BPKA

• Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 RSUD Dr R Soedarsono	Rp	7.021.921,00
Total Pengurangan	**Rp**	**7.639.415.517,67**
Selisih	**Rp**	**109.505.293,33**

2) Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp761.977.904.421,60 Kelompok Pendapatan Transfer – LO terinci sebagaimana terlampir pada tabel 5.114.

Tabel 5.114.
Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**761.977.904.421,60**	**759.856.127.023,40**	**2.121.777.398,20**	**0,28**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	657.999.923.100,60	655.142.154.312,40	2.857.768.788,20	0,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	103.977.981.321,00	104.713.972.711,00	(735.991.390,00)	(0,70)

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAK dan DAU terealisasi di Tahun 2023 sebesar Rp657.999.923.100,60. Berikut rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dapat diuraikan sebagaimana tabel 5.115.

Tabel 5.115.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	52.581.018.953,60	52.846.793.395,40	(265.774.441,80)	(0,50)
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ SDA	44.239.975.000,00	88.102.041.632,00	(43.862.066.632,00)	(49,79)
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.076.974.462,00	400.677.921.887,00	26.399.052.575,00	6,59
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.244.880.377,00	33.551.889.313,00	2.692.991.064,00	8,03
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.177.014.308,00	61.954.766.085,00	20.222.248.223,00	32,64
6	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	18.008.742.000,00	(2.328.682.000,00)	(12,93)
	TOTAL	**657.999.923.100,60**	**655.142.154.312,40**	**2.857.768.788,20**	**0,44**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,43% atau sebesar Rp2.857.768.788,20 sehingga realisasi Tahun 2023 sebesar Rp657.999.923.100,60.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat LRA dengan LO tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp6.609.198.888,60. Selisih tersebut adalah pengakuan fasilitas TDF sesuai dengan nota dinas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-54/PK/PK.02//2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang rincian penyaluran dana *Treasury Deposite Facilities (TDF)* dalam rangka mendukung belanja daerah tahun anggaran 2024 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir pada tabel 5.116.

Tabel 5.116.
Rincian selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	52.499.578.024,00	52.581.018.953,60	(81.440.929,60)
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/ SDA	37.712.217.041,00	44.239.975.000,00	(6.527.757.959,00)
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.076.974.462,00	427.076.974.462,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.244.880.377,00	36.244.880.377,00	0,00
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.177.014.308,00	82.177.014.308,00	0,00
6	Dana Insentif Daerah (DID)	15.680.060.000,00	15.680.060.000,00	0,00
	TOTAL	**651.390.724.212,00**	**657.999.923.100,60**	**(6.609.198.888,60)**

Selisih Pendapatan transfer Pemerintah Pusat antara LRA dan LO sebesar Rp6.609.198.888,60 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Penambahan

• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023	Rp	452.396.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH PPH Pasal 21 Tahun 2023	Rp	2.782.850.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN Tahun 2023	Rp	45.744.000,00
• Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023	Rp	2.131.703.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun 2023	Rp	9.381.411.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun 2023	Rp	2.612.162.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Gas Bumi Tahun 2023	Rp	4.818.000,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan BatuBara Royalti Tahun 2023	Rp	233.784.000,00
Total	**Rp**	**17.644.868.000,00**

Pengurangan

• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	Rp	540.266.937,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH PPH Pasal 21 Tahun 2022	Rp	1.835.399.643,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN Tahun 2022	Rp	230.291.890,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBHCHT Tahun 2022	Rp	2.722.617.764,00
• Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 yang terbayar	Rp	2.675.836,40
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Tahun 2022	Rp	4.890.481.005,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Tahun 2022	Rp	310.711.246,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Gas Bumi Tahun 2022	Rp	254.233.911,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) Provisi Sumber Daya Hutan Tahun 2022	Rp	37.237.668,00
• Alokasi penyaluran Dana TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA)	Rp	211.753.211,00

Perikanan Tahun 2022

Total	**Rp**	**11.035.669.111,40**
Selisih	**Rp**	**6.609.198.888,60**

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO terealisasi sebesar Rp103.977.981.321,00, sebagaimana usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 5.117.

Tabel 5.117.
Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.574.897.700,00	92.313.939.711,00	9.260.957.989,00	10,03
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.403.083.621,00	12.400.033.000,00	(9.996.949.379,00)	(80,62)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**103.977.981.321,00**	**104.713.972.711,00**	**(735.991.390,00)**	**(0,70)**

Adapun rincian Bantuan Keuangan Tahun 2023 berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana rincian berikut:

(1) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk honorarium kinerja guru non PNS selama 2 bulan TA 2023 sebesar Rp16.000.000,00;

(2) Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 Bulan TA. 2023 sebesar Rp75.600.000,00;

(3) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan, Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama 6 bulan, dan Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP selama 10 bulan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.276.100.000,00;

(4) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk Pendampingan Penyelenggaraan Pesantren Sehat (Santri Jatim Sehat dan Berkah/SAJADAH) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.383.621,00.

Pendapatan transfer LO diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil yang menjadi hak daerah. Di tahun 2023 pendapatan transfer antar daerah LRA dengan transfer antar daerah LO terdapat selisih yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang belum salur pada tahun 2023, rincian perbedaan pendapatan transfer daerah LRA dan LO sebagaimana terlampir pada tabel 5.118.

Tabel 5.118.
Rincian selisih Pendapatan Transfer antar daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.053.799.100,00	101.574.897.700,00	6.478.901.400,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	2.403.083.621,00	2.403.083.621,00	0,00

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	Daerah Provinsi			
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**110.455.882.721,00**	**103.977.981.321,00**	**6.478.901.400,00**

Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO sebesar Rp6.478.901.400,00 Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

Pengurangan :

- Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2022

Piutang Pendapatan Daba Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA. 2022 sesuai SK Gubernur Nomor 188/987/KTPS/013/2022 Rp 6.478.901.400,00

Total Pengurangan **Rp 6.478.901.400,00**

Selisih **Rp (6.478.901.400,00)**

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.409.639.828,60 dengan rincian sebagaimana tabel 5.119 berikut,

Tabel 5.119.
Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1	Pendapatan Hibah-LO	14.409.639.828,60	33.344.529.979,46	(18.934.890.150,86)	(56,79)
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	89.022,00	(89.022,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**14.409.639.828,60**	**33.344.619.001,46**	**(18.934.979.172,86)**	**(56,79)**

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 56,79% atau 18.934.979.172,86 dari realisasi Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp33.344.619.001,46.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penagihan. Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO dengan LRA terdapat selisih karena ada pengakuan hak yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan, adapun rincian selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah LRA dan LO tahun 2023 sebagaimana terlampir pada tabel 5.120.

Tabel 5.120.
Rincian selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1	Pendapatan Hibah-LO	222.000.000,00	14.409.639.828,60	(14.187.639.828,60)
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**222.000.000,00**	**14.409.639.828,60**	**(14.187.639.828,60)**

Terdapat selisih antara pendapatan Hibah Pada LRA dan LO adalah penambahan hibah selama tahun 2023 sebesar Rp14.187.639.828,60. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

Penambahan hibah dengan rincian :

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.018.177.078,00
• Dinas Kesehatan	Rp	2.271.351.636,10
• RSUD Dr R Soedarsono	Rp	556.891.491,00
• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	5.738.311.463,00
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1.063.888.215,00
• Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Rp	235.547.445,50
• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	254.550.000,00
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	232.499.400,00
• Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	2.332.906.100,00
• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp	483.517.000,00
Total	**Rp**	**14.187.639.828,60**

b. Beban LO

Beban-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	979.927.705.268,29	**943.135.734.444,38**

Tahun 2023 Beban - LO terealisasi sebesar Rp979.927.705.268,29 dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 5.121.
Realisasi Beban – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
8	**BEBAN**	**979.927.705.268,29**	**943.135.734.444,38**	**36.791.970.823,91**	**3,90**
8.1.1	Beban Pegawai	373.259.522.337,00	370.409.364.401,00	2.850.157.936,00	0,77
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	422.303.799.111,66	375.034.890.441,46	47.268.908.670,20	12,60
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	53.315.739.949,20	38.700.549.804,00	14.615.190.145,20	37,76
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	15.823.991.573,00	26.998.133.100,00	(11.174.141.527,00)	(41,39)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	3.794.728.575,50	1.510.265.623,80	2.284.462.951,70	151,26
8.1.8	Beban Lain-lain	12.817.791.410,93	31.523.603.337,00	(18.705.811.926,07)	(59,34)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.298.327.892,00	45.219.268.017,00	(1.920.940.125,00)	(4,25)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.381.550.510,00	14.777.184.601,00	604.365.909,00	4,09
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.150.969.464,00	37.295.054.128,12	1.855.915.335,88	4,98
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	66.777.981,00	0,00	66777981,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	714.506.464,00	1.667.420.991,00	(952.914.527,00)	(57,15)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi sampai dengan 31 Desember belum dibayar.

Tabel 5.122.
Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Beban Pegawai				
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	201.430.523.601,00	199.747.019.212,00	1.683.504.389,00	0,84
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	96.000.542.179,00	83.837.308.581,00	12.163.233.598,00	14,51
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.180.965.856,00	45.130.405.391,00	(5.949.439.535,00)	(13,18)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.961.003.918,00	14.380.437.393,00	(419.433.475,00)	(2,92)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	581.128.223,00	741.423.144,00	(160.294.921,00)	(21,62)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	741.600.000,00	741.600.000,00	0,00	-
7	Beban Pegawai Dana BOS	0,00	3.278.650.000,00	(3.278.650.000,00)	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	21.363.758.560,00	22.552.520.680,00	(1.188.762.120,00)	(5,27)
	TOTAL	**373.259.522.337,00**	**370.409.364.401,00**	**2.850.157.936,00**	**0,77**

Beban Pegawai Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp373.259.522.337,00 Beban pegawai pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.850.157.936,00 atau 0,77%.

Beban pegawai diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Pemerintah Daerah. Beban pegawai dengan belanja pegawai tahun 2023 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban pegawai dengan belanja pegawai terlampir pada tabel 5.123.

Tabel 5.123.
Perbedaan Beban Pegawai –Belanja Pegawai Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	Beban Pegawai			
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	201.430.523.601,00	201.430.523.601,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	92.485.943.648,00	96.000.542.179,00	(3.514.598.531,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.180.965.856,00	39.180.965.856,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.961.003.918,00	13.961.003.918,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	581.128.223,00	581.128.223,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	741.600.000,00	741.600.000,00	0,00
7	Beban Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	21.138.966.921,00	21.363.758.560,00	(224.791.639,00)
	TOTAL	**369.520.132.167,00**	**373.259.522.337,00**	**(3.739.390.170,00)**

Terdapat selisih antara belanja pegawai - LRA dan beban pegawai - LO sebesar Rp3.739.390.170,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :		
Utang Belanja Pegawai Tahun 2023	Rp	6.088.098.113,00
Total Penambahan	**Rp**	**6.088.098.113,00**
Pengurangan :		
Pembayaran Utang Belanja Pegawai sampai dengan tahun 2023	Rp	2.348.707.943,00
Total Pengurangan	**Rp**	**2.348.707.943,00**
Selisih	**Rp**	**3.739.390.170,00**

2) Beban Barang dan Jasa – LO

Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Barang dan Jasa tahun 2023 bisa diuraikan dalam 4 rincian obyek, sebagaimana berikut :

a) Beban Persediaan sebesar Rp120.585.167.972,63
b) Beban Jasa sebesar Rp246.607.444.352,03
c) Beban Pemeliharaan sebesar Rp21.074.322.557,00
d) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp34.036.864.230,00

Tabel 5.124.
Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	79.149.350.722,63	69.361.439.149,97	9.787.911.572,66	14,11
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	42.389.050,00	(42.389.050,00)	(100,00)
3	Belanja Jasa Kantor	145.085.968.453,11	126.661.291.595,00	18.424.676.858,11	14,55
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.328.485.172,00	38.218.541.236,35	1.109.943.935,65	2,90
5	Belanja Sewa Tanah	397.933.119,00	437.574.000,00	(39.640.881,00)	(9,06)
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.718.731.700,00	1.222.635.875,00	1.496.095.825,00	122,37
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	117.000.000,00	6.529.270.808,00	(6.412.270.808,00)	(98,21)
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	266.340.000,00	52.996.000,00	213.344.000,00	402,57
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.663.070.015,00	6.028.678.619,00	1.634.391.396,00	27,11
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.087.330.296,00	4.513.174.131,00	574.156.165,00	12,72
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.555.449.619,00	3.857.832.700,00	697.616.919,00	18,08
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	4.041.280,00	(4.041.280,00)	(100,00)
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.384.753.982,00	10.630.348.743,00	3.754.405.239,00	35,32
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.239.440.887,00	4.926.390.561,00	313.050.326,00	6,35
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	316.747.735,00	222.407.900,00	94.339.835,00	42,42
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.808.781.422,00	28.050.712.863,00	5.758.068.559,00	20,53
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.056.800.600,00	3.156.676.784,00	(99.876.184,00)	(3,16)
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.032.000.000,00	2.508.009.212,00	(1.476.009.212,00)	(58,85)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.354.613.751,00	13.022.635.336,00	3.331.978.415,00	25,59
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.741.001.637,92	55.587.844.598,14	8.153.157.039,78	14,67
	Total	**422.303.799.111,66**	**375.034.890.441,46**	**47.268.908.670,20**	**12,60**

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp422.303.799.111,66. Beban Barang dan Jasa Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47.268.908.670,20 atau sebesar 12,60% dari beban barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp375.034.890.441,46.

Beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa tahun 2023 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban barang dan jasa dengan belanja barang dan jasa terlampir pada tabel 5.125.

Tabel 5.125.
Perbedaan Beban dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Belanja Barang Pakai Habis	79.941.506.362,00	79.149.350.722,63	792.155.639,37
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	145.922.946.905,00	145.085.968.453,11	836.978.451,89
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	39.328.485.172,00	39.328.485.172,00	0,00
5	Belanja Sewa Tanah	397.933.119,00	397.933.119,00	0,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.718.731.700,00	2.718.731.700,00	0,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	266.340.000,00	266.340.000,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.663.070.015,00	7.663.070.015,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.087.330.296,00	5.087.330.296,00	0,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.555.449.619,00	4.555.449.619,00	0,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.384.753.982,00	14.384.753.982,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.239.440.887,00	5.239.440.887,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	316.747.735,00	316.747.735,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.808.781.422,00	33.808.781.422,00	0,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.056.800.600,00	3.056.800.600,00	0,00
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.032.000.000,00	1.032.000.000,00	0,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.354.613.751,00	16.354.613.751,00	0,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.741.001.637,92	63.741.001.637,92	0,00
	Total	**423.932.933.202,92**	**422.303.799.111,66**	**1.629.134.091,26**

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa - LRA dan beban barang dan jasa - LO sebesar Rp1.681.334.643,26. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :

- Persediaan tahun 2022 yang digunakan di tahun 2023 Rp 21.667.082.304,11
- Persediaan tahun 2023 yang dimutasi ke SKPD lain Rp 1.545.677,00
- Penambahan dari aset ekstracomptable tahun 2023 Rp 1.613.815.567,38
- Reklas Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 Rp 674.872.653,00

•	Penambahan Hibah Barang dan Jasa tahun 2023	Rp	3.760.014.602,60
•	Penambahan dari Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	Rp	5.282.727.841,00
•	Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023	Rp	225.018,00
•	Penambahan dari Beban dibayar dimuka tahun 2022	Rp	78.775.506,85
•	Penambahan dari Piutang yang gagal klaim pada RSUD Dr R Soedarsono	Rp	96.080.600,00
Total Penambahan		**Rp**	**33.175.139.769,94**
Pengurangan :			
•	Pengurangan dari sisa persediaan tahun 2023	Rp	22.553.055.456,46
•	Persediaan 2023 yang dimutasi ke SKPD lain	Rp	1.545.677,00
•	Pengurangan atas pembayaran utang belanja barang dan jasa tahun 2022	Rp	6.198.017.332,00
•	Pengurangan atas pembayaran Utang Jk Pendek Lainnya tahun 2022	Rp	11.108.785,60
•	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap tahun 2023	Rp	5.900.328.810,00
•	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tidak Berwujud tahun 2023	Rp	54.556.500,00
•	Pengurangan dari Beban dibayar dimuka 2023	Rp	85.661.300,14
Total Pengurangan		**Rp**	**34.804.273.861,20**
Selisih		**Rp**	**-1.629.134.091,26**

3) Beban Hibah – LO

Beban Hibah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp53.315.739.949,20. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.126.
Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.859.860.759,20	6.141.654.379,00	(281.793.619,80)	(4,59)
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	3.341.108.300,00	(3.341.108.300,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.898.024.090,00	28.659.932.025,00	18.238.092.065,00	63,64
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.855.100,00	557.855.100,00	0,00	0,00
	Total	**53.315.739.949,20**	**38.700.549.804,00**	**14.615.190.145,20**	**37,76**

Beban Bantuan Hibah Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp53.315.739.949,20 atau mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 37,76% atau sebesar Rp38.700.549.804,00.

Beban hibah dengan belanja hibah tahun 2023 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban hibah dengan belanja hibah terlampir pada tabel 5.127.

Tabel 5.127.
Perbedaan Beban Hibah LO dengan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.872.366.356,00	5.859.860.759,20	12.505.596,80
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga,	46.898.024.090,00	46.898.024.090,00	0,00

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
	Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.855.100,00	557.855.100,00	0,00
	Total	**53.328.245.546,00**	**53.315.739.949,20**	**12.505.596,80**

Terdapat selisih antara belanja hibah - LRA dan beban hibah - LO sebesar Rp12.505.596,80. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Penambahan :

• Penambahan atas persediaan hibah tahun 2022 yang diserahkan tahun 2023 pada DPUPR	Rp	3.548.773.804,00
• Penambahan atas Hutang Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR	Rp	9.000.000,00
Total Penambahan	**Rp**	**3.557.773.804,00**

Pengurangan :

• Belanja hibah tahun 2023 yang belum diserahkan pada pihak ketiga tahun 2023 pada DPUPR	Rp	3.570.279.400,80
Total Pengurangan	**Rp**	**3.570.279.400,80**
Selisih	**Rp**	**-12.505.596,80**

4) Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp15.823.991.573,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 5.128.
Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.823.991.573,00	20.255.133.100,00	(4.431.141.527,00)	(21,88)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.743.000.000,00	(6.743.000.000,00)	(100,00)
	Total	**15.823.991.573,00**	**26.998.133.100,00**	**(11.174.141.527,00)**	**(41,39)**

Beban Bantuan Sosial Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp15.823.991.573,00 atau penurunan dari tahun 2022 sebesar 41,39% atau sebesar Rp26.998.133.100,00.

Tidak terdapat selisih antara belanja bantuan sosial LRA dengan beban bantuan sosial LO pada tahun 2023.

5) Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp98.612.132.311,00 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.129.
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.298.327.892,00	45.219.268.017,00	(1.920.940.125,00)	(4,25)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.381.550.510,00	14.777.184.601,00	604.365.909,00	4,09
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.150.969.464,00	37.295.054.128,12	1.855.915.335,88	4,98
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	66.777.981,00	0,00	66777981,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	714.506.464,00	1.667.420.991,00	(952.914.527,00)	(57,15)
	JUMLAH	**98.612.132.311,00**	**98.958.927.737,12**	**(346.795.426,12)**	**(0,35)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp98.612.132.311,00, Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp346.795.426,12 atau 0,35%.

6) Beban Penyisihan Piutang – LO

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Tabel 5.130.
Realisasi Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyisihan Piutang	3.794.728.575,50	1.510.265.623,80	2.284.462.951,70	151,26

Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.794.728.575,50 yang berasal dari penyisihan piutang Tahun Anggaran 2023. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.284.462.951,70 atau 151,26%. Adapun rincian beban penyisihan piutang tahun 2023 sebagaimana uraian tabel 5.131,

Tabel 5.131.
Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD – LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian Rincian Piutang	Beban Penyisihan Piutang
		31-Des-23
I	**Piutang Pajak**	**1.073.741.513,30**
1	Badan Pendapatan Daerah	1.073.741.513,30
II	**Piutang Retribusi**	**245.635.722,90**
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	245.635.722,90
III	**Piutang Lain-Lain PAD yang sah**	**2.475.351.339,30**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	487.945.718,85
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	37.628.494,95
3	RSUD Dr. R. Soedarsono	1.949.777.125,50
IV	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	0,00
V	**Piutang Transfer Antar Daerah**	0,00
VI	**Piutang Lainnya**	0,00
	Total Penyisihan Piutang	**3.794.728.575,50**

7) Beban Lain – Lain

Tabel 5.132.
Realisasi Beban Lain-lain – LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Lain-lain	12.817.791.410,93	31.523.603.337,00	(18.705.811.926,07)	(59,34)

Beban lain-lain – LO Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.817.791.410,93 adalah Penghapusan aset tetap pada 12 OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Berikut rincian beban lain-lain yang merupakan penghapusan aset tetap selama tahun 2023.

Tabel 5.133.
Rincian penghapusan pada 12 OPD – LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SKPD	NILAI
1	penghapusan nilai buku software	DINAS KESEHATAN	84.634.333,00
2	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1723/423.201/2023 Tanggal 4 Desember 2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	201.798.000,00
3	Penghapusan nilai buku atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.164.954.802,93
4	Penghapusan nilai buku atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	185.461.311,00
5	Penghapusan atas aset tanah sebesar Rp1.328.524.250, Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.599.450, Aset Lain-lain sebesar Rp430.969.839	DINAS PERHUBUNGAN	1.769.093.539,00
6	Penghapusan nilai buku aset lain2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	269.917.142,00
7	penghapusan nilai buku aset tetap gedung dan bangunan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.765.024,00
8	penghapusan aset tetap lainnya	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6.360.000,00
9	Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai SK Penghapusan Nomor 188/1714/423.201/2023 Tanggal 7 Desember 2023	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	61.805.700,00
10	penghapusan nilai buku aset tetap gedung dan bangunan	SEKRETARIAT DAERAH	853.634.893,00
11	Penghapusan nilai buku aset lain2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	73.366.666,00
12	penghapusan aset tetap tanah	KECAMATAN BUGUL KIDUL	71.000.000,00
	TOTAL		**12.817.791.410,93**

8) Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.134.
Realisasi Beban Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c. **Surplus/Defisit Non Operasional**

Tabel 5.135.
Realisasi Defisit Non Operasional – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2023 Surplus/Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp0,00.

d. **Beban Tak Terduga**

Tabel 5.136.
Realisasi Beban Tak Terduga– LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LO 2023	REALISASI LO 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Belanja Tidak Terduga	2.103.469.500,00	879.227.100,00	1.224.242.400,00	139,24

Pemerintah Kota Pasuruan pada Beban tak terduga- LO tahun 2023 menyajikan saldo sebesar Rp2.103.469.500,00. Beban tak terduga pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.224.242.400,00 atau 139,24%.

Beban tak terduga dengan belanja tidak terduga tahun 2023 terdapat perbedaan, adapun perbedaan rincian beban tak terduga dengan belanja tidak terduga terlampir pada tabel 5.137.

Tabel 5.137.
Perbedaan Beban dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI LRA 2023	REALISASI LO 2023	SELISIH
1	Belanja Tidak Terduga	1.722.869.500,00	2.103.469.500,00	(380.600.000,00)

Terdapat selisih Pada belanja tidak terduga dengan beban tak terduga sebesar Rp380.600.000,00 adalah sisa Bantuan Keuangan tahun 2023 yang akan dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024.

e. **Surplus/Defisit – LO**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surplus/Defisit-LO	**(Rp)**	**(Rp)**
	(23.392.738.307,22)	**(2.157.921.447,60)**

Tahun 2023 Pemerintah Kota Pasuruan mengalami surplus sebesar Rp(23.392.738.307,22) dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.138.
Rincian Surplus/Defisit – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN - LO	958.638.436.461,07	941.857.040.096,78	16.781.396.364,29	1,78
BEBAN	979.927.705.268,29	943.135.734.444,38	36.791.970.823,91	3,90
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(21.289.268.807,22)	(1.278.694.347,60)	(20.010.574.459,62)	1.564,92
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21.289.268.807,22)	(1.278.694.347,60)	(20.010.574.459,62)	1.564,92
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	2.103.469.500,00	879.227.100,00	1.224.242.400,00	139,24
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(23.392.738.307,22)**	**(2.157.921.447,60)**	**(21.234.816.859,62)**	**984,04**

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar Pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Pasuruan. Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non Anggaran selama periode akuntansi. Penjelasan masing-masing sebagai berikut.

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	77.033.929.985,78	**101.386.396.924,46**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.139
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	52.473.038.186,78	46.650.290.289,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.498.780.644,00	8.117.254.501,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.283.921.167,03	6.115.362.978,37
Lain-lain PAD Yang Sah	109.036.755.043,89	102.135.407.031,74
Dana Bagi Hasil Pajak	52.499.578.024,00	25.013.386.007,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	37.712.217.041,00	104.899.779.909,00
Dana Alokasi Umum	427.076.974.462,00	400.677.921.887,00
Dana Alokasi Khusus	118.421.894.685,00	95.506.655.398,00
Dana Penyesuaian	15.680.060.000,00	18.008.742.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.053.799.100,00	91.417.533.571,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.403.083.621,00	12.400.033.000,00

URAIAN	2023	2022
Lainnya		
Pendapatan Hibah	222.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	-	89.022,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**941.362.101.974,70**	**910.942.455.594,11**
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	369.512.860.112,00	378.770.674.303,00
Belanja Barang dan Jasa	423.940.205.257,92	363.508.133.547,65
Belanja Hibah	53.328.245.546,00	35.526.573.727,00
Belanja Bantuan Sosial	15.823.991.573,00	26.790.093.100,00
Belanja Tak Terduga	1.722.869.500,00	4.960.583.992,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**864.328.171.988,92**	**809.556.058.669,65**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**77.033.929.985,78**	**101.386.396.924,46**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.033.929.985,78 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Kota Pasuruan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Aliran kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas.

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Non Keuangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(146.117.659.140,00)	**(129.004.071.253,85)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2023 Defisit sebesar (Rp146.117.659.140,00) mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 5.140.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	525.371.881,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan Bangunan	139.445.000,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	0,00	97.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	192.881.600,00	90.499.300,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya	810.000,00	795.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**333.136.600,00**	**714.416.181,00**
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.641.329.574,00	36.486.480.985,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.482.341.064,00	54.606.509.061,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.938.790.102,00	38.003.139.388,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	388.335.000,00	619.120.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	3.238.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**146.450.795.740,00**	**129.718.487.434,85**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	**(146.117.659.140,00)**	**(129.004.071.253,85)**

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	86.000.133.684,16	**(2.186.802.066,08)**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit Anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.000.133.684,16 yang menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus Anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 5.141.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	86.000.133.684,16	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**86.000.133.684,16**	**3.000.000,00**
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.189.802.066,08
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**2.189.802.066,08**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	**86.000.133.684,16**	**(2.186.802.066,08)**

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris)

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(553.750,00)	**2.541.602,00**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi akibat potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah tersebut bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas non Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp553.750,00) yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas berupa pajak, potongan ataupun penerimaan lainnya yang menjadi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dari Kas Daerah/BUD atau BLUD dan langsung dibayarkan kepada yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.142.
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	56.312.449.232,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Kelebihan Transfer pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	0,00	1.987.852,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**56.314.437.084,07**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	56.311.895.482,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Saldo sisa Kas BLUD Akademi Keperawatan	0,00	0,00
Setoran Pajak pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	553.750,00	0,00
Saldo sisa Kas BOP Paud	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**553.750,00**	**56.311.895.482,07**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	**(553.750,00)**	**2.541.602,00**

e. Kenaikan dan Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	16.915.850.779,94	**(29.801.934.793,47)**

Kenaikan dan penurunan kas ini hasil dari kompilasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non Anggaran. Kenaikan dan penurunan kas Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 sebesar Rp16.915.850.779,94.

Tabel 5.143.
Perhitungan Kenaikan dan Penurunan Kas dalam LAK Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	77.033.929.985,78	101.386.396.924,46
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(146.117.659.140,00)	(129.004.071.253,85)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	86.000.133.684,16	(2.186.802.066,08)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(553.750,00)	2.541.602,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**16.915.850.779,94**	**(29.801.934.793,47)**

f. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
	171.172.144.599,31	**200.974.079.392,78**

Saldo awal kas per 1 Januari 2023 terdiri dari:

Tabel 5.144.
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Awal Kas	**171.172.144.599,31**	**200.974.079.392,78**
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	141.679.898.891,84	170.322.683.460,04
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	27.631.060.593,47	29.243.646.869,08
Kas Dana BOSP	863.357.052,00	114.077.606,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	996.027.962,00	1.293.671.457,66
Kas Lainnya	1.800.100,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00

g. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	188.087.995.379,25	**171.172.144.599,31**

Saldo kas akhir merupakan jumlah kenaikan atau penurunan kas ditambah saldo awal, dengan perhitungan sebagai berikut.

Kenaikan/Penurunan Kas	16.915.850.779,94
Saldo Awal Kas	171.172.144.599,31
Saldo Akhir Kas	**188.087.995.379,25**

Adapun rincian saldo akhir kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.145.
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Akhir Kas	**188.087.995.379,25**	**171.172.144.599,31**
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	19.291.173.363,90	27.631.060.593,47
Kas Dana BOSP	403.951.773,00	863.357.052,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00	996.027.962,00
Kas Lainnya	0,00	1.800.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00	0,00

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional Pada Tahun pelaporan.

Posisi Ekuitas Akhir Pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.162.707.256.390,08 dengan uraian perubahan ekuitas Pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.146.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	**3.199.986.024.017,58**	**3.187.385.532.609,39**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(23.392.738.307,22)**	**(2.157.921.447,60)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**(8.933.974.069,28)**	**14.758.412.855,79**
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.933.974.069,28)	14.758.412.855,79
EKUITAS AKHIR	**3.167.659.311.641,08**	**3.199.986.024.017,58**

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Saldo awal Ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp3.199.986.024.017,58 merupakan ekuitas akhir Pada Neraca Tahun 2022;
b. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp23.392.738.307,22) merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai ekuitas Pada Neraca Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023;
c. Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp8.933.974.069,28).

   Adapun rincian Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut :

   1. Koreksi Ekuitas bertambah berasal dari :
      1) Koreksi atas Persediaan Awal persediaan obat th 2022 karena kurang penjumlahan di RSUD Soedarsono sebesar Rp8.755.188,09;
      2) Aset Tetap Tanah yang baru tercatat di Dinas Pendidikan sebesar Rp64.240.801,00 dan di RSUD Soedarsono sebesar Rp10.800.000,00;
      3) Atribusi atas Perencanaan dan Pengawasan rehabilitasi OK Central di RSUD Soedarsono sebesar Rp115.889.600,00;
      4) Atribusi tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp176.340.150,00 dan di Dinas Prindustrian dan Perdagangan sebesar Rp98.989.800,00;

5) Koreksi berkurang akumulasi penyusutan karena reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.076.228.793,00;
6) Bertambah ATB dari pengembangan aplikasi di Badan Pendapatan Daerah sebesar nilai buku Rp16.133.333,33;
7) Koreksi atas reklasifikasi ektrakomptabel tahun sebelumnya ke Aset Lainnya - Kemitraan dengan pihak ketiga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp2.600.000,00;
8) Koreksi utang di RSUD Soedarsono sebesar Rp972.874,00;
9) Berkurang penyisihan piutang karena terdapat pembayaran piutang sebesar Rp314.472.935,80;
10) Kurang catat piutang BPJS Rp8.596.100,00.

2. Koreksi Ekuitas berkurang berasal dari :
   1) Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp170.747.373,00;
   2) Koreksi bertambah akumulasi penyusutan karena reklasifikasi antar KIB dan kapitalisasi sebesar Rp1.638.249.631,00;
   3) Bertambah Akumulasi Penyusutan Hibah Aset Tetap Rp969.376.013,00;
   4) Koreksi amortisasi dikarenakan pengembangan aplikasi yang dikapitalisasikan ke aplikasi dengan tahun perolehan 2017 di Dinas Perhubungan sebesar Rp28.000.000,00;
   5) Koreksi berkurang saldo awal Piutang di RSUD Soedarsono antara lain koreksi kurang piutang kemkes sebesar Rp6.248.838.950, dobel catat piutang Mandiri Inhealth sebesar Rp260.000,00, dobel catat piutang Jasa Raharja sebesar Rp1.608.281,00, dan dobel catat dengan Yayasan Kita Bisa piutang pasien umum Rp6.000.000,00;
   6) Pengurangan penyertaan modal sebesar Rp2.633.238.966,50;
   7) Akumulasi Penyusutan tahun sebelumnya atas aset kemitraan SPBU sebesar Rp131.674.430,00.

BAB VI

PENJELASAN PENTING LAINNYA

1. ***Treasury Deposit Facility* (TDF)**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada pasal 47 ayat 6 bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan :

a. Penerbitan SBN; dan/atau
b. *Treasury Deposit Facility.*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk Nontunai mengatur ketentuan teknis lebih lanjut.

Perlakuan Akuntansi pada Pemerintah Daerah atas penyaluran pokok DBH/DAU yang telah disalurkan Pemerintah Pusat dari RKUN ke rekening TDF-TKD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mencatat realisasi pendapatan transfer DBH/DAU pada LRA dan LO; dan
b. Mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai kas dan setara kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan) pada Neraca.

2. **Properti Investasi**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

Penyajian Properti Investasi sesuai dengan paragraph 45 PSAP yang menyajikan Laporan Keuangan, Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Property Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian property investasi adalah untuk memperolah pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas property investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan property tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian property investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset property investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan Property Investasi diantaranya mencakup ;

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*;
b. Metode penyusutan yang digunakan;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat property investasi pada awal dan akhir periode;
f. Revaluasi atas property investasi, nilai wajar dari properi investasi;
g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlumengungkapkan hasil revaluasi property investasi;
h. Apabila pengklasifikasian sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan property investasi dengan property yang digunakan sendiri dan dengan property yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
i. Metode dan asumsi yang signifikan dalam penentuan nilai wajar;

j. Apabila entitas menggunakan penilaian independent, kualifikasi professional dan pengalaman;
k. Jumlah yang diakui dalam surplus/deficit;
l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan property investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
m. Property investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Pasuruan memiliki Piutang Jangka Panjang atas 3 perjanjian Kerjasama yang setiap tahunnya mendapatkan kontribusi berupa pendapatan, Adapun Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan terdapat pada :

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan Koperasi Pedagang Pasar Kebonagung Jaya Kota Pasuruan Nomor : 188/09/423.012/2008 dan Nomor : 190/KOPPAS-KJ/VI.2008 tentang Pengelolaan Gedung Bekas Bioskop di Kompleks Pasar Kebonagung Kota Pasuruan tanggal 20 Juni 2008;

b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai Penempatan Jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) *Microcell* dan *Fiber Optic* dengan Metode Kamuflase di Wilayah Kota Pasuruan Nomor : 130.1/1307.4/423.201/2021 dan Nomor : 192/BTS-KOTAPASURUAN/IX/2021;

c) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT Tower Bersama tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sebagai Penempatan Jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) *Microcell* dan *Fiber Optic* di Wilayah Kota Pasuruan Nomor : 130.1/1307.5/423.201/2021 dan Nomor : 186/TBG-TB-00/ARC/IX/2021;

4. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bertujuan untuk :

a) Mengukur kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
b) Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
c) Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
d) Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional, dan;
e) Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mewujudakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transaparan dan akuntabel.

Dapat disampaikan tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 memberikan hasil Indeks Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :

a) IPKD Kota Pasuruan Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 62,593 dari tahun 2022 sebesar 51,992. Namun karena kluster Kota Pasuruan naik menjadi kluster sedang sehingga predikat yang didapat tahun ini adalah C (sangat perlu perbaikan)
b) Evaluasi yang perlu diperbaiki pada IPKD Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah pada Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah), Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) dan Dimensi 5 (Kondisi Keuangan Daerah).
c) Pada Dimensi 3 terdapat 28 dokumen yang waktu penetapan dan waktu unggahnya lebih dari 30 hari.
d) Pada Dimensi 4, penyerapan belanja modal tidak mencapai 80% dan penyerapan belanja tidak terduga tidak mencapai 80%.
e) Pada Dimensi 5, Data yang diinput sudah benar, namun jika dibandingkan dengan kota klaster sedang se-Indonesia didapatkan hasil pengukuran indeks solvabilitas operasional, jangka pendek, jangka panjang dan layanannya masih rendah.
f) Tidak ada Standar masing2 Indeks Solvabiltas Operasional, jangka panjang, jangka pendek dan layanan, karena itu dibandingkannya dg klaster sedang se-indonesia.
g) Untuk mendapatkan nilai solvabilitas operasional yang tinggi maka total beban operasionalnya tidak tinggi.
h) Untuk mendapatkan nilai solva jangka panjang yang tinggi maka total aset tetap tetapnya harus tinggi.
i) Untuk mendapatkan nilai solvabilitas pendek yang tinggi maka kewajiban lancarnya jangan terlalu tinggi.
j) Untuk mendapatkan nilai solvabilitas layanan yang tinggi maka total aset tetap tetapnya harus tinggi.

BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Letak Geografis

Secara geografis, sebagaimana tersaji Pada gambar 6.1, berlokasi di Pulau Jawa bagian, dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan

Secara administratif, Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 39,00 km2 yang terbagi ke dalam 4 kecamatan yaitu Bugul Kidul; Purworejo; Gadingrejo dan Panggungrejo, dan 34 kelurahan. Semula wilayah Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Kandangsapi yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.

Gambar 6.1

Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

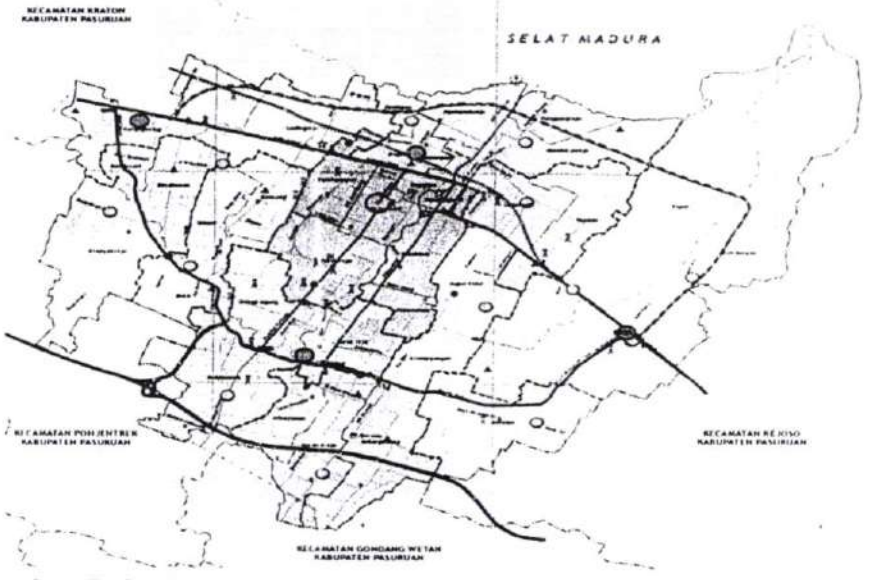

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan

2. Luas Wilayah

Secara astronomis, Kota Pasuruan terletak antara 112°45¹–112°55¹ Bujur Timur dan 7°35¹–7°45¹ Lintang Selatan. Kota Pasuruan dengan wilayah seluas 35,29 Km2 atau 0,07persen dari luas wilayah Jawa Timur. Kota Pasuruan merupakan daerah terkecil

kelima di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, (16,46 km2), Kota Probolinggo (25,24 km2), Kota Blitar (32,58 km2) dan Kota Madiun (33,23 km2). Tabel 6.1 menyajikan rincian distribusi luas wilayah Kota Pasuruan menurut kecamatan dan kelurahan.

Tabel 6.1

Jumlah dan Luas Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2019

Nomor	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah	
			Rukun Warga	Rukun Tetangga
KOTA PASURUAN			224	1005
I	**Kecamatan Purworejo**		51	286
1	Kelurahan Purworejo	1,05	8	57
2	Kelurahan Purutrejo	1,15	7	35
3	Kelurahan Tembokrejo	1,03	7	38
4	Kelurahan Wirogunan	0,61	8	26
5	Kelurahan Kebonagung	0,86	8	46
6	Kelurahan Pohjentrek	1,9	5	44
7	Kelurahan Sekargadung	1,51	8	40
II	**Kecamatan Gadingrejo**		54	221
1	Kelurahan PeTahunan	0,97	6	33
2	Kelurahan Randusari	0,34	8	25
3	Kelurahan Karangketug	1,88	6	31
4	Kelurahan Bukir	0,66	8	26
5	Kelurahan Gadingrejo	1,33	5	28
6	Kelurahan Sebani	0,87	6	21
7	Kelurahan Krapyakrejo	1,74	7	32
8	Kelurahan Gentong	0,69	8	25
III	**Kecamatan Bugulkidul**		34	148
1	Kelurahan Kepel	2,54	6	20
2	Kelurahan Tapa'an	1,15	4	16
3	Kelurahan Bugul Kidul	0,95	6	44
4	Kelurahan Krampyangan	0,55	2	14
5	Kelurahan Bakalan	1,78	9	29
6	Kelurahan Blandongan	3,97	7	25
IV	**Kecamatan Panggungrejo**		85	350
1	Kelurahan Kandangsapi	0,46	2	14
2	Kelurahan Tamba'an	0,36	5	24
3	Kelurahan Mandaranrejo	0,58	5	23
4	Kelurahan Bugul Lor	0,96	8	47
5	Kelurahan Trajeng	1,13	11	31
6	Kelurahan Karanganyar	0,56	8	46
7	Kelurahan Bangilan	0,17	4	15
8	Kelurahan Panggungrejo	1,99	5	15

Nomor	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah	
			Rukun Warga	Rukun Tetangga
9	Kelurahan Pekuncen	0,8	4	14
10	Kelurahan Ngemplakrejo	1,05	9	37
11	Kelurahan Mayangan	0,28	5	16
12	Kelurahan Petamanan	0,42	7	24
13	Kelurahan Kebonsari	0,8	12	44

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

3. Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Nomor	Uraian
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Dr. R. Soedarsono
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	Satuan Polisi Pamong Praja
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Sosial
10	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	Kecamatan Gadingrejo
26	Kecamatan Panggungrejo

Nomor	Uraian
27	Kecamatan Bugul Kidul
28	Kecamatan Purworejo
29	Inspektorat
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian Daerah

4. Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga Pemerintah Kota Pasuruan

No	Nama Aset	Luas (M2)	Harga	Hak	Tanggal	Nomor	Pihak ketiga yang menguasai aset	Kronologis Permasalahan	KIB	OPD	NO Register
1	Tanah Bangunan Gudang	1.560	56.160.000	Hak Pengelolaan	07/05/1991	1	Warga	merupakan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan bersertifikat HPL no 1, setelah tidak adanya Pasar Ayam, lokasi dimaksud digunakan untuk rumah tinggal	A	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2
2	Tanah Sarinah	510	2.500.000				Warga	merupakan tanah persewaan milik Pemerintah Kota Pasuruan, sekarang digunakan warga untuk rumah tinggal	A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	53
3	Tanah Lapangan Sepakbola	5.030	7.545.000.000	Hak Pakai	19/03/1997	8	Warga	awalnya merupakan lapangan sepakbola, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang untuk rumah tinggal hingga saat ini	A	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2

No	Nama Aset	Luas (M2)	Harga	Hak	Tanggal	Nomor	Pihak yang menguasai aset	Kronologis Permasalahan	KIB	OPD	NO Register
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	753	48.640.000	Hak Pakai	20/12/2022	24	Kantor Kelurahan Bukir	telah terjadi tukar menukar tanah pada tahun 1976 antara Pemerintah Desa Bukir dengan Rahma B Djonah yang digunakan untuk Kantor Kelurahan Bukir. Para pihak sudah memanfaatkan obyek tukar menukar sesuai kesepakatan. Pada tahun 2012 ahli waris (cicit) menggugat Pemerintah Kota Pasuruan untuk membatalkan tukar menukar atau	A	Kelurahan Bukir	1

No	Nama Aset	Luas (M2)	Harga	Hak	Tanggal	Nomor	Pihak yang menguasai aset	Kronologis Permasalahan	KIB	OPD	NO Register
								mengganti sejumlah uang.			
2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	523	14.560.000	Hak Pakai	02/11/2017	12	SDN Karangketug I dan Kantor Kelurahan Karangketug	Bangunan SDN Karangketug I dan Kantor Kelurahan Karangketug berdiri di atas tanah hak milik Iman Soedjono. Sekarang ini ahli waris (cucu) melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk relokasi Bangunan SDN Karangketug I dan Kantor Kelurahan Karangketug atau mengganti sejumlah uang. Gugatan sudah masuk dalam ranah pengadilan	A	UPT SDN Karangketug I	1

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan Tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Pasuruan di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih baik.

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode dan Nama Urusan Pemerintahan pada Masing-masing OPD

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
1.02	DINAS KESEHATAN
1.02	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
1.02	UPT PUSKESMAS GADINGREJO
1.02	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI
1.02	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
1.02	UPT PUSKESMAS KEBONSARI
1.02	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL
1.02	UPT PUSKESMAS TRAJENG
1.02	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
1.02	RSUD DR. R. SOEDARSONO
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1.04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
1.06	DINAS SOSIAL
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
2.07	DINAS TENAGA KERJA
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
2.08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
2.09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
2.10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
2.14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
2.15	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
2.16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
2.17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
2.19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
2.20	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
2.21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
2.22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
2.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3.25	DINAS PERIKANAN
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
3.26	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
3.27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
3.30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
3.31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01	BAGIAN UMUM
4.01	BAGIAN ORGANISASI
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01	BAGIAN HUKUM
4.01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
5.01	**PERENCANAAN**
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5.02	**KEUANGAN**
5.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	**KEPEGAWAIAN**
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
5.04	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
5.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**
6.01	INSPEKTORAT
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01	KECAMATAN GADINGREJO
7.01	KELURAHAN KRAPYAKREJO
7.01	KELURAHAN BUKIR
7.01	KELURAHAN SEBANI
7.01	KELURAHAN GENTONG
7.01	KELURAHAN GADINGREJO
7.01	KELURAHAN RANDUSARI
7.01	KELURAHAN KARANGKETUG
7.01	KELURAHAN PETAHUNAN
7.01	KECAMATAN PANGGUNGREJO
7.01	KELURAHAN NGEMPLAKREJO
7.01	KELURAHAN MAYANGAN
7.01	KELURAHAN TRAJENG
7.01	KELURAHAN BANGILAN
7.01	KELURAHAN KEBONSARI
7.01	KELURAHAN KARANGANYAR
7.01	KELURAHAN KANDANGSAPI
7.01	KELURAHAN PEKUNCEN
7.01	KELURAHAN PANGGUNGREJO
7.01	KELURAHAN MANDARANREJO
7.01	KELURAHAN TAMBAAN
7.01	KELURAHAN PETAMANAN
7.01	KELURAHAN BUGUL LOR
7.01	KECAMATAN BUGUL KIDUL
7.01	KELURAHAN BAKALAN
7.01	KELURAHAN KRAMPYANGAN
7.01	KELURAHAN BLANDONGAN
7.01	KELURAHAN KEPEL
7.01	KELURAHAN BUGUL KIDUL
7.01	KELURAHAN TAPAAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
7.01	KECAMATAN PURWOREJO
7.01	KELURAHAN POHJENTREK
7.01	KELURAHAN WIROGUNAN
7.01	KELURAHAN TEMBOKREJO
7.01	KELURAHAN PURUTREJO
7.01	KELURAHAN KEBONAGUNG
7.01	KELURAHAN PURWOREJO
7.01	KELURAHAN SEKARGADUNG
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran 2. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(dalam rupiah)

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
1	01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	
2	01.03.02.01	ALAT BESAR	
3	01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10.000.000,00
4	01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	25.000.000,00
5	01.03.02.01.03	ALAT BANTU	1.000.000,00
6	01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	
7	01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10.000.000,00
8	01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	500.000,00
9	01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	20.000.000,00
10	01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	10.000.000,00
11	01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	25.000.000,00
12	01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
13	01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	350.000,00
14	01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	200.000,00
15	01.03.02.03.03	ALAT UKUR	200.000,00
16	01.03.02.04	ALAT PERTANIAN	
17	01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	200.000,00
18	01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
19	01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	300.000,00
20	01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	300.000,00
21	01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	300.000,00
22	01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
23	01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	1.000.000,00
24	01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	500.000,00
25	01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	2.000.000,00
26	01.03.02.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	500.000,00
27	01.03.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
28	01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	500.000,00
29	01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	500.000,00
30	01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	
31	01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	500.000,00
32	01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	500.000,00
33	01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	200.000,00
34	01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	300.000,00
35	01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000,00
36	01.03.02.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000,00
37	01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	500.000,00
38	01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	500.000,00
39	01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	500.000,00
40	01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	
41	01.03.02.09.01	SENJATA API	500.000,00
42	01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	250.000,00
43	01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	500.000,00
44	01.03.02.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000,00
45	01.03.02.010	KOMPUTER	
46	01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	3.000.000,00
47	01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	3.000.000,00
48	01.03.02.11	ALAT EKSPLORASI	
49	01.03.02.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	300.000,00
50	01.03.02.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	300.000,00
51	01.03.02.12	ALAT PENGEBORAN	

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
52	01.03.02.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	500.000,00
53	01.03.02.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	300.000,00
54	01.03.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
55	01.03.02.13.01	SUMUR	300.000,00
56	01.03.02.13.02	PRODUKSI	500.000,00
57	01.03.02.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	300.000,00
58	01.03.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
59	01.03.02.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	300.000,00
60	01.03.02.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	300.000,00
61	01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
62	01.03.02.15.01	ALAT DETEKSI	500.000,00
63	01.03.02.15.02	ALAT PELINDUNG	300.000,00
64	01.03.02.15.03	ALAT SAR	300.000,00
65	01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	500.000,00
66	01.03.02.16	ALAT PERAGA	
67	01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	300.000,00
68	01.03.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
69	01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	300.000,00
70	01.03.02.18	RAMBU – RAMBU	
71	01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	500.000,00
72	01.03.02.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5.000.000,00
73	01.03.02.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5.000.000,00
74	01.03.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	
75	01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	500.000,00
76	01.03.03	BANGUNAN GEDUNG	
77	01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	
78	01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10.000.000,00
79	01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10.000.000,00
80	01.03.03.02	MONUMEN	
81	01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10.000.000,00
82	01.03.03.03	BANGUNAN MENARA	
83	01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	5.000.000,00
84	01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
85	01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	5.000.000,00
86	01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
87	01.03.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	
88	01.03.04.01.01	JALAN	10.000.000,00
89	01.03.04.01.02	JEMBATAN	10.000.000,00
90	01.03.04.02	BANGUNAN AIR	
91	01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	10.000.000,00
92	01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	10.000.000,00
93	01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10.000.000,00
94	01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10.000.000,00
95	01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	10.000.000,00
96	01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000,00
97	01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	10.000.000,00
98	01.03.04.03	INSTALASI	
99	01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5.000.000,00
100	01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	10.000.000,00
101	01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	5.000.000,00
102	01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	5.000.000,00
103	01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	10.000.000,00
104	01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	5.000.000,00
105	01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	5.000.000,00

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
106	01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	5.000.000,00
107	01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	5.000.000,00
108	01.03.04.03.10	INSTALASI LAIN	5.000.000,00
109	01.03.04.04	JARINGAN	
110	01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	10.000.000,00
111	01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	2.500.000,00
112	01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	1.000.000,00
113	01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	1.000.000,00
114	01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
115	01.03.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
116	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (BUKU)	100.000,00
117	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (TERBITAN)	100.000,00
118	01.03.05.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	200.000,00
119	01.03.05.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	200.000,00
120	01.03.05.01.04	MUSIK	200.000,00
121	01.03.05.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	200.000,00
122	01.03.05.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	200.000,00
123	01.03.05.01.07	TARSCALT	200.000,00
124	01.03.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
125	01.03.05.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	200.000,00
126	01.03.05.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	200.000,00
127	01.03.05.02.03	TANDA PENGHARGAAN	200.000,00
128	01.03.05.03	HEWAN	
129	01.03.05.03.01	HEWAN PIARAAN	500.000,00
130	01.03.05.03.02	TERNAK	500.000,00
131	01.03.05.03.03	HEWAN LAINNYA	500.000,00
132	01.03.05.04	BIOTA PERAIRAN	
133	01.03.05.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	200.000,00
134	01.03.05.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
135	01.03.05.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
136	01.03.05.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
137	01.03.05.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
138	01.03.05.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
139	01.03.05.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA	200.000,00
140	01.03.05.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	500.000,00
141	01.03.05.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	200.000,00
142	01.03.05.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	200.000,00
143	01.03.05.05	TANAMAN	
144	01.03.05.05.01	TANAMAN	250.000,00
145	01.03.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
146	01.03.05.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	250.000,00
147	01.03.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
148	01.03.05.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5.000.000,00

Lampiran 3. Kebijakan Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan
Peralatan dan Mesin				
-	Alat-Alat Besar Darat	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat-Alat Besar Apung	>=	5.000.000	
-	Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>=	1.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor			-
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor			
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/*sparepart* baru
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin			
-	Alat Ukur			
Alat Pertanian				
-	Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Pemelihraan Tanaman dan Alat Penyimpanan			
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
-	Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair			
-	Komputer			
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat			
Alat Studio dan Komunikasi				
-	Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Komunikasi			
-	Peralatan Pemancar			
Alat Kedokteran				
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Kesehatan			
Alat Laboratorium				
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah			
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika			
Alat Persenjataan dan Keamanan				
-	Senjata api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Persenjataan non Senjata Api			
-	Amunisi			
-	Senjata Sinar			
Bangunan dan Gedung				
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>=	25.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>=	10.000.000	

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan
-	Bangunan Menara	>=	2.500.000	berat/ Menambah Umur Ekonomis
Monumen				
-	Bangunan Bersejarah	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	>=	5.000.000	
-	Candi	>=	5.000.000	
-	Taman (untuk Umum)	>=	5.000.000	
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara			
Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi				
-	Jalan	Seluruh Perolehan untuk jalan jembatan dan irigasi dikapitalisasikan		Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan			
-	Bangunan Air dan Irigasi			
-	Instalasi Air Minum			
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya			
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)			
-	Instalasi Penangkal Petir			
-	Jaringan Air minum dan sejenisnya			
-	Jaringan Listrik dan Sejenisnya			
-	Jaringan Telepon dan Sejenisnya			
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)			
Aset Lainnya				
-	Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Terbitan Berkala			
-	Barang Perpustakaan			
-	Barang Bercorak Kebudayaan			-
-	Alat Olah Raga Lainnya			
-	Hewan Ternak			
-	Tanaman			

Lampiran 4. Dasar Hukum Pemungutan dan Tarif Masing-masing Jenis Pajak Daerah

Dasar Hukum	Dasar Pengenaan	Tarif
Perda No 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel	Losmen	10%
	Wisma Pariwisata	10%
	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10%
	Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar	5%
Perda No 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	Rumah Makan	10%
	Kafetaria	10%
	Kantin	10%
	Warung	5%
	Jasa Boga/Catering	5%
Perda No 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	Tontonan Film	15%
	Pagelaran Kesenian Tradisional	15%
	Pagelaran Musik, Tari, Dan/Atau Busana	15%
	Kontes Kecantikan, Binaraga	20%
	Pameran	15%
	Sirkus, Akrobat, Sulap	15%
	Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	15%
	Refleksi, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50%
	Pertandingan Olahraga	15%
Perda No 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Dan Sejenisnya	20%
	Reklame Kain	20%
	Reklame Melekat, Stiker	20%
	Reklame Selebaran	20%
	Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan	20%
	Reklame Udara	20%
	Reklame Apung	20%
	Reklame Suara	20%
	Reklame Film/Slide	20%
	Reklame Peragaan	20%
Perda No 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan Ditetapkan Paling Tinggi Sebesar	9%
	Penggunaan Tenaga Listrik Dari Sumber Lain Oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam, Tarip Pajak Penerangan Jalan Ditetapkan Paling Tinggi Sebesar	3%
	Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri, Pajak Penerangan Jalan Ditetapkan Paling Tinggi Sebesar	1,5%
Perda No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir	Penyelenggaraan Tempat Parkir Yang Disediakan Berkaitan Dengan Pokok Usaha Dengan Tidak Memungut Biaya Parkir Maupun Yang Disediakan Sebagai Suatu Usaha, Termasuk Penyediaan Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor	30%
Perda No 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah		20%

Dasar Hukum	Dasar Pengenaan	Tarif
Perda No 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	NJOP Dibawah Rp2.000.000.000,00	0,05%
	NJOP Rp2.000.000.000,00 atau Lebih	0,1%
Perda No 21 Tahun 2010 Tentang Bphtb	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Ditetapkan Sebesar Rp.60.000.000,00	5%
	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Karena Waris Atau Hibah Wasiat Ditetapkan Sebesar Rp.300.000.000,00	5%

Lampiran 5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011

No.	Lokasi	Jenis Bangunan / Dagang / Sarana dan Prasarana Lain	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)			
			Kelompok			Lain-lain
			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasar Kelas I**	a. kios / kios bertingkat	200 / m² / hari	140 / m² / hari	140 / m² / hari	-
	- Pasar Besar	b. Bedak	-	-	150 / m² / hari	-
	- Pasar Kebonagung	c. Los	-	-	100 / m² / hari	-
	- Pasar Poncol (tradisional)	d. halaman / pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	500 / hari
	- Pasar Meubel Bukir dan Randusari	e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	500 / hari
2.	**Pasar Kelas II**	a. kios / kios bertingkat	-	-	130 / m² / hari	-
	- Pasar Gadingrejo	b. Bedak	-	-	150 / m² / hari	-
		c. Los	-	-	100 / m² / hari	-
		d. halaman / pelataran untuk penjual dasaran (pecokan) di dalam pasar	-	-	-	500 / hari
		e. penggunaan lokasi di dalam pasar untuk pedagang keliling	-	-	-	500 / hari

Lampiran 6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor12 tahun 2012

(dalam rupiah)

No	Jenis Pemakaian	Tarif	OPD
1	*2*	*3*	*4*
Pemakaian Ruangan, Bangunan Tempat Usaha, Bangunan Untuk Kantor Dan Rumah Tangga, Bangunan Rusunawa Dan Papan Reklame, Taman Kota,Stadion Dan Gor			
I.	Ruang Gradhika	Rp.1.000.000,- / hari	Bagian Umum dan Perlengkapan
II.	Bangunan Tempat Usaha : a. toko/rumah toko (ruko) : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal b. kios/kantin/ bedak : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	 Rp.250.000,-/m2/tahun Rp.200.000,-/m2/tahun Rp.175.000,-/m2/tahun Rp.100.000,-/m2/tahun Rp.75.000,-/m2/tahun Rp.50.000,-/m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
III.	Bangunan untuk kantor dan rumah tangga: a. untuk kantor : 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	 Rp.250.000,-/m2/tahun Rp.200.000,-/m2/tahun Rp.175.000,-/m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	b. untuk rumah tangga/ hunian 1. Jalan arteri 2. Jalan kolektor 3. Jalan lokal	 Rp. 50.000,-/m2/tahun Rp. 35.000,-/m2/tahun Rp25.000,-/m2/tahun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
V.	BangunanRusunawa (tipe24) a. LantaiI b. LantaiII c. LantaiIII d. LantaiIV e. LantaiV	 Rp.110.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.90.000,-/bulan Rp.80.000,-/bulan Rp.70.000,-/bulan	Dinas Pekerjaan Umum
V.	Papan Reklame : * Billboard : 1. nilai strategis I 2. nilai strategis II 3. nilai strategis III	 Rp.1.950.000,-/m2/tahun Rp.1.625.000,-/m2/tahun Rp.1.300.000,-/m2/tahun	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
VI.	Pemakaian Taman Kota : a. untuk Kegiatan Hiburan 1.Permainan anak-anak 2. Pasar Malam 3. Pertunjukan Musik b. untuk kegiatan pameran,promosi, dagang/produk	 Rp. 10.000,-/1 jenisPermainan/hari Rp. 200.000,-/hari. Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari	Dinas Pekerjaan Umum
VII.	Pemakaian Stadion : a. Latihan sepak bola b. Pertandingan Sepak Bola dengan tidak dipungut biaya masuk. a. Pertandingan Sepak Bola	 Rp.200.000,-/ jam Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 2.000.000,-/ hari	Dinas Pemuda,Olah Raga dan Kebudayaan

No	Jenis Pemakaian	Tarif	OPD
	dengan memungut biaya masuk		
VIII.	Pemakaian GOR : a. Dalam Gedung : 1. Latihan olah raga: • Bulu Tangkis • Voly, basket 2. Pertandingan/perlombaan dengan tidak dipungut biaya masuk. 3. Pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk. b. Halaman GOR : 1.Pameran/ kegiatan promosi dagang produk 2.Pertunjukan	 Rp. 40.000,-/jam/ lapang Rp.120.000,-/ jam/ lapangan Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 2.000.000,-/ hari Rp.1.000.000,-/ hari Rp.2.000.000,-/ hari	Dinas Pemuda,Olah Raga dan Kebudayaan
IX.	Pemakaian lapangan a. untuk pertandingan/ perlombaan dengan dipungut biaya masuk 1. per hari 2. per minggu 3. per bulan	 Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000	Dinas Pemuda,Olah Raga dan Kebudayaan
X.	b. untuk kegiatan hiburan : 1. pasar malam/ pameran 2. pertunjukan musik c. untuk kegiatan promosi dagang/produk	 Rp. 250.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari	Dinas Pemuda,Olah Raga dan Kebudayaan
XI.	Pemakaian Lapangan Tennis	Rp. 50.000,-/bulan	Dinas Pemuda,Olah Raga dan Kebudayaan
PemakaianPeralatan Mesin Industri			
I	Jasa coating Variasi dan komponen kendaraan bermotor/tidak bermotor, peralatan rumah tangga, komponen mebeler, komponen alat musik.	Rp. 3,1,-/cm2	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Lampiran 7. Tabel Penetapan Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB untuk Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011

Fungsi			Klarifikasi				Waktu Penggunaan	
Parameter		Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Hunian	0,05 / 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2.	Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangkamenengah	0,70
3.	Usaha	3,00			c. Khusus	1,0	3. Tetap	1,00
4.	Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5.	Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6.	Ganda / Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
			3 Resiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
					b. Zona II / minor	0,20		
					c. Zona III / sedang	0,40		
					d. Zona IV / sedang	0,50		
					e. Zona V / kuat	0,70		
					f.Zona VI / kuat	1,00		
			5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara / Yayasan	0,40		
					b. Perorangan	0,70		
					c. Badan usaha swasta	1,00		

Lampiran 8. Rincian Data Realisasi Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
1	05/01/2023	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600,000.00
2	01/02/2023	SETORAN TUNAI	4,800,000.00
3	07/02/2023	SET DINKES - Setor Pembayaran Denda sesuai adendum Surat Pesanan Belanja Alat Kesehatan Keb. Program TB (SP No: 027/19.2/423.104/PPK3/2022 an. PT. Medquest Jaya Global)	3,722,880.00
4	08/05/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan (2 hari) pek. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pek. teknik sipil air an. CV. LAKU CIPTA CONSULINDO (No. Kontrak: 602.21/1962/423.109/2023)	66,928.00
5	17/05/2023	SETORAN TUNAI	60,000.00
6	31/05/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan (17 hari) atas Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Penerangan Jalan Lingkungan) TA. 2023 an. CV. WINNERS CONSULTING ENGINEERING (No. Kontrak: 602.21/1656/423.109/2023)	1,195,500.00
7	06/06/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pek. Perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (14 hari) an. CV. AKA DESIGN DAN ENGINEERING (No. Kontrak : 000.5.2/015.5/425.109/2023)	590,753.00
8	08/06/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan (15 hari) pek. Perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan dan drainase lingkungan permukiman an. CV. TIGA KARYA ABADI (No. Kontrak : 000.3.2/013-3/423.109/2023)	1,071,000.00
9	09/06/2023	SET DPUPR - Pendapatan denda atas Keterlambatan Pekerjaan pada paket pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Karangketug III Tahun Anggaran 2023 CV.SCALA	524,780.00
10	09/06/2023	SET DPUPR - Pendapatan denda atas Keterlambatan Pekerjaan pada paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung PLUT (Lanjutan) Tahun Anggaran 2023 CV.WIRATAMA MANDIRI	238,000.00
11	20/06/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan perencanaan teknis peningkatan jalan lingkungan permukiman Kec. Purworejo dan Kec. Gadingrejo TA. 2023 an. CV. ARYA PUTRA KONSULTAN (No. Kontrak : 000.3.2/011.3/423.109/2023)	1,000,860.00
12	03/07/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan perencanaan teknis rehab Kantpr Kejaksaan Negeri TA. 2023 an. CV. ERKA	961,800.00
13	06/07/2023	SET PERKIM - Setor Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan Kec. Bugul Kidul dan Kec. Panggungrejo dan Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu Skala Perkotaan Kec. Bugul Kidul dan Kec. Panggungrejo (4 Hari) PT. BSNS INOVA BIKARYA No. Kontrak 602.1./2600/423.109/2023	613,200.00
14	07/07/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pek. perencanaan teknis peningkatan jalan lingkungan permukiman Kec. Panggungrejo dan Kec. Bugul Kidul (20 hari) an. CV. ARLANA (No. Kontrak : 000.3.2/018.3/423.109/2023)	884,600.00
15	07/07/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pek. perencanaan teknis peningkatan drainase lingkungan permukiman (17 hari) an. CV. METRO KARYA (No. Kontrak : 000.3.2/018-3/423.109/2023)	722,925.00
16	07/07/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pek. perencanaan teknis pembangunan penerangan jalan lingkungan permukiman (20 hari) an. CV. PION ENGINEERING (No. Kontrak : 000.3.2/018.3/423.109/2023)	705,150.00
17	07/07/2023	SET INSPEKTORAT - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Inspektorat Kota Pasuruan (7 hari x Rp. 108.863.000/1.000) an. CV. PRATAMA KARYA	762,041.00
18	14/07/2023	SET DLHKP - Denda keterlambatan belanja jasa konsultasi perencanaan pembuatan sumur resapan TA. 2023 (No. SPK 000.3.2/870/423.110/2023 tgl 29-3-23) an. CV. NIVO KONSULTAN	222,950.00
19	28/07/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan gedung negara TA. 2023 an. PT. EPITHU LOGICA SEMBADA	1,429,000.00
20	28/07/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan paket pekerjaan perencanaan teknis pembangunan gedung arsip depo (lanjutan) TA. 2023 an. PT. ELEMEN TIGA-TIGA	639,828.00
21	31/07/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan paket pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, ruang TU, ruang UKS pada SDN Purutrejo II Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. CAKRAWALA DESIGN	759,300.00
22	04/08/2023	Setor Kembali Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) TK SABILUNA Tahap II Tahun 2023	3,600,000.00

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
23	22/08/2023	SET DPUPR - Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan perencanaan teknis rehab berat bangunan gudang logistik, barak dalmas, rumah dinas Polres Kota Pasuruan TA. 2023 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA	1,222,800.00
24	22/08/2023	Pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan an. CV. ANUGERAH INTI TEK	564,856.00
25	23/08/2023	SET DISPENDIKBUD - Setor kembali dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) KB An-Nur Tahap II Tahun 2023	2,700,000.00
26	05/09/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. SCALA	936,300.00
27	11/09/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Supriadi (DAK) Kota Pasuruan TA. 2023	537,353.90
28	14/09/2023	Pengakuan atas setoran pengembalian atas kekurangan volume AC-WC pemeliharaan berkala Jl Supriadi (DAK) TAHUN 2023 pada DPUPR dikarenakan 2 angka dibelakang koma tidak bisa tercatat pada menu STS di SIPD Penatausahaan	0.21
29	21/09/2023	SET DINKES - Pembayaran Denda Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) PKD TA. 2023 an. PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	30,649.00
30	06/10/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan berkala Jl. Desa Krapyakrejo II (DAK) Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. DUTA BANGSA	1,003,391.00
31	09/10/2023	SET DINKES - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pembayaran Denda Belanja BMHP PKD Sub Kegiatan 01.17 a/n PT. Tri Sapta Jaya	406,667.00
32	09/10/2023	SET DINKES - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pembayaran Denda Belanja Obat PKD Sub Kegiatan 01.16 a/n PT. Kimia Farma Trading & Distribution	278,173.00
33	09/10/2023	SET DINKES -Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pembayaran Denda Belanja Bahan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Sub Kegiatan 01.16 a/n PT. Anugrah Argon Medica	1,253.00
34	09/10/2023	SET DINKES - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pembayaran Denda Belanja Bahan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Sub Kegiatan 01.16 a/n PT. Enseval Putera Megatrading	2,523.00
35	09/10/2023	SET DINKES - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Pembayaran Denda Belanja Bahan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Sub Kegiatan 01.16 a/n PT. Rajawali Nusindo	7,352.00
36	24/10/2023	SET DINKES - Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan atas Belanja BMPH PKD (DAK NF) Sub Keg. Pengadaan Bahan Habis Pakai an. PT. INTI SUMBER HASIL SEMPURNA GLOBAL TA. 2023	641,393.00
37	06/11/2023	Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu (Pembangunan Pendukung Payung Hidrolik dan Payung Hidrolik) Nomor SPK: 027/96/423.103/2022 tgl. 15 Juni 2022 (1/1.000 x 15.382.646.130,76 x 29 hari = 446.096.738 - pembulatan) pada DISPARPORA an. PT. DETIGA INTI TEKNIK SINERGI	446,096,738.00
38	08/11/2023	SET DLHKP - Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Taman (Peningkatan Tugu Slagah) Sub . Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) an. CV. Haromain No. SPK 000.3.2/3144/423.110/2023 Tanggal 15 September 2023	85,511.00
39	10/11/2023	SET DISPENDIKBUD - Pengembalian denda keterlambatan pengadaan bahan kain seragam siswa SMP/MTs selama 18 hari an. CV. INTAN JAYA SEKTI Tahun 2023	19,301,343.24
40	10/11/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan LS Termin 100% (NK dikurangi UM) Rehab Saluran Irigasi S.BG.BPL.4.Ki.2.T1 Kel. Sebani TA. 2023 an. CV. TRI KARYA SEJAHTERA	1,319,907.00
41	10/11/2023	SET DISPENDIKBUD - Pengembalian denda keterlambatan pengadaan kain siswa SD/MI selama 20 hari an. CV. INTAN JAYA SEKTI Tahun 2023	21,435,693.69
42	22/11/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (5 hari) pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Kel. Petahunan an. CV. PUTRI PASIR PUTIH (No. Kontrak: 600.2.10.2/116-2/423.109/2023)	1,184,760.00
43	22/11/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan (2 hari) pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR) Kel. Sebani an. CV. ASRI KARYA (No. Kontrak: 600.2.10.2/118-2/423.109/2023)	831,390.00
44	24/11/2023	SET DLHKP - Denda Keterlambatan Pek. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Sub Keg. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab./Kota an. CV. SEGER JAYA MOTOR No. Surat Pesanan E-Katalog : 000.3.2/2883.1/423.110/2023 Tgl. 30 Agustus 2023	480,779.00
45	24/11/2023	SET DLHKP - Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Taman (Peningkatan Taman Alun-alun) Sub Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) an. CV. BIDADARI No. SPK : 000.3.2/2467/423.110/2023 Tgl. 3 Agustus 2023	2,999,721.00

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
46	27/11/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Paving RW. 03 dan 04 Kel. Tapaan an. CV. PANGGITA No. Kontrak : 600.2.10/559-3/423.109/2023	996,815.00
47	30/11/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan (3 hari) Pemeliharaan Berkala Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo (DAK) TA. 2023 an. CV. RIVIC JAYA MANDIRI	6,158,714.00
48	06/12/2023	Pemindahbukuan atas Pengembalian Dana BOP PAUD KB An-Nur Tahap II Tahun 2023 (Masuk ke RKUD tanggal 23 Agustus 2023) ke RKUN TA. 2023	(2,700,000.00)
49	06/12/2023	Pemindahbukuan atas Pengembalian Dana BOP PAUD TK Sabiluna Tahap II Tahun 2023 (Masuk ke RKUD tanggal 4 Agustus 2023) ke RKUN TA. 2023	(3,600,000.00)
50	08/12/2023	SET DISPENDIKBUD - Denda Keterlambatan (7 hari) Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Aula Gedung Kantor TA. 2023 an. CV. WIJI LESTARI ENGENERING	1,302,840.00
51	08/12/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan drainase Jl. Hangtuah TA. 2023 an. CV. UNIMIX KARYA ANDALAN	4,612,370.00
52	14/12/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan perencanaan teknis pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik (2024) an. CV.DEEKSHAN CONSULTANT	440,550.00
53	18/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan (5 hari) atas Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan Perumahan Istana Bestari Kel. Pekuncen TA. 2023 an. CV. ADIKO (No. Kontrak : 600.2.1/8226/423.109/2023)	385,818.00
54	18/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan Pekerjaan Konsultasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah an. PT. NUPHIDAMA GRAHA TA. 2023 (No. Kontrak : 000.3.2/898-3/423.109/2023)	350,000.00
55	18/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Perum Taman Asri I RW. 04 Kel. Tembokrejo TA. 2023 an. CV. WIJI LESTARI ENGINEERING (No. Kontrak : 600.2/7804/423.109/2023)	6,347,926.00
56	19/12/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan penerangan jalan lingkungan RT. 3 RW. 2 dan RT. 3 RW. 1 Kel. Mandaranrejo dan RT. 1 - 2 RW. 1 dan RT. 2 RW. 3 Kel. Mayangan TA. 2023 an. CV. ADINO (No. Kontrak: 600.2.10/774-3/423.109/2023)	275,285.00
57	20/12/2023	SET DINKES - Denda keterlambatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran umum (stetoskop dewasa) TA. 2023 an. PT. RAJAWALI NUSINDO	5,000.00
58	21/12/2023	Lebih Bayar atas VA UPT SPMN 10 Pasuruan	135,000.00
59	22/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl. Petahunan Raya Ketug (DAK) Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. PUTRI PASIR PUTIH	34,198,936.00
60	22/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan Pek. Pembangunan Jl. Paving dan Drainase RT. 03 RW. 04 dan RT. 02 RW. 03 Kel. Kepel TA. 2023 an. CV. PUTRI PASIR PUTIH (No. Kontrak : 600.2.10/607-3/423.109/2023)	1,834,843.00
61	22/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pek. Peningkatan Jl. Kepel Utara Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. PANGGITA NUNGGI	6,485,962.00
62	22/12/2023	SET DISHUB - Denda keterlambatan pekerjaan belanja modal jaringan distribusi - pembangunan PJU High Maat (19 hari) dan PJU Sumber Glagah - Blintingan (3 hari) TA. 2023 an. CV. ARFA NEVADA	7,839,500.00
63	27/12/2023	SET DPUPR - Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan trotoar dan drainase Jl. Pahlawan TA. 2023 an. CV. BANGUN CIPTA MARTA NUSANTARA	12,958,223.00
64	27/12/2023	SET DISPERINDAG - Denda keterlambatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung kantor (rehabilitasi gedung UPT Logam) TA. 2023 an. CV. FLAMBOYAN	71,134,528.00
65	27/12/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan jalan dan drainase RT. 03, 04, 05 RW. - Kel. Karanganyar TA. 2023 an. CV. MUTIARA RAJAWALI	984,125.00
66	27/12/2023	SET PERKIM - Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan penerangan jalan di area Makam Bong Kel. Pohjentrek TA. 2023 an. CV. SISKA	5,952,045.00
67	27/12/2023	SET DISPARPORA - Denda keterlambatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung kantor TA. 2023 an. CV. DANADYAKSA BANGKIT PERKASA	3,257,589.00
68	27/12/2023	SET DLHKP - Denda keterlambatan pekerjaan peningkatan taman belakang Kec. Panggungrejo TA. 2023 an. CV. WANA MULTI CONSTRUCTION	7,341,561.00
69	27/12/2023	SET DLHKP - Denda keterlambatan pekerjaan pengawasan peningkatan taman belakang Kec. Panggungrejo TA. 2023 an. CV. NiVO KONSULTAN	205,620.00
70	28/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Gg. Buyut Tentrem Kel. Sebani TA. 2023 an. CV. MIKAEL PERKASA	5,627,030.00
71	28/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan (10 hari) Pek. Peningkatan Jalan Paving RW. 1 Kel. Wirogunan dan Peningkatan Jalan Aspal & Jembatan RT. 2, 3 RW. 3 Kel. Tembokrejo TA. 2023 an. CV. MIKAEL PERKASA	3,592,793.00
72	28/12/2023	SET DINKES - Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehab Berat Puskesmas Bugul Kidul) TA. 2023 an. CV. SAFA ARTHA ANUGERAH	639,000.00
73	28/12/2023	TRF DEST ONLY (ATMB)	8,469,600.00
74	29/12/2023	SET PERKIM - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving & Saluran Papan Bestari II Kel. Tembokrejo TA. 2023 an. CV. MULIA ABADI	5,472,910.00

NO	Tanggal	Uraian	Nilai
75	29/12/2023	SET DINKES - Denda Keterlambatan Pek. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Berat Puskesmas Bugul Kidul TA. 2023 an. CV. WIRATAMA MANDIRI	38,550.00
76	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. BANAWA SEKAR	172,250.00
77	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Atap Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. RAFIFA WIRATAMA	8,639,900.00
78	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. LURUS BALI	72,480,180.00
79	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl. Veteran Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. MITRA UTAMA	4,611,997.00
80	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Lanjutan) Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. SCALA	390,250.00
81	29/12/2023	SET DPUPR - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pasuruan TA. 2023 an. CV. KARYA NABILA TEKNIK	1,564,300.00
82	29/12/2023	Penerimaan atas Penihilan Rekening Kecamatan Bugul Kidul Sesuai Surat Nomer : 900.1.1.1/136/423.201/2024	28,000.00
83	31/12/2023	Penihilan atas Rekening BEND KNTR KEC BUGUL KIDUL PAS (0231014977) TA. 2023 (Sesuai Surat Nomor : 900.1.1.1/136/ 423.401/2024)	0.50
			805,870,059.54

Lampiran 9. Rincian Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga per-OPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Anggaran	Realisasi
A	**Belanja Operasi**		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.344.989.640,00	187.849.400.039,00
2	Dinas Kesehatan	129.826.424.143,00	116.661.674.558,00
3	RSUD DR. R. Soedarsono	99.252.041.990,00	106.103.859.112,92
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.541.881.305,00	23.562.428.761,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.774.650.298,00	25.427.685.088,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.258.481.642,00	10.048.386.483,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	13.780.114.568,00	12.039.207.555,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.290.176.8[illegible]?,00	5.365.045.663,00
9	Dinas Sosial	22.332.235.270,00	17.888.688.736,00
10	Dinas Tenaga Kerja	6.708.035.711,00	5.528.761.970,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	11.824.178.719,00	10.532.383.608,00
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	37.026.697.222,00	35.316.784.312,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.438.334.213,00	5.732.211.569,00
14	Dinas Perhubungan	24.980.549.149,00	22.734.143.805,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	20.225.119.030,00	19.251.386.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.352.319.115,00	5.423.088.369,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.383.380.878,00	5.530.546.466,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrag	22.015.221.376,00	20.661.749.756,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.677.056.633,00	4.811.888.011,00
20	Dinas Perikanan	6.613.148.954,00	5.889.183.829,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16.952.245.658,00	13.865.748.022,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.201.739.969,00	20.492.176.190,00
23	Sekretariat Daerah	51.211.488.382,00	43.563.911.399,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.947.321.669,00	36.592.685.505,00
25	Kecamatan Gadingrejo	14.951.708.387,00	13.651.497.276,00
26	Kecamatan Panggungrejo	23.628.516.812,00	22.262.634.740,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	11.284.594.392,00	10.306.270.975,00
28	Kecamatan Purworejo	14.438.826.877,00	13.545.671.162,00
29	Inspektorat	8.758.508.816,00	8.023.087.856,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.067.458.416,00	7.585.433.092,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	11.077.310.787,00	9.370.580.365,00
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)		
33	Badan Pendapatan Daerah	8.575.605.595,00	7.772.410.148,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	11.603.139.796,00	9.214.692.068,00
	Total Belanja Operasi	**944.343.502.254,00**	**862.605.302.488,92**
B			**Belanja Modal**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.483.714.732,00	18.883.026.142,00
2	Dinas Kesehatan	8.657.144.178,00	7.630.807.582,00
3	RSUD DR. R. Soedarsono	35.295.191.618,00	32.855.132.333,00

NO	CPD	Anggaran	Realisasi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.812.171.378,00	22.126.121.230,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.654.031.000,00	16.432.865.106,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.745.300,00	180.346.500,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	93.910.200,00	86.833.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.875.600,00	120.397.000,00
9	Dinas Sosial	572.432.700,00	535.827.023,00
10	Dinas Tenaga Kerja	61.771.100,00	45.600.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	14.062.300,00	14.061.400,00
12	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	5.484.107.300,00	5.145.369.826,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63.840.096,00	60.627.000,00
14	Dinas Perhubungan	4.736.689.600,00	4.503.127.420,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.171.648.948,00	2.063.580.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	18.823.900,00	18.650.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	841.109.200,00	680.729.751,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	26.719.253.700,00	23.000.547.035,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	109.191.600,00	90.704.000,00
20	Dinas Perikanan	166.227.700,00	160.316.366,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	547.821.700,00	505.011.910,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.159.497.800,00	4.994.820.866,00
23	Sekretariat Daerah	967.991.600,00	864.426.150,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.738.363.970,00	2.648.793.000,00
25	Kecamatan Gadingrejo	168.139.902,00	165.450.000,00
26	Kecamatan Panggungrejo	963.575.217,00	960.921.000,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	225.645.700,00	224.216.700,00
28	Kecamatan Purworejo	76.646.800,00	75.965.400,00
29	Inspektorat	204.358.500,00	194.430.000,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.650.000,00	69.580.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	877.460.000,00	813.882.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	214.581.600,00	205.180.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	105.242.500,00	93.450.000,00
	Total Belanja Modal	**201.600.917.439,00**	**146.450.795.740,00**
C			**Belanja Tak Terduga**
1	BPKA	7.967.169.780,00	1.722.869.500,00
D	**Total Belanja Tak Terduga**	**7.967.169.780,00**	**1.722.869.500,00**
	Total Belanja Daerah	**1.153.911.589.473,00**	**1.010.778.967.728,92**

Lampiran 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**464.480.805.962,00**	**423.932.933.202,92**	**91,27**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**92.983.522.322,00**	**79.941.506.362,00**	**85,97**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**92.983.522.322,00**	**79.941.506.362,00**	**85,97**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.452.000.800,00	5.050.930.494,00	92,64
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.091.607.400,00	981.020.140,00	89,87
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.259.550,00	3.591.994.115,00	89,79
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	611.935.400,00	578.608.498,00	94,55
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	88.816.900,00	53.928.700,00	60,72
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	57.916.500,00	50.360.800,00	86,95
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	32.040.000,00	30.375.000,00	94,8
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.052.115.000,00	913.526.850,00	86,83
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	44.757.700,00	23.185.200,00	51,8
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.985.322.400,00	1.704.461.396,00	85,85
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.981.099.200,00	1.283.036.305,00	43,04
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	291.792.900,00	282.854.980,00	96,94
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.790.800,00	8.675.200,00	88,61
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	247.599.700,00	241.768.788,00	97,65
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.344.738.210,00	2.683.203.464,00	80,22
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.933.360.800,00	1.676.792.370,00	86,73
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.326.134.596,00	8.086.919.433,00	86,71
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	573.230.000,00	527.530.000,00	92,03
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	406.200,00	313.500,00	77,18
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.460.380.710,00	2.865.263.712,00	82,8
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.284.100.200,00	2.110.983.561,00	92,42
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.239.816.816,00	2.058.390.435,00	91,9
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.499.200,00	1.499.200,00	100
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	77.274.400,00	55.418.800,00	71,72
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.081.695.900,00	1.863.813.000,00	89,53
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	273.688.500,00	224.160.900,00	81,9
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.401.984.120,00	1.273.081.980,00	90,81
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.722.552.000,00	1.535.433.570,00	89,14
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.369.089.200,00	2.127.969.500,00	89,82
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	677.694.000,00	673.551.400,00	99,39
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	14.055.100,00	13.716.000,00	97,59
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.747.596.500,00	16.327.862.800,00	82,68

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.561.956.500,00	6.471.134.750,00	85,57
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	224.220.000,00	205.273.800,00	91,55
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.834.504.000,00	4.460.274.550,00	92,26
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.492.690.000,00	2.177.708.250,00	87,36
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	107.740.000,00	8.000.000,00	7,43
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	30.000.000,00	30.000.000,00	100
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	154.040.000,00	153.220.000,00	99,47
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.249.312.300,00	3.149.460.700,00	96,93
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.662.361.220,00	1.572.826.175,00	94,61
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	81.573.000,00	37.300.000,00	45,73
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	206.976.000,00	201.199.000,00	97,21
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	9.326.000,00	9.000.000,00	96,5
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	25.046.000,00	24.615.000,00	98,28
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.921.000,00	1.950.000,00	66,76
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	26.846.700,00	24.392.500,00	90,86
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	359.854.700,00	302.356.275,00	84,02
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	520.542.100,00	407.547.000,00	78,29
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.796.684.300,00	1.645.382.071,00	91,58
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	160.577.800,00	159.236.200,00	99,16
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**228.740.064.207,00**	**206.057.286.826,00**	**90,08**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**162.613.360.322,00**	**145.922.946.905,00**	**89,74**
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	603.000.000,00	490.032.900,00	81,27
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.935.225.000,00	6.852.989.200,00	76,7
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.078.800.000,00	1.369.793.500,00	65,89
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	118.800.000,00	108.900.000,00	91,67
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.354.110.000,00	3.044.560.000,00	90,77
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.133.100.000,00	5.668.200.000,00	92,42
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.174.470.000,00	3.234.345.000,00	77,48
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	318.000.000,00	315.000.000,00	99,06
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.828.800.000,00	4.186.125.000,00	86,69
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.602.887.900,00	7.795.493.516,00	90,61
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	281.400.000,00	201.335.700,00	71,55
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16.322.665.800,00	15.572.850.500,00	95,41
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	365.400.000,00	342.150.000,00	93,64
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	546.450.000,00	477.375.000,00	87,36
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.176.775.000,00	954.895.000,00	81,15
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.400.000,00	1.400.000,00	58,33
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	59.400.000,00	52.800.000,00	88,89
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	592.000.000,00	437.750.000,00	73,94

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.372.426.250,00	19.103.589.755,00	93,77
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.703.625.000,00	1.491.315.000,00	87,54
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.283.920.000,00	4.001.254.150,00	93,4
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.430.750.000,00	2.241.066.667,00	92,2
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.176.340.000,00	8.745.788.900,00	95,31
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.719.910.000,00	6.918.562.750,00	89,62
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	99.000.000,00	94.455.000,00	95,41
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	809.475.000,00	698.025.000,00	86,23
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	100
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	485.500.000,00	393.400.000,00	81,03
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	184.580.200,00	104.605.000,00	56,67
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	26.989.800,00	73.978.013,00	274,1
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	414.800.000,00	398.486.797,00	96,07
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.567.500.000,00	19.447.313.569,00	94,55
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	487.000.000,00	437.000.000,00	89,73
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	237.990.880,00	197.083.550,00	82,81
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	116.150.000,00	102.996.630,00	88,68
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	116.750.000,00	91.682.176,00	78,53
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	250.205.015,00	8.141.000,00	3,25
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.336.929.200,00	3.186.209.350,00	95,48
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	484.369.373,00	259.918.026,00	53,66
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	657.677.504,00	455.036.080,00	69,19
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.208.268.202,00	14.843.369.289,00	91,58
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	224.800.500,00	210.880.630,00	93,81
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.325.376.671,00	7.567.983.491,00	90,9
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	56.240.480,00	48.191.500,00	85,69
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	8.505.900,00	3.644.463,00	42,85
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	751.701.647,00	472.209.350,00	62,82
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	9.600.000,00	5.701.618,00	59,39
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.143.895.000,00	2.044.322.000,00	65,03
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	75.000.000,00	18.506.000,00	24,67
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	424.400.000,00	225.450.000,00	53,12
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	925.000.000,00	921.785.835,00	99,65
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**40.110.905.000,00**	**39.328.485.172,00**	**98,05**
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.120.000.000,00	35.614.630.800,00	98,6
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.091.200.000,00	2.995.018.800,00	96,89
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	585.875.000,00	501.825.748,00	85,65
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.140.000,00	6.593.476,00	40,85
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	297.690.000,00	210.416.348,00	70,68

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.02.03	**Belanja Sewa Tanah**	**483.100.000,00**	**397.933.119,00**	**82,37**
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	28.000.000,00	28.000.000,00	100
5.1.02.02.03.0008	Belanja Sewa Tanah Basah	11.100.000,00	11.100.000,00	100
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	444.000.000,00	358.833.119,00	80,82
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**4.064.206.415,00**	**2.718.731.700,00**	**66,89**
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.181.815,00	6.105.000,00	74,62
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	923.044.300,00	686.221.200,00	74,34
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.393.588.500,00	1.477.240.300,00	61,72
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	155.374.800,00	125.700.000,00	80,9
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	16.400.000,00	16.000.000,00	97,56
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	160.537.400,00	84.230.000,00	52,47
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	10.000.000,00	6.650.000,00	66,5
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	128.079.600,00	118.902.200,00	92,83
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	74.000.000,00	6.000.000,00	8,11
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	8.200.000,00	82
5.1.02.02.04.0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	185.000.000,00	183.483.000,00	99,18
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**294.950.000,00**	**117.000.000,00**	**39,67**
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	225.000.000,00	65.900.000,00	29,29
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	69.950.000,00	51.100.000,00	73,05
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**386.751.800,00**	**266.340.000,00**	**68,87**
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	184.627.800,00	92.720.000,00	50,22
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	202.124.000,00	173.620.000,00	85,9
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**8.429.000.000,00**	**7.663.070.015,00**	**90,91**
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	786.500.000,00	727.971.711,00	92,56
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	6.000.000,00	5.916.300,00	98,61
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	200.000.000,00	155.802.900,00	77,9
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.033.500.000,00	988.011.433,00	95,6
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	523.500.000,00	489.676.010,00	93,54
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	485.000.000,00	392.634.750,00	80,96
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	180.000.000,00	176.795.250,00	98,22
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	230.000.000,00	221.667.000,00	96,38
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.891.000.000,00	1.648.263.821,00	87,16
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.009.500.000,00	927.451.464,00	91,87

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	478.000.000,00	398.353.487,00	83,34
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	100.000.000,00	99.058.620,00	99,06
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	100.000.000,00	99.645.477,00	99,65
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00	100.000.000,00	100
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	677.500.000,00	647.519.964,00	95,57
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	9.000.000,00	7.800.000,00	86,67
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	80.000.000,00	79.190.000,00	98,99
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	410.000.000,00	391.921.020,00	95,59
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	62.500.000,00	61.623.508,00	98,6
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	22.000.000,00	-	-
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	45.000.000,00	43.767.300,00	97,26
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**5.761.290.670,00**	**5.087.330.296,00**	**88,3**
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.115.000.000,00	996.172.985,00	89,34
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	225.000.000,00	223.029.000,00	99,12
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	477.500.000,00	310.616.211,00	65,05
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	40.000.000,00	39.738.000,00	99,35
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	285.000.000,00	279.143.540,00	97,95
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	560.000.000,00	520.778.700,00	93
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.546.290.670,00	1.473.576.640,00	95,3
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.142.500.000,00	1.021.143.020,00	89,38
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	85.000.000,00	83.860.500,00	98,66
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	285.000.000,00	139.271.700,00	48,87
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.596.500.000,00	4.555.449.619,00	69,06
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.596.500.000,00	4.555.449.619,00	69,06
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**22.084.015.894,00**	**19.940.942.604,00**	**90,3**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**16.326.761.500,00**	**14.384.753.982,00**	**88,11**
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	367.116.050,00	348.075.436,00	94,81
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	91.000.000,00	73.069.900,00	80,3
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	50.000.000,00	49.964.770,00	99,93
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	586.719.650,00	586.711.965,00	100

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	5.000.000,00	4.975.000,00	99,5
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	17.100.000,00	7.711.000,00	45,09
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.501.871.900,00	7.922.112.428,00	93,18
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.703.100,00	5.130.000,00	76,53
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.729.092.000,00	1.565.371.084,00	90,53
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	570.000.000,00	501.520.194,00	87,99
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	36.280.000,00	29.268.100,00	80,67
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.300.000,00	20.296.000,00	99,98
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	56.240.000,00	45.900.715,00	81,62
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	30.000.000,00	29.100.000,00	97
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	712.400.000,00	569.150.320,00	79,89
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	100
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	129.724.100,00	118.828.750,00	91,6
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	145.309.800,00	129.329.650,00	89
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	395.873.800,00	356.883.678,00	90,15
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.116.200,00	615.000,00	55,1
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	78.000.000,00	78.000.000,00	100
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	21.800.000,00	6.755.000,00	30,99
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	17.853.200,00	10.272.600,00	57,54
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	30.000.000,00	29.415.000,00	98,05
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	26.000.000,00	24.975.000,00	96,06
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	16.000.000,00	15.999.540,00	100
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	273.000.000,00	256.640.000,00	94,01
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	555.095.700,00	501.112.048,00	90,27
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	450.210.000,00	388.210.804,00	86,23
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	1.356.956.000,00	659.360.000,00	48,59
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.402.744.394,00	5.239.440.887,00	96,98

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.195.679.954,00	5.033.795.887,00	96,88
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	149.613.040,00	148.445.000,00	99,22
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	57.451.400,00	57.200.000,00	99,56
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**354.510.000,00**	**316.747.735,00**	**89,35**
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	180.000.000,00	179.497.450,00	99,72
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	174.510.000,00	137.250.285,00	78,65
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**41.576.618.080,00**	**33.808.781.422,00**	**81,32**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**41.576.618.080,00**	**33.808.781.422,00**	**81,32**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.825.473.080,00	22.181.455.113,00	79,72
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.802.825.000,00	8.002.075.309,00	81,63
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.024.250.000,00	1.945.577.000,00	96,11
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.924.070.000,00	1.679.674.000,00	87,3
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**5.002.838.700,00**	**4.088.800.600,00**	**81,73**
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.922.838.700,00	3.056.800.600,00	77,92
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.303.200.000,00	1.140.832.000,00	87,54
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	803.238.700,00	263.818.600,00	32,84
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	252.400.000,00	252.150.000,00	99,9
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.564.000.000,00	1.400.000.000,00	89,51
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.080.000.000,00**	**1.032.000.000,00**	**95,56**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.080.000.000,00	1.032.000.000,00	95,56
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**16.740.051.842,00**	**16.354.613.751,00**	**97,7**
5.1.02.88.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**16.740.051.842,00**	**16.354.613.751,00**	**97,7**
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.740.051.842,00	16.354.613.751,00	97,7
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**57.353.694.917,00**	**63.741.001.637,92**	**111,14**
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.353.694.917,00	63.741.001.637,92	111,14
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.353.694.917,00	63.741.001.637,92	111,14

Lampiran 11. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD dan BOS Tahun 2023

Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**67.105.431.097,07**	**63.741.001.637,92**	**94,99**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**34.921.874.716,07**	**33.870.071.864,00**	**96,99**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**34.921.874.716,07**	**33.870.071.864,00**	**96,99**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00	600.000,00	17,14
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	427.680.000,00	271.017.874,00	63,37
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.380.000,00	33.145.000,00	99,30
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	175.000.000,00	148.599.000,00	84,91
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	401.633.700,00	371.590.960,00	92,52
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.490.000,00	-	
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	619.457.000,00	547.983.009,00	88,46
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	109.400.000,00	37.136.338,00	33,95
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249.653.450,00	237.512.900,00	95,14
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	186.187.500,00	156.057.850,00	83,82
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	790.287.000,00	746.887.320,00	94,51
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	36.915.000,00	34.225.460,00	92,71
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	203.305.000,00	139.130.780,00	68,43
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.131.250,00	244.367.460,00	79,82
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	402.570.087,00	291.553.763,00	72,42
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.408.312.137,07	14.255.579.157,00	98,94
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.762.337.592,00	14.741.858.261,00	99,86
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	251.870.000,00	143.262.750,00	56,88
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.244.000,00	19.785.000,00	75,39
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.442.229.000,00	1.368.659.982,00	94,90
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.750.000,00	16.650.000,00	99,40
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.542.000,00	44.469.000,00	95,55
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**29.929.874.387,00**	**28.311.486.409,92**	**94,59**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**14.778.544.250,00**	**14.284.073.549,92**	**96,65**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	73.903.000,00	63.350.000,00	85,72
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	122.000.000,00	51.000.000,00	41,80
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	13.800.000,00	76,67
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.491.653.303,00	10.391.062.905,00	99,04
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8.000.000,00	4.000.000,00	50,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.500.000,00	3.000.000,00	40,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	380.000.000,00	373.800.000,00	98,37

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.790.000,00	61.709.500,00	98,28
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO			
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.000.000,00	-	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.615.177,00	649.614,92	24,84
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	65.000.000,00	56.053.800,00	86,24
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	9.800.000,00	6.600.000,00	67,35
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	243.973.000,00	221.462.900,00	90,77
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	496.054.230,00	454.896.009,00	91,70
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	62.462.800,00	46.271.500,00	74,08
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	28.900.000,00	26.650.000,00	92,21
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.780.000,00	17.052.709,00	86,21
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	66.964.534,00	62.005.046,00	92,59
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.302.224.400,00	1.281.793.660,00	98,43
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	117.862.606,00	113.241.106,00	96,08
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	1.329.500,00	66,48
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	1.048.545.000,00	915.335.000,00	87,30
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.976.200,00	9.515.300,00	29,76
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	12.540.000,00	8.495.000,00	67,74
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**822.049.000,00**	**762.502.783,00**	**92,76**
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	822.049.000,00	762.502.783,00	92,76
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**100.000.000,00**	**81.696.000,00**	**81,70**
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	100.000.000,00	81.696.000,00	81,70
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**764.221.000,00**	**482.334.324,00**	**63,11**
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	453.662.600,00	304.274.600,00	67,07
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	15.558.400,00	-	
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	25.000.000,00	17.937.600,00	71,75
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	210.000.000,00	160.122.124,00	76,25
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	60.000.000,00	-	
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**549.581.530,00**	**537.085.797,00**	**97,73**
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	317.000.000,00	313.015.092,00	98,74
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	50.000.000,00	48.534.750,00	97,07
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	182.581.530,00	175.535.955,00	96,14
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**265.400.000,00**	**229.848.907,00**	**86,60**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	265.400.000,00	229.848.907,00	86,60
5.1.02.02.14	**Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum**	**12.650.078.607,00**	**11.933.945.049,00**	**94,34**
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	12.650.078.607,00	11.933.945.049,00	94,34

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
	Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan			
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.457.816.994,00**	**946.639.053,00**	**64,94**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**452.786.000,00**	**307.141.814,00**	**67,83**
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	16.000.000,00	215.000,00	1,34
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	3.000.000,00	-	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.650.000,00	26.001.000,00	79,64
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	70.000.000,00	52.783.300,00	75,40
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)			
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	22.153.400,00	18.820.600,00	84,96
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	24.000.000,00	-	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	73.058.500,00	30.975.040,00	42,40
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	14.000.000,00	-	
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.883.000,00	5.883.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	139.482.600,00	138.087.774,00	99,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	37.558.500,00	20.362.300,00	54,21
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	14.013.800,00	93,43
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**955.755.994,00**	**609.356.424,00**	**63,76**
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	703.755.994,00	359.356.428,00	51,06
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	252.000.000,00	249.999.996,00	99,21
5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**34.275.000,00**	**16.625.815,00**	**48,51**
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya			
5.1.02.03.04.0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	29.275.000,00	16.625.815,00	56,79
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	5.000.000,00	-	
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**15.000.000,00**	**13.515.000,00**	**90,10**
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	15.000.000,00	13.515.000,00	90,10
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**365.670.000,00**	**228.082.808,00**	**62,37**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	365.670.000,00	228.082.808,00	62,37
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365.670.000,00	228.082.808,00	62,37
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**430.195.000,00**	**384.721.503,00**	**89,43**
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	430.195.000,00	384.721.503,00	89,43
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	415.195.000,00	376.478.385,00	90,68

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	8.243.118,00	54,95

Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**16.740.051.842,00**	**16.354.613.751,00**	**97,70**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.716.193.041,00**	**8.481.034.877,00**	**97,30**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.716.193.041,00	8.481.034.877,00	97,30
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	525.756.150,00	502.735.545,00	95,62
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.075.000,00	4.075.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	215.186.316,00	207.334.416,00	96,35
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.000,00	-	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	48.303.040,00	48.005.040,00	99,38
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	624.136.438,00	608.330.687,00	97,47
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	439.784.870,00	431.501.840,00	98,12
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.678.038.003,00	4.606.112.503,00	98,46
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	53.086.000,00	52.200.000,00	98,33
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11.475.000,00	10.800.000,00	94,12
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	505.830.499,00	490.278.500,00	96,93
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	586.724.318,00	576.757.522,00	98,30
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	168.428.680,00	165.837.525,00	98,46
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.835.000,00	2.735.000,00	96,47
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	128.321.154,00	127.358.150,00	99,25
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.330.000,00	3.330.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	160.565.790,00	157.482.790,00	98,08
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	208.914.784,00	205.320.359,00	98,28
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.147.000,00	259.615.000,00	78,64
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	19.195.000,00	19.195.000,00	100,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**7.831.278.201,00**	**7.686.837.974,00**	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**7.831.278.201,00**	**7.686.837.974,00**	**98,16**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	692.250.000,00	688.050.000,00	99,39
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	50.250.000,00	41.325.000,00	82,24
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	29.650.000,00	29.650.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	934.580.000,00	932.960.000,00	99,83
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	236.659.000,00	216.288.000,00	91,39
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.825.278.000,00	1.800.233.000,00	98,63
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.250.000,00	17.100.000,00	99,13

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	815.870.000,00	799.645.000,00	98,01
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	78.994.000,00	78.994.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.014.718,00	153.700,00	5,10
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	18.550.000,00	18.550.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.276.105,00	25.610.282,00	84,59
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	44.361.459,00	38.843.941,00	87,56
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	605.291.634,00	572.669.929,00	94,61
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.830.322.501,00	1.822.519.900,00	99,57
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	588.980.784,00	574.545.222,00	97,55
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**187.024.600,00**	**186.740.900,00**	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**157.014.600,00**	**157.001.600,00**	**99,99**
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	107.385.000,00	107.385.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40.229.600,00	40.216.600,00	99,97
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.400.000,00	9.400.000,00	100,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.010.000,00	29.739.300,00	
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	30.010.000,00	29.739.300,00	99,10
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.556.000,00**	-	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**5.556.000,00**	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.556.000,00	-	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			

Lampiran 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**65.608.075.179,00**	**54.641.329.574,00**	**83,28**	**36.486.480.985,00**
Belanja Modal Alat Besar	**961.910.800,00**	**932.747.000,00**	**96,97**	**1.034.607.499,00**
Belanja Modal Alat Besar Darat	48.238.800,00	36.000.000,00	74,63	**507.255.099,00**
Belanja Modal Asphalt Equipment	48.238.800,00	36.000.000,00	74,63	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	488.255.100,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.999.999,00
Belanja Modal Alat Bantu	**913.672.000,00**	**896.747.000,00**	**98,15**	**527.352.400,00**
Belanja Modal Electric Generating Set	685.650.500,00	682.507.000,00	99,54	249.499.000,00
Belanja Modal Pompa	95.021.500,00	81.740.000,00	86,02	88.265.400,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	133.000.000,00	132.500.000,00	99,62	189.588.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	**2.546.347.561,00**	**2.465.817.740,00**	**96,84**	**2.073.986.160,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	**1.939.150.661,00**	**1.861.058.840,00**	**95,97**	**2.028.856.260,00**
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	468.836.400,00	452.000.000,00	96,41	1.174.729.500,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.277.900,00	75.294.840,00	93,79	584.518.760,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	737.568.861,00	713.164.000,00	96,69	269.608.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	652.467.500,00	620.600.000,00	95,12	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	**607.196.900,00**	**604.758.900,00**	**99,60**	**45.129.900,00**
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	607.196.900,00	604.758.900,00	99,60	45.129.900,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**8.716.003.800,00**	**537.655.700,00**	**6,17**	**1.523.845.496,00**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	**8.423.902.200,00**	**246.394.000,00**	**2,92**	**548.302.274,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.556.700,00	0,00	0,00	**0,00**
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	50.984.200,00	48.947.000,00	96,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	0,00	0,00	31.694.274,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	461.094.000,00
Belanja Modal Peralatan Las	5.818.200,00	5.818.200,00	100,00	2.964.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.365.543.100,00	191.628.800,00	2,29	50.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	**686.400,00**	**686.400,00**	**100,00**	**969.848.222,00**
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	2.251.900,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	1.174.600,00
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0,00	0,00	0,00	966.421.722,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	686.400,00	686.400,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	**291.415.200,00**	**290.575.300,00**	**99,71**	**5.695.000,00**
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00
Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	925.500,00	885.000,00	95,62	2.800.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	274.489.700,00	273.790.300,00	99,75	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	**247.544.100,00**	**208.826.800,00**	**84,36**	**196.997.500,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan	**247.544.100,00**	**208.826.800,00**	**84,36**	**196.997.500,00**
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	125.549.800,00	90.500.000,00	72,08	2.762.100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	69.172.800,00	67.226.800,00	97,19	23.815.000,00
Belanja Modal Alat Processing	5.821.500,00	5.800.000,00	99,63	0,00
Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	116.275.400,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	14.145.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	47.000.000,00	45.300.000,00	96,38	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**9.483.851.002,00**	**8.727.528.713,00**	**91,98**	**6.905.995.472,00**
Belanja Modal Alat Kantor	**4.037.295.045,00**	**3.686.663.540,00**	**91,32**	**2.314.577.206,00**
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	826.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	894.957.600,00	737.581.000,00	82,42	593.777.600,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.142.337.445,00	2.949.082.540,00	93,85	1.719.973.606,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	**5.033.611.857,00**	**4.640.106.573,00**	**92,18**	**4.314.294.466,00**
Belanja Modal Mebel	2.237.301.126,00	2.087.464.178,00	93,30	1.883.668.491,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.920.600,00	1.496.250,00	77,91	0,00
Belanja Modal Alat Pembersih	17.924.300,00	16.590.000,00	92,56	25.571.600,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.810.361.962,00	1.700.735.500,00	93,94	1.162.142.850,00
Belanja Modal Alat Dapur	26.074.500,00	14.960.000,00	57,37	37.654.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	833.749.269,00	737.560.645,00	88,46	1.025.348.125,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	106.280.100,00	81.300.000,00	76,50	179.908.900,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**417.944.100,00**	**400.758.600,00**	**95,89**	**277.123.800,00**
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.623.000,00	19.350.000,00	98,61	42.600.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	34.927.200,00	34.550.000,00	98,92	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	102.373.100,00	98.205.000,00	95,93	118.667.500,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	211.009.400,00	198.850.000,00	94,24	73.900.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	23.083.200,00	22.903.600,00	99,22	35.872.800,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	26.928.200,00	26.900.000,00	99,90	6.083.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**4.335.871.500,00**	**4.144.005.000,00**	**95,57**	**309.858.400,00**
Belanja Modal Alat Studio	**4.197.441.600,00**	**4.009.560.000,00**	**95,52**	**200.745.900,00**
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	843.592.000,00	679.233.000,00	80,52	62.478.900,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.304.086.700,00	3.282.677.000,00	99,35	59.115.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	43.940.700,00	41.900.000,00	95,36	31.502.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.822.200,00	5.750.000,00	98,76	47.650.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	**132.963.400,00**	**129.145.000,00**	**97,13**	**109.112.500,00**
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	73.345.800,00	71.645.000,00	97,68	49.262.500,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	59.850.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	59.617.600,00	57.500.000,00	96,45	0,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	**5.466.500,00**	**5.300.000,00**	**96,95**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	5.466.500,00	5.300.000,00	96,95	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**25.809.858.550,00**	**24.363.463.371,00**	**94,40**	**6.035.250.368,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran	**25.809.858.550,00**	**24.363.463.371,00**	**94,40**	**6.035.250.368,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	13.827.702.900,00	13.118.498.475,00	94,87	5.557.350.350,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	332.822.600,00	247.349.106,00	74,32	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	52.764.418,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	731.552.350,00	636.748.780,00	87,04	306.803.100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.477.109.900,00	2.356.932.000,00	95,15	115.832.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	11.883.900,00	11.374.800,00	95,72	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	419.386.800,00	329.814.960,00	78,64	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	8.009.400.100,00	7.662.745.550,00	95,67	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	**463.525.400,00**	**439.342.460,00**	**94,78**	**900.603.676,00**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**552.020.636,00**
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	128.470.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	423.550.636,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	**388.363.400,00**	**364.842.500,00**	**93,94**	**347.293.040,00**
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	4.078.800,00	4.000.000,00	98,07	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	4.977.800,00	3.279.500,00	65,88	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	3.699.800,00	2.500.000,00	67,57	2.850.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	645.800,00	600.000,00	92,91	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	20.523.500,00	12.560.000,00	61,20	201.700.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	28.482.700,00	16.629.000,00	58,38	136.193.040,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	325.955.000,00	325.274.000,00	99,79	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	**25.162.000,00**	**24.500.000,00**	**97,37**	**1.290.000,00**
Belanja Modal System/Power Supply	25.162.000,00	24.500.000,00	97,37	1.290.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	**40.000.000,00**	**39.999.960,00**	**100,00**	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	40.000.000,00	39.999.960,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	**5.873.762.208,00**	**5.587.947.000,00**	**95,13**	**8.857.464.180,00**
Belanja Modal Komputer Unit	**4.287.365.005,00**	**4.133.176.300,00**	**96,40**	**6.147.088.392,00**
Belanja Modal Komputer Jaringan	277.459.300,00	254.090.000,00	91,58	2.083.915.000,00
Belanja Modal Personal Computer	3.931.470.805,00	3.810.488.300,00	96,92	3.803.323.705,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	78.434.900,00	68.598.000,00	87,46	259.849.687,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	**1.586.397.203,00**	**1.454.770.700,00**	**91,70**	**2.710.375.788,00**
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	437.697.504,00	400.602.000,00	91,52	656.923.458,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	219.655.600,00	218.655.000,00	99,54	310.267.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	929.044.099,00	835.513.700,00	89,93	1.743.184.830,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**303.650.500,00**	**260.440.570,00**	**85,77**	**1.534.369.007,00**
Belanja Modal Alat Deteksi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.130.397,00**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.330.130.397,00
Belanja Modal Alat Pelindung	**303.650.500,00**	**260.440.570,00**	**85,77**	**203.438.610,00**
Belanja Modal Baju Pengaman	11.788.800,00	11.712.000,00	99,35	41.908.050,00
Belanja Modal Topi Kerja	30.500.400,00	30.360.000,00	99,54	111.994.560,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	261.361.300,00	218.368.570,00	83,55	47.961.000,00
Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	**543.594.400,00**	**519.084.000,00**	**95,49**	**1.036.915.570,00**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**543.594.400,00**	**519.084.000,00**	**95,49**	**1.036.915.570,00**
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	324.261.100,00	312.984.000,00	96,52	363.333.970,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	219.333.300,00	206.100.000,00	93,97	673.581.600,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**23.197.200,00**	**21.800.000,00**	**93,98**	**66.800.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**23.197.200,00**	**21.800.000,00**	**93,98**	**66.800.000,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	9.800.000,00	9.000.000,00	91,84	5.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	2.090.800,00	1.880.000,00	89,92	3.700.000,00
Belanja Modal Peralatan Senam	11.306.400,00	10.920.000,00	96,58	2.450.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	55.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**3.358.048.158,00**	**3.350.360.742,00**	**99,77**	**2.711.107.612,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**3.358.048.158,00**	**3.350.360.742,00**	**99,77**	**2.711.107.612,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.358.048.158,00	3.350.360.742,00	99,77	2.711.107.612,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**2.935.910.000,00**	**3.082.310.478,00**	**104,99**	**3.297.930.045,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99	**3.297.930.045,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.935.910.000,00	3.082.310.478,00	104,99	3.297.930.045,00

Lampiran 13. Rincian Saldo Masing-Masing Sekolah per 1 Januari dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Tahun 2022	PENDAPATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SISA DANA / SALDO TAHUN 2023
1	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL I	733.600	68.400.000	-	67.828.591	-	571.409
2	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL II	312.700	159.300.000	-	153.377.254	5.400.000	522.746
3	UPT SD NEGERI KRAMPYANGAN	2.928.000	306.000.000	-	249.270.315	55.900.000	829.685
4	UPT SD NEGERI TAPAAN 1	740.000	120.600.000	-	119.974.539	-	625.461
5	UPT SD NEGERI TAPAAN 2	6.427.940	89.206.340	-	62.393.696	18.200.000	8.612.644
6	UPT SD NEGERI BAKALAN	604.500	260.100.000	-	191.108.224	66.300.000	2.691.776
7	UPT SD NEGERI KEPEL	103.300	137.700.000	-	136.690.018	-	1.009.982
8	UPT SD NEGERI BLANDONGAN	3.700.200	170.100.000	-	144.785.217	20.868.000	4.446.783
9	UPT SD NEGERI PURUTREJO I	6.162.540	255.600.000	-	200.246.210	54.400.000	953.790
10	UPT SD NEGERI PURUTREJO II	3.886.130	368.900.300	-	297.127.438	66.264.500	5.508.362
11	UPT SD NEGERI KEBONAGUNG	232.194.820	830.100.000	-	577.164.173	225.000.000	27.935.827
12	UPT SD NEGERI PURWOREJO 1	13.277.800	270.900.150	-	210.694.013	53.750.000	6.456.137
13	UPT SD NEGERI PURWOREJO III	18.513.200	128.700.000	-	102.245.726	18.150.000	8.304.274
14	UPT SD NEGERI POHJENTREK I	6.809.700	162.900.000	-	122.939.521	32.150.000	7.810.479
15	UPT SD NEGERI POHJENTREK II	7.619.100	100.854.700	-	78.664.352	20.700.000	1.490.348
16	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO I	26.767.470	240.300.000	-	199.512.411	33.400.000	7.387.589
17	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO II	74.400	189.000.000	-	149.998.634	33.482.300	5.519.066
18	UPT SD NEGERI WIROGUNAN	10.529.700	241.867.220	-	191.976.455	36.000.000	13.890.765
19	UPT SD NEGERI SEKARGADUNG	13.412.080	333.900.075	-	279.182.857	41.877.000	12.840.218
20	UPT SD NEGERI GADINGREJO 1	5.246.300	195.300.000	-	131.550.950	63.240.000	509.050
21	UPT SD NEGERI GADINGREJO II	1.041.700	213.300.000	-	161.654.002	50.227.800	1.418.198
22	UPT SD NEGERI GENTONG	1.368.000	378.900.150	-	307.942.555	69.623.100	1.334.495
23	UPT SD NEGERI SEBANI	646.100	264.600.000	-	213.219.325	47.106.000	4.274.675
24	UPT SD NEGERI BUKIR	79.627.200	481.500.000	-	366.284.764	111.000.000	4.215.236

No.	Sekolah	Saldo Tahun 2022	PENDAPATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SISA DANA / SALDO TAHUN 2023
25	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO I	10.835.580	126.900.000	-	90.921.368	34.860.000	1.118.632
26	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO II	18.600.000	330.300.000	-	277.611.103	52.421.000	267.897
27	UPT SD NEGERI PETAHUNAN I	7.552.650	331.200.000	-	243.393.737	62.000.000	25.806.263
28	UPT SD NEGERI PETAHUNAN II	715.800	161.100.000	-	82.884.386	77.819.400	396.214
29	UPT SD NEGERI RANDUSARI	1.535.050	311.400.000	-	227.425.888	80.500.000	3.474.112
30	UPT SD NEGERI KARANGKETUG I	15.075.850	158.400.000	-	143.566.441	8.200.000	6.633.559
31	UPT SD NEGERI KARANGKETUG II	387.800	322.200.000	-	236.654.035	85.106.500	439.465
32	UPT SD NEGERI KARANGKETUG III	519.900	133.200.000	-	110.926.745	21.714.300	556.955
33	UPT SD NEGERI TRAJENG 1	5.938.700	460.800.000	-	303.528.040	155.638.800	1.633.160
34	UPT SD NEGERI TRAJENG 2	250.760	99.900.000	-	81.538.177	14.813.100	3.548.723
35	UPT SD NEGERI KARANGANYAR	14.614.650	264.600.000	-	219.205.585	44.330.000	1.064.415
36	UPT SD NEGERI KEBONSARI	1.103.720	514.800.000	-	489.349.457	22.300.000	3.150.543
37	UPT SD NEGERI BANGILAN	24.538.780	362.700.270	-	311.540.950	44.600.000	6.559.320
38	UPT SD NEGERI NGEMPLAKREJO	8.911.200	186.300.000	-	161.375.915	20.525.000	4.399.085
39	UPT SD NEGERI PEKUNCEN	24.990.600	665.323.480	-	444.359.673	143.523.000	77.440.807
40	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI 1	2.339.424	104.400.000	-	103.860.217	-	539.783
41	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI II	6.177.000	152.100.000	-	151.368.670	-	731.330
42	UPT SD NEGERI BUGUL LOR	504.000	144.000.240	-	117.884.550	23.700.000	2.415.690
43	UPT SD NEGERI PETAMANAN	14.819.680	458.100.000	-	405.632.519	26.900.000	25.567.431
44	UPT SD NEGERI PANGGUNGREJO	469.700	203.400.000	-	197.101.921	6.000.000	298.079
45	UPT SD NEGERI MANDARANREJO 1	9.939.110	408.769.546	-	382.682.313	23.900.000	2.187.233
46	UPT SD NEGERI MANDARANREJO II	7.176.660	84.600.000	-	79.568.098	4.914.000	117.902
47	UPT SMP NEGERI 1 PASURUAN	136.000	830.500.000	-	740.548.116	86.000.000	3.951.884

No.	Sekolah	Saldo Tahun 2022	PENDAPATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SISA DANA / SALDO TAHUN 2023
48	UPT SMP NEGERI 2 PASURUAN	45.895.450	739.200.000	-	643.319.563	95.050.000	830.437
49	UPT SMP NEGERI 3 PASURUAN	598.800	530.200.000	-	473.506.354	56.633.800	59.846
50	UPT SMP NEGERI 4 PASURUAN	46.945.200	893.000.000	-	738.235.220	129.652.800	25.111.980
51	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	32.913.108	942.500.000	-	783.859.677	149.991.000	8.649.323
52	UPT SMP NEGERI 6 PASURUAN	9.034.400	771.103.795	-	711.651.838	59.426.000	25.957
53	UPT SMP NEGERI 7 PASURUAN	4.970.800	845.900.000	-	767.411.146	74.109.800	4.379.054
54	UPT SMP NEGERI 8 PASURUAN	21.324.850	738.100.000	-	605.850.436	115.205.000	17.044.564
55	UPT SMP NEGERI 9 PASURUAN	4.619.800	695.300.000	-	560.305.054	113.000.000	21.994.946
56	UPT SMP NEGERI 10 PASURUAN	39.695.550	646.400.000	-	381.703.545	245.301.042	19.395.413
57	UPT SMP NEGERI 11 PASURUAN	37.500.000	363.000.000	-	277.089.600	85.256.400	654.000
	Jumlah	**863.357.052**	**19.947.726.266**	**-**	**16.261.693.577**	**3.286.429.642**	**393.603.047**

Lampiran 14. Rekapitulasi Sisa Saldo Dana BOS Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	No. Rekening Giro	Nama Rekening Giro	Saldo Akhir Rek	Ket
1	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL I	231032690	SDN BUGUL KIDUL I	571.409,00	Aktif
2	UPT SD NEGERI BUGUL KIDUL II	231032614	SDN BUGUL KIDUL II	522.746,00	Aktif
3	UPT SD NEGERI KRAMPYANGAN	231031863	SDN KRAMPYANGAN	829.685,00	Aktif
4	UPT SD NEGERI TAPAAN 1	231033599	SDN TAPAAN 1	625.461,00	Aktif
5	UPT SD NEGERI TAPAAN 2	231032720	SDN TAPAAN II	8.612.644,00	Aktif
6	UPT SD NEGERI BAKALAN	231032754	UPT SDN BAKALAN	2.691.776,00	Aktif
7	UPT SD NEGERI KEPEL	231032771	SDN KEPEL	1.009.982,00	Aktif
8	UPT SD NEGERI BLANDONGAN	231032711	SDN BLANDONGAN	4.446.783,00	Aktif
9	UPT SD NEGERI PURUTREJO I	231032355	SDN PURUTREJO I	953.790,00	Aktif
10	UPT SD NEGERI PURUTREJO II	231031898	SDN Purutrejo II	5.508.362,00	Aktif
11	UPT SD NEGERI KEBONAGUNG	231032746	SDN KEBONAGUNG	27.935.827,00	Aktif
12	UPT SD NEGERI PURWOREJO 1	231032410	SDN PURWOREJO 1	6.456.137,00	Aktif
13	UPT SD NEGERI PURWOREJO III	231032622	SDN PURWOREJO III	8.304.274,00	Aktif
14	UPT SD NEGERI POHJENTREK I	231032398	SDN POHJENTREK I	7.810.479,00	Aktif
15	UPT SD NEGERI POHJENTREK II	231032371	SDN POHJENTREK II	1.490.348,00	Aktif
16	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO I	231032428	SDN Tembokrejo I	7.387.589,00	Aktif
17	UPT SD NEGERI TEMBOKREJO II	231032380	SDN Tembokrejo II	5.519.066,00	Aktif
18	UPT SD NEGERI WIROGUNAN	231032452	SDN WIROGUNAN	13.890.765,00	Aktif
19	UPT SD NEGERI SEKARGADUNG	231032738	SDN SEKARGADUNG	12.840.218,00	Aktif
20	UPT SD NEGERI GADINGREJO 1	231032541	SDN Gadingrejo I	509.050,00	Aktif
21	UPT SD NEGERI GADINGREJO II	231031936	SDN Gadingrejo II	1.418.198,00	Aktif
22	UPT SD NEGERI TRAJENG 1	231032461	UPT SDN Trajeng I	1.334.495,00	Aktif
23	UPT SD NEGERI GENTONG	231031901	SDN GENTONG	4.274.675,00	Aktif
24	UPT SD NEGERI SEBANI	231032673	SDN SEBANI	4.215.236,00	Aktif
25	UPT SD NEGERI BUKIR	231031871	SDN Bukir	1.118.632,00	Aktif
26	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO I	231032517	SDN KRAPYAKREJO I	267.897,00	Aktif
27	UPT SD NEGERI KRAPYAKREJO II	231032444	SDN KRAPYAKREJO II	25.806.263,00	Aktif
28	UPT SD NEGERI PETAHUNAN I	231032576	SDN Petahunan I	396.214,00	Aktif
29	UPT SD NEGERI PETAHUNAN II	231031987	SDN PETAHUNAN II	3.474.112,00	Aktif
30	UPT SD NEGERI RANDUSARI	231032703	SDN RANDUSARI	6.633.559,00	Aktif
31	UPT SD NEGERI KARANGKETUG I	231032525	SDN KARANGKETUG I	439.465,00	Aktif
32	UPT SD NEGERI KARANGKETUG II	231032436	SDN KARANGKETUG II	556.955,00	Aktif
33	UPT SD NEGERI KARANGKETUG III	231032363	SDN KARANGKETUG III	1.633.160,00	Aktif
34	UPT SD NEGERI TRAJENG 2	231032657	SDN TRAJENG II	3.548.723,00	Aktif
35	UPT SD NEGERI KARANGANYAR	231032592	UPT SDN KARANGANYAR	1.064.415,00	Aktif
36	UPT SD NEGERI KEBONSARI	231032568	UPT SDN KEBONSARI	3.150.543,00	Aktif
37	UPT SD NEGERI BANGILAN	231032533	SDN Bangilan	6.559.320,00	Aktif
38	UPT SD NEGERI NGEMPLAKREJO	231032479	SDN Ngemplak	4.399.085,00	Aktif
39	UPT SD NEGERI PEKUNCEN	231031928	SDN PEKUNCEN	77.440.807,00	Aktif
40	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI 1	231033602	SDN Kandangsapi 1	539.783,00	Aktif

No.	Nama Sekolah	No. Rekening Giro	Nama Rekening Giro	Saldo Akhir Rek	Ket
41	UPT SD NEGERI KANDANGSAPI II	231032487	UPT SDN KANDANGSAPI II	731.330,00	Aktif
42	UPT SD NEGERI BUGUL LOR	231031910	SDN BUGUL LOR	2.415.690,00	Aktif
43	UPT SD NEGERI PETAMANAN	231032584	SDN PETAMANAN	25.567.481,00	Aktif
44	UPT SD NEGERI PANGGUNGREJO	231032401	SDN Panggungrejo	298.079,00	Aktif
45	UPT SD NEGERI MANDARANREJO I	231032550	UPT SDN Mandaranrejo 1	2.187.233,00	Aktif
46	UPT SD NEGERI MANDARANREJO II	231031944	SDN MANDARANREJO II	117.902,00	Aktif
47	UPT SMP NEGERI 1 PASURUAN	231031952	SMP NEGERI I PASURUAN	3.951.884,00	Aktif
48	UPT SMP NEGERI 2 PASURUAN	231032649	SMP NEGERI II PASURUAN	830.437,00	Aktif
49	UPT SMP NEGERI 3 PASURUAN	231032495	SMP NEGERI 3 PASURUAN	59.846,00	Aktif
50	UPT SMP NEGERI 4 PASURUAN	231032665	SMP NEGERI 4 PASURUAN	25.111.980,00	Aktif
51	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	231032681	UPT SMP NEGERI 5 PASURUAN	8.649.323,00	Aktif
52	UPT SMP NEGERI 6 PASURUAN	231031961	SMP Negeri 6 Pasuruan	25.957,00	Aktif
53	UPT SMP NEGERI 7 PASURUAN	231032762	SMP Negeri 7 Pasuruan	4.379.054,00	Aktif
54	UPT SMP NEGERI 8 PASURUAN	231033611	SMPN 8 Pasuruan	17.044.564,00	Aktif
55	UPT SMP NEGERI 9 PASURUAN	231032631	SMP Negeri 9 Pasuruan	21.994.946,00	Aktif
56	UPT SMP NEGERI 10 PASURUAN	231032606	SMP NEGERI 10 PASURUAN	19.395.413,00	Aktif
57	UPT SMP NEGERI 11 PASURUAN	231032509	SMP Negeri 11 Pasuruan	654.000,00	Aktif
	Jumlah	-	-	**399.603.047**	

Lampiran 15. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Bapenda Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
1	**Piutang Pajak Daerah**	**15.303.921.063,00**		**0,00**	**238.631.372,60**	**522.518.306,40**	**1.445.334.968,70**	**5.716.657.312,00**	**7.923.141.959,70**	**7.380.779.103,30**
a	Badan Pendapatan Daerah	15.303.921.063,00		0,00	238.631.372,60	522.518.306,40	1.445.334.968,70	5.716.657.312,00	7.923.141.959,70	7.380.779.103,30
1)	Piutang PBB	13.515.580.433,00		0,00	234.763.506,80	505.014.991,60	1.419.235.382,60	5.700.600.288,00	7.859.614.169,00	5.655.966.264,00
	PBB Tahun 2011	860.425.879,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	860.425.879,00	860.425.879,00	0,00
	PBB Tahun 2012	1.158.100.004,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.100.004,00	1.158.100.004,00	0,00
	PBB Tahun 2013	658.433.838,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	658.433.838,00	658.433.838,00	0,00
	PBB Tahun 2014	620.001.018,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	620.001.018,00	620.001.018,00	0,00
	PBB Tahun 2015	760.951.298,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	760.951.298,00	760.951.298,00	0,00
	PBB Tahun 2016	809.693.060,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	809.693.060,00	809.693.060,00	0,00
	PBB Tahun 2017	832.995.191,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	832.995.191,00	832.995.191,00	0,00
	PBB Tahun 2018	971.932.010,00	5	0,00	0,00	0,00	680.352.407,00	0,00	680.352.407,00	291.579.603,00
	PBB Tahun 2019	1.055.547.108,00	4	0,00	0,00	0,00	738.882.975,60	0,00	738.882.975,60	316.664.132,40
	PBB Tahun 2020	1.262.537.479,00	3	0,00	0,00	505.014.991,60	0,00	0,00	505.014.991,60	757.522.487,40
	PBB Tahun 2021	1.173.817.534,00	2	0,00	234.763.506,80	0,00	0,00	0,00	234.763.506,80	939.054.027,20
	PBB Tahun 2022	1.183.156.804,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.156.804,00
	PBB Tahun 2023	2.167.989.210,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.989.210,00
2)	Pajak Penerangan Jalan	1.612.081.552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.081.552,00
	Pajak Penerangan Jalan 2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan	1.612.081.552,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.081.552,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	2023									
3)	Pajak Parkir	15.817.300,00		0,00	393.840,00	1.453.160,00	3.126.270,00	560.000,00	5.533.270,00	10.284.030,00
	Pajak Parkir 2017	560.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
	Pajak Parkir 2018	1.515.600,00	5	0,00	0,00	0,00	1.060.920,00	0,00	1.060.920,00	454.680,00
	Pajak Parkir 2019	2.950.500,00	4	0,00	0,00	0,00	2.065.350,00	0,00	2.065.350,00	885.150,00
	Pajak Parkir 2020	3.632.900,00	3	0,00	0,00	1.453.160,00	0,00	0,00	1.453.160,00	2.179.740,00
	Pajak Parkir 2021	1.969.200,00	2	0,00	393.840,00	0,00	0,00	0,00	393.840,00	1.575.360,00
	Pajak Parkir 2022	3.252.900,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.900,00
	Pajak Parkir 2023	1.936.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.200,00
4)	Pajak Warung (Restoran)	37.319.810,00		0,00	1.402.600,00	3.507.404,00	5.637.282,00	2.448.590,00	12.995.876,00	24.323.934,00
	Pajak Warung (Restoran) 2017	2.448.590,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.590,00	2.448.590,00	0,00
	Pajak Warung (Restoran) 2018	4.680.685,00	5	0,00	0,00	0,00	3.276.479,50	0,00	3.276.479,50	1.404.205,50
	Pajak Warung (Restoran) 2019	3.372.575,00	4	0,00	0,00	0,00	2.360.802,50	0,00	2.360.802,50	1.011.772,50
	Pajak Warung (Restoran) 2020	8.768.510,00	3	0,00	0,00	3.507.404,00	0,00	0,00	3.507.404,00	5.261.106,00
	Pajak Warung (Restoran) 2021	7.013.000,00	2	0,00	1.402.600,00	0,00	0,00	0,00	1.402.600,00	5.610.400,00
	Pajak Warung (Restoran) 2022	6.797.025,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.025,00
	Pajak Warung (Restoran) 2023	4.239.425,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.425,00
5)	Pajak Rumah Makan	79.863.194,00		0,00	1.045.570,00	7.301.559,60	12.562.165,00	3.752.950,00	24.662.244,60	55.200.949,40
	Pajak Rumah Makan 2017	3.752.950,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.950,00	3.752.950,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	Pajak Rumah Makan 2018	11.360.100,00	5	0,00	0,00	0,00	7.952.070,00	0,00	7.952.070,00	3.408.030,00
	Pajak Rumah Makan 2019	6.585.850,00	4	0,00	0,00	0,00	4.610.095,00	0,00	4.610.095,00	1.975.755,00
	Pajak Rumah Makan 2020	18.253.899,00	3	0,00	0,00	7.301.559,60	0,00	0,00	7.301.559,60	10.952.339,40
	Pajak Rumah Makan 2021	5.227.850,00	2	0,00	1.045.570,00	0,00	0,00	0,00	1.045.570,00	4.182.280,00
	Pajak Rumah Makan 2022	2.785.455,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.455,00
	Pajak Rumah Makan 2023	31.897.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.897.090,00
6)	Pajak Rumah Kost	16.554.750,00		0,00	714.300,00	1.289.600,00	3.869.950,00	73.250,00	5.947.100,00	10.607.650,00
	Pajak Rumah Kost 2017	73.250,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	73.250,00	73.250,00	0,00
	Pajak Rumah Kost 2018	1.879.250,00	5	0,00	0,00	0,00	1.315.475,00	0,00	1.315.475,00	563.775,00
	Pajak Rumah Kost 2019	3.649.250,00	4	0,00	0,00	0,00	2.554.475,00	0,00	2.554.475,00	1.094.775,00
	Pajak Rumah Kost 2020	3.224.000,00	3	0,00	0,00	1.289.600,00	0,00	0,00	1.289.600,00	1.934.400,00
	Pajak Rumah Kost 2021	3.571.500,00	2	0,00	714.300,00	0,00	0,00	0,00	714.300,00	2.857.200,00
	Pajak Rumah Kost 2022	3.517.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.500,00
	Pajak Rumah Kost 2023	640.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
7)	Pajak Hiburan	9.075.000,00		0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	5.445.000,00
	Pajak Hiburan 2020	9.075.000,00	3	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	5.445.000,00
	Pajak Hiburan 2021	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hiburan 2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hiburan 2023	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8)	Piutang Pajak Air Tanah	17.629.024,00		0,00	311.555,80	321.591,20	903.919,10	9.222.234,00	10.759.300,10	6.869.723,90
	Pajak Air Tanah 2013	541.051,00	<5	0,00	0,00	0,00	0,00	541.051,00	541.051,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	
				0%	20%	40%	70%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	Pajak Air Tanah 2014	1.985.387,00	<5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.387,00	1.985.387,00	0,00
	Pajak Air Tanah 2015	3.911.634,00	<5	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.634,00	3.911.634,00	0,00
	Pajak Air Tanah 2016	2.309.829,00	<5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.829,00	2.309.829,00	0,00
	Pajak Air Tanah 2017	474.333,00	<5	0,00	0,00	0,00	0,00	474.333,00	474.333,00	0,00
	Pajak Air Tanah 2018	864.285,00	5	0,00	0,00	0,00	604.999,50	0,00	604.999,50	259.285,50
	Pajak Air Tanah 2019	427.028,00	4	0,00	0,00	0,00	298.919,60	0,00	298.919,60	128.108,40
	Pajak Air Tanah 2020	803.978,00	3	0,00	0,00	321.591,20	0,00	0,00	321.591,20	482.386,80
	Pajak Air Tanah 2021	1.557.779,00	2	0,00	311.555,80	0,00	0,00	0,00	311.555,80	1.246.223,20
	Pajak Air Tanah 2022	2.101.109,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.109,00
	Pajak Air Tanah 2023	2.652.611,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652.611,00
Sub Jumlah		**15.303.921.063,00**		**0,00**	**238.631.372,60**	**522.518.306,40**	**1.445.334.968,70**	**5.716.657.312,00**	**7.923.141.959,70**	**7.380.779.103,30**

Lampiran16. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada Disperindag, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2023

(dalam rupiah)

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur Bulan	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	40%	70%	100%	100%		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
2			**Piutang Retribusi**	**3.557.168.359,00**		**0,00**	**149.981.418,00**	**133.046.133,50**	**626.324.445,00**	**887.094.435,00**	**1.796.446.431,50**	**1.760.721.927,50**
	a		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.460.012.924,00		0,00	149.981.418,00	89.961.133,50	522.724.445,00	15.942.000,00	778.608.996,50	1.681.403.927,50
		1)	Retribusi Pelayanan Pasar Trajeng	15.942.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942.000,00	15.942.000,00	0,00
		2)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2018	332.392.667,00	5	0,00	0,00	0,00	332.392.667,00	0,00	332.392.667,00	0,00
		3)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2019	190.331.778,00	4	0,00	0,00	0,00	190.331.778,00	0,00	190.331.778,00	0,00
		4)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2020	128.515.905,00	3	0,00	0,00	89.961.133,50	0,00	0,00	89.961.133,50	38.554.771,50
		5)	Retribusi Pelayanan Pasar Th.2021	374.953.545,00	2	0,00	149.981.418,00	0,00	0,00	0,00	149.981.418,00	224.972.127,00
		6)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2022	359.007.084,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.007.084,00
		7)	Retribusi Pelayanan Pasar Th 2023	1.058.869.945,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.869.945,00
	b		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
		1)	Rusunawa Tambaan 2023	12.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00
	c		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.040.530.435,00	0	0,00	0,00	43.085.000,00	103.600.000,00	871.152.435,00	1.017.837.435,00	22.693.000,00
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas	819.380.435,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	815.152.435,00	815.152.435,00	4.228.000,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
		Jumlah (Rp)	Umur Bulan	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 thn	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
				0%	40%	70%	100%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5 s/d 9	11 = 3 - 10
	Tanah Kas Desa 2004-2013									
2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Kepel 2017	56.000.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
3)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2018 593,1/33/423,01/2020	51.800.000,00	5	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	0,00
4)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2019 593,1/34/423,01/2020	51.800.000,00	4	0,00	0,00	0,00	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	0,00
5)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kelurahan Bakalan 2020 593,1/35/423,01/2020	61.550.000,00	3	0,00	0,00	43.085.000,00	0,00	0,00	43.085.000,00	18.465.000,00
	Dinas Kesehatan	33.525.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525.000,00
1)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Klaim Dana Non Kapitasi Tahun 2023	33.525.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525.000,00
	Dinas Perhubungan	10.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios Parkir Wisata)	10.800.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
Sub Jumlah		**3.557.168.359,00**		**0,00**	**149.981.418,00**	**133.046.133,50**	**626.324.445,00**	**887.094.435,00**	**1.796.446.431,50**	**1.760.721.927,50**

1

Lampiran 17. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, RSUD DR. R. Soedarsono dan Dinas Kesehatan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
3			**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**29.759.068.693,05**		-	**1.892.267.020,65**	**76.182.872,40**	**14.805.984,00**	**228.406.900,00**	**2.211.662.777,05**	**27.546.405.916,00**
	a		RSUD Dr. R. Soedarsono	29.455.322.419,00		0,00	1.691.585.551,90	76.182.872,40	14.805.984,00	0,00	1.982.574.408,30	27.472.748.010,70
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan									
		1)	Jasa Marga 2020	49.955.600,00	3	0,00	0,00	14.986.680,00	0,00	0,00	14.986.680,00	34.968.920,00
		2)	Jasa Marga 2023	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3)	BPJS 2020	179.377.321,00	3	0,00	0,00	53.813.196,30	0,00	0,00	53.813.196,30	125.564.124,70
		4)	BPJS 2021	12.866.000,00	2	0,00	1.286.600,00	0,00	0,00	0,00	1.286.600,00	11.579.400,00
		5)	BPJS 2022	2.728.709.100,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.709.100,00
		6)	BPJS 2023	4.914.470.061,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.470.061,00
		7)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2020	136.451,00	3	0,00	0,00	40.935,30	0,00	0,00	40.935,30	95.515,70
		8)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	1.480.257,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.257,00
		9)	PT. YAMAHA ELECTRICALS MUSIC INDONESIA 2023	4.180.042,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.042,00
		10)	PT. TELKOM 2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11)	PT. TELKOM 2023	1.995.565,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.565,00
		12)	PT. JASA RAHARJA 2020	683.978,00	3	0,00	0,00	205.193,40	0,00	0,00	205.193,40	478.784,60

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
				0%	10%	30%	60%	100%		
1	2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
13)	PT. JASA RAHARJA 2021	14.402.436,00	2	0,00	1.440.243,60	0,00	0,00	0,00	1.440.243,60	12.962.192,40
14)	PT. JASA RAHARJA 2022	406.740,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.740,00
15)	PT. JASA RAHARJA 2023	139.557.006,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.557.006,00
16)	PT. MANDIRI INHEALTH 2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17)	PT. MANDIRI INHEALTH 2023	2.590.803,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.803,00
18)	BPJSTK 2021	1.040.516,00	2	0,00	104.051,60	0,00	0,00	0,00	104.051,60	936.464,40
19)	BPJSTK 2022	12.925.850,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925.850,00
20)	BPJSTK 2023	465.521.246,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.521.246,00
21)	Piutang Pasien Umum 2019	24.676.640,00	4	0,00	0,00	0,00	14.805.984,00	0,00	14.805.984,00	9.870.656,00
22)	Piutang Pasien Umum 2020	22.084.427,00	3	0,00	0,00	6.625.328,10	0,00	0,00	6.625.328,10	15.459.098,90
23)	Piutang Pasien Umum 2021	26.938.967,00	2	0,00	2.693.896,70	0,00	0,00	0,00	2.693.896,70	24.245.070,30
24)	Piutang Pasien Umum 2022	20.805.323,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.805.323,00
25)	Piutang Pasien Umum 2023	35.052.403,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.052.403,00
26)	PT Avrist Assurance 2020	1.705.131,00	3	0,00	0,00	511.539,30	0,00	0,00	511.539,30	1.193.591,70
27)	PT Taspen 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28)	PT Taspen 2023	468.183,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.183,00
29)	Covid Kemenkes 2021	18.853.607.600,00	2	0,00	1.885.360.760,00	0,00	0,00	0,00	1.885.360.760,00	16.968.246.840,00
30)	Covid Kemenkes 2022	1.488.523.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.523.500,00
31)	Covid Kemenkes 2023	129.277.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.277.000,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
		32)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33)	PT. ASURANSI RELIANCE INDONESIA 2023	84.895.358,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.895.358,00
		34)	Piutang Lahan Kantin 2021	7.000.000,00	2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	6.300.000,00
		35)	Piutang Lahan Kantin 2022	27.000.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
		36)	Piutang Lahan Kantin 2023	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37)	PT ASURANSI RAMAYANA 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39)	BPD JATIM (PAYMENT POINT) 2023	3.060.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
		40)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2022	44.250.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00
		41)	PT SENTRYPARK UTAMA INDONESIA 2023	135.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
		42)	PT. Cheil Jedang 2023	7.768.340,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768.340,00
		43)	yayasan kita bisa 2023	12.910.575,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910.575,00
	b		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	51.472.577,05		0,00	681.468,75	0,00	0,00	0,00	681.468,75	50.791.108,30
			Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Kemitraan								291.093,75	31.662.733,30
		1)	Piutang Bali Towerindo 2023	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2021	2.910.937,50	2	0,00	291.093,75	0,00	0,00	0,00	291.093,75	2.619.843,75

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
1			2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
		3)	Piutang Bali Towerindo - Denda 2022	2.910.937,50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.937,50
		4)	Piutang Tower Bersama 2022	13.119.452,05	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119.452,05
		5)	Piutang Tower Bersama 2022	13.012.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012.500,00
		6)	Piutang Tower Bersama - Denda 2021	3.903.750,00	2	0,00	390.375,00	0,00	0,00	0,00	390.375,00	3.513.375,00
		7)	Piutang Tower Bersama - Denda 2022	7.807.500,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.500,00
		6)	Piutang Tower Bersama - Denda 2023	7.807.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807.500,00
	c		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	228.406.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	228.406.900,00	228.406.900,00	0,00
			Piutang Pemberian Pinjaman dan atau bagian lancar pemberian pinjaman	228.406.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	228.406.900,00	228.406.900,00	0,00
		1)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2014	102.540.400,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540.400,00	102.540.400,00	0,00
		2)	Hasil Pengelolaan Bekas Tanah Kas Desa 2015	125.866.500,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	125.866.500,00	125.866.500,00	0,00
	d		Piutang TPP 2023	22.866.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866.797,00
		1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	848.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00
		2)	Dinas Kesehatan	4.047.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047.900,00
		3)	Dinas Pekerjaan Umum	446.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.100,00
		4)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
				0%	10%	30%	60%	100%		
1	2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
5)	Satuan Polisi Pamong Praja	2.200.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.600,00
6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.039.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.400,00
7)	Dinas Sosial	171.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
8)	Dinas tenaga kerja	285.121,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.121,00
9)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB	177.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
10)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	351.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.200,00
11)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
12)	Dinas Perhubungan	2.138.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.800,00
13)	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	235.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,00
14)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	242.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.900,00
15)	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	518.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.100,00
16)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	435.941,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.941,00
17)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.663.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.500,00
18)	Dinas Perikanan	47.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
19)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.806.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.800,00
20)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	472.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.800,00

No	Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
		Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	
				0%	10%	30%	60%	100%		
1	2	3	4	5	6	7		8	9 = 5 s/d 8	10 = 3 - 9
21)	Sekretariat Daerah	882.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.100,00
22)	Inspektorat	659.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
23)	Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	928.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.100,00
24)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	198.814,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.814,00
25)	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26)	Badan Kepegawaian Daerah	473.984,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.984,00
27)	Sekretariat DPRD	214.923,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.923,00
28)	Kecamatan Gadingrejo	891.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.500,00
29)	Kecamatan Panggungrejo	831.226,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.226,00
30)	Kecamatan Bugul Kidul	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31)	Kecamatan purworejo	506.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.900,00
32)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	87.688,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.688,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
4			**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**3.540.392.700,00**		**0,00**	**255.643.841,50**	**292.712.630,70**	**4.947.309,60**	**0,00**	**553.303.781,80**	**2.987.088.918,20**
	a		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.540.392.700,00		0,00	255.643.841,50	292.712.630,70	4.947.309,60	0,00	553.303.781,80	2.987.088.918,20
		1)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No. 25/PMK.07/2021	2.556.438.415,00	2	0,00	255.643.841,50	0,00	0,00	0,00	255.643.841,50	2.300.794.573,50
		2)	Piutang Pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan PMK No 129/PMK.07/2021									
			-DBH Kehutanan PSDH TA. 2019	8.245.516,00	4	0,00	0,00	0,00	4.947.309,60	0,00	4.947.309,60	3.298.206,40
			-DBH Kehutanan PPH pasal 21 TA. 2020	975.708.769,00	3	0,00	0,00	292.712.630,70	0,00	0,00	292.712.630,70	682.996.138,30
		3)	Piutang remunerasi Treasury Deposite Facilities (TDF) 2022	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No			**Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan**	**Piutang Per 31 Desember 2023**		**Penyisihan Piutang (Rp)**						
				Jumlah (Rp)	**Umur (Tahun)**	**0 s/d 1 thn**	**>1 s/d 2 thn**	**>2 s/d 3 thn**	**>3 s/d 5 thn**	**>5 tahun**	**Jumlah**	**Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)**
						0%	**10%**	**30%**	**60%**	**100%**		
5			**Piutang Transfer Antar Daerah**	**2.131.703.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131.703.000,00**
	a		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.131.703.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1)	Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV TA.2021	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sesuai SK Gubernur Nomor : 188/987/KPTS/013/2022									

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
6			**Piutang Lainnya**	**4.421.783.360,36**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.260.729,00**	**4.213.768.375,35**	**4.263.029.104,35**	**32.840.486,00**
	a		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	592.811.952,35		0,00	0,00	0,00	0,00	592.811.952,35	592.811.952,35	0,00
		1)	Piutang Pengamanan Produksi Padi Tahun 2001	275.461.730,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	275.461.730,00	275.461.730,00	0,00
		2)	Piutang Penguatan Modal Tahun 2002	8.078.450,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	8.078.450,00	8.078.450,00	0,00
		3)	Kredit Alat Pengolahan Hasil 2002	4.333.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.000,00	4.333.000,00	0,00
		4)	Piutang Kemitraan Pupuk Tahun 2003	6.930.748,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.748,00	6.930.748,00	0,00
		5)	Piutang Kemitraan Jamur Merang Tahun 2005	34.563.300,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563.300,00	34.563.300,00	0,00
		6)	Piutang Kemitraan Kulit Tahun 2001	122.045.025,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	122.045.025,00	122.045.025,00	0,00
		7)	Piutang Kendaraan Roda Tiga Tahun 2003	23.510.000,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510.000,00	23.510.000,00	0,00
		8)	Piutang kredit Pengolahan Hasil Tahun 2002	23.818.462,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	23.818.462,00	23.818.462,00	0,00
		9)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Pohjentrek pada tujuh OPD Th. 2017	35.835.201,77	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	35.835.201,77	35.835.201,77	0,00
		10)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	30.524.909,70	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	30.524.909,70	30.524.909,70	0,00
		11)	Kurvol Jaringan air tanah Kel. Gadingrejo pada tujuh OPD Th. 2017	27.711.125,88	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	27.711.125,88	27.711.125,88	0,00
	b		Dinas Koperasi dan UKM	2.293.387.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00	2.293.387.357,00	0,00
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Koperasi & PKM)	2.293.387.357,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.387.357,00	2.293.387.357,00	0,00

No			Jenis Piutang dan Tahun Pengakuan	Piutang Per 31 Desember 2023		Penyisihan Piutang (Rp)						
				Jumlah (Rp)	Umur (Tahun)	0 s/d 1 thn	>1 s/d 2 thn	>2 s/d 3 thn	>3 s/d 5 thn	>5 tahun	Jumlah	Piutang Bersih Per 31 Des 2023 (Rp)
						0%	10%	30%	60%	100%		
	c		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.042.158.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.158.715,00	1.042.158.715,00	0,00
		1)	Pemberian Pinjaman (Eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.042.158.715,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.158.715,00	1.042.158.715,00	0,00
	d		Sekretariat Daerah	285.410.351,00		0,00	0,00	0,00	0,00	285.410.351,00	285.410.351,00	0,00
		1)	Piutang Fasos/Fasum Bagian Perekonomian	285.410.351,00	>5	0,00	0,00	0,00	0,00	285.410.351,00	285.410.351,00	0,00
	e		Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	208.014.985,01		0,00	0,00	0,00	49.260.729,00	0,00	49.260.729,00	32.840.486,00
		1)	Kurvol pekerjaan peningkatan jalan patimura 2018	82.101.215,00	5	0,00	0,00	0,00	49.260.729,00	0,00	49.260.729,00	32.840.486,00
		2)	Kelebihan Bayar atas Pembangunan	125.913.770,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.913.770,01
			Gedung Depo Arsip (Lanjutan) 2023									
		3)	Kelebihan Bayar atas Pengawasan Teknis	4.358.385,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.385,00
			Pembangunan Gedung Depo Arsip (Lanjutan) 2023									

Lampiran 18. Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2023
Total Persediaan	**25.215.856.108,11**	**26.132.090.045,35**
Persedian Alat Tulis Kantor	**276.671.210,00**	**156.468.738,00**
Belanja Rutin	**276.657.010,00**	**156.468.738,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.806.100,00	7.810.500,00
Dinas Kesehatan	100.903.628,00	38.438.620,00
RSUD	63.768.517,00	51.914.550,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.151.465,00	1.864.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.692.900,00	4.672.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.232.500,00	156.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	401.500,00	182.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.591.420,00	9.981.520,00
Dinas Sosial	62.364,00	2.327.050,00
Dinas Tenaga Kerja	219.600,00	137.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.250.800,00	555.450,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	216.000,00	440.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	21.045.800,00	6.697.100,00
Dinas Perhubungan	4.514.400,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	809.200,00	905.600,00
Dinas Koperasi dan UKM	557.100,00	485.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	183.200,00	83.600,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	368.700,00	291.200,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	341.000,00	560.000,00
Dinas Perikanan	362.900,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.370.500,00	484.200,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	723.800,00	1.174.500,00
Sekretariat Daerah	2.620.010,00	1.016.400,00
Sekretariat Dewan	5.075.880,00	6.920.150,00
Kecamatan Gadingrejo	6.985.700,00	7.406.920,00
Kecamatan Panggungrejo	2.644.200,00	889.600,00
Kecamatan Bugul Kidul	1.335.500,00	225.100,00
Kecamatan Purworejo	3.629.843,00	3.767.700,00
Inspektorat	453.600,00	183.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	1.281.723,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	480.600,00	4.518.800,00
Badan Pendapatan Daerah	4.032.560,00	1.743.378,00
Badan Kepegawaian Daerah	1.544.000,00	636.000,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**14.200,00**	**0,00**
Kecamatan Gadingrejo	14.200,00	0,00
Persedian Perabot Kantor	**215.140.219,00**	**425.936.070,00**
Belanja Rutin	**215.140.219,00**	**425.936.070,00**

Uraian	2022	2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.070.400,00	3.922.300,00
Dinas Kesehatan	78.203.020,00	73.454.030,00
RSUD	101.020.229,00	137.224.220,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.000,00	713.900,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	868.500,00	7.102.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	42.500,00	92.700,00
Dinas Tenaga Kerja	22.500,00	96.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	401.500,00	384.500,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	15.430.057,00	182.166.420,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	57.150,00	1.273.400,00
Dinas Koperasi dan UKM	0,00	627.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.200,00	46.600,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.251.700,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	1.058.100,00	833.900,00
Dinas Perikanan	127.000,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.098.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	132.600,00	282.700,00
Sekretariat Daerah	4.218.075,00	9.290.000,00
Sekretariat Dewan	1.245.400,00	3.167.800,00
Kecamatan Gadingrejo	0,00	381.600,00
Kecamatan Bugul Kidul	149.400,00	0,00
Kecamatan Purworejo	342.500,00	630.900,00
Inspektorat	55.500,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	1.754.500,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	1.799.088,00	1.344.900,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	551.000,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0.00**	**0,00**
Persedian Bahan Komputer	**266.209.080,00**	**252.726.860,00**
Belanja Rutin	**266.209.080,00**	**252.726.860,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.411.500,00	10.481.000,00
Dinas Kesehatan	62.630.900,00	52.999.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	510.000,00	730.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	4.185.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	460.000,00
Dinas Sosial	0,00	488.000,00
Dinas Tenaga Kerja	210.000,00	340.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.123.200,00	1.788.500,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	179.761.600,00	169.698.100,00
Dinas Perhubungan	1.177.000,00	0,00
Dinas Koperasi dan UKM	0,00	635.000,00

Uraian	2022	2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	340.000,00	193.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	491.400,00	1.115.000,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	435.000,00	309.000,00
Dinas Perikanan	500.000,00	572.500,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.465.000,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	114.000,00
Sekretariat Daerah	2.199.880,00	2.794.500,00
Sekretariat Dewan	7.110.900,00	3.188.000,00
Kecamatan Bugul Kidul	128.700,00	563.400,00
Kecamatan Purworejo	900.900,00	1.183.100,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	250.000,00	184.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.249.100,00	705.360,00
Badan Kepegawaian Daerah	314.000,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	**570.604.237,00**	**582.261.025,00**
Belanja Rutin	**569.929.599,00**	**532.917.836,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.318.500,00	2.075.000,00
Dinas Kesehatan	59.464.640,00	13.010.800,00
RSUD	342.893.709,00	261.350.386,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	536.000,00	595.800,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	855.000,00	3.251.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.562.000,00	1.648.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	492.800,00
Dinas Tenaga Kerja	1.867.500,00	912.700,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	40.054.770,00	48.580.500,00
Dinas Perhubungan	65.545.500,00	137.667.100,00
Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik	135.000,00	1.050.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	0,00	605.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	937.000,00	1.578.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	429.000,00	0,00
Dinas Perikanan	560.500,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	204.750,00	270.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.819.000,00	25.123.900,00
Sekretariat Daerah	4.419.900,00	8.541.650,00
Sekretariat Dewan	1.485.000,00	22.365.000,00
Kecamatan Gadingrejo	2.619.290,00	0,00
Kecamatan Bugul Kidul	0,00	15.900,00
Kecamatan Purworejo	2.214.540,00	1.012.000,00
Inspektorat	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	308.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,00	230.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.030.000,00	251.800,00

Uraian	2022	2023
Badan Kepegawaian Daerah	670.000,00	2.290.000,00
Belanja Donasi	**674.638,00**	**49.343.189,00**
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	49.223.289,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	674.638,00	119.900,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Perangko, Materai, Pos Lain	**6.960.000,00**	**6.160.000,00**
Belanja Rutin	**6.960.000,00**	**6.160.000,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.090.000,00	630.000,00
Dinas Kesehatan	3.090.000,00	2.250.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000,00	220.000,00
Dinas Sosial	0,00	200.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	250.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.000.000,00	400.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	400.000,00	700.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000,00	350.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	200.000,00
Dinas Perikanan	150.000,00	100.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000,00	0,00
Kecamatan Gadingrejo	0,00	460.000,00
Kecamatan Purworejo	0,00	40.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	330.000,00	100.000,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	60.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	300.000,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Alat Listrik	**828.457.189,00**	**766.216.831,00**
Belanja Rutin	**828.457.189,00**	**766.216.831,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	2.302.000,00
Dinas Kesehatan	23.716.980,00	24.536.000,00
RSUD	10.505.800,00	27.780.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	346.000,00	160.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	194.448.155,00	191.473.691,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.292.500,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	75.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	468.900,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	789.038,00	337.075,00
Dinas Perhubungan	592.133.128,00	505.308.765,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.424.500,00	438.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	417.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	788.800,00	1.765.300,00

Uraian	2022	2023
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	592.500,00	120.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	251.270,00	113.500,00
Sekretariat Daerah	2.760.520,00	9.240.500,00
Kecamatan Gadingrejo	0,00	174.000,00
Kecamatan Bugul Kidul	283.498,00	156.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	475.200,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	**1.399.500,00**	**81.000,00**
Belanja Rutin	**1.399.500,00**	**81.000,00**
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	79.500,00	81.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	254.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	326.500,00	0,00
Kecamatan Gadingrejo	486.000,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	253.500,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Obat dan Bahan Medis	**8.932.249,44**	**8.683.556,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**8.932.249,44**	**8.683.556,00**
RSUD	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	8.932.249,44	8.683.556,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Obat	11.978.877.161,86	11.875.138.620,11
Belanja Rutin	**9.419.750.792,05**	**10.294.112.695,71**
Dinas Kesehatan	1.818.454.504,66	1.503.226.078,71
RSUD	7.601.296.287,39	8.790.206.157,00
Sekretariat Daerah	0,00	680.460,00
Belanja Donasi	**2.197.643.314,21**	**1.581.025.924,40**
Dinas Kesehatan	696.977.202,21	255.606.128,40
RSUD	1.500.208.402,00	1.323.986.800,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	457.710,00	1.432.996,00
Belanja Tidak Terduga	**361.483.055,60**	**0,00**
RSUD	357.733 055,60	0,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.750.000,00	0,00
Persediaan Obat Lainnya	**183.603.116,60**	**1.160.039.360,00**
Belanja Rutin	**183.603.116,60**	**1.160.039.360,00**
Dinas Kesehatan	183.603.116,60	1.160.039.360,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Seragam Dinas	**3.870.520,00**	**3.691.570,00**
Belanja Rutin	**3.870.520,00**	**3.691.570,00**
Sekretariat Daerah	3.870.520,00	3.691.570,00

Uraian	2022	2023
Persediaan Alat Kontrasepsi	**20.341.020,00**	**59.590.706,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**20.341.020,00**	**59.590.706,00**
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.341.020,00	59.590.706,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Kertas dan Cover	**23.190.500,00**	**84.201.300,00**
Belanja Rutin	**23.190.500,00**	**84.201.300,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	7.034.200,00
Dinas Kesehatan	23.190.500,00	54.863.750,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	3.715.000,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	404.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	236.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	890.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	240.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	480.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	442.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	0,00	570.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	343.800,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	540.350,00
Dinas Perikanan	0,00	621.500,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	267.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	698.000,00
Sekretaris Daerah	0,00	2.216.700,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	0,00	403.300,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.100.800,00
Sekretaris Dewan	1.485.000,00	4.718.000,00
Kecamatan Panggungrejo	0,00	1.658.200,00
Kecamatan Bugul Kidul	0,00	947.800,00
Kecamatan Purworejo	0,00	1.258.400,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	552.000,00
Persediaan Bahan Laboratorium/Kimia	**561.592.308,00**	**321.443.066,00**
Belanja Rutin	**559.103.808,00**	**318.706.066,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	408.818.335,00	173.257.816,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.240.000,00	110.240.000,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	35.735.180,00	33.766.150,00
Dinas Perpustakaan dan Dokumentasi	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	542.700,00	354.000,00
Kecamatan Gadingrejo	2.432.793,00	1.088.100,00
Kecamatan Bugul Kidul	56.800,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.278.000,00	0,00

Uraian	2022	2023
Belanja Donasi	**1.909.000,00**	**2.737.000,00**
RSUD	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.909.000,00	2.737.000,00
Belanja Tidak Terduga	**579.500,00**	**0,00**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	579.500,00	0,00
Persediaan Makanan Pokok	**0,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Makanan dan Minuman	**0,00**	**166.958.871,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Dinas Kesehatan	408.818.335,00	166.958.871,00
Persediaan Bahan Logistik Kantor	**0,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bahan Bangunan	**471.795.915,26**	**546.320.771,95**
Belanja Rutin	**471.795.915,26**	**546.320.771,95**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	276.218.672,00	373.361.396,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	171.966.524,58	127.197.843,27
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	10.231.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.610.718,68	35.530.032,68
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Alat/Perlengkapan Olahraga Pakai Habis	**1.050.000,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**1.050.000,00**	**0,00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.050.000,00	0,00
Persediaan Bahan Vandel/Plakat, Souvenir, Cindera Mata	**27.841.000,00**	**8.729.000,00**
Belanja Rutin	**27.841.000,00**	**8.729.000,00**
RSUD	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	7.249.000,00	8.729.000,00
Sekretariat Dewan	20.592.000,00	0,00
Persediaan Barang yang akan diserahkan ke pihak ketiga	**4.763.782.238,00**	**5.220.257.702,80**
Belanja Rutin	**3.548.773.804,00**	**3.570.279.400,80**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.548.773.804,00	3.570.279.400,80
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
Belanja Donasi	**1.215.008.434,00**	**1.649.978.302,00**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.215.008.434,00	1.649.978.302,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
Kecamatan Bugul Kidul	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bahan Kemasan/Kardus/Plastik	**0,00**	**0,00**

Uraian	2022	2023
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Alat Kesehatan habis pakai	**49.775.000,00**	**49.525.000,00**
Belanja Rutin	**49.775.000,00**	**49.525.000,00**
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	46.400.000,00	46.400.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.375.000,00	3.125.000,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	**4.726.594.669,95**	**4.310.595.502,49**
Belanja Rutin	**4.723.186.669,95**	**3.376.689.398,27**
Dinas Kesehatan	4.720.627.069,95	3.375.081.106,27
Sekretariat DPRD	2.394.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	0,00	1.126.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	482.292,00
Kecamatan Bugul Kidul	165.600,00	0,00
Belanja Donasi	**0,00**	**933.906.104,22**
Dinas Kesehatan	0,00	933.906.104,22
Belanja Tidak Terduga	**3.408.000,00**	**0,00**
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.408.000,00	0,00
Persediaan Suku Cadang Alat Angkut	**0,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Natuna dan Pakan-pakan Lainnya	**5.330.000,00**	**18.244.000,00**
Belanja Rutin	**5.330.000,00**	**18.244.000,00**
Dinas Perikanan	1.830.000,00	1.960.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.500.000,00	16.284.000,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	**0,00**	**0,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**0,00**
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bahan Alat Kantor Lainnya	**0,00**	**16.688.736,00**
Belanja Rutin	**0,00**	**16.688.736,00**
RSUD	0,00	16.688.736,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bibit	1.058.000,00	2.030.000,00
Belanja Rutin	**1.058.000,00**	2.030.000,00
Dinas Perikanan	0,00	2.030.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.058.000,00	0,00

Uraian	2022	2023
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Cetakan Benda Berharga	**3.387.700,00**	**814.700,00**
Belanja Rutin	**3.387.700,00**	**814.700,00**
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	3.387.700,00	814.700,00
Belanja Donasi	**0,00**	**0,00**
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**
Persediaan Bahan Bakar	**1.428.800,00**	**140.000,00**
Belanja Rutin	**1.428.800,00**	**140.000,00**
Dinas Perikanan	1.428.800,00	140.000,00
Belanja Donasi	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Persediaan Bahan Lainnya	**217.964.474,00**	**89.147.059,00**
Belanja Rutin	**177.214.474,00**	**48.397.059,00**
Dinas Pendidikan	**0,00**	640.000,00
Dinas Kesehatan	920.700,00	3.165.000,00
RSUD	176.293.774,00	44.592.059,00
Belanja Donasi	**40.750.000,00**	**40.750.000,00**
RSUD	40.750.000,00	40.750.000,00
Belanja Tidak Terduga	**0,00**	**0,00**

Lampiran 19. Nilai Aktiva Tak Berwujud per OPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	OPD	Nilai Perolehan per 31 Des 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023	Nilai Buku 31 des 2023
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	289.938.000,00	238.536.232,00	51.401.768,00
2	DINAS KESEHATAN	262.800.000,00	226.666.667,00	36.133.333,00
3	RSUD DR R SOEDARSONO	1.286.688.000,00	1.284.151.567,00	2.536.433,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.260.000,00	112.922.000,00	13.338.000,00
5	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	255.560.000,00	246.565.667,00	8.994.333,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8	DINAS SOSIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	35.595.000,00	16.567.750,00	19.027.250,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	119.470.000,00	87.036.500,00	32.433.500,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	445.860.000,00	431.926.667,00	13.933.333,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	462.706.908,00	462.706.908,00	0,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.302.061.600,00	1.187.623.264,00	114.438.336,00
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	64.400.000,00	53.833.333,00	10.566.667,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
17	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	55.556.500,00	1.909.275,00	53.647.225,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	78.441.968,00	76.368.307,00	2.073.661,00
19	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21	DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	272.548.200,00	176.163.890,00	96.384.310,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	464.710.000,00	428.865.000,00	35.845.000,00
23	INSPEKTORAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
24	BAPPELIBANGDA	185.485.000,00	185.485.000,00	0,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	276.918.000,00	160.415.300,00	116.502.700,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.078.283.100,00	678.488.932,67	399.794.167,33
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	174.194.000,00	174.194.000,00	0,00
28	SEKRETARIAT DPRD	215.500.000,00	215.500.000,00	0,00
29	KECAMATAN GADINGREJO	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
30	KECAMATAN PANGGUNGREJO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
31	KECAMATAN BUGUL KIDUL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
32	KECAMATAN PURWOREJO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL	**7.585.476.276,00**	**6.578.426.259,67**	**1.007.050.016,33**

Lampiran 20. RincianPendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah eks bengkok Per 31 Desember 2022

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas Tanah	Masa Sewa		Nilai Sewa	Pendapatan Sewa Per Bulan	Pendapatan untuk Tahun 2022		Pendapatan untuk Tahun 2023	Jumlah Bulan Sewa untuk Tahun 2024	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2024
							Jangka Waktu Sewa	Periode Sewa							
1	06-Jun-2023	012/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Bugul Kidul pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 4,2934 hektar (S-III)	Kel. Bugul Kidul	4,2934	S-III	1 Th	Jan-23 s/d Dec-23	17.173.600	1.431.133	0	12	17.173.600		-
2	06-Jun-2023	013/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Krapyakrejo pada bulan Pebruari 2022 s/d Januari 2023 (1 tahun) seluas 3,3290 hektar (S-II)	Kel. Krapyakrejo	3,3290	S-II	1 Th	Feb-22 s/d Jan-23	16.645.000	1.387.083	15.257.917	1	1.387.083		-
3	06-Jun-23	014/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 (1 tahun) seluas 0,1470 hektar (S-III)	Kel. Bugul Lor	0,1470	S-III	1 Th	Jul-22 s/d Jun-23	588.000	49.000	294.000	6	294.000		-
4	06-Jun-23	014/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Juli 2022 s/d Juni 2023 (1 tahun) seluas 2,8580 hektar (S-I)	Kel. Bugul Lor	2,8580	S-I	1 Th	Jul-22 s/d Jun-23	17.148.000	1.429.000	8.574.000	6	8.574.000		-
5	06-Jun-23	015/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Gadingrejo pada bulan September 2022 s/d Agustus 2023 (1 tahun) seluas 3,8000 hektar (S-I)	Kel. Gadingrejo	3,8000	S-I	1 Th	Sep-22 s/d Aug-23	22.800.000	1.900.000	7.600.000	8	15.200.000		-
6	06-Jun-23	016/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Gadingrejo pada bulan Desember 2022 s/d Nopember 2023 (1 tahun) seluas 3,1000 hektar (S-II)	Kel. Gadingrejo	3,1000	S-II	1 Th	Dec-22 s/d Nov-23	15.500.000	1.291.667	1.291.667	11	14.208.333		-

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas Tanah	Masa Sewa				Nilai Sewa	Pendapatan Sewa Per	Pendapatan untuk		Pendapatan untuk	Jumlah Bulan Sewa		Pendapatan Sewa
7	12-Jun-23	017/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Pekuncen pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 0,2000 hektar (S-II)	Kel. Pekuncen	0,2000	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	1.000.000	83.333	0	12	1.000.000			-
8	12-Jun-23	019/RETR.USAHA/BPKA/2023	Pemakaian tanah sawah di Kelurahan Kepel pada periode Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 3,400 hektar (S-III)	Kel. Kepel	3,4000	S-III	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	13.600.000	1.133.333	0	12	13.600.000			-
9	14-Jun-23	021/RETR.USAHA/BPKA/2023	Retribusi penyewaan tanah sawah di Kel. Wirogunan pada bulan Maret 2023 s/d Pebruari 2024 (1 tahun) seluas 4,0000 hektar (S-III)	Kel. Wirogunan	4,0000	S-III	1	Th	Mar-23	s/d Feb-24	16.000.000	1.333.333	2.666.667	10	13.333.333	2	Bulan	2.666.666,67
10	21-Jun-23	022/RETR.USAHA/BPKA/2023	Retribusi penyewaan tanah sawah di Kel. Pohjentrek pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 3,5000 hektar (S-II)	Kel. Pohjentrek	3,5000	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	17.500.000	1.458.333	0	12	17.500.000			-
11	21-Jun-23	023/RETR.USAHA/BPKA/2023	Retribusi penyewaan tanah sawah di Kel. Gentong pada bulan April 2023 s/d Maret 2024 (1 tahun) seluas 4,2874 hektar (S-I)	Kel. Gentong	4,2874	S-I	1	Th	Apr-23	s/d Mar-24	25.724.400	2.143.700	6.431.100	9	19.293.300	3	Bulan	6.431.100,00
12	21-Jun-23	024/RETR.USAHA/BPKA/2023	Retribusi penyewaan tanah sawah di Kel. Karangketug pada bulan Nopember 2022 s/d Oktober 2023 (1 tahun) seluas 0,2270 hektar (S-II)	Kel. Karangketug	0,2270	S-II	1	Th	Nov-22	s/d Oct-23	1.135.000	94.583	189.167	10	945.833			-
13	21-Jun-23	025/RETR.USAHA/BPKA/2023	Retribusi penyewaan tanah sawah di Kel. Randusari pada bulan Pebruari 2023 s/d Januari 2024 (1 tahun) seluas 1,0185 hektar (S-I)	Kel. Randusari	1,0185	S-I	1	Th	Feb-23	s/d Jan-24	6.111.000	509.250	509.250	11	5.601.750	1	Bulan	509.250,00
14	04-Jul-23	028/RETR.USAHA/BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Sebani pada bulan Pebruari	Kel. Sebani	4,2000	S-II	1	Th	Feb-23	s/d Jan-24	21.000.000	1.750.000	1.750.000	11	19.250.000	1	Bulan	1.750.000,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas Tanah	Masa Sewa	Nilai Sewa	Pendapatan Sewa Per	Pendapatan untuk		Pendapatan untuk	Jumlah Bulan Sewa	Pendapatan Sewa
			2023 s/d Januari 2024 (1 tahun) seluas 4,2000 hektar (S-II)											
15	04-Aug-23	031/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Trajeng pada bulan Nopember 2022 s/d Oktober 2023 (1 tahun) seluas 2,2104 hektar (S-II)	Kel. Trajeng	2,2104	S-II	1 Th Nov-22 s/d Oct-23	11.052.000	921.000	1.842.000	10	9.210.000		-
16	04-Aug-23	032/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Tembokrejo pada bulan Juni 2023 s/d Mei 2024 (1 tahun) seluas 0,5010 hektar (S-I)	Kel. Tembokrejo	0,5010	S-I	1 Th Jun-23 s/d May-24	3.006.000	250.500	1.252.500	7	1.753.500	5 Bulan	1.252.500,00
		032/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Tembokrejo pada bulan Juni 2023 s/d Mei 2024 (1 tahun) seluas 3,4000 hektar (S-II)	Kel. Tembokrejo	3,4000	S-II	1 Th Jun-23 s/d May-24	17.000.000	1.416.667	7.083.333	7	9.916.667	5 Bulan	7.083.333,33
		032/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Tembokrejo pada bulan Juni 2023 s/d Mei 2024 (1 tahun) seluas 2,3060 hektar (S-III)	Kel. Tembokrejo	2,3060	S-III	1 Th Jun-23 s/d May-24	9.224.000	768.667	3.843.333	7	5.380.667	5 Bulan	3.843.333,33
17	07-Aug-23	033/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Penyewaan tanah eks-bengkok di Kel. Bukir pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 2,000 hektar (S-II)	Kel. Bukir	2,0000	S-II	1 Th Jan-23 s/d Dec-23	10.000.000	833.333	0	12	10.000.000		-
18	18-Sep-2023	039/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Karangketug pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 5,000 hektar (S-I)	Kel. Karangketug	5,0000	S-I	1 Th Jan-23 s/d Dec-23	30.000.000	2.500.000	0	12	30.000.000		-
19	17-Oct-2023	040/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Karanganyar pada bulan Juli 2023 s/d Juni 2024 (1 tahun) seluas 0,3210 hektar (S-I)	Kel. Karanganyar	0,3210	S-I	1 Th Jul-23 s/d Jun-24	1.926.000	160.500	963.000	6	963.000	6 Bulan	963.000,00
		040/RETR.USAHA/ BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Karanganyar pada bulan Juli 2023 s/d Juni 2024 (1 tahun) seluas	Kel. Karanganyar	1,5755	S-II	1 Th Jul-23 s/d Jun-24	7.877.500	656.458	3.938.750	6	3.938.750	6 Bulan	3.938.750,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas Tanah	Masa Sewa				Nilai Sewa	Pendapatan Sewa Per Bulan	Pendapatan untuk		Pendapatan untuk	Jumlah Bulan Sewa		Pendapatan Sewa
			1,5755 hektar (S-II)															
20	02-Nov-23	043/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Petahunan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 2,8620 hektar (S-II)	Kel. Petahunan	2,8620	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	14.310.000	1.192.500	0	12	14.310.000			-
		043/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Petahunan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 1,5180 hektar (S-I)	Kel. Petahunan	1,5180	S-I	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	9.108.000	759.000	0	12	9.108.000			
21	02-Nov-23	044/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Blandongan pada bulan Maret 2023 s/d Pebruari 2024 (1 tahun) seluas 2,7500 hektar (S-II)	Kel. Blandongan	2,7500	S-II	1	Th	Mar-23	s/d Feb-24	13.750.000	1.145.833	2.291.667	10	11.458.333	2	Bulan	2.291.666,67
22	02-Nov-2023	045/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Karangketug pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 0,3950 hektar (S-II)	Kel. Karangketug	0,3950	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	1.975.000	164.583	0	12	1.975.000			-
		045/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Karangketug pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 2,8470 hektar (S-I)	Kel. Karangketug	2,8470	S-I	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	17.082.000	1.423.500	0	12	17.082.000			
23	02-Nov-23	046/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Pebruari 2023 s/d Januari 2024 (1 tahun) seluas 2,9490 hektar (S-III)	Kel. Bugul Lor	2,9490	S-III	1	Th	Feb-23	s/d Jan-24	11.796.000	983.000	983.000	11	10.813.000	1	Bulan	983.000,00
		046/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Pebruari 2023 s/d Januari 2024 (1 tahun) seluas 1,3530 hektar (S-I)	Kel. Bugul Lor	1,3530	S-I	1	Th	Feb-23	s/d Jan 24	8.118.000	676.500	676.500	11	7.441.500	1	Bulan	676.500,00
		046/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Pebruari 2023 s/d Januari 2024 (1 tahun) seluas 0,4030 hektar (S-II)	Kel. Bugul Lor	0,4030	S-II	1	Th	Feb-23	s/d Jan-24	2.015.000	167.917	167.917	11	1.847.083	1	Bulan	167.916,67
24	02-Nov-23	047/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Bugul Lor pada bulan	Kel. Bugul Lor	2,8580	S-I	6	bl	Jul-23	s/d Dec-23	8.574.000	1.429.000	0	6	8.574.000			-

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas	Masa Sewa				Nilai Sewa	Pendapatan	Pendapatan		Pendapatan	Jumlah	Pendapatan
			Juli 2023 s/d Desember 2023 (6 bulan) seluas 2,8580 hektar (S-I)														
		047/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Bugul Lor pada bulan Juli 2023 s/d Desember 2023 (6 bulan) seluas 0,1470 hektar (S-III)	Kel. Bugul Lor	0,1470	S-III	6 bl	Jul-23	s/d	Dec-23	294.000	49.000	0	6	294.000		
25	15-Nov-2023	048/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Gadingrejo pada bulan Desember 2022 s/d Nopember 2023 (1 tahun) seluas 0,6421 hektar (S-II)	Kel. Gadingrejo	0,6421	S-II	1 Th	Dec-22	s/d	Nov-23	3.210.500	267.542	267.542	11	2.942.958		-
26	15-Nov-2023	049/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Gadingrejo pada bulan September s/d Desember 2023 (4 bulan) seluas 3,8000 hektar (S-I)	Kel. Gadingrejo	3,8000	S-I	4 bl	Sep-23	s/d	Dec-23	7.600.000	1.900.000	0	4	7.600.000		-
27	21-Nov-2023	050/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Krampyangan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 3,1700 hektar (S-I)	Kel. Krampyangan	3,1700	S-I	1 Th	Jan-23	s/d	Dec-23	19.020.000	1.585.000	0	12	19.020.000		-
		050/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Krampyangan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 0,5960 hektar (S-II)	Kel. Krampyangan	0,5960	S-II	1 Th	Jan-23	s/d	Dec-23	2.980.000	248.333	0	12	2.980.000		
28	21-Nov-2023	051/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Blandongan pada bulan September 2022 s/d Agustus 2023 (1 tahun) seluas 0,3000 hektar (S-I)	Kel. Blandongan	0,3000	S-I	1 Th	Sep-22	s/d	Aug-23	1.800.000	150.000	300.000	10	1.500.000		-
29	24-Nov-23	054/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Tapa'an pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 1,7001 hektar (S-II)	Kel. Tapa'an	1,7001	S-II	1 Th	Jan-23	s/d	Dec-23	8.500.500	708.375	0	12	8.500.500		-
		054/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Tapa'an pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas	Kel. Tapa'an	1,1639	S-III	1 Th	Jan-23	s/d	Dec-23	4.655.600	387.967	0	12	4.655.600		

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Lokasi	Luas	Kelas Tanah	Masa Sewa				Nilai Sewa	Pendapatan Sewa Per	Pendapatan untuk		Pendapatan untuk	Jumlah Bulan Sewa	Pendapatan Sewa
			1,1639 hektar (S-III)														
30	27-Nov-23	055/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa Tambak di Kelurahan Mayangan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 1,1998 hektar (D-II)	Kel. Mayangan	1,1998	D-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	4.199.300	349.942	0	12	4.199.300		-
		055/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa Tambak di Kelurahan Ngemplakrejo pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 1,2754 hektar (D-II)	Kel. Ngemplakrejo	1,2754	D-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	4.463.900	371.992	0	12	4.463.900		-
31	28-Nov-2023	056/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Krapyakrejo pada bulan Desember 2022 s/d Nopember 2023 (1 tahun) seluas 5,7000 hektar (S-II)	Kel. Krapyakrejo	5,7000	S-II	1	Th	Dec-22	s/d Nov-23	28.500.000	2.375.000	2.375.000	11	26.125.000		
32	18-Dec-2023	060/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa TEB di Kelurahan Petamanan pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 0,8956 hektar (S-II)	Kel. Petamanan	0,8956	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	4.478.000	373.167	0	12	4.478.000		-
33	27-Dec-2023	063/RETR.USAHA/BPKA/2023	Sewa Tanah di Kelurahan Pohjentrek pada bulan Januari s/d Desember 2023 (1 tahun) seluas 1,000 hektar (S-II)	Kel. Pohjentrek	1,0000	S-II	1	Th	Jan-23	s/d Dec-23	5.000.000	416.667	0	12	5.000.000		-
JUMLAH											463.440.300	40.625.692	70.548.308		392.891.992		32.557.016,67

Lampiran 21. Mutasi Aset Tanah per OPD Tahun 2023

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
No	OPD	Bidang	Luas	Nilai	Bidang	Luas	Nilai	Bidang	Luas	Nilai	Bidang	Luas	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3+6-9	13=4+7-10	14=5+8-11	16
1	Dinas Pendidikan	77	267.731	49.392.509.500,00	3	12.151	64.240.801,00	1	6.575	-	79	263.307	49.456.750.301,00	
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sesuai sertifikat HP nomor 78 tanggal 11 Juli 2023 luas 1.012 m² alamat Jl. Jambangan No 2 Kec Purworejo Pasuruan (SDN Purworejo III)				1	1.012	64.240.801							
	Ubah Identitas TK dan PAUD (SDN Purworejo II (luas tanah berdasarkan sertifikat HP No 77 tanggal 11 juli 2023)				-	549,00	-	-	425,00	-				-
	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan menjadi 2 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.21 / 26 Maret 2010 dan sertifikat HP. No.8 / 9 Desember 2022				2	10.590,00		1	6.150,00					
2	Dinas PU PR	214	690.628	488.380.968.167,64	10	93.758	10.800.000,00	3	73.050	-	221	711.336	488.391.768.167,64	
	Tanah Untuk Jalan Kotamadya sesuai sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No 028/1684/423.401/2023 tgl 9 oktober 2023 (sebagian tanah pers Nomor 2a Leter C Nomor 1121 Klas S-III)				1	226	10.800.000							
	berdasarkan sertifikat HP. No.39 / 9 Desember 2022					5.470			6.020,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.12 / 9 Desember 2022					6.089,00			3.570,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.9 / 9 Desember 2022					4.601,00			2.610,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.16 / 27 Desember 2022					7.252,00			4.200,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.14 / 27 Desember 2022					8.799,00			6.615,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.5 / 27 Desember 2022					1.348,00			700,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.14 / 24 Oktober 2022					2.761,00			3.600,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat HP. No.23 / 24 Oktober 2022					14.900,00			7.470,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.19 / 24 Oktober 2022					3.456,00			2.790,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.32 / 24 Oktober 2022					1.713,00			640,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.41 / 25 Oktober 2022					1.526,00			1.617,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.13 / 28 Desember 2022					2.600,00			1.920,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.55 / 28 Desember 2022					1.392,00			1.007,60					
	berdasarkan sertifikat HP. No.17 / 28 Desember 2022					1.366,00			1.140,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.71 / 28 Maret 2023					670,00			365,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.70 / 28 Maret 2023					235,00			100,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.75 / 10 Mei 2023					712,00			1.062,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.73 / 10 Mei 2023					1.179,00			450,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.74 / 10 Mei 2023					888,00			269,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.45 / 10 Mei 2023					324,00			1.143,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.40 / 11 Juli 2023					2.567,00			1.223,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.7 / 27 Juli 2023					1.033,00			760,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.57 / 27 Juli 2023					2.605,00			3.810,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.22 / 27 Juli 2023					1.897,00			2.700,00					
	menjadi 3 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.44/ 14 Juli 2023, sertifikat HP. No.43/ 14 Juli 2023 dan sertifikat HP. No.42/ 14 Juli 2023				3	3.120,00		1	1.650,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.23/ 11 Juli 2023 dan sertifikat HP. No.22/ 11 Juli 2023				2	3.360,00		1	3.220,00					
	menjadi 4 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.36/ 11 Juli 2023, sertifikat HP. No.26/ 11 Juli 2023, sertifikat HP. No.20/				4	11.201,00		1	7.595,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	11 Juli 2023 dan serifikat HP. No.19/ 11 Juli 2023													
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 20 Tanggal : 07 November 2023					469,00			4.800,00					
3	Dinas Perkim	1.069	106.155.844	128.754.087.358,83	48	288.022	-	22	105.182.338	-	1095	1.262.128	128.754.087.358,83	
	Menjadi satu bidang berdasarkan serifikat HP. No.51 / 10 Agustus 2023				1	408		2	1794,8					
	menjadi 1 bidang karana Kepitalisasi (dari Urugan)				1	15.195		2	31.504,92					
	berdasarkan serifikat HP. No.39 / 11 Juli 2023					1.064,00			1.068,94					
	berdasarkan serifikat HP. No.34 / 11 Juli 2023					661,00			368,00					
	berdasarkan serifikat HP. No.47 / 27 Juli 2023					37,00			113,90					
	berdasarkan serifikat HP. No.49 / 10 Agustus 2023					100,00			252,34					
	berdasarkan serifikat HP. No.48 / 27 Juli 2023					57,00			180,60					
	berdasarkan serifikat HP. No.50 / 10 Agustus 2023					236,00			311,19					
	berdasarkan serifikat HP. No.46 / 27 Juli 2023					1.091,00			1.097,40					
	berdasarkan serifikat HP. No.52 / 10 Agustus 2023					1.054,00			1.684,50					
	berdasarkan serifikat HP. No.25 / 30 Desember 2008					3.257,00			2.500,00					
	berdasarkan serifikat HP. No.18 / 09 September 2019					23.992,00			22.350,00					
	berdasarkan serifikat HP. No.26 / 12 Oktober 2010					4.360,00			2.300,00					
	berdasarkan serifikat HP. No.29 / 17 September 2019					9.512,00			5.990,00					
	berdasarkan BA No. 600/04/423.109/PSU/BA-P/2017					4.697,00			4.697.000,00					
	berdasarkan BA No. 600/05/423.108/PSU/BA-STF/2017					14.830,74			14.830.740,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan BA No. 600/01/423.109/PSU/BA-STF/2017					25.394,00			25.394.000,00					
	berdasarkan BA No. 600/03/423.109/PSU/BA-STF/2017					60.044,79			60.044.790,00					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.37 / 11 September 2023 dan serifikat HP. No.48 / 22 September 2023				2	157,00		1	89,88					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.25 / 16 Juli 2023 dan serifikat HP. No.20 / 16 Juli 2023				2	101,00		1	119,83					
	berdasarkan serifikat HP. No.46 / 8 September 2023 dan serifikat HP. No.56 / 19 September 2023				2	1.473,00		1	129,15					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.23 / 24 Juli 2023 dan serifikat HP. No.26 / 30 Juli 2023				2	348,00		1	189,60					
	menjadi 3 bidang berdasarkan serifikat HP. No.39 / 11 Agustus 2023, serifikat HP. No.18 / 17 Juli 2023 dan serifikat HP. No.19 / 18 Juli 2023				3	3.481,00		1	292,50					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.9 / 20 September 2023 dan serifikat HP. No.16 / 27 Oktober 2023				2	622,00		1	304,50					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.23 / 17 Juli 2023 dan serifikat HP. No.22 / 17 Juli 2023				2	412,00		1	340,80					
	menjadi 4 bidang berdasarkan serifikat HP. No.34 / 17 Juli 2023, serifikat HP. No.38 / 17 Juli 2023, serifikat HP. No.39 / 26 Juli 2023, dan serifikat HP. No.50 / 24 Agustus 2023				4	644,00		1	494,26					
	menjadi 3 bidang berdasarkan serifikat HP. No.41 / 11 Agustus 2023, serifikat HP. No.40 / 11 Agustus 2023 dan serifikat HP. No.45 / 17 Nopember 2023				3	642,00		1	504,02					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.24 / 24 Juli 2023 dan serifikat HP. No.27 / 30 Juli 2023				2	627,00		1	525,00					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.42 / 15 September 2023, dan serifikat HP. No.50 / 22 September 2023				2	760,00		1	530,66					
	menjadi 2 bidang berdasarkan serifikat HP. No.19 / 30 Agustus 2023 dan serifikat HP. No.19 / 30 Agustus 2023				2	520,00		1	535,36					
	menjadi 3 bidang berdasarkan serifikat HP. No.31 / 30 Agustus 2023, serifikat HP. No.30 / 30 Agustus 2023 dan serifikat HP. No.28 / 30 Agustus 2023				3	1.832,00		1	969,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	menjadi 2 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.42 / 14 Agustus 2023 dan sertifikat HP. No.37 / 11 Agustus 2023				2	1.499,00		1	1.243,00					
	menjadi 2 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.43 / 8 September 2023 dan sertifikat HP. No.25/ 6 September 2023				2	1.398,00		1	1.444,52					
	menjadi 6 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.44/ 09 Agustus 2023, sertifikat HP. No.38/ 11 Juli 2023, sertifikat HP. No.37/ 11 Juli 2023, sertifikat HP. No.36/ 11 Juli 2023, sertifikat HP. No.35/ 11 Juli 2023, dan sertifikat HP. No.33/ 11 Juli 2023				6	1.220,00		1	1.466,88					
	menjadi 2 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.35/ 30 Agustus 2023 dan sertifikat HP. No.22/ 30 Agustus 2023				2	2.027,20		1	1.637,20					
	menjadi 3 bidang berdasarkan sertifikat HP. No.76/ 23 Agustus 2023, sertifikat HP. No.67/ 23 Agustus 2023, dan sertifikat HP. No.66/ 23 Agustus 2023				3	3.850,00		1	2.464,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 47 Tanggal : 29 Agustus 2023					48,00			21,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 18 Tanggal : 27 Oktober 2023					32,00			23,36					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 16 Juli 2023					72,00			23,40					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 74 Tanggal : 23 Agustus 2023					7,00			26,40					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 54 Tanggal : 12 September 2023					53,00			30,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 35 Tanggal : 30 Juli 2023					33,00			34,01					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 30 Tanggal : 30 Juli 2023					32,00			36,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 52 Tanggal : 17 Juli 2023					30,00			36,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 42 Tanggal : 26 Juli 2023					38,00			37,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 16 Juli 2023					134,00			40,65					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 26 Tanggal : 17 Juli 2023					25,00			41,76					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 15 Tanggal : 27 Oktober 2023					44,00			42,68					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 26 Juli 2023					55,00			46,92					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 11 September 2023					25,00			50,10					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 52 Tanggal : 08 September 2023					61,00			50,10					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 07 September 2023					47,00			54,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 37 Tanggal : 29 Agustus 2023					61,00			55,48					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 51 Tanggal : 17 Juli 2023					17,00			55,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 06 September 2023					41,00			57,07					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 93 Tanggal : 29 Agustus 2023					43,00			57,15					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 89 Tanggal : 25 Agustus 2023					227,00			57,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 26 Juli 2023					64,00			60,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 37 Tanggal : 09 Agustus 2023					26,00			62,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 53 Tanggal : 12 September 2023					32,00			63,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 75 Tanggal : 23 Agustus 2023					28,00			63,54					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 31 Tanggal : 04 Agustus 2023					34,00			64,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 35 Tanggal : 06 September 2023					87,00			65,52					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 42 Tanggal : 29 Agustus 2023					166,00			65,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 14 Tanggal : 22 September 2023					81,00			65,73					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 31 Tanggal : 30 Juli 2023					91,00			66,24					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 29 Agustus 2023					55,00			72,30					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 18 Juli 2023					68,00			78,60					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 29 Tanggal : 30 Juli 2023					187,00			81,84					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 44 Tanggal : 29 Agustus 2023					181,00			82,60					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 99 Tanggal : 29 Agustus 2023					41,00			85,14					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 42 Tanggal : 06 September 2023					93,00			85,65					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 39 Tanggal : 11 September 2023					73,00			88,66					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 50 Tanggal : 17 Juli 2023					146,00			89,80					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 84 Tanggal : 24 Agustus 2023					68,00			89,97					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 06 September 2023					52,00			90,80					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 33 Tanggal : 09 Agustus 2023					36,00			92,19					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 10 November 2023					129,00			95,20					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 29 Tanggal : 06 September 2023					76,00			95,40					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 14 Juli 2023					166,00			96,80					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 25 Tanggal : 17 Juli 2023					100,00			98,26					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 19 Tanggal : 16 Juli 2023					142,00			100,10					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 32 Tanggal : 30 Juli 2023					70,00			102,20					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 49 Tanggal : 17 Juli 2023					110,00			102,72					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 19 Tanggal : 27 Oktober 2023					91,00			104,55					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 35 Tanggal : 09 Agustus 2023					45,00			106,68					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 44 Tanggal : 28 Agustus 2023					247,00			107,70					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 06 September 2023					112,00			111,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 23 Tanggal : 18 Juli 2023					121,00			111,55					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 23 Tanggal : 16 Juli 2023					101,00			113,40					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 17 Tanggal : 27 Oktober 2023					133,00			116,64					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 11 Agustus 2023					108,00			118,75					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 73 Tanggal : 23 Agustus 2023					97,00			119,28					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 50 Tanggal : 08 September 2023					120,00			120,06					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 36 Tanggal : 06 September 2023					98,00			122,25					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 13 Oktober 2023					152,00			126,56					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 42 Tanggal : 08 Agustus 2023					77,00			126,65					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 43 Tanggal : 15 September 2023					118,00			129,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 13 Tanggal : 27 Oktober 2023					157,00			132,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 16 Juli 2023					100,00			135,10					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 17 Juli 2023					81,00			135,05					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 51 Tanggal : 08 September 2023					173,00			136,34					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 06 September 2023					136,00			138,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 19 Tanggal : 09 November 2023					59,00			143,58					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 7 Tanggal : 09 November 2023					124,00			143,64					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 30 Agustus 2023					245,00			146,52					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 53 Tanggal : 21 Agustus 2023					43,00			147,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 10 Tanggal : 29 Agustus 2023					122,00			150,40					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 92 Tanggal : 25 Agustus 2023					62,00			153,19					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 07 November 2023					152,00			157,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 94 Tanggal : 29 Agustus 2023					121,00			157,92					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 37 Tanggal : 06 September 2023					193,00			159,38					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 69 Tanggal : 23 Agustus 2023					106,00			160,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 14 Tanggal : 10 November 2023					63,00			161,35					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 29 Tanggal : 07 November 2023					62,00			162,75					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 36 Tanggal : 09 Agustus 2023					93,00			163,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 47 Tanggal : 24 Agustus 2023					262,00			166,78					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 50 Tanggal : 24 Agustus 2023					117,00			168,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 08 Agustus 2023					58,00			173,34					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 90 Tanggal : 07 November 2023					267,00			174,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 11 September 2023					149,00			176,88					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 47 Tanggal : 05 September 2023					166,00			177,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 30 Tanggal : 08 September 2023					272,00			180,54					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 33 Tanggal : 11 September 2023					16. ,00			180,64					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 11 Agustus 2023					185,00			183,30					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 30 Tanggal : 11 Agustus 2023					366,00			183,30					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 68 Tanggal : 23 Agustus 2023					110,00			184,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 39 Tanggal : 29 Agustus 2023					342,00			187,50					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 100 Tanggal : 29 Agustus 2023					136,00			187,61					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 07 November 2023					184,00			189,56					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 11 Tanggal : 22 September 2023					126,00			190,21					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 98 Tanggal : 29 Agustus 2023					99,00			190,74					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 12 Tanggal : 27 Oktober 2023					108,00			194,50					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 23 Agustus 2023					178,00			194,68					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 31 Tanggal : 06 September 2023					224,00			196,56					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 19 Tanggal : 09 November 2023					110,00			197,94					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 06 September 2023					100,00			199,29					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 48 Tanggal : 05 September 2023					115,00			204,25					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 32 Tanggal : 04 Agustus 2023					66,00			207,00					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 11 Agustus 2023					304,00			208,00					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 20 Tanggal : 30 Agustus 2023					106,00			208,78					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 22 Tanggal : 27 Oktober 2023					188,00			209,55					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 06 September 2023					227,00			210,98					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 25 Tanggal : 07 November 2023					185,00			214,20					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 100 Tanggal : 10 November 2023					172,00			220,06					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 64 Tanggal : 22 September 2023					76,00			220,68					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 17 Juli 2023					74,00			223,88					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 93 Tanggal : 07 November 2023					143,00			224,10					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 61 Tanggal : 04 Agustus 2023					122,00			230,88					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 06 September 2023					163,00			230,88					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 55 Tanggal : 19 September 2023					84,00			232,50					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 17 Tanggal : 17 Juli 2023					241,00			233,25					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 36 Tanggal : 28 Agustus 2023					351,00			236,00					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 79 Tanggal : 24 Agustus 2023					1.753,00			239,18					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 49 Tanggal : 08 September 2023					304,00			243,84					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 14 Tanggal : 27 Oktooer 2023					381,00			246,45					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 10 Tanggal : 20 September 2023					193,00			250,54					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 48 Tanggal : 08 September 2023					91,00			254,36					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 23 Tanggal : 27 Oktober 2023					233,00			258,00					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 09 Agustus 2023					71,00			258,48					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 6 Tanggal : 20 September 2023					251,00			264,11					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 83 Tanggal : 24 Agustus 2023					110,00			266,97					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 75 Tanggal : 24 Agustus 2023					216,00			267,30					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 59 Tanggal : 22 September 2023					194,00			267,40					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 72 Tanggal : 23 Agustus 2023					240,00			268,72					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 103 Tanggal : 10 November 2023					299,00			270,95					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 36 Tanggal : 11 Agustus 2023					275,00			273,00					
	berdasarkan serifikat Hak Pakai No : 63 Tanggal : 04 Agustus 2023					184,00			275,79					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 26 Juli 2023					251,00			282,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 33 Tanggal : 11 Agustus 2023					227,00			287,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 26 Tanggal : 07 November 2023					294,00			290,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 22 Tanggal : 18 Juli 2023					415,00			296,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 65 Tanggal : 24 Agustus 2023					141,00			300,64					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 32 Tanggal : 11 Agustus 2023					280,00			305,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 33 Tanggal : 17 Juli 2023					1.060,00			306,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 29 Agustus 2023					358,00			307,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 33 Tanggal : 06 September 2023					122,00			308,18					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 66 Tanggal : 24 Agustus 2023					154,00			310,36					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 26 Tanggal : 06 September 2023					364,00			315,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 92 Tanggal : 07 November 2023					553,00			315,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 15 Tanggal : 29 Agustus 2023					275,00			315,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 64 Tanggal : 23 Agustus 2023					133,00			318,49					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 55 Tanggal : 22 September 2023					175,00			324,08					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 44 Tanggal : 06 September 2023					395,00			325,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 82 Tanggal : 24 Agustus 2023					12[illegible]00			329,59					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 16 Tanggal : 17 Juli 2023					322,00			330,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 44 Tanggal : 15 September 2023					253,00			330,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 54 Tanggal : 18 Juli 2023					248,00			333,75					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 102 Tanggal : 10 November 2023					171,00			344,82					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 06 September 2023					206,00			351,21					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 6 Tanggal : 20 September 2023					387,00			353,18					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 95 Tanggal : 07 November 2023					309,00			353,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 22 Tanggal : 16 Juli 2023					228,00			355,96					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 98 Tanggal : 07 November 2023					378,00			370,23					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 11 Juli 2022					65,00			370,37					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 52 Tanggal : 22 September 2023					153,00			373,33					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 29 Tanggal : 11 Agustus 2023					481,00			393,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 09 Agustus 2023					348,00			395,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 30 Tanggal : 27 Oktober 2023					1.045,00			399,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 67 Tanggal : 27 Oktober 2023					290,00			403,18					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 06 September 2023					102,00			411,16					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 07 Tanggal : 29 Agustus 2023					189,00			412,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 113 Tanggal : 04 September 2023					233,00			416,16					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 47 Tanggal : 22 September 2023					400,00			426,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 16 Tanggal : 29 Agustus 2023					352,00			427,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 56 Tanggal : 22 September 2023					55,00			433,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 101 Tanggal : 10 November 2023					334,00			433,65					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 24 Agustus 2023					125,00			433,65					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 17 Tanggal : 27 Oktober 2023					459,00			436,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 14 Juli 2023					141,00			438,24					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 27 Oktober 2023					269,00			440,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 53 Tanggal : 18 Juli 2023					394,00			441,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 7 Tanggal : 20 September 2023					534,00			459,73					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 22 Tanggal : 10 November 2023					361,00			461,71					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 12 Tanggal : 29 Agustus 2023					389,00			474,16					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 37 Tanggal : 17 Juli 2023					308,00			480,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 20 Tanggal : 17 Juli 2023					243,00			489,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 101 Tanggal : 29 Agustus 2023					175,00			521,48					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 25 Tanggal : 30 Juli 2023					376,00			526,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 44 Tanggal : 14 Agustus 2023					672,00			530,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 94 Tanggal : 07 November 2023					444,00			532,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 30 Agustus 2023					1.146,00			537,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 11 September 2023					219,00			548,49					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 70 Tanggal : 23 Agustus 2023					399,00			548,70					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 88 Tanggal : 07 November 2023					386,00			548,81					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 32 Tanggal : 06 September 2023					145,00			556,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 08 Agustus 2023					505,00			575,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 58 Tanggal : 22 September 2023					370,00			596,70					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un-Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 69 Tanggal : 07 November 2023					613,00			597,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 81 Tanggal : 24 Agustus 2023					366,00			619,40					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 47 Tanggal : 14 Juli 2023					592,00			630,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 19 Tanggal : 07 November 2023					470,00			647,70					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 62 Tanggal : 04 Agustus 2023					232,00			648,66					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 22 September 2023					703,00			548,96					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 13 Tanggal : 22 September 2023					428,00			653,96					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 62 Tanggal : 22 September 2023					546,00			659,57					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 60 Tanggal : 22 September 2023					677,00			676,01					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 43 Tanggal : 26 Juli 2023					912,00			676,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 29 Agustus 2023					681,00			685,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 21 Tanggal : 16 Juli 2023					740,00			693,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 95 Tanggal : 29 Agustus 2023					132,00			740,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 61 Tanggal : 22 September 2023					136,00			744,84					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 31 Tanggal : 11 Agustus 2023					309,00			762,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 58 Tanggal : 27 Oktober 2023					399,00			764,88					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 27 Oktober 2023					394,00			800,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 53 Tanggal : 22 September 2023					474,00			802,73					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 16 Tanggal : 27 Oktober 2023					962,00			810,96					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 22 Tanggal : 07 November 2023					1.084,00			828,50					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 91 Tanggal : 07 November 2023					260,00			831,30					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 41 Tanggal : 15 September 2023					836,00			837,12					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 66 Tanggal : 22 September 2023					1.080,00			837,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 14 Juli 2023					99,00			868,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 15 Tanggal : 22 September 2023					489,00			882,62					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 43 Tanggal : 29 Agustus 2023					465,00			892,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 23 Tanggal : 27 Oktober 2023					822,00			910,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 17 Juli 2023					1.240,00			916,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 90 Tanggal : 25 Agustus 2023					595,00			930,30					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 63 Tanggal : 22 September 2023					542,00			944,24					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 26 Tanggal : 27 Oktober 2023					1.112,00			946,24					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 17 Juli 2023					631,00			970,97					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 28 Tanggal : 27 Oktober 2023					1.327,00			971,75					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 97 Tanggal : 07 November 2023					508,00			973,97					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 28 Agustus 2023					434,00			996,90					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 65 Tanggal : 22 September 2023					901,00			1.015,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 20 Tanggal : 27 Oktober 2023					529,00			1.071,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 36 Tanggal : 11 September 2023					597,00			1.076,96					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 13 Tanggal : 29 Agustus 2023					1.437,00			1.117,20					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 10 Tanggal : 10 November 2023					1.111,00			1.126,36					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 35 Tanggal : 11 September 2023					725,00			1.135,69					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 34 Tanggal : 07 November 2023					257,00			1.139,38					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 54 Tanggal : 22 September 2023					719,00			1.146,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 65 Tanggal : 23 Agustus 2023					648,00			1.150,69					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 5 Tanggal : 20 September 2023					115,00			1.156,16					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 43 Tanggal : 22 September 2023					1.095,00			1.176,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 45 Tanggal : 14 Agustus 2023					1.210,00			1.181,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 12 Tanggal : 22 September 2023					1.071,00			1.286,75					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 46 Tanggal : 22 September 2023					353,00			1.302,12					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 07 November 2023					1.180,00			1.312,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 20 Tanggal : 10 November 2023					1.339,00			1.321,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 48 Tanggal : 09 Agustus 2023					1.248,00			1.362,10					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 40 Tanggal : 11 Juli 2023					2.567,00			1.424,00					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 24 Tanggal : 27 Oktober 2023					551,00			1.504,80					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 15 Tanggal : 10 November 2023					748,00			1.582,31					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 25 Tanggal : 27 Oktober 2023					1.565,00			1.593,55					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 57 Tanggal : 22 September 2023					1.202,00			1.648,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 37 Tanggal : 07 November 2023					1.618,00			1.757,91					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 102 Tanggal : 29 Agustus 2023					180,00			1.838,60					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 12 Tanggal : 10 November 2023					927,00			1.853,36					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 29 Tanggal : 27 Oktober 2023					1.856,00			1.963,50					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 38 Tanggal : 08 Agustus 2023					933,00			1.960,49					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 77 Tanggal : 24 Agustus 2023					1.284,00			2.039,72					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 51 Tanggal : 22 September 2023					1.545,00			2.140,44					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 49 Tanggal : 24 Agustus 2023					3.847,00			4.233,51					
	berdasarkan sertifikat Hak Pakai No : 27 Tanggal : 07 November 2023					7.841,00			14.599,20					
4	Gadingrejo	32	113.494	6.967.118.000,00	0	753	-	-	760	-	32	113.487	6.967.118.000,00	
	berdasarkan sertifikat HP. No.24 / 20 Desember 2022					753			760					
5	Penggungrejo	38	69.962	29.818.759.625,60	0	-	-	0	-	-	38	69.962	29.818.759.625,60	
6	Bugul Kidul	12	23.921	2.010.992.000,00			0,00	1	7.100,00	71.000.000,00	11	16.821	1.939.992.000,00	
	Koreksi atas pencatatan ganda hasil inventarisasi sesuai surat pernyataan Camat Bugul Kidul Nmor 300/1407/423.401/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan identitas Sertifikat Hak Pakai tanggal 05/03/2009 No. 14, sudah dihapuskan atas hibah ke Menkumham (Lapas Kota Pesuruan) sesuai SK Penghapusan nomor 188/320/423.011/2022 (tercatat awal di Dispora)							1	7100	71.000.000,00				
7	Purworejo	13	33.777	9.268.514.000,00	0	2.757	-	-	3.840	-	13	32.704	9.268.514.000,00	

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	berdasarkan serifikat HP. No.35 / 12 September 2022					1.177			1.500,00					
	berdasarkan serifikat HP. No.84 / 28 Desember 2022					1.590,00			2.240,00					
8	Dinas Lingkungan Hidup	44	196.547	98.582.721.791,00				0	0	-	44	196.547	98.582.721.791,00	
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12	211.905	13.828.188.000,00	4	40.140	22.591.150.000	0	-	-	16	252.045	66.419.338.000,00	
	mutasi 4 Bidang Tanah dari Biden Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan BAST No 028/1755/423.201/2023 tanggal 8-12-2023.				4	40.140	22.591.150.000,00							
10	Dinas Pertanian	22	158.300	49.311.251.233,00	0	1.560	-	0	2.130	-	22	157.730	49.311.251.233,00	
	Ubah Identitas Tanah Usaha (luas tanah dan sertifikat berdasarkan sertifikat HP No 17 tanggal 28 Nopember 2023)					1.560			2130					
11	BPKA	399	1.865.573	454.769.357.066,00	2	45.803	-	14	92.094	22.966.025.000	387	1.819.282	431.803.332.066,00	
	menjadi satu bidang berdasarkan sertifikat HP. No.34 / 24 Oktober 2022				1	17.119		7	18.510					
	menjadi satu bidang berdasarkan sertifikat HP. No.17 / 28 Nopember 2022				1	13.985		2	14.910,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.18 / 28 Nopember 2022					3.291,00			5.960,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.19 / 28 Nopember 2022					8.712,00			8.770,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.40 / 25 September 2022					1.387,00			1.480,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.30 / 29 September 2022					217,00			840,00					
	berdasarkan sertifikat HP. No.31 / 29 September 2022					1.092,00			485,00					

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
	mutasi 4 Bidang Tanah ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan BAST No 028/1755/423.201/2023 tanggal 8-12-2023.							4	40.140	22.591.150.000,00				
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Kemitraan) sesuai Nomor 130.1/17.1/423.013/2019 - 019.1/KPRI.PEMKOT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 (SPBU Baksian)							1	2.999,00	374.875.000,00				
12	Dinas Kesehatan	37	42.709	7.802.684.000,00	-	-	-	-	-	-	37	42.709	7.802.684.000,00	
13	RSUD dr. SOEDARSONO	1	40.293	2.010.105.000,00							1	40.293	2.010.105.000,00	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	0,00							-	-	-	
15	Satpol PP	1	714	50.560.000,00							1	714	50.560.000,00	
16	BPBD	0	-	0,00							-	-	-	
17	Dinas Sosial	2	3.179	1.199.650.000,00	2	1745	1.486.470.000,00	1	2800	688.000.000,00	3	2.124	1.998.120.000,00	
	Mutasi Tanah dari DPPKB sesuai Nomor BAST 028/129/BAST/423.115/2023				1,00	955,00	38.400.000,00							
	Mutasi Tanah ke DPPKB sesuai Nomor BAST 028/379/BAST/423.105/2023							1	2.800	688.000.000,00				
	Mutasi Tanah (Pengalihan status penggunaan) 1 Bidang dari Sekretariat serah berdasarkan BAST No 028/1780.2/423.201/2023 tanggal 27-11-2023.				1	790	1.448.070.000,00							

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
18	Dinas Tenaga Kerja	2	1.483	4.516.504.000,00							2	1.483	4.516.504.000,00	
19	DPPPKB	2	3.815	10.195.690.000,00	1	2.800,00	688.000.000,00	1,00	955,00	38.400.000,00	2	5.660	10.845.290.000,00	
	Mutasi Tanah ke Dinas Sosial sesuai Nomor BAST 028/129/BAST/423.115/2023							1,00	955,00	38.400.000,00				
	Mutasi Tanah dari Dinsos sesuai Nomor BAST 028/379/BAST/423.105/2023				1	2.800	688.000.000,00							
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	-	0,00							-	-	-	
21	Dinas Perhubungan	2	9.058	4.560.012.250,00	0	0	0	1	2.478,00	1.326.524.250,00	1	6.580	3.231.488.000,00	
	Penghapuwan Tanah (Tercatat Ganda) sesuai SK nomor 188/1083/423.201/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tanggal 22/12/2023							1	2.478	1.326.524.250,00				
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	-	0,00				0	0	-	-	-	-	
23	Dinas Kopersai dan UM	2	23.536	22.639.863.000,00							2	23.536	22.639.863.000,00	
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	18.600	93.000.000.000,00							1	18.600	93.000.000.000,00	
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	-	0,00							-	-	-	
26	Dinas Perikanan	1	35.213	14.243.127.000,00							1	35.213	14.243.127.000,00	

		Tahun 2022			Mutasi Tambah 2023			Mutasi Kurang 2023			Tahun 2023 *Un- Audited*			
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	157.565	25.407.447.494,00	0	-	-	-	-	-	18	157.565	25.407.447.494,00	
28	Sekretariat Daerah	11	15.115	4.886.848.400,00	0,00	0,00	0,00	1,00	790,00	1.448.070.000,00	10	15.325	3.438.778.400,00	
	Mutasi Tanah (Pengalihan status penggunaan) 1 Bidang ke Dinas Sosial berdasarkan BAST No 026/1780.2/423.201/2023 tanggal 27-11-2023.							1	790	1.448.070.000,00				
29	Sekretariat DPRD	1	4.098	1.320.000.000,00							1	4.098	1.320.000.000,00	
30	Inspektorat	1	2.060	263.680.000,00							1	2.060	263.680.000,00	
31	Bappelitbangda	1	1.324	4.230.000.000,00							1	1.324	4.230.000.000,00	
32	Badan Pendapatan Daerah	1	1.725	177.675.000,00							1	1.725	177.675.000,00	
33	BKD	0	-	0,00							-	-	-	
Total		2016	110.138.869,22	1.557.588.312.890,07			24.840.660.801,00			25.540.019.250	2041	5.254.359	1.556.888.954.441,07	

Lampiran 22. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
Kewajiban	**9.219.487.398,60**	**12.238.932.559,00**	**9.217.496.759,60**	**12.240.923.198,00**
Kewajiban BLUD	**3.735.696.890,00**	**4.636.813.738,00**	**3.734.138.770,00**	**4.638.371.858,00**
RSUD DR. R Soedarsono	**3.735.696.890,00**	**4.636.813.738,00**	**3.734.138.770,00**	**4.638.371.858,00**
- PLN	100.525.720,00	111.059.200,00	100.525.720,00	111.059.200,00
- Telp	1.204.646,00	912.062,00	1.204.646,00	912.062,00
- Air	5.521.027,00	11.516.276,00	5.521.027,00	11.516.276,00
- Internet	4.723.389,00	9.525.000,00	4.723.389,00	9.525.000,00
-Utang Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	305.265.743,00	305.846.252,00	305.265.743,00	305.846.252,00
-Utang Penyediaan Bahan Habis Pakai, Darah, Alkeshabis pakai dan oksigen	866.671.449,00	1.217.565.539,00	865.913.319,00	1.218.323.669,00
-Utang PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN (Foto Kopi)	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
-Utang Penyediaan Mamin Pasien 2023	82.745.559,00	67.198.202,00	82.745.559,00	67.198.202,00
-Utang Jasa Pelayanan Bulan Desember 2023	2.264.349.000,00	2.797.560.000,00	2.264.349.000,00	2.797.560.000,00
-Utang Bahan Bakar Minyak 2023	0,00	2.222.332,00	0,00	2.222.332,00
-Utang Insentif TCM	8.520.000,00	25.420.000,00	8.520.000,00	25.420.000,00
-Utang atas penggantian biaya pelayanan pihak ketiga - 2018	799.990,00	0,00	0,00	799.990,00
-Utang atas penggantian biaya pelayanan pihak ketiga - 2023	26.720.000,00	47.000.812,00	26.720.000,00	47.000.812,00
-Utang jasa pemantauan kualitas lingkungan RS - 2021	66.653.617,00	33.554.045,00	66.653.617,00	33.554.045,00
-Utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
-Utang Pajak Gaji Tenaga BLUD Bulan Des 2022	553.750,00	0,00	553.750,00	0,00
-E-Toll Ambulance 2021	1.443.000,00	1.424.000,00	1.443.000,00	1.424.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	225.018,00	0,00	225.018,00
Kewajiban Lainnya	**5.483.790.508,60**	**7.602.118.821,00**	**5.483.357.989,60**	**7.602.551.340,00**
Dinas Pendidikan	**233.296.909,00**	**3.504.871.724,00**	**233.296.909,00**	**3.504.871.724,00**
- PLN	59.954.525,00	66.672.796,00	59.954.525,00	66.672.796,00
- Telp	5.586.050,00	6.943.677,00	5.586.050,00	6.943.677,00
- Air	3.751.168,00	4.044.133,00	3.751.168,00	4.044.133,00
- Internet	43.885.166,00	42.594.278,00	43.885.166,00	42.594.278,00
Hutang Belanja 50% TPG dan Tamsil (PNSD dan PPPK)	0,00	1.457.194.400,00	0,00	1.457.194.400,00
Hutang Belanja 50% Gaji ke 13 dan Tamsil (PNSD dan PPPK)	0,00	1.409.657.400,00	0,00	1.409.657.400,00
Hutang Belanja Tamsil	120.120.000,00	517.765.040,00	120.120.000,00	517.765.040,00
Hutang Belanja TPP berdasarkan Prestasi Kerja				-
Dinas Kesehatan	**2.458.942.737,00**	**807.945.656,00**	**2.458.942.737,00**	**807.945.656,00**
-Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Retribusi	0,00	26.040.000,00	0,00	26.040.000,00
- PLN	43.886.789,00	57.271.825,00	43.886.789,00	57.271.825,00
- Telp	2.221.888,00	2.265.021,00	2.221.888,00	2.265.021,00
- Air	3.367.418,00	3.569.340,00	3.367.418,00	3.569.340,00
- Internet	17.530.883,00	16.702.270,00	17.530.883,00	16.702.270,00
-Hutang insentif tenaga kesehatan yang menangani covid	2.371.071.659,00	0,00	2.371.071.659,00	0,00
-Hutang belanja pembayaran koran Dinas Kesehatan	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
-Hutang belanja pembayaran koran unit Perbekalan Kefarmasian	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
-Koreksi atas penambahan utang pegawai (jasa medis non	18.324.000,00	0,00	18.324.000,00	0,00
non kapitasi) Bulan November s/d Desember 2020			-	0,00

Uraian	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
Hutang Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.280.100,00	0,00	2.280.100,00	0,00
Hutang Pembayaran Premi PBID	0,00	702.097.200,00	0,00	702.097.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**16.209.024,60**	**17.808.342,00**	**16.209.024,60**	**17.808.342,00**
- PLN	4.709.370,00	8.606.638,00	4.709.370,00	8.606.638,00
- Telp	93.300,00	85.364,00	93.300,00	85.364,00
- Air	297.569,00	116.340,00	297.569,00	116.340,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang BPKB	508.100,00		508.100,00	0,00
Hutang KDP	10.600.685,60	9.000.000,00	10.600.685,60	9.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	**180.174.148,00**	**642.894.363,00**	**180.174.148,00**	**642.894.363,00**
- Hutang Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	11.103.600,00	0,00	11.103.600,00	0,00
- Pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- PLN	91.766.611,00	93.026.670,00	91.766.611,00	93.026.670,00
- Telp	2.643.756,00	263.350,00	2.643.756,00	263.350,00
- Air	14.755.306,00	20.161.856,00	14.755.306,00	20.161.856,00
-Utang Termin Pemeliharaan Jasa Konsultasi Rehab Gd. Kantor an. CV Arya	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Putra Konsultan SPK No. 602,21/2252/423.109/2022 tgl 06 April 2022				
-Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Jaringan Kontrak No. 602.21/1851/423.109/2022 tgl 18 Juli 2022				
-Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Septictank Kontrak No. 602.21/6311/423.109/2022 tgl 22 Agustus 2022				
-Utang Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Kontrak No. 602.21/6819/423.109/2022 tgl 12 September 2022				
-Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pekerjaan Jalan dan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Saluran Kontrak No. 602.21/6597/423.109/2022 tgl 1 September 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan	5.384.055,00	0,00	5.384.055,00	0,00
Lingkungan Kontrak No. 602.21/5614/423.109/2022 tgl 19 Juli 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan	956.265,00	0,00	956.265,00	0,00
Lingkungan Kontrak No. 602.21/6831/423.109/2022 tgl 13 September 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana	4.885.110,00	0,00	4.885.110,00	0,00
Pemakaman Kontrak No. 602.21/7001/423.109/2022 tgl 21 September 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan	2.527.470,00	0,00	2.527.470,00	0,00
Permukiman Kontrak No. 602.21/6880/423.109/2022 tgl 14 September 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan	8.225.100,00	0,00	8.225.100,00	0,00
Permukiman Kontrak No. 602.21/6614/423.109/2022 tgl 2 September 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase Lingkungan	9.226.875,00	0,00	9.226.875,00	0,00

Uraian	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
Permukiman Kontrak No. 602.21/6544/423.109/2022 tgl 31 Agustus 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Konstruksi Bangunan Gedung Kontrak No. 602.21/6544/423.109/2022				
tgl 31 Agustus 2022				
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan/ Peningkatan Prasarana,	0,00	7.276.050,00	0,00	7.276.050,00
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa				-
Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan				-
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pengembangan Jaringan Distribusi	0,00	2.410.920,00	0,00	2.410.920,00
dan Sambungan Rumah (SR)				-
-Utang Belanja Konsultasi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu	0,00	9.820.060,00	0,00	9.820.060,00
Skala Perkotaan Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan Panggungrejo dan Belanja				-
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Pembangunan Septictank Individu Skala				-
Perkotaan Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Purworejo				-
-Utang Belanja Pembangunan Jalan Paving dan Saluran Papan Bestari II Kelurahan	0,00	478.281.587,00	0,00	478.281.587,00
Tembokrejo				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana	0,00	3.924.405,00	0,00	3.924.405,00
Pemakaman (2023)				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan	0,00	3.405.480,00	0,00	3.405.480,00
Permukiman (2023)				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan	0,00	7.682.310,00	0,00	7.682.310,00
Permukiman (2023)				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec.	0,00	4.390.827,00	0,00	4.390.827,00
Pangungrejo dan Kec. Bugul Kidul (2023)				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kec.	0,00	6.920.739,00	0,00	6.920.739,00
Purworejo dan Kec. Gadingrejo (2023)				-
-Utang Belanja Pengawasan Teknis Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman (2023)	0,00	4.338.324,00	0,00	4.338.324,00
-Utang Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	0,00	991.785,00	0,00	991.785,00
Konstruksi Bangunan Gedung				-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**12.252.283,00**	**10.223.762,00**	**12.252.283,00**	**10.223.762,00**
Belanja Gaji Pokok PNS	3.272.200,00	0,00	3.272.200,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	72.420,00	0,00	72.420,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	145.030,00	0,00	145.030,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	891,00	0,00	891,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	138.288,00	0,00	138.288,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.853,00	0,00	7.853,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.560,00	0,00	23.560,00	0,00
- PLN	6.620.373,00	10.082.115,00	6.620.373,00	10.082.115,00
- Telp	146.668,00	141.647,00	146.668,00	141.647,00
Satuan Polisi Pamong Praja	**6.157.771,00**	**5.768.787,00**	**5.845.752,00**	**6.080.806,00**

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
- PLN	4.882.351,00	5.526.275,00	4.882.351,00	5.526.275,00
- Telp	38.686,00	38.686,00	38.686,00	38.686,00
- Air	924.715,00	203.826,00	924.715,00	203.826,00
-internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan PPh Pasal 21	309.113,00	0,00	0,00	309.113,00
Pembulatan	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
BPBD	**16.008.799,00**	**15.850.791,00**	**16.008.799,00**	**15.850.791,00**
- Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2022	8.574.557,00	0,00	8.574.557,00	0,00
- PLN	6.238.378,00	14.702.641,00	6.238.378,00	14.702.641,00
- Telp	88.714,00	84.250,00	88.714,00	84.250,00
- Internet	1.107.150,00	1.063.900,00	1.107.150,00	1.063.900,00
Dinas Sosial	**4.864.972,00**	**6.251.819,00**	**4.864.972,00**	**6.251.819,00**
- PLN	3.625.425,00	5.654.135,00	3.625.425,00	5.654.135,00
- Telp	51.007,00	51.284,00	51.007,00	51.284,00
- Air	116.340,00	0,00	116.340,00	0,00
- Internet	1.072.200,00	546.400,00	1.072.200,00	546.400,00
Dinas Tenaga Kerja	**4.164.323,00**	**4.537.891,00**	**4.164.323,00**	**4.537.891,00**
- PLN	3.765.759,00	3.930.614,00	3.765.759,00	3.930.614,00
- Telp	51.007,00	51.007,00	51.007,00	51.007,00
- Air	347.557,00	556.270,00	347.557,00	556.270,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
DPPPA&KB	**12.247.259,00**	**15.247.831,00**	**12.247.259,00**	**15.247.831,00**
- Utang Tunjangan Fungsional Umum	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
-Utang Belanja Pajak Penghasilan	272.156,00	0,00	272.156,00	0,00
- PLN	9.450.692,00	10.052.163,00	9.450.692,00	10.052.163,00
- Telp	56.557,00	96.464,00	56.557,00	96.464,00
- Air	282.680,00	217.680,00	282.680,00	217.680,00
-Internet	2.185.174,00	2.156.524,00	2.185.174,00	2.156.524,00
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	**31.301.202,00**	**50.431.385,00**	**31.301.202,00**	**50.431.385,00**
- PLN	30.554.609,00	28.595.998,00	30.554.609,00	28.595.998,00
- Telp	155.253,00	156.136,00	155.253,00	156.136,00
- Air	141.340,00	116.340,00	141.340,00	116.340,00
- Internet	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	20.678.911,00	0,00	20.678.911,00
- Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**9.447.983,00**	**8.243.329,00**	**9.447.983,00**	**8.243.329,00**
- PLN	8.372.589,00	7.169.322,00	8.372.589,00	7.169.322,00
- Telp	46.294,00	44.907,00	46.294,00	44.907,00
- Internet	1.029.100,00	1.029.100,00	1.029.100,00	1.029.100,00
Dinas Perhubungan	**724.694.863,00**	**751.287.656,00**	**724.694.863,00**	**751.287.656,00**
- Telp	3.945.634,00	3.763.745,00	3.945.634,00	3.763.745,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air	347.557,00	108.840,00	347.557,00	108.840,00
- PLN Kantor	34.942.411,00	35.434.233,00	34.942.411,00	35.434.233,00
- PLN PJU	672.155.461,00	689.570.838,00	672.155.461,00	689.570.838,00
- Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga (Operasional Dispenda) Des 2022	9.608.300,00	0,00	9.608.300,00	0,00
- Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga (Operasional Polresta) Des 2022	3.695.500,00	0,00	3.695.500,00	0,00
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Menghasilkan Pendapatan (Operasional Dispenda) Des 2023	0,00	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00

Uraian	Saldo Akhir 31-Dec-22	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31-Dec-23
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Menghasilkan Pendapatan (Operasional Polresta) Des 2023	0,00	6.225.000,00	0,00	6.225.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	**16.850.777,00**	**21.343.607,00**	**16.850.777,00**	**21.343.607,00**
- PLN	16.247.414,00	20.968.708,00	16.247.414,00	20.968.708,00
- Telp	290.966,00	265.966,00	290.966,00	265.966,00
- Air	141.340,00	108.840,00	141.340,00	108.840,00
- Pembulatan Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Desember 2023	0,00	93,00	0,00	93,00
- PPh 21 Gaji dan Tunjangan ASN Bln Desember 2022	155.642,00	0,00	155.642,00	0,00
- Pembulatan Gaji dan Tunjangan ASN Bln Desember 2022	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
- PPh 21 Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November 2022	13.808,00	0,00	13.808,00	0,00
- Pembulatan Kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Maret s/d November 2022	117,00	0,00	117,00	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	**10.271.871,00**	**3.960.597,00**	**10.271.871,00**	**3.960.597,00**
- Tunjangan Keluarga PNS	5.791.826,00	0,00	5.791.826,00	0,00
- PLN	2.990.439,00	2.650.868,00	2.990.439,00	2.650.868,00
- Telp	95.641,00	97.989,00	95.641,00	97.989,00
- Air	301.065,00	118.840,00	301.065,00	118.840,00
- Internet	1.092.900,00	1.092.900,00	1.092.900,00	1.092.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**130.404.553,00**	**40.932.825,00**	**130.404.553,00**	**40.932.825,00**
- Tambahan Penghasilan Pegawai 2021	76.243.353,00	0,00	76.243.353,00	0,00
- PLN	41.366.569,00	39.931.773,00	41.366.569,00	39.931.773,00
- Telp	63.277,00	68.822,00	63.277,00	68.822,00
- Air	7.208.736,00	932.230,00	7.208.736,00	932.230,00
- Internet	565.100,00	0,00	565.100,00	0,00
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.917.300,00	0,00	4.917.300,00	0,00
- Belanja Tunjangan PPh	40.218,00	0,00	40.218,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	**734.517.686,00**	**84.567.151,00**	**734.517.686,00**	**84.567.151,00**
- PLN	13.954.370,00	23.632.604,00	13.954.370,00	23.632.604,00
- Telp	359.311,00	352.517,00	359.311,00	352.517,00
- Air	141.340,00	116.340,00	141.340,00	116.340,00
- Internet	1.655.500,00	0,00	1.655.500,00	0,00
- Utang Belanja Pengawasan Konstruksi	60.271.090,00	45.609.727,00	60.271.090,00	45.609.727,00
- Utang KDP Payung Madinah	658.136.075,00	0,00	658.136.075,00	0,00
- utang belanja jasa konsultansi perencanaan	0,00	14.855.963,00	0,00	14.855.963,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**11.025.657,00**	**8.635.305,00**	**11.025.657,00**	**8.635.305,00**
- PLN	7.455.859,00	7.150.141,00	7.455.859,00	7.150.141,00
- Telp	1.228.999,00	1.171.557,00	1.228.999,00	1.171.557,00
- Air	143.590,00	110.840,00	143.590,00	110.840,00
- Tunjangan Keluarga	1.577.044,00	0,00	1.577.044,00	0,00
- Tunjangan Jabatan	439.934,00	0,00	439.934,00	0,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	177.913,00	0,00	177.913,00	0,00
- Pembulatan Gaji	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00
- Iuran asuransi ketenagakerjaan JKK	318,00	0,00	318,00	0,00
- Iuran asuransi ketenagakerjaan JKM	956,00	0,00	956,00	0,00
- Utang pajak Gaji Pegawai Desember 2023	0,00	202.767,00	0,00	202.767,00
Dinas Perikanan	**2.683.640,00**	**2.578.099,00**	**2.683.640,00**	**2.578.099,00**
- PLN	2.048.940,00	2.578.099,00	2.048.940,00	2.578.099,00
- Telp	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air	0,00	0,00	0,00	0,00
- Internet	634.700,00	0,00	634.700,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	**10.697.387,00**	**9.776.448,00**	**10.697.387,00**	**9.776.448,00**

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
- PLN	10.306.490,00	9.329.992,00	10.306.490,00	9.329.992,00
- Telp	249.557,00	245.116,00	249.557,00	245.116,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air	141.340,00	108.840,00	141.340,00	108.840,00
- Hutang BPKP	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**29.702.924,00**	**34.955.131,00**	**29.702.924,00**	**34.955.131,00**
- PLN	25.404.601,00	30.770.762,00	25.404.601,00	30.770.762,00
- Telp	299.175,00	185.221,00	299.175,00	185.221,00
- Internet	3.999.148,00	3.999.148,00	3.999.148,00	3.999.148,00
- Air	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	**80.370.714,00**	**82.294.537,00**	**80.250.214,00**	**82.415.037,00**
- PLN	64.096.007,00	67.432.710,00	64.096.007,00	67.432.710,00
- Telp	2.620.835,00	2.056.955,00	2.620.835,00	2.056.955,00
- Air	10.364.752,00	8.461.174,00	10.364.752,00	8.461.174,00
- Internet	3.168.620,00	4.343.698,00	3.168.620,00	4.343.698,00
- Hutang BPKB	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
Sekretariat DPRD	**29.407.106,00**	**37.330.483,00**	**29.407.106,00**	**37.330.483,00**
- PLN	24.467.537,00	32.096.727,00	24.467.537,00	32.096.727,00
- Telp	1.209.057,00	1.133.373,00	1.209.057,00	1.133.373,00
- Telp	1.609.855,00	2.071.026,00	1.609.855,00	2.071.026,00
- Internet	2.120.657,00	2.029.357,00	2.120.657,00	2.029.357,00
Kecamatan Gadingrejo	**2.313.632,00**	**7.001.207,00**	**2.313.632,00**	**7.001.207,00**
- PLN	1.471.745,00	6.168.352,00	1.471.745,00	6.168.352,00
- Telp	270.278,00	251.155,00	270.278,00	251.155,00
- Air	571.609,00	581.700,00	571.609,00	581.700,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Panggungrejo	**22.795.509,00**	**26.825.233,00**	**22.795.509,00**	**26.825.233,00**
- PLN	21.120.810,00	24.134.294,00	21.120.810,00	24.134.294,00
- Telp	670.654,00	580.233,00	670.654,00	580.233,00
- Air	1.004.045,00	2.110.706,00	1.004.045,00	2.110.706,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Pajak Catering Kel. Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bugul Kidul	**6.997.161,00**	**8.404.972,00**	**6.997.161,00**	**8.404.972,00**
- PLN	6.612.656,00	8.257.501,00	6.612.656,00	8.257.501,00
- Telp	243.165,00	147.471,00	243.165,00	147.471,00
- Air	141.340,00	0,00	141.340,00	0,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Purworejo	**14.891.266,00**	**9.579.554,00**	**14.891.266,00**	**9.579.554,00**
- PLN	12.838.664,00	8.808.110,00	12.838.664,00	8.808.110,00
- Telp	223.857,00	206.818,00	223.857,00	206.818,00
- Air	503.895,00	564.626,00	503.895,00	564.626,00
- Internet	1.324.850,00	0,00	1.324.850,00	0,00
Inspektorat	**20.339.464,00**	**7.524.248,00**	**20.339.464,00**	**7.524.248,00**
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00
- Belanja pembulatan gaji PNS	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00
- PLN	5.544.970,00	7.346.472,00	5.544.970,00	7.346.472,00
- Telp	71.436,00	66.436,00	71.436,00	66.436,00
- Air	141.340,00	111.340,00	141.340,00	111.340,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	**8.956.732,00**	**7.839.425,00**	**8.956.732,00**	**7.839.425,00**
- PLN	8.276.115,00	7.693.176,00	8.276.115,00	7.693.176,00
- Telp	39.357,00	37.409,00	39.357,00	37.409,00
- Air	641.260,00	108.840,00	641.260,00	108.840,00

Uraian	Saldo Akhir	Mutasi	Mutasi	Saldo Akhir
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	**9.327.373,00**	**390.346.806,00**	**9.327.373,00**	**390.346.806,00**
- PLN	7.695.458,00	7.931.125,00	7.695.458,00	7.931.125,00
- Telp	167.815,00	149.291,00	167.815,00	149.291,00
- Internet	1.464.100,00	1.666.390,00	1.464.100,00	1.666.390,00
- Utang BKK Provinsi Jatim	0,00	380.600.000,00	0,00	380.600.000,00
Badan Pendapatan Daerah	**625.170.875,00**	**968.499.350,00**	**625.170.875,00**	**968.499.350,00**
- Tambahan Penghasilan Pegawai 2022	128.926.847,00	82.858.214,00	128.926.847,00	82.858.214,00
- Hutang Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2022	488.001.000,00	875.728.400,00	488.001.000,00	875.728.400,00
- PLN	8.038.181,00	9.732.612,00	8.038.181,00	9.732.612,00
- Telp	24.150,00	24.427,00	24.150,00	24.427,00
- Air	141.340,00	116.340,00	141.340,00	116.340,00
- Internet	39.357,00	39.357,00	39.357,00	39.357,00
Badan Kepegawaian Daerah	**7.303.908,00**	**8.360.507,00**	**7.303.908,00**	**8.360.507,00**
- Telp	185.173,00	121.782,00	185.173,00	121.782,00
- PLN	7.118.735,00	8.238.725,00	7.118.735,00	8.238.725,00
- Air	0,00	0,00	0,00	0,00
- Internet	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 23. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
1	Pembangunan 85% dari Nilai Kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Penambahan Ruang Gedung MR sesuai	54.697.500,00	SPK No 442/235.04/423.600.03/PPK/2020 tanggal 21 Maret 2020	Gedung dan Bangunan	RSUD Dr R Soedarsono
2	Pembangunan Drainase RT 3,4,5 RW 1 Kel. Purutrejo (Belakang RSUD Dr. Soedarsono) Kel. Purutrejo	7.337.400,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Pembangunan Drainase RT 2,3 RW 1 Kel. Randusari	4.073.800,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawsan Permukiman
4	Pembangunan Drainase RT 4 RW 5 Kel. Petamanan	5.895.650,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawsan Permukiman
5	Pembangunan Drainase RT 3,4 RW 1 Kel. Kandangsapi	8.565.000,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawsan Permukiman
6	Pembangunan Drainase dan Tutup RT 1,4 RW 2 dan RW 5 Kel. Panggungrejo	8.433.030,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawsan Permukiman
7	Pembangunan Drainase RW 2 Kel. Kebonsari	3.855.200,00	SPK nomor : 602.21/186/423.109/2020; tanggal 28/01/2020; BA nomor : 602.21/1792/423.109/2020; tanggal 09/04/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Perumahan rakyat dan Kawsan Permukiman
8	BU Generator	2.577.500,00		Peralatan dan Mesin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	BU Pengadaan Tanah JLU Kel. Tambaan	71.820.188,00		Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Belakang Gedung Gradika Kel. Purworejo	8.648.000,00	602.21/705/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran di Utara SMPLB Kel. Purworejo	10.186.000,00	602.21/611/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran dibelakang UD. SRI REJEKI Kel. Gadingrejo	11.142.000,00	602.21/734/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran di Jl. Soekarno Hatta (sebelah Yon Zipur)	12.241.500,00	602.21/451/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran di Jl. A yani (dpn kantor Kec. Gadigrejo)	12.845.000,00	602.21/486/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Belanja Modal Rehabilitasi	13.168.800,00	602.21/355/423.108/2020	Jalan, Irigasi	Dinas Pekerjaan

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
	Plengsengan dan Normalisasi Depan Pom bensin Bakalan Kel. Blandongan			dan Jaringan	Umum dan Penataan Ruang
16	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kel. Wirogunan	15.455.000,00	602.21/372/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran di LC Kel. Sebani	15.488.000,00	602.21/372/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Belanja Modal Peningkatan Saluran Irigasi Kel. Tembokrejo	15.600.000,00	602.21/385/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Batas Kota Kel. Bakalan Ke Kel. Blandongan	16.671.840,00	602.21/268/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Belanja Modal Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Irigasi dan Drainase irigasi jl. Cokroningrat kel. Bakaln dan kel. Blandongan	17.875.000,00	602.21/353/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Belanja Modal Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran Timur Rusunawa Kel. Sebani	19.329.000,00	602.21/363/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Belanja Modal Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Drainase Irigasi di Kejobo Gayam Kel. Blandongan	19.862.400,00	602.21/267/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. Hayam Wuruk	29.359.700,00	602.21 / 162 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. SMP 6 Pohjentrek	35.564.000,00	602.21/ 216 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jl. Balaikota	34.278.900,00	602.21 / 164 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	PerencanaanTeknis Pemeliharaan Berkala Jl. Sumatra	32.594.900,00	602.21/ 148 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27	Perencanaan Teknis Rehab Gedung dan Pagar Kelurahan Trajeng	73.045.100,00	602.21/251/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Perencanaan Teknis Rehab Berat Gedung Kantor Kel. Mayangan	52.350.500,00	602.21/332/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Perencanaan Teknis Rehab Gedung Kantor Kel. Karanganyar	24.486.700,00	602.21/393/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kel. Karangketug	83.405.100,00	602.21/411/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Perencanaan Teknis Pembangunan Gudang DPUPR	46.627.100,00	602.21/319/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Perencanaan Pembangunan Kanopi Parkir Gedung DPRD	12.282.950,00	602.21/395/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Revitalisasi Sarana Perdagangan Jl. Dewi Sartika	48.315.000,00	602.21/295/TBBK/423.108/2020	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Jl. Halmahera	32.069.300,00	602.21 / 168 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Perencanaan Teknis Pembangunan Trotoar, Drainase dan Crosdrain Jl.	28.193.050,00	602.21 / 79 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Nilai	No SPK	Jenis aset tetap	Nama OPD
	Sulawesi				
36	Perencanaan Teknis Peningkatan Drainase dan Trotoar Jl. Gajahmada	32.733.200,00	602.21 / 112 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Pendataan Kondisi Jalan dan Jembatan (97 Ruas dan 31 Jembatan)	58.282.800,00	602.21/3023/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi Saluran drainase kel. Gadingrejo	8.818.150,00	602.21/443/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39	perencanaan Plengsengan dan Normalisasi di Kel.Karanganyar (dari Palm Resto - Matahari)	10.149.200,00	602.21/613/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Plengsengan dan Normalisasi RW.01 kel. Gentong	13.626.500,00	602.21/441/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Petempen di RW 1 RW 6 Kel. Kebonsari	12.922.200,00	602.21/378/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Perencanaan Teknis Rehabilitasi, Peninggian dan Normalisasi Saluran di RT 1 - 04 RW 1 Kel. Tapaan	8.640.700,00	602.21/609/423.108/2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Kh. Hasyim Ashari II	27.285.150,00	602.21 / 144 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Ade Irma Suryani Nasution	47.340.900,00	602.21 / 114 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Kebon mangga	25.755.300,00	602.21 / 81 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	Perencanaan Teknis peningkatan Jl. Sisingamangaraja	60.283.800,00	602.21/ 116 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Perencanaan Teknis Pembangunan drainase dan rehabilitasi Jl. Glagah-Bintingan	27.431.000,00	602.21 / 76 / 423.108 / 2020	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	pengadaan Konstruksi Depo dan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.527.617.702,00	SPK No600/500/423,117/PPK/DPK.I/2019	Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Depo Arsip Lanjutan	775.937.492,99		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Ruang Belajar, R Guru, R.TU dan R. UKS SDN Purutrejo II	849.754.118,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pasuruan	1.252.047.828,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	Perencanaan ex Pasar Burung	14.586.000,00		Gedung dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL		8.641.552.648,99			

Lampiran 25. Laporan Keuangan PT BPR Kota Pasuruan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR KOTA PASURUAN (PERSERODA)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN:	
1. Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	1 - 2
2. Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	3
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	4
4. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6 – 28
LAMPIRAN 1. RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN	29 - 33
LAMPIRAN 2. KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PPAP	34
LAMPIRAN 3. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO	35
LAMPIRAN 4. KPMM	36
LAMPIRAN 5. RASIO PERHITUNGAN KESEHATAN BANK	37

PT. BPR
KOTA PASURUAN
(PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Iswinarti Margiana, SE
Alamat Kantor	:	Jl. Panglima Sudirman No. 58 Pasuruan
Alamat Domisili	:	Pecantingan RT.011 RW.004 Sekardangan - Sidoarjo
Telepon	:	(0343) 424532
Jabatan	:	Direktur Utama

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA.**
2. Laporan keuangan **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA** telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN PERSERODA.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pasuruan, 29 Februari 2024

ISWINARTI MARGIANA, SE
Direktur Utama

mwa
Registered Public Accountants

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN
Kantor Pusat : Izin Usaha No. 728/KM.1/2019 Tanggal 02 Desember 2019
Kantor Cabang : Izin Usaha No. 139/KM.1/2020 Tanggal 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No. 606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286
Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126
Telp/Fax : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

No.: 00038/3.0420/AU.2/07/0388-4/1/II/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT. BPR KOTA PASURUAN (PERSERODA)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BPR KOTA PASURUAN (PERSERODA)**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

mwa
Registered Public Accountants

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN
Kantor Pusat : Izin Usaha No. 728/KM.1/2019 Tanggal 02 Desember 2019
Kantor Cabang : Izin Usaha No. 139/KM.1/2020 Tanggal 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No. 606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286
Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126
Telp/Fax : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertangung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan Keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN
Kantor Pusat : Izin Usaha No. 728/KM.1/2019 Tanggal 02 Desember 2019
Kantor Cabang : Izin Usaha No. 139/KM.1/2020 Tanggal 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No. 606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286
Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126
Telp/Fax : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Moh. Wildan & Adi Darmawan

Adi Darmawan Eryanto, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik – AP.0388
Nomor Izin Kantor Akuntan Publik – KEP-139/KM.1/2020

00038

Malang, 29 Februari 2024

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
N E R A C A
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	Catatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	ASET		
Aset Lancar			
Kas		44.832.300	39.064.900
Penempatan pada bank lain	3	20.459.823.340	15.142.579.685
- Penyisihan kerugian		0	0
Kredit yang diberikan	4	41.288.796.960	41.298.592.256
- Biaya transaksi belum diamortisasi		23.293.789	29.703.528
- Kredit Yang Diberikan - Provisi & Administrasi		(525.030.758)	(716.472.995)
- Penyisihan Penghapusan Kredit		(1.088.845.597)	(1.309.834.267)
Agunan Yang Diambil Alih		991.679.448	0
Jumlah aset lancar		**61.194.549.482**	**54.483.633.107**
Aset tidak lancar			
Aset tetap & Inventaris	5	2.082.652.609	2.058.291.534
- Akumulasi Penyusutan		(1.451.545.949)	(1.789.105.560)
Aset tidak berwujud	6	157.633.300	79.933.300
- Akumulasi Amortisasi		(71.790.535)	(57.645.965)
Aset lain-lain	7	435.351.633	426.413.917
Jumlah aset tidak lancar		**1.152.301.058**	**717.887.226**
Jumlah Aset		**62.346.850.540**	**55.201.520.333**

Pasuruan, 29 Februari 2024

PT. BPR KOTA PASURUAN

Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

NERACA

31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	Catatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		LIABILITAS & EKUITAS	
Liabilitas			
Liabilitas Segera	8	143.607.219	199.616.002
Simpanan	9	36.080.305.271	31.039.816.975
Simpanan dari bank lain	10	11.655.103.620	11.940.151.798
Pinjaman yang diterima	11	2.227.634.256	0
Liabilitas lain-lain	12	1.049.495.390	951.908.464
Jumlah kewajiban Jangka Pendek		**51.156.145.756**	**44.131.493.239**
Ekuitas			
Modal saham - modal dasar 6.000 saham, dengan nilai nominal Rp 2.500.000,- per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 2.874 saham.	13	7.185.000.000	7.185.000.000
Cadangan Umum		1.370.629.294	1.209.203.975
Cadangan Tujuan		1.222.995.255	1.061.569.936
Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya		1.412.080.235	1.614.253.183
Jumlah Ekuitas		**11.190.704.784**	**11.070.027.094**
Jumlah Kewajiban & Ekuitas		**62.346.850.540**	**55.201.520.333**

Pasuruan, 29 Februari 2024

PT. BPR KOTA PASURUAN

Iswinarti Margiana, SE

Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	Catatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga :			
Bunga Kontraktual	14	5.870.148.853	6.464.336.956
Provisi	15	458.355.669	471.030.629
Biaya Transaksi	16	(17.659.739)	(23.589.244)
Jumlah Pendapatan Bunga		6.310.844.783	6.911.778.341
Pendapatan Lainnya	17	803.538.340	557.168.376
Jumlah Pendapatan Operasional		7.114.383.123	7.468.946.717
Beban Operasional :			
Beban Bunga	18	2.280.295.578	1.908.260.532
Beban PPAP	19	396.012.965	229.050.105
Beban Pemasaran	20	108.921.857	168.420.064
Beban Administrasi dan Umum	21	2.760.726.373	3.173.574.634
Beban Lainnya	22	62.149.164	70.913.851
Jumlah Beban Operasional		5.608.105.937	5.550.219.186
LABA OPERASIONAL		1.506.277.186	1.918.727.531
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	23		
Pendapatan Non operasional		178.623.794	15.604.980
Beban Non Operasional		26.745.600	20.906.263
LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL		151.878.194	(5.301.283)
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.658.155.380	1.913.426.248
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	24	(246.075.145)	(299.173.065)
LABA/(RUGI) BERSIH		1.412.080.235	1.614.253.183

Pasuruan, 29 Februari 2024

PT. BPR KOTA PASURUAN

Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	**7.185.000.000**	**1.058.752.134**	**911.118.095**	**1.504.518.410**	**10.659.388.639**
(Pembagian Laba Tahun Buku 2021)	0	0	0	(1.504.518.410)	(1.504.518.410)
Penambahan Cadangan Umum		150.451.841	0	0	150.451.841
Penambahan Cadangan Tujuan	0	0	150.451.841	0	150.451.841
Laba bersih tahun berjalan	0	0	0	1.614.253.183	1.614.253.183
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	**7.185.000.000**	**1.209.203.975**	**1.061.569.936**	**1.614.253.183**	**11.070.027.094**
(Pembagian Laba Tahun Buku 2022)	0	0	0	(1.614.253.183)	(1.614.253.183)
Penambahan Cadangan Umum		161.425.319	0	0	161.425.319
Penambahan Cadangan Tujuan	0	0	161.425.319	0	161.425.319
Laba bersih tahun berjalan	0	0	0	1.412.080.235	1.412.080.235
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**7.185.000.000**	**1.370.629.294**	**1.222.995.255**	**1.412.080.235**	**11.190.704.784**

Pasuruan, 29 Februari 2024

PT. BPR
Kota Pasuruan
(Perseroda)

Iswinarti Margiana, SE
Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian
Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	2023	2022
ARUS KAS DARI:		
Kegiatan Usaha:		
Laba (Rugi) Selama Tahun Berjalan	1.412.080.235	1.614.253.183
Penyesuaian:		
Penyisihan penghapusan aset produktif	396.012.965	229.050.105
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	(617.001.635)	(147.833.468)
Penyusutan Aset Tetap	89.171.305	73.599.421
Penyesuaian akumulasi aset tetap	(426.730.916)	0
Amortisasi aset tidak berwujud	14.144.570	7.993.320
Provisi yang belum diamortisasi	(191.442.237)	(154.788.334)
Biaya transaksi kredit yang belum diamortisasi	6.409.739	23.589.244
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(22.365.594)	5.472.232
Perubahan modal kerja:		
Kredit yang diberikan	9.795.296	(5.901.855.088)
Agunan Yang Diambil Alih	(991.679.448)	0
Aset lain-lain	(8.937.716)	70.734.509
Liabilitas segera	(56.008.783)	71.772.190
Simpanan	5.040.488.296	1.969.144.908
Simpanan dari bank lain	(285.048.178)	4.440.151.798
Liabilitas lain-lain	97.586.926	169.549.269
Kas dari/(untuk) kegiatan operasi	**4.466.474.825**	**2.470.833.289**
Arus kas dari aktivitas investasi :		
Penambahan Aset tetap	(24.361.075)	(33.300.000)
Penambahan Aset tidak berwujud	(77.700.000)	0
Kas bersih untuk kegiatan investasi	**(102.061.075)**	**(33.300.000)**
Arus kas dari aktivitas pendanaan :		
Pinjaman Diterima dari bank lain	2.249.999.850	(441.987.947)
Tambahan Cadangan Umum	161.425.319	150.451.841
Tambahan Cadangan Tujuan	161.425.319	150.451.841
Deviden	(1.614.253.183)	(1.504.518.410)
Kas bersih dari/(untuk) kegiatan pendanaan	**958.597.305**	**(1.645.602.675)**
Kenaikan/(Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	5.323.011.055	791.930.614
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	15.181.644.585	14.389.713.971
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	**20.504.655.640**	**15.181.644.585**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	44.832.300	39.064.900
Giro pada bank lain	3.846.287.593	1.010.579.627
Tabungan pada bank lain	9.083.535.747	8.002.000.058
Deposito pada bank lain	7.530.000.000	6.130.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	**20.504.655.640**	**15.181.644.585**

Pasuruan, 29 Februari 2024

PT. BPR

Lewinarti Margiana, SE

Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian

Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

1 U M U M

a. Pendirian

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Nyata (Bank) yang selanjutnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan didirikan sesuai dengan akta No. 3 tanggal 1 Mei 1990 oleh Notaris Ny. Susanti, SH., di Surabaya. Akta tersebut telah diumumkan dalam Lembar Tambahan No. 4824, dan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1990. Selanjutnya pada tahun 2023 Bank melakukan perubahan nama menjadi PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA, sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 14 September 2023 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn di Kota Mojokerto. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055426.AH.01.02. Tahun 2023.

b. Perijinan yang dimiliki

Perijinan yang dimiliki Bank sampai saat ini adalah :

1 Ijin Usaha perdagangan besar sesuai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 171/13-09/SIUP-B/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Pasuruan

2 Ijin Usaha sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-604/KM.13/1990 tanggal 10 Desember 1990

3 Bank Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.467.912.0-651.000 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pasuruan

4 Ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403712649 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS pada tanggal 24 Juli 2019

c. Maksud dan tujuan

Berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 14 September 2023 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn di Kota Mojokerto, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat.

d. Susunan pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 8 September 2022 oleh Notaris Mochamad Rosyidi, SH., di Pandaan - Pasuruan dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0056178 tanggal 19 September 2022, Susunan Pengurus PT. BPR Kota Pasuruan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Ir. Sugiarti, M.Si
Direktur Utama	: Iswinarti Margiana, SE

e. **Lokasi Bank**

Bank berkantor pusat di Jl. Panglima Sudirman No. 58, Pasuruan, Jawa Timur.
Bank memiliki 3 (Tiga) kantor kas, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Keterangan	Izin	Lokasi
1	Kantor Kas Pasar Besar	No. 8/230/DPBPR/IDABPR/MI Tanggal 26 April 2006	Jl. Soekarno Hatta Pasuruan (Komplek Pasar Besar) Ruko B No. 01
2	Kantor Kas Pasar Karangketug	No. 8/684/DPBPR/IDABPR/MI Tanggal 19 Desember 2006	Jl. Gatot Subroto, Pasuruan (Komplek Pasar Karangketug) No. 06-07
3	Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Sentra UMKM Kota Pasuruan	Telah dilaporkan kepada OJK sesuai surat nomor 443/SPB/423.500.02/2023 tanggal 09 Oktober 2023	Jl. Wachid Hasyim Kota Pasuruan (Komplek Mall Pelayanan Publik)

e. **Jumlah Karyawan**

Sumber daya manusia bank sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang, terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) orang Karyawan, dan 1 (Satu) orang Direksi dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Bidang Tugas Karyawan	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		
			Tetap (1)	Tidak Tetap (2)	Total (1+2)
1	Direktur Utama	S1	0	1	1
2	Audit Internal	S1	1	0	1
3	Kepatuhan	S1	1	0	1
4	Proses Data Elektronik	S1	2	0	2
3	Pemasaran	S1	6	0	6
		Diploma 3	0	0	0
		SMA	2	0	2
4	Operasional	S1	3	3	6
		D3	0	0	0
		SMA	1	2	3
		SMK	0	0	0
5	Umum	S1	1	0	1
		SMA	0	6	6
		SMP	0	0	0
		SD	0	0	0
	Total		17	12	29

2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan bank.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR).

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung. Kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain.

b. Transaksi hubungan istimewa

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, didefinisikan dalam SAK - ETAP No. 28, tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang dimaksud adalah:

a. Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
b. Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
c. Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 28.6 untuk mengungkapkan kompensasi personel manajemen kunci. Sekurang-kurangnya, pengungkapan tersebut meliputi:

a. Jumlah transaksi;
b. Jumlah saldo dan:
   (i) Syarat dan kondisinya (termasuk apakah dijamin) dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian; dan
   (ii) Rincian jaminan yang diberikan atau diterima;
c. Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang;
d. Beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang telah jatuh tempo dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transaksi tersebut meliputi pembelian, penjualan, atau pengalihan barang atau jasa; sewa: penjaminan; dan penyelesaian oleh entitas atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan sebaliknya.

Pengungkapan yang dipersyaratkan dalam paragraf 28.8 harus dibuat secara terpisah untuk setiap kategori:

a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Entitas tidak boleh menyatakan bahwa transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibuat dalam syarat yang setara dengan transaksi pertukaran antara pihak yang paham dan berkeinginan melakukan transaksi dengan wajar, kecuali syarat tersebut dapat dibenarkan.
Entitas dapat mengungkapkan hal-hal yang serupa secara agregat, kecuali diperlukan pengungkapan terpisah untuk pemahaman dampak transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam laporan keuangan.

Berdasarkan SAK - ETAP No. 28, semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan tingkat harga dan persyaratan normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan untuk masing-masing akun.

c. **Pendapatan bunga yang akan diterima**
Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

d. **Giro pada bank lain**
Giro pada bank lain disajikan sebesar saldo giro, bank tidak menetapkan penyisihan penghapusan atas giro pada bank lain.

e. **Penempatan pada bank lain**
Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan penempatan. Penyisihan tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo penempatan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas penempatan pada bank lain. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh dana yang ditempatkan di bank lain.

f. **Kredit yang diberikan**
Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit/baki debet dikurangi dengan provisi kredit yang belum diamortisasi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh Bank yang belum diamortisasi.

Kredit yang diberikan bersih dinyatakan sebesar kredit yang diberikan dikurangi penyisihan penghapusan kredit. Penyisihan penghapusan kredit tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo kredit yang diberikan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas kredit yang diberikan. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan.

Kredit diklasifikasikan *"non-performing"* pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *"non-performing"* tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

g. Penyisihan penghapusan aset produktif

Aset Produktif terdiri dari kredit yang diberikan, Sertifikat Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis).

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan, komitmen dan kontijensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) ditentukan berdasarkan POJK Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
Penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di Bank lain.

Aset produktif dihapuskan dan penyisihan penghapusan aset produktif pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur atau Bank lain tempat menempatkan dana sudah tidak mampu lagi membayar.

Pada tahun 2018 Kebijakan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) ditentukan berdasarkan PBI No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 sedangkan pada tahun 2019 mengacu pada POJK Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat tanggal 27 Desember 2018. Maka klasifikasi Aset Produktif dan Pembentukan Aset Produktif BPR adalah sebagai berikut:

Klasifikasi / Kualitas Kredit	Prosentase	Keterangan
PPAP Umum - Lancar	0,5%	Dari nilai aset produktif kualitas Lancar
PPAP Khusus - Dalam Perhatian Khusus	3%	Dari aset produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Kurang Lancar	10%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
- Diragukan	50%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- Macet	100%	Dari nilai aset produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan

Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus dilakukan secara bertahap yaitu:

a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan November 2021.
c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2021.

Penetapan nilai Agunan di klasifikasikan sebagai berikut:

No	Keterangan Agunan	Prosentase
a.	Agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Tabungan dan/atau deposito yang diblokir BPR disertai surat kuasa pencairan dan logam mulia yang disetai surat kuasa gadai.	100%
b.	Nilai pasar untuk agunan emas perhiasan.	85%
c.	Nilai hak tanggungan untuk agunan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat hak tanggungan atau Fidusia.	80%
d.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan mengenai resi gudang.	70%
e.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan/atau rumah yang memilki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan atau fidusia.	60%

f.	Nilai jual obyek pajak (NJOP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terkahir dari instansi yang berwenang atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang untuk agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.	50%
g.	Harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijinnya yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang.	50%
h.	Nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	50%
i.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	50%
j.	Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat.	50%
k.	Nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.	30%

Prosentase PPAP diatas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan OJK kecuali aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Terkait penerapan pasal 17 ayat (3) dan (4) POJK no. 33/POJK.03./2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang perubahan atas PBI no. 13/26/PBI/2011 tentang kualitas aset produktif dan PPAP BPR yang menyatakan bahwa:

a. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf c,huruf e sampai dengan huruf g:
   - Ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 tahun sampai dengan 4 tahun sejak penetapan kualifikasi kredit menjadi macet; dan
   - Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 tahun sejak penetapan kualifikasi kredit menjadi macet.

b. Nilai agunan sebagai pengurang PPAP kredit macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada klasifikasi huruf h:
- ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1tahun sampai dengan 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi

tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

h. **Agunan yang diambil alih**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pernbentukan Penyisihan Aset Produktif BPR BAB V Agunan Yang Diambil Alih

1. Pengambilalihan agunan untuk penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas macet, dan bersifat sementara.
2. Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
3. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.
4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPR tidak dapat melakukan menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

   a) 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dirniliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

   b) 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

   c) 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
5. Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
6. Dalam hal AYDA mengalami peningkatan karena penilaian kembali, maka BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih yang telah diterima pada saat kredit diambil alih, dibebankan ke dalam akun penyisihan penghapusan aset produktif. Sedangkan selisih lebih nilai realisasi bersih di atas saldo kredit, agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam catatan administratif bank.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeliharaan dan pengambilalihan agunan tersebut dibebankan pada beban operasi saat terjadi.

Laba atau rugi yang diperoleh/diderita akibat dari realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

i. **Aset tetap**

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kecuali hak atas tanah, seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset	Prosentase	Masa Manfaat
Bangunan	5%	20 tahun
Kendaraan	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun
Inventaris	25% dan 12,5%	4 dan 8 tahun

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke laporan laba-rugi pada saat terjadinya Pemugaran dan perbaikan yang meningkatkan produktivitas aset tetap dalam jumlah material dikapitalisasi dalam *cost aset* yang bersangkutan. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

j. **Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat di identifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik.

Piranti lunak Komputer

Lisensi piranti lunak koomputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan biaya ini diamortisasi selama estimasi (4Tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Bank dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biaya-biaya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun , diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya - biaya ini meliputi Aplikasi perbankan sehubungan dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SLIK dan aplikasi pelaporan bulanan OJK.

k. **Aset Lain-lain**

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan secara tersendiri.

Aset lain-lain terdiri dari beban dibayar dimuka, beban ditangguhkan dan lainnya dimana diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan .

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus / (*Staight line method).*

l. **Liabilitas Segera**

Liabilitas Segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang telah jatuh tempo atau menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah memberi amanat maupun tidak meberi. Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank.

m. **Biaya dibayar dimuka**

Beban dibayar dimuka dinyatakan sebesar jumlah yang dibayarkan dan diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. **Utang bunga**

Utang bunga merupakan kewajiban bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi bank, termasuk didalamnya adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

o. **Simpanan dari pihak ketiga dan bank lain**

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan disajikan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dan bank. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Simpanan dari bank lain diakui sesuai dengan jumlah kewajiban terhadap bank lain tersebut.

p. **Pinjaman yang diterima**

Pinjaman yang diterima terdiri dari pinjaman dari bank lain dan dari lembaga keuangan lainnya. Pinjaman yang diterima diakui sesuai dengan jumlah kewajiban terhadap bank lain tersebut.

q. **Estimasi Kewajiban Imbalan Kerja**

Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan bank atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:

1. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
2. Kewajiban imbalan pasca kerja
3. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
4. Kewajiban pesangon pemutusan kerja.

r. **Pendapatan dan beban bunga**

Pendapatan bunga diperoleh dari penanaman dana bank pada aset produktif, berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dikurangi biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Pendapatan bunga – provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Saldo pendapatan provisi sehubungan dengan kredit yang telah selesai sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan aset produktif yang ditanggung oleh bank. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung bank diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Pendapatan bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas aset *"non-performing"* diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non performing. Pendapatan bunga atas aset non performing yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontinjensi.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi.

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah dan *cash back*, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Beban diakui pada saat terjadinya (Basis Akrual).

s. **Pendapatan provisi**

Pendapatan provisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat realisasi kredit. Pendapatan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan perkreditan atau jangka waktu diakui pada saat transaksi dilakukan.

t. **Perpajakan**

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Bank tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

3 PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2023	2022
Giro :		
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - 798	265.192.828	127.836.977
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - 131	4.945.115	5.244.468
PT. Bank Danamon - 780	1.887.919.232	877.498.182
PT. Bank Permata Tbk. - 636	1.688.230.418	0
Jumlah Giro	3.846.287.593	1.010.579.627
Tabungan:		
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - 892	38.352.709	32.111.287
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur - 945	1.394.839.498	1.013.558.153
PT. Bank Permata Tbk. - 748	177.272.085	1.138.028.504
PT. BPR Jawa Timur - 951	1.736.788.183	1.568.188.209
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (Bisnis) - 556	999.956.615	1.375.588.103
PT. BPR Surya Artha Utama - 985	108.671.557	335.746.009
PT. Bank Mega Syariah - 665	923.690.516	505.837.027
PT. BPR Bank Jombang Perseroda - 004	1.115.638.006	1.002.997.925
PT. BPR Bank Jombang Perseroda - 100 (Tab. Simar)	100.197.390	0
PT. BPR Danaputra Sakti - 001	332.037.251	45.304.526
PT. BPR Delta Artha (Perseroda) - 317	1.471.269.998	984.640.315
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) - 102	451.055.725	0
PT. BPR Kridadhana Citranusa - 901	224.511.612	0
PT BPRS Kota Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda - 079	9.254.602	0
Jumlah Tabungan	9.083.535.747	8.002.000.058
Deposito:		
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	30.000.000	30.000.000
PT. Bank Danaputra Sakti	1.500.000.000	500.000.000
PT BPRS Kota Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Harta Swadiri	0	500.000.000
PT. BPRS Kabupaten Ngawi	0	500.000.000
PT. BPR Tumpang Prima Artorejo	0	600.000.000
PT. BPR Bank Daerah Kediri	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Surya Artha Utama	1.500.000.000	1.500.000.000
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda)	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Nusumma Jatim	0	500.000.000
PT. BPR Tapin Sejahtera	0	500.000.000
Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1.000.000.000	0
PT. BPR Majatama Perseroda	500.000.000	0
PD. BPR Bahteramas Konawe	500.000.000	0
PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang Perseroda	1.000.000.000	0
Jumlah Deposito	7.530.000.000	6.130.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	20.459.823.340	15.142.579.685
Dikurangi penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain	0	0
Jumlah penempatan pada bank lain bersih	20.459.823.340	15.142.579.685
Suku bunga Giro per tahun	0,5% - 1,0%	0,25% - 0,50%
Suku bunga tabungan per tahun	0,1% - 3,00%	0,25% - 3,50%
Suku bunga Deposito per tahun	2,63% - 7%	2,45% - 6,25%

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain

Saldo awal	0	0
Pembentukan di Tahun Berjalan	284.527	13.985.383
Penyesuaian PPAP	(284.527)	(13.985.383)
Saldo akhir	0	0

4 KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis Penggunaan

	2023	2022
Kredit Modal Kerja	27.746.864.131	22.057.810.977
Kredit Investasi	2.980.389.168	2.832.581.503
Kredit Konsumtif	10.561.543.661	16.408.199.776
Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960	41.298.592.256
Biaya transaksi belum diamortisasi	23.293.789	29.703.528
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(525.030.758)	(716.472.995)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit	(1.088.845.597)	(1.309.834.267)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	39.698.214.394	39.301.988.522

b. Keterkaitan

	2023	2022
Pihak terkait	144.885.138	932.263.947
Pihak tidak terkait	41.143.911.822	40.366.328.309
Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960	41.298.592.256
Biaya transaksi belum diamortisasi	23.293.789	29.703.528
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(525.030.758)	(716.472.995)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit	(1.088.845.597)	(1.309.834.267)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	39.698.214.394	39.301.988.522

c. Kolektibilitas

	2023	2022
Lancar	36.268.228.174	36.895.699.729
Dalam Perhatian Khusus	2.082.294.336	1.491.615.649
Kurang Lancar	340.749.759	14.137.356
Diragukan	58.656.752	347.625.939
Macet	2.538.867.939	2.549.513.583
Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960	41.298.592.256
Biaya transaksi belum diamortisasi	23.293.789	29.703.528
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(525.030.758)	(716.472.995)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit	(1.088.845.597)	(1.309.834.267)
Jumlah kredit yang diberikan bersih	39.698.214.394	39.301.988.522

d. Perubahan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan

	2023	2022
Saldo awal	1.309.834.267	1.228.617.630
Penyisihan penghapusan kredit selama tahun berjalan	395.728.438	215.064.722
Penghapusan kredit yang diberikan	(245.000.000)	0
Pemulihan penghapusan kredit yang diberikan	(371.717.108)	(133.848.085)
Saldo akhir	1.088.845.597	1.309.834.267
Suku bunga kredit yang diberikan per tahun	9,12% flat - 27% flat, 9,6% eff - 27%	9,12% flat -27% flat, 9,60% eff - 27% eff

Kredit yang diberikan tersebut dijamin dengan agunan berupa barang tidak bergerak yang diikat dengan hak tanggungan (APHT) atau kuasa untuk membebankan hak tanggungan (SKMHT), serta agunan berupa barang bergerak (kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan lebih) yang diikat dengan fidusia (Sertifikat Fidusia) dan legallisasi perjanjian kredit. atau dengan jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

5 AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2023	2022
AYDA	991.679.448	0
J u m l a h	991.679.448	0

5 ASET TETAP

	2023	2022
Harga perolehan:		
Gedung	184.169.000	184.169.000
Inventaris kantor	801.631.609	773.081.609
Kendaraan	1.083.010.000	1.101.040.925
Inventaris lainnya	13.842.000	0
J u m l a h	2.082.652.609	2.058.291.534
Akumulasi penyusutan:		
Gedung	153.827.333	144.618.881
Inventaris kantor	726.510.846	691.770.779
Kendaraan	569.189.152	952.715.900
Inventaris lainnya	2.018.618	0
J u m l a h	1.451.545.949	1.789.105.560
Nilai Buku:		
Gedung	30.341.667	39.550.119
Inventaris kantor	75.120.763	81.310.830
Kendaraan	513.820.848	148.325.025
Inventaris lainnya	11.823.382	0
J u m l a h	631.106.660	269.185.974

6 ASET TIDAK BERWUJUD

	2023	2022
Harga perolehan:		
Software Program SIPT	62.469.300	62.469.300
Mobile Banking	17.464.000	17.464.000
Program Assist	72.150.000	0
Program ASSIST MPP	5.550.000	0
J u m l a h	157.633.300	79.933.300
Akumulasi Amortisasi :		
Software Program SIPT	53.414.513	47.167.589
Mobile Banking	12.224.772	10.478.376
Program Assist	6.012.500	0
Program ASSIST MPP	138.750	0
J u m l a h	71.790.535	57.645.965

Nilai Buku :		
Software Program SIPT	9.054.787	15.301.711
Mobile Banking	5.239.228	6.985.624
Program Assist	66.137.500	0
Program ASSIST MPP	5.411.250	0
J u m l a h	85.842.765	22.287.335

7 ASET LAIN-LAIN

	2023	2022
Pajak Dibayar Dimuka :		
Uang Muka PPh pasal 25		
Pendapatan Bunga yang akan Diterima Kredit	289.035.909	290.372.388
Pendapatan Bunga yang akan Diterima Penempatan :		
Deposito	17.261.235	14.188.534
Biaya Dibayar Dimuka :		
Sewa Gedung	26.813.500	26.813.500
Gugatan Sederhana	51.629.300	2.959.150
Premi Asuransi - Inventaris Kendaraan	7.884.400	6.285.031
Premi Asuransi - Gedung	644.655	644.655
Jaringan	5.835.834	6.113.334
Iklan dan Promosi	0	5.850.000
Uang Muka Inventaris	0	36.085.000
Piutang Dari Pihak Ketiga :		
Klaim Fintech	40.000	0
Lainnya :		
Persediaan Cetakan dan ATK	13.229.800	25.779.825
Kalender	0	8.314.000
Persediaan Cinderamata	20.951.500	1.975.000
Persediaan Kaleng Tabungan	1.605.500	553.500
Persediaan Materai	420.000	460.000
Lainnya	0	20.000
J u m l a h	435.351.633	426.413.917

8 LIABILITAS SEGERA

	2023	2022
Liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar :		
Pajak Penghasilan pasal 21	31.225.970	23.751.088
Pajak Penghasilan atas bunga tabungan	4.316.153	3.350.481
Pajak Penghasilan atas bunga deposito	10.783.924	12.550.807
Pajak Penghasilan pasal 23	105.000	0
Titipan Nasabah	3.619.750	57.052.335
Titipan Pihak Ketiga	73.615.922	73.021.211
Titipan Asuransi	15.540.500	16.440.080
Titipan Notaris	4.400.000	13.450.000
J u m l a h	143.607.219	199.616.002

9 SIMPANAN

	2023	2022
Tabungan:		
Pihak terkait	152.548.358	211.657.823
Pihak tidak terkait	21.039.490.121	17.434.932.974
J u m l a h	21.192.038.479	17.646.590.797
Tabungan terdiri dari :		
Simpanan Masyarakat Kota	6.934.822.534	4.738.387.390
Simpanan Kaleng	3.088.728.597	2.660.592.011
Simpanan Anak Sekolah	266.744.075	224.483.714
Tabunganku	2.808.780.542	2.931.700.668
Simpanan Masyarakat Hari Raya	7.517.502.840	7.091.427.014
Simpanan Pelajar	575.459.891	0
J u m l a h	21.192.038.479	17.646.590.797
Suku bunga tabungan per tahun	0,25% - 3,5%	0% - 3,5%

Tabungan dari pihak terkait dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak tidak terkait.

Deposito berjangka:		
Pihak terkait	169.987.363	322.198.323
Pihak tidak terkait	14.718.279.429	13.071.027.855
J u m l a h	14.888.266.792	13.393.226.178
Jangka waktu:		
1 Bulan	0	0
3 Bulan	4.148.500.000	2.806.250.000
6 Bulan	4.745.500.000	4.924.500.000
12 Bulan	5.994.266.792	5.662.476.178
J u m l a h	14.888.266.792	13.393.226.178
Suku bunga deposito per tahun	1,75% - 6,75%	2,25% - 6,25%

Deposito berjangka dari pihak terkait dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti dilakukan dengan pihak tidak terkait.

Jumlah Simpanan	36.080.305.271	31.039.816.975

10 SIMPANAN DARI BANK LAIN

	2023	2022
Tabungan		
Pihak Tidak Terkait :		
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	352.472.093	89.443.296
PT. BPR Jawa Timur	710.322	708.502
PT. BPR Delta Artha Perseroda	1.001.921.205	0
Jumlah Tabungan	1.355.103.620	90.151.798
Suku bunga simpanan dari bank lain berupa tabungan per tahun	0,25% - 3,5%	0,25% - 2,25%

Deposito		
Pihak Tidak Terkait :		
PT. BPR Delta Artha Perseroda	0	1.000.000.000
Perumda BPR Bank Lumajang	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Surya Artha Utama	0	1.500.000.000
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	0	50.000.000
PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang Perseroda	1.500.000.000	1.500.000.000
Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun	500.000.000	500.000.000
PT. BPR Tapa	0	1.000.000.000
PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	0	500.000.000
PERUMDA BPR Kota Blitar	1.000.000.000	1.000.000.000
Perumda BPR Kota Kediri	800.000.000	800.000.000
PT. BPR Artha Senapati	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Dewata Indobank	0	500.000.000
PT. BPR Nusumma Jateng	0	1.000.000.000
PT. BPR Bank Boyolali Perseroda	1.000.000.000	1.000.000.000
PT. BPR Daya Lumbung Asia	1.500.000.000	0
PT. BPR Harta Swadiri	1.000.000.000	0
PT. BPR Bank Sleman (Perseroda)	1.000.000.000	0
PT. BPR Tanah Laut	500.000.000	0
Jumlah Deposito	10.300.000.000	11.850.000.000
J u m l a h	11.655.103.620	11.940.151.798
Suku bunga simpanan dari bank lain berupa deposito per tahun	5,75% - 6,75%	2% - 6,25%

11 PINJAMAN YANG DITERIMA

	2023	2022
PT. BPR Bank Jombang Perseroda	2.249.999.850	0
Biaya Provisi & Administrasi	(22.365.594)	0
Jumlah	2.227.634.256	0

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) nomor 900/194/415.51/2023 tanggal 1 Maret 2023, BPR memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. BPR Bank Jombang Perseroda sebagai berikut :

Jenis Kredit	:	Pinjaman Lembaga Keuangan (PLK)
Tujuan	:	Modal Kerja BPR
Plafond Kredit	:	Rp 3.000.000.000,-
Skema Kredit	:	Rp 3.000.000.000,- Installment
Jangka Waktu	:	a. Jangka Waktu Penarikan : 6 Bulan b. Jangka Waktu Kredit : 26 Bulan
Suku Bunga	:	10% Efektif
Biaya Provisi dan Administrasi	:	Provisi : 0,5% & Adm : 0,5% diambil dari nilai
Agunan	:	Cessie Piutang sebesar Rp 3.647.351.279

12 LIABILITAS LAIN-LAIN

	2023	2022
Utang Bunga :		
Deposito :		
Bank Lain	0	0
Belum Jatuh Tempo	37.779.045	25.016.322
Simpanan dari Bank lain :		
Belum Jatuh Tempo	28.913.306	17.265.457
Pinjaman yang diterima	3.125.000	0
Utang Pajak :		
Utang Pajak Penghasilan pasal 29	95.417.478	109.731.969
Kewajiban Imbalan Kerja	571.011.834	540.708.900
Lainnya :		
Biaya Pendidikan	0	36.962.701
CSR	130.200.364	97.614.768
Lainnya	183.048.363	124.608.347
J u m l a h	1.049.495.390	951.908.464

13 MODAL

Pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat perubahan kepemilikan saham, sehingga komposisi kepemilikan saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi, SH di Pandaan Pasuruandan telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusan No. AHU-AH.01.03-0004329 Tanggal 7 Januari 2020 dan telah tercatat dalam administrasi pengawasan OJK sesuai dengan surat OJK No.S-67/KO.0401/2020 tanggal 21 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Lembar Saham	Jumlah (Rp)
Pemerintah Kota Pasuruan	2.848	7.120.000.000
Mochammad Hasjim Asjari	24	60.000.000
Koperasi Karyawan Perdana Kota Pasuruan	2	5.000.000
Total	**2.874**	**7.185.000.000**

14 PENDAPATAN BUNGA KONTRAKTUAL

	2023	2022
Pendapatan Bunga dari Pihak ketiga Bank:		
Giro pada bank lain	16.356.861	539.911
Tabungan pada bank lain	214.862.763	197.779.718
Deposito berjangka pada bank lain	412.930.495	421.355.681
Jumlah	644.150.119	619.675.310
Pendapatan bunga dari pihak ketiga bukan bank:		
Kredit yang diberikan	5.225.998.734	5.844.661.646
J u m l a h	5.870.148.853	6.464.336.956

15 PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI KREDIT

	2023	2022
Kepada Pihak ketiga bukan bank	458.355.669	471.030.629

16 BIAYA TRANSAKSI KREDIT

	2023	2022
Kepada Pihak ketiga bukan bank	17.659.739	23.589.244

17 PENDAPATAN LAINNYA

	2023	2022
Penerimaan kredit yang dihapus buku	212.872.740	156.115.573
Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif :		
Penempatan pada bank lain	284.527	13.985.383
Kredit yang diberikan	371.717.108	133.848.085
Lainnya :		
Denda Kredit yang diberikan	203.381.087	234.220.385
Penalti deposito	2.660.000	14.880.000
Administrasi tutup rekening	9.279.178	1.104.050
Survei	1.660.000	1.325.000
Pengurusan Perkara Pengadilan	1.683.700	1.089.900
Lainnya	0	600.000
J u m l a h	803.538.340	557.168.376

18 BEBAN BUNGA

	2023	2022
Bunga pinjaman bank	206.875.200	14.655.014
Tabungan dari pihak ketiga bukan bank	459.217.301	338.976.413
Tabungan dari bank lain	6.719.018	469.647
Deposito berjangka pada pihak ketiga bukan bank	696.828.922	718.200.005
Deposito berjangka pada bank lain	813.653.896	751.363.576
Lainnya :		
Lembaga Penjamin Simpanan	89.366.835	79.123.645
Provisi pinjaman	7.634.406	5.472.232
J u m l a h	2.280.295.578	1.908.260.532

19 BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

	2023	2022
Penempatan pada bank lain	284.527	13.985.383
Kredit yang diberikan	395.728.438	215.064.722
J u m l a h	396.012.965	229.050.105

20 BEBAN PEMASARAN

	2023	2022
Promosi dan iklan	7.011.250	11.877.000
Penagihan	14.674.244	2.964.414
Penghimpunan dana	66.655.613	120.863.400
Penyaluran kredit	4.001.250	14.823.750
Edukasi, Inklusi dan Literasi	16.579.500	17.891.500
J u m l a h	108.921.857	168.420.064

21 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2023	2022
Beban Tenaga Kerja :		
Gaji dan upah :		
Gaji Karyawan	768.108.479	761.957.259
Gaji Direksi	136.794.180	220.943.327
Tunjangan Rumah direksi	7.500.000	12.113.636
Tunjangan Transport	13.534.100	17.681.818
Tunjangan Pangan	122.736.661	124.065.931
Tunjangan Jabatan	243.416.907	323.543.327
THR	66.933.945	194.509.103
Tunjangan Keluarga	104.099.863	109.210.245
Tunjangan PPh 21	49.668.343	73.329.094
Tunjangan Fungsional	55.179.546	54.018.182
Honorarium	95.755.920	148.276.591
Lainnya :		
Beban lembur	20.424.400	45.300.900
Jasa Pengabdian	66.346.131	68.405.988
Jamsostek	80.065.428	83.397.340
JPK	49.889.574	50.944.900
Insentif Karyawan	137.469.649	129.272.448
Pakaian Dinas	5.910.000	9.258.175
Beban pendidikan dan pelatihan	123.361.567	129.524.940
Premi Asuransi	8.695.788	11.844.140
Beban sewa :		
Gedung kantor	80.440.500	80.440.500
Peralatan	100.000	1.800.000
Pajak-pajak (kecuali pajak penghasilan)	28.297.903	25.680.770
Beban penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	89.171.305	73.599.421
Beban amortisasi aset tidak berwujud	14.144.570	7.993.320
Pemeliharaan dan perbaikan	47.746.300	113.758.627
Barang dan Jasa :		
Jasa Konsultan dan Audit	19.869.000	16.500.000
Perjalanan dinas	23.824.500	16.402.500
Listrik, air, dan telepon	71.578.939	78.931.127
Barang cetak dan ATK	73.755.725	46.360.275
BBM	31.936.900	32.781.100
Jasa pengiriman	2.161.200	2.066.000
Jasa keamanan	6.600.000	6.600.000
Jasa Kebersihan	1.200.000	1.800.000
Jasa parkir	5.916.500	3.715.000
Lainnya	280.000	128.800

Rapat, seminar, lokakarya	18.812.000	26.406.700
Mamin pengurus dan karyawan	16.948.800	16.002.600
Rumah Tangga perusahaan	5.925.000	7.424.000
HUT BPR	25.026.200	20.792.500
Jaminan tamu dinas	2.285.000	6.023.400
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.686.900	10.026.300
SLIK	0	900.000
Pengurusan Perkara	7.980.650	8.933.100
Biaya Representatif Direksi	2.200.000	0
Biaya Kaleng Tabungan	1.948.000	911.250
J u m l a h	2.760.726.373	3.173.574.634

22 BEBAN LAINNYA

	2023	2022
SIPO OJK	27.821.816	26.272.119
Aktivitas Karyawan	11.516.400	1.917.000
Asuransi Kredit	0	35.403.332
Jasa Bank	11.320.948	2.761.400
Notaris	8.500.000	1.500.000
Biaya Materai	2.990.000	3.060.000
J u m l a h	62.149.164	70.913.851

23 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2023	2022
Keuntungan Penjualan :		
Kendaraan Kantor	173.949.991	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya:		
Jasa Layanan PPOB	471.500	836.781
Jasa Asuransi	0	12.235.445
Pembayaran Pengurusan Roya	4.100.000	2.400.000
Lainnya	102.303	132.754
Jumlah	178.623.794	15.604.980
Beban Non Operasional Lainnya:		
Sanksi administrasi dan denda pajak	380.000	5.122.063
Asosiasi BPR	19.550.000	9.600.000
Kegiatan Sosial	2.761.000	4.955.500
Panitia seleksi perekrutan	4.054.600	0
Lainnya	0	1.228.700
Jumlah	26.745.600	20.906.263
Jumlah Pendapatan dan Beban non Operasional Lainnya	151.878.194	(5.301.283)

24 TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

	2023	2022
Perhitungan Pajak Penghasilan setelah koreksi fiskal :		
Laba Sebelum Pajak Manurut Laporan Laba Rugi	1.658.155.380	1.913.426.248
Koreksi Positif :		
Pakaian Dinas	5.775.000	8.578.175
Sumbangan	0	450.000
Denda Pajak	0	100.000
PPAP Penempatan Pada Bank lain	284.527	0
PPAP Kredit	395.728.438	215.064.722
Jumlah	401.787.965	224.192.897
Koreksi Negatif :		
Jasa Rekening Simpanan di Bank lain	0	(30.701)
Pemulihan PPAP Penempatan pada bank lain	(284.527)	0
Pemulihan PPAP Kredit	(371.717.108)	(133.848.085)
Jumlah	(372.001.635)	(133.878.786)
Laba Setelah koreksi fiskal	1.687.941.710	2.003.740.359
Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	1.138.836.645	1.287.725.577
Jumlah Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	549.105.065	716.014.782
Pajak Penghasilan terutang sesuai pasal 31 E UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan		
(50%x22%) x PKP	125.272.031	141.649.814
(22%) x PKP	120.803.114	157.523.252
Taksiran Pajak Penghasilan	246.075.145	299.173.065
Dikurangi pajak dibayar dimuka (PPh pasal 25)	(150.657.667)	(189.441.096)
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	95.417.478	109.731.969

25 INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

	2023	2022
Aset:		
Kredit yang diberikan	144.885.138	932.263.947
	0,35%	2,26%
Kewajiban :		
Tabungan	152.548.358	211.657.823
	0,72%	1,20%
Deposito berjangka	169.987.363	322.198.323
	1,14%	2,41%

26 KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	2023	2022
Kewajiban Komitmen :		
Penerusan kredit	1.295.802.591	1.423.408.191
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang belum ditarik	246.860.818	99.645.127
Tagihan Kontinjensi :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian bunga kredit yang diberikan	1.141.281.234	1.146.282.235
Aset produktif yang dihapusbukukan	2.074.623.748	1.949.994.174
Pendapatan bunga atas kredit yang dihapus buku	965.393.422	975.605.825
Kewajiban Kontijensi :		
Kewajiban Kontijensi	164.009.174	134.629.864
J u m l a h	5.887.970.987	5.729.565.416

27 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Lampiran 1

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN JENIS PENGGUNAAN BERDASARKAN KUALITAS
31 DESEMBER 2023

Keterangan	2023					
	Lancar	Lancar Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:						
Modal kerja	0	0	0	0	0	0
KPR	0	0	0	0	0	0
Kepemilikan kendaraan bermotor	0	0	0	0	0	0
Investasi	0	0	0	0	0	0
Konsumsi lainnya	144.885 138	0	0	0	0	144.885.138
Sub total	144.885.138	0	0	0	0	144.885.138
Pihak ketiga:						
Modal kerja	26.226.901.297	559.130.758	0	0	960.832.076	27.746.864.131
KPR	85.644.215					85.644.215
Kepemilikan kendaraan bermotor	41.562.491					41.562.491
Investasi	1.091.519.171	929.078.613	0	0	959.791.384	2.980.389.168
Konsumsi lainnya	8.677.715.862	594.084.965	340.749.759	58.656.752	618.244.479	10.289.451.817
Sub total	36.123.343.036	2.082.294.336	340.749.759	58.656.752	2.538.867.939	41.143.911.822
Jumlah kredit yang diberikan	36.268.228.174	2.082.294.336	340.749.759	58.656.752	2.538.867.939	41.288.796.960
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi						(525.030.758)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit						(1.088.845.597)
Biaya Transaksi						23.293.789
Jumlah kredit yang diberikan bersih						39.698.214.394

Lampiran 2

PT BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
RINCIAN KREDIT YANG DIBERIKAN SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN KUALITAS
31 DESEMBER 2023

Keterangan	Lancar	Lancar Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pertanian Jagung	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
Pertanian Padi	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
Peternakan Unggas	0	0	0	0	38.691.971	38.691.971
Penangkapan Ikan Lainnya	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	500.000.000	0	0	0	57.302.335	557.302.335
Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	0	367.268.484	0	0	0	367.268.484
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	664.999.900	0	0	0	0	664.999.900
Industri Produk Roti Dan Kue	11.874.168	0	0	0	0	11.874.168
Industri Produk Makanan Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
Industri Tekstil Lainnya	42.999.998	0	0	0	0	42.999.998
Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	416.663	0	0	0	0	416.663
Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	749.999.800	0	0	0	0	749.999.800
Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000
Industri Furnitur	59.038.508	0	0	0	400.655.890	459.694.398
Industri Pengolahan Lainnya	18.998.622	0	0	0	0	18.998.622
Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Lainnya	715.428.414	0	0	0	0	715.428.414
Konstruksi Gedung Perkantoran	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
Konstruksi Gedung Lainnya	1.003.139.182	0	0	0	347.625.939	1.350.765.121
Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya	1.668.025.106	0	0	0	0	1.668.025.106
Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000

Keterangan	Lancar	Lancar Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Perdagangan Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	0	0	0	0	13.249.027	13.249.027
Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	2.916.665	0	0	0	0	2.916.665
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	0	924.382.174	0	0	0	924.382.174
Perdagangan Besar Hasil Perikanan	350.000.000	0	0	0	28.238.775	378.238.775
Perdagangan Kayu	221.262.133	0	0	0	26.246.748	247.508.881
Perdagangan Cengkeh	0	0	0	0	428.479.254	428.479.254
Perdagangan Biji Kelapa Sawit	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	300.000.000	0	0	0	76.774.615	376.774.615
Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	1.400.000.000	0	0	0	30.896.943	1.430.896.943
Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
Perdagangan Besar Tekstil	733.333.325	0	0	0	0	733.333.325
Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	0	0	0	0	10.622.438	10.622.438
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	1.873.000.000	0	0	0	0	1.873.000.000
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	17.222.220	0	0	0	0	17.222.220
Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	154.740.783	64.040.463	0	0	319.329.654	538.110.900
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko	61.123.137	18.636.804	0	0	0	79.759.941
Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	4.999.988	0	0	0	0	4.999.988
Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	4.166.666	0	0	0	0	4.166.666

Keterangan	Lancar	Lancar Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Di Toko	26.249.993	0	0	0	0	26.249.993
Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko	3.873.144	0	0	0	0	3.873.144
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	79.966.168	2.080.998	0	0	0	82.047.166
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Makanan, Minuman Dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	22.124.982	0	0	0	0	22.124.982
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	14.833.324	0	0	0	8.554.540	23.387.864
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Ybdi	5.999.997	0	0	0	0	5.999.997
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga	10.999.994	0	0	0	0	10.999.994
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	3.666.666	0	0	0	0	3.666.666
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	1.666.662	0	0	0	0	1.666.662
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	500.000	0	0	0	0	500.000
Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Atau Internet	5.333.333	0	0	0	0	5.333.333
Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya	42.907.139	0	0	0	0	42.907.139
Angkutan Darat Untuk Barang	1.900.000.000	0	0	0	0	1.900.000.000
Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Untuk Barang	1.050.000.000	0	0	0	0	1.050.000.000
Aktivitas Pos Dan Kurir	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
Hotel Bintang	806.987.585	0	0	0	0	806.987.585
Penyediaan Akomodasi Lainnya	4.583.333	0	0	0	0	4.583.333
Penyediaan Makanan Dan Minuman Lainnya	214.547.127	19.143.986	0	0	13.333.332	247.024.445
Perantara Moneter	857.638.887	0	0	0	0	857.638.887
Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	708.333.331	0	0	0	0	708.333.331
Real Estat Perumahan Sederhana Perumnas Tipe 22 S.D. 70	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000

Keterangan	Lancar	Lancar Dalam Perhatian	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Real Estat Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70)	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
Real Estat Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	750.000.000	0	0	0	0	750.000.000
Aktivitas Ketenagakerjaan	1.337.440.000	0	0	0	0	1.337.440.000
Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	400.000.000	0	0	0	55.961.786	455.961.786
Pendidikan Lainnya	7.705.670	0	0	0	0	7.705.670
Kegiatan Penunjang Pendidikan	118.044.310	0	0	0	0	118.044.310
Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	17.333.545	92.656.462	0	0	2.860.213	112.850.220
Rumah Tangga Untuk Pemilikan Rumah Tinggal S.D. Tipe 21	85.644.215	0	0	0	0	85.644.215
Rumah Tangga Untuk Pemilikan Mobil Roda Empat	41.562.491	0	0	0	0	41.562.491
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	8.822.601.000	594.084.965	340.749.759	58.656.752	618.244.479	10.434.336.955
Jumlah kredit yang diberikan	36.268.228.174	2.082.294.336	340.749.759	58.656.752	2.538.867.939	41.288.796.960
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi						(525.030.758)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit						(1.088.845.597)
Biaya Transaksi						23.293.789
Jumlah kredit yang diberikan bersih						39.698.214.394

c. Jangka waktu kredit

	2023
Kurang dari 6 bulan	17.513.611.026
6 bulan sampai kurang dari 12 bulan	991.833.326
12 bulan sampai kurang dari 24 bulan	3.733.288.322
24 Bulan Keatas	19.050.064.286
Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960
Dikurangi provisi yang belum diamortisasi	(525.030.758)
Dikurangi penyisihan penghapusan kredit	(1.088.845.597)
Biaya Transaksi	23.293.789
Jumlah kredit yang diberikan bersih	39.698.214.394

d. Perubahan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan

	2023
Saldo awal	1.309.834.267
Penyisihan penghapusan kredit selama tahun berjalan	395.728.438
Penghapusan kredit yang diberikan	(245.000.000)
Pemulihan penyisihan penghapusan kredit	(371.717.108)
Saldo akhir	1.088.845.597

Lampiran 2

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
KUALITAS ASET PRODUKTIF
DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
31 DESEMBER 2023

No.	Keterangan	Lancar	DPK	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I	Perhitungan Aset Produktif dan Rasio KAP						
	A. Aset Produktif						
	1. Kredit yang diberikan	36.268.228.174	2.082.294.336	340.749.759	58.656.752	2.538.867.939	41.288.796.960
	2 Surat-surat berharga	0	0	0	0	0	0
	3 Penempatan pada bank lain	19.950.568.738	0	0	0	509.254.602	20.459.823.340
	4 Jumlah aset produktif	56.218.796.912	2.082.294.336	340.749.759	58.656.752	3.048.122.541	61.748.620.300
	B. Persentase Bobot Klasifikasi	0%	0%	50%	75%	100%	0%
	C. Jumlah Aset Produktif yang Diklasifikasikan	0	0	170.374.880	43.992.564	3.048.122.541	3.262.489.985
	D. Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (IC:IA4)x100%						5,28
II	Perhitungan Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif*)						
	A. Nilai Agunan Kredit	13.107.190.849	1.549.336.211	0	37.901.342	1.678.651.848	16.373.080.250
	B. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)						
	C. Dasar Penghitungan PPAP	33.637.617.063	532.958.125	340.749.759	20.755.410	860.216.091	35.392.296.448
	D. Prosentase PPAPWD (sesuai PBI No.8/19/PBI/2006)	0,5%	3,0%	10,0%	50,0%	100,0%	-
	E. Jumlah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)	168.188.082	15.988.743	34.074.976	10.377.705	860.216.091	1.088.845.597
	F. Jumlah Penyisihan Penghapusan (Lapbul)	168.188.082	15.988.743	34.074.976	10.377.705	860.216.091	1.088.845.597
	G. Jumlah Kekurangan Penyisihan Penghapusan						0
	H. Rasio Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terhadap PPAPWD (IIF:IIE)x100%						100,00
	I. Prosentase Kolektibilitas Kredit Bruto	87,84%	5,04%	0,83%	0,14%	6,15%	
	J. Prosentase Kredit non Lancar (Bruto)						7,12%
	Prosentase Kredit non Lancar (Netto)						4,48%

Lampiran 3

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
31 DESEMBER 2023

No.	Keterangan	Nominal	Bobot Resiko	ATMR
1	Kas	44.832.300	0%	0
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0	0%	0
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	2.088.111.111	0%	0
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	0	0%	0
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas	0	15%	0
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito , sertifikat deposito, tabungan dan tagihan lainnya kepada bank lain.	20.459.823.340	20%	4.091.964.668
7	Kredit kepada atau bagian dari kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	0	20%	0
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	0	20%	0
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	3.852.552.404	30%	1.155.765.721
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).	0	50%	0
11	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	0	50%	0
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	7.175.579.808	50%	3.587.789.904
13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	16.751.957.645	70%	11.726.370.352
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan /atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fiducia sesuai peraturan perundang-undangan.	527.391.204	70%	369.173.843
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	8.293.895.425	100%	8.293.895.425
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	1.678.651.848	100%	1.678.651.848
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	716.949.425	100%	716.949.425
18	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	991.679.448	100%	991.679.448
19	Aset lain, selain angka 1s.d angka 19	435.351.633	100%	435.351.633
	JUMLAH A.T.M.R.	63.016.775.591		33.047.592.267

Lampiran 4

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
31 DESEMBER 2023

No.	Keterangan	Jumlah setiap Komponen	Diperhitungkan (%)	Jumlah
II	MODAL			
1	Modal Inti			
	1.1. Modal Disetor	7.185.000.000	100%	7.185.000.000
	1.2. Agio	0	100%	0
	1.3. Disagio -/-	0	100%	0
	1.4. Modal Sumbangan	0	100%	0
	1.5. Dana Setoran Modal	0	100%	0
	1.6. Cadangan Umum	1.370.629.294	100%	1.370.629.294
	1.7. Cadangan Tujuan	1.222.995.255	100%	1.222.995.255
	1.8. Laba Ditahan	0	100%	0
	1.9. Laba Tahun-tahun Lalu	0	100%	0
	1.10. Rugi Tahun-tahun Lalu	0	100%	0
	1.11. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (max 50% setelah dikurangi taksiran utang PPh)	1.412.080.235	max 50% setelah dikurangi THP	706.040.118
	1.12. Rugi Tahun Berjalan -/-	0	100%	0
	1.13. Sub total	11.190.704.784	100%	10.484.664.667
	1.14. Goodwill	0	100%	0
	1.15. Jumlah Modal Inti	11.190.704.784		10.484.664.667
2	Modal Pelengkap			
	2.1. Cadangan revaluasi aset tetap	0	100%	0
	2.2. Penyisihan penghapusan aset produktif umum (Max 1,25% ATMR)	168.188.082	Max 1,25% ATMR	168.188.082
	2.3. Modal Pinjaman	0	100%	0
	2.4. Pinjaman subordinasi (Max 50% modal inti)	0	Max 50% modal inti	0
	2.5. Jumlah Modal Pelengkap		Max 100% modal	168.188.082
3	Jumlah Modal (1.15 + 2.5)			10.652.852.749
	Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			
	Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP			
III	MODAL MINIMUM (8% DARI ATMR)	33.047.592.267		2.643.807.381
IV	JUMLAH KEKURANGAN MODAL			0
V	Jumlah modal pelengkap / ATMR	168.188.082 / 33.047.592.267		0,51%
VI	RASIO MODAL (CAR)=(II.3:ATMR) x 100% Jumlah modal / ATMR	10.652.852.749 / 33.047.592.267		32,23%
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar			
VII	Jumlah modal inti / ATMR	10.484.664.667 / 33.047.592.267		31,73%
	Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar			

Lampiran 5

PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
RASIO PERHITUNGAN KESEHATAN BANK
31 Desember 2023

No.	Faktor Komponen Penilaian	31 Desember 2023	
		Jumlah	Rasio
I	Permodalan (CAR)		
	a. Modal	10.652.852.749	
	b. ATMR	33.047.592.267	
	c. Rasio Modal terhadap ATMR		32,23
II	Kualitas Aset Produktif		
1	a. Jumlah aset produktif yang diklasifikasikan	3.262.489.985	
	b. Jumlah aset produktif	61.748.620.300	
	c. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan thd. Aset produktif		5,28
2	a. Jumlah kredit non lancar	2.938.274.450	
	b. Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960	
	c. Prosentase Kredit non Lancar		7,12
3	a. Jumlah penyisihan penghapusan aset produktif	1.088.845.597	
	b. Jumlah PPAP. yang wajib dibentuk (PPAPWD)	1.088.845.597	
	c. Rasio penyisihan penghapusan aset produktif terhadap PPAPWD		100,00
III	Rentabilitas (ROA)		
1	a. Jumlah laba sebelum pajak	1.658.155.380	
	b. Rata-rata volume usaha/jumlah aset	56.006.509.246	
	c. Rasio laba terhadap total aset (ROA)		2,96
2	a. Jumlah biaya operasional	5.608.105.937	
	b. Jumlah pendapatan operasional	7.114.383.123	
	c. Rasio biaya terhadap pendapatan operasional		78,83
3	a. Jumlah pendapatan bunga bersih	4.030.549.205	
	b. Rata-rata total aset produktif	56.776.121.686	
	c. Rasio pendapatan bunga terhadap aset produktif (NIM)		7,10
IV	Likuiditas (CR)		
1	a. Jumlah alat likuid	11.619.552.020	
	b. kewajiban lancar	36.223.912.490	
	c. Rasio perbandingan alat likuid dengan kewajiban lancar		32,08
2	a. Jumlah kredit yang diberikan	41.288.796.960	
	b. Jumlah dana yang diterima	36.080.305.271	
	c. Rasio perbandingan kredit terhadap dana yang diterima (menurut SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022)		114,44

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadk@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

MANAGEMENT LETTER

UNTUK

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"KOTA PASURUAN" PERSERODA

31 DESEMBER 2023

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

No.: **0116/MWA.02/ML/II/2024**

Malang, 29 Februari 2024

Dewan Komisaris Dan Direksi
PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA
Jl. Panglima Sudirman No. 58
PASURUAN

MANAGEMENT LETTER

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya audit atas laporan keuangan **PT. BPR KOTA PASURUAN PERSERODA** (bank), untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, kami sampaikan *management letter* yang berisikan temuan dan saran sebagai berikut:

A. KONDISI USAHA

1. Perkembangan Kondisi Usaha

Volume usaha bank periode 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp 7.145.330.207,- atau 12,94% dari sebesar Rp 55.201.520.333,- menjadi sebesar Rp 62.346.850.540,-. Pada sisi pasiva, terdapat peningkatan terutama pada Simpanan sebesar Rp 5.040.488.296,- atau 16,24% dari sebesar Rp 31.039.816.975,- menjadi sebesar Rp 36.080.305.271,-. Pada sisi aktiva, terdapat peningkatan Penempatan pada bank lain sebesar Rp 5.317.243.655,- atau 35,11% dari sebesar Rp 15.142.579.685,- menjadi sebesar Rp 20.459.823.340,-.

2. Aktiva Produktif (AP)

- **Kualitas Aktiva Produktif (KAP)**

  Aktiva produktif bank terdiri dari kredit yang diberikan sebesar Rp 41.288.796.960,- dan penempatan dana berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka pada bank lain sebesar Rp 20.459.823.340,- Rasio kualitas aktiva produktif, tercermin dari rasio aktiva produktif sebesar 5,28%. Sedangkan rasio Non Performing Loan (NPL) Netto sebesar 4,48%.

- **Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**

  Sampai dengan posisi 31 Desember 2023 BPR telah membentuk PPAP sebesar Rp. 1.088.845.597,- dan PPAPWD yaitu sebesar Rp. 1.088.845.597,-, sehingga rasio PPAP terhadap PPAPWD pada posisi pemeriksaan sebesar 100,00 %.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

- **Analisis Konsentrasi Risiko**

  Kredit yang diberikan dijamin dengan sertifikat hak milik berupa tanah, bangunan yang telah diikat dengan Akte pemberiaan hak tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan BPKB kendaran bermotor roda dua, roda empat atau lebih diikat dengan sertifikat fidusia atau kuasa menjual.

3. Rentabilitas

Perkembangan hasil usaha bank pada akhir tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini terlihat dari laba bersih sebelum pajak turun sebesar Rp. 255.270.868,- atau 13,34% dari sebesar Rp 1.913.426.248,- menjadi Rp. 1.658.155.380,-. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan Pendapatan Operasional sebesar Rp 354.563.594,- atau 4,75% dari sebesar Rp. 7.468.946.717,- menjadi Rp 7.114.383.123,-.

4. Permodalan

Berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), jumlah modal bank sebesar Rp 10.652.852.749,- Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank sebesar Rp 33.047.592.267,- sehingga rasio permodalan (CAR) yaitu rasio perbandingan antara modal terhadap ATMR tercatat sebesar 32,23%.

5. Likuiditas

a. Perkembangan Keadaan dan Kecukupan Likuiditas

- Cash ratio posisi pemeriksaan sebesar 32,08%.
- Jumlah alat likuid pada posisi pemeriksaan adalah sebesar Rp 11.619.552.020,-

b. Analisis Pengelolaan Risiko Likuiditas

Cash ratio pada tanggal pemeriksaan sebesar 32,08%. Untuk menjaga kecukupan tingkat likuiditas, bank menempatkan dana pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat – 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur – 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

B. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Jumlah anggota direksi BPR Kota Pasuruan Perseroda saat ini berjumlah 1 orang yaitu Direktur Utama.

   Saran:
   Seharusnya BPR Kota Pasuruan Perseroda segera menunjuk 1 anggota tambahan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 POJK No. 3/POJK.03/2018 yang mewajibkan jumlah anggota direksi BPR minimal 2 orang. BPR Kota Pasuruan disarankan untuk segera menunjuk posisi kekurangan direktur tersebut.

   Tanggapan BPR :
   Sependapat, sudah dalam proses permohonan pengajuan Penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK.

2. Berdasarkan sampling 27 deposan terbesar total Rp. 7.940.500.000,- atau sebesar 53,33% dari total deposan, kemudian pada sampling 38 penabung terbesar dengan total Rp. 6.806.787.197,- atau sebesar 32,12% dari total penabung terbesar. Hal ini menunjukan bahwa dana pihak ketiga BPR terkonsentrasi kepada penabung dan deposan inti sehingga perlu menjadi perhatian BPR, hal ini dikarenakan kondisi saat ini yang berpotensi Likuiditas bilamana sewaktu-waktu nasabah menarik simpananya di BPR.

   Saran :
   Meningkatkan dan mempertahankan Kepercayaan masyarakat terhadap BPR agar semakin meningkatkan penggunaan dari produk bank antara lain Tabungan, deposito, dan Kredit. Hal ini dilakukan agar dana pihak ketiga BPR tidak terkonsentrasi kepada penabung dan deposan inti sehingga potensi Likuiditas dapat teratasi.

   Tanggapan BPR :
   Sependapat, akan menjadi perhatian

3. Pada tahun 2023 Terdapat 50 Rekening Kredit dengan kualitas Macet lebih dari 2 tahun sebesar Rp. 893.690.524,-. Hal ini menunjukan Penanganan kredit bermasalah masih belum efektif dan Peningkatan Beban PPAP dari debitur macet lebih dari 2 tahun berpotensi mengurangi modal BPR.

   Saran :
   Bank diharapkan selalu melakukan kebijakan terkait penagihan kredit dan Penyelesaian kredit Bermasalah secara intensif. Kebijakan tersebut dilakukan agar Realisasi terkait penagihan dan Penanganan kredit bermasalah tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi agar penyelesaian kredit bermasalah bisa teratasi setiap tahunnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

Tanggapan BPR :
Sependapat, akan lebih focus dan optimal terhadap penanganan kredit bermasalah tersebut.

4. Pada Posisi 31 Desember 2023, terdapat total baki debet kredit dengan kualitas lancar sebesar Rp. 36.268.228.174,- dengan jumlah rekening sebanyak 541. Berdasarkan kredit yang tergolong lancar tersebut, terdapat 21 debitur dengan baki debet sebesar Rp. 432.258.712,- atau sebesar 1,19 % dari total kredit dengan kualitas lancar merupakan kredit lancar dengan tunggakan. Hal tersebut berpotensi downgrade menjadi NPL.

Saran :
Bank sudah melaksanakan sosialisasi dan pengarahan secara intensif terhadap debitur yang berpotensi NPL. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya downgrade kualitas Debitur.

Tanggapan BPR :
Sependapat, akan lebih focus dan optimal terhadap pemantauan dan penyelesaian kredit tersebut.

5. Berdasarkan Daftar Nominatif, terdapat debitur yang realisasinya dibawah 1 tahun (1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023) yang Kualitas kreditnya menjadi Non Lancar.

No Rekening	Nama	Tanggal Mulai	Jatuh Tempo	Baki Debet	Kolek
0171015987002	PT. RUNINCO BUMI LESTARI	29-09-2023	29-09-2028	924.382.174	2
0172007617004	NUR FADHOLI	05-06-2023	05-06-2028	142.500.000	2
0183016317003	PT. RIFKY JAYA SAKTI	10-06-2023	10-09-2023	428.479.254	5

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286 Telp/Fax 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126 Telp. : 0341-490880
Email . kap.mwa.malang@gmail.com

Saran :

Bank sebaiknya melakukan sosialisasi dan pengarahan secara intensif terhadap debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar potensi kredit bermasalah dapat diminimalisir.

Tanggapan BPR :

Sependapat, kredit atas nama PT RIFKY JAYA SAKTI tersebut telah jatuh tempo dengan jangka waktu hanya 3 bulan sedangkan atas nama NUR FADHOLI ybs telah meninggal dunia, dalam proses claim asuransi jiwa.

6. Laba setelah pajak tahun 2023 BPR mengalami penurunan. Kondisi tersebut disebabkan adanya penurunan pendapatan operasional tahun 2023.

Saran:

Upaya untuk meningkatkan pendapatan BPR dan pengendalian atas beban operasional perlu dilakukan. Untuk pembiayaan yang kolektibilitasnya kategori 3,4 dan 5 perlu diupayakan penagihan yang intensif agar tidak menurun kualitasnya. Selain itu, tetap melakukan pemantauan berkala atas pembiayaan yang belum bermasalah agar tidak menurun kualitasnya.

Tanggapan BPR :

Sependapat, di tahun 2023 adanya beban bunga pinjaman bank lain, selanjutnya akan menjadi perhatian.

7. Tindak Lanjut atas temuan OJK :

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

BPR saat ini sudah tidak memiliki anggota Dewan Komisaris sejak masa jabatan Komisaris atas nama Sdr. Sugeng Pradikto berakhir pada tanggal 28 Agustus 2022 sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) POJK No. 62/POJK.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

BPR berkomitmen akan mengajukan calon anggota Dewan Komisaris baru kepada OJK paling lambat 31 Desember 2023.

Berdasarkan pemeriksaan auditor pada tanggal 9 Januari 2024, BPR masih belum melakukan komitmen yang dimaksud.

Tanggapan BPR :

Sependapat, sudah dalam proses permohonan pengajuan Penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MOH WILDAN & ADI DARMAWAN

Izin Usaha : KMK Nomor 139/KM.1/2020
Tanggal : 10 Maret 2020

Kantor Pusat :
Gedung Tigaraksa Satria, Tbk Lantai 2, Ruang 3-G
Jl. Soekarno Hatta No.606 Kota Bandung
Jawa Barat - 40286 Telp/Fax : 022-7569464
Email : kapmohwildanadi@gmail.com

Kantor Cabang :
Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Malang
Jawa Timur - 65126 Telp. : 0341-490880
Email : kap.mwa.malang@gmail.com

Demikian *management letter* ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Adi Darmawan Eryanto, CPA
Partner

Lampiran 24. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023

LAPORAN KEUANGAN

[UNAUDIT]

UNT

PERUMDAM
TIRTA UMBULAN
KOTA PASURUAN

LAPORAN KEUANGAN

(UNAUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

Profesional Harmonis dan Prima Dalam Pelayanan

1. Neraca

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PASURUAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

ASET	31 Des 2023	31 Des 2022
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	14.549.330.549	12.610.091.070
Deposito	2.000.000.000	2.000.000.000
Piutang usaha bersih	3.453.177.809	3.275.789.250
Persediaan	1.117.185.394	1.088.361.213
Biaya dimuka	321.260.924	306.319.614
Jumlah Aset Lancar	21.440.954.676	19.280.561.147
Aset Tetap		
Harga Perolehan	117.034.992.503	115.921.430.963
Akumulasi Penyusutan	(64.626.823.422)	(61.152.801.578)
Jumlah Aset Tetap	52.408.169.081	54.768.629.385
Aset Lain-lain		
Aset Dalam Penyelesaian	-	3.080.224.189
Aset Tidak Berwujud	209.439.000	-
TOTAL ASET	**74.058.562.757**	**77.129.414.721**

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Des 2023	31 Des 2022
Kewajiban Lancar		
Hutang Usaha	101.433.500	142.521.864
Hutang non usaha	107.749.917	237.351.885
Beban ymh dibayar	5.148.904	5 148.904
Hutang Pajak	-	-
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	670.680	56.839.936
Jumlah Kewajiban Lancar	215.003.001	441.862.589
Kewajiban Jangka Panjang		
Kewajiban Aktuaria	1.094.301.156	1.094.301.156
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.094.301.156	1.094.301.156
Jumlah Kewajiban	1.309.304.157	1.536.163.745
Ekuitas		
Penyertaan Pemprov Jatim	5.016.960.939	5.016.960.939
Penyertaan Pemkot Pasuruan	42.811.766.043	42.811.766.043
Penyertaan Pemerintah Pusat	38.591.404.336	38.591.404.336
Modal Hibah	973.531.962	973.531.962
Cadangan	2.421.658.409	2.421.658.409
	89.815.321.689	89.815.321.689
Laba (Rugi) Ditahan		
- Laba (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	(16.249.391.869)	(13.153.801.878)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(816.671.220)	(1.068.268.835)
Jumlah Laba (Rugi) Ditahan	(17.066.063.089)	(14.222.070.713)
Jumlah Ekuitas	72.749.258.600	75.593.250.976
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**74.058.562.757**	**77.129.414.721**

Pasuruan, 26 Januari 2024

Dewan Pengawas

Lucky Panandeno, AP, MM

Direktur

Yoyok Widoyoko, SE, MM

Kabag. Administrasi & Keuangan

IGA Alit Arioka, S. Sos

2. Laporan Laba (Rugi)

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PASURUAN
LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
Pendapatan Usaha		
Penjualan Air	20.555.099.711	20.150.756.556
Penjualan Non Air	957.618.734	1.147.220.882
Jumlah Pendapatan Usaha	21.512.718.445	21.297.977.438
Beban Langsung Usaha		
Beban Pegawai	9.052.545.147	9.098.691.104
Beban Pemakaian Bahan Bakar	149.831.500	54.574.724
Beban Bahan Pembantu	3.994.000	20.955.368
Beban Retribusi Air Baku	52.644.125	60.858.625
Beban Air Curah	1.979.585.644	1.128.333.100
Beban Listrik	4.473.333.710	4.882.547.884
Beban Pemeliharaan	1.009.520.612	881.427.179
Beban Penyusutan	4.377.945.320	4.866.282.257
Beban Penyisihan	527.340.456	420.000.000
Beban Usaha Lainnya	1.015.821.649	1.290.768.453
Jumlah Beban Langsung Usaha	22.642.562.163	22.704.438.694
Laba (Rugi) Kotor Usaha	**(1.129.843.718)**	**(1.406.461.256)**
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain-lain	367.553.908	380.466.413
Beban Lain-lain	(54.381.411)	(42.273.993)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	313.172.497	338.192.420
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**(816.671.221)**	**(1.068.268.836)**
PAJAK PENGHASILAN		-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**(816.671.221)**	**(1.068.268.835)**

Pasuruan, 26 Januari 2024

Pengawas	Direktur	Kabag. Adm. & Keuangan
Lukman Hariyono, AP, MM	Yoyok Widoyoko, SE, MM	IGA Alit Arioka, S. Sos

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Penyertaan Pemprov Jatim	Penyertaan Pemda	Penyertaan Pemerintah Pusat (YBDS)	Modal Hibah	Cadangan	Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021	5.016.960.939	42.811.766.043	38.591.404.336	973.531.962	2.421.658.409	(13.153.801.878)	76.661.519.811
Koreksi laba (rugi)		-	-	-	-	-	-
Pembagian laba		-	-	-	-	-	-
Mutasi tahun 2022		-	-	-	-	(1.068.268.835)	(1.068.268.835)
Saldo per 31 Desember 2022	5.016.960.939	42.811.766.043	38.591.404.336	973.531.962	2.421.658.409	(14.222.070.713)	75.593.250.976
Koreksi laba (rugi)						(2.027.321.156)	(2.027.321.156)
Pembagian laba		-	-	-	-	-	-
Penyertaan Pemda		-	-	-	-	-	-
Mutasi tahun 2023		-	-	-	-	(816.671.221)	(816.671.221)
Saldo per 31 Desember 2023	5.016.960.939	42.811.766.043	38.591.404.336	973.531.962	2.421.658.409	(17.066.063.090)	72.749.258.599

Dewan Pengawas

Lucky Danardono, AP, MM

Direktur

PERUSAHAAN TIRTA UMBULAN KOTA PASURUAN

Yoyok Widoyoko, SE, MM

Pasuruan, 26 Januari 2023
Kabag. Administrasi & Keuangan

IGA Alit Arioka, S. Sos

4. Laporan Arus Kas

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PASURUAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	31 Des 2023	31 Des 2022
A. ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	(816.671.221)	(1.068.268.835)
Penyesuaian untuk:		
Beban Penyusutan Aset Tetap	3.474.021.844	4.866.282.257
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	(2.027.321.156)	(5.423.567)
Beban Penyisihan Piutang	527.340.456	420.000.000
Koreksi Bon		17.539.944
Laba Operasi sebelum perubahan Modal Kerja	1.157.369.923	4.230.129.799
Perubahan Modal Kerja		
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(177.388.559)	(116.453.159)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(28.824.181)	110.543.275
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran di	(14.941.310)	(205.503.404)
(Penurunan) Kenaikan Hutang Usaha	(41.088.364)	(65.709.470)
(Penurunan) Kenaikan Hutang non Usaha	(129.601.968)	120.848.529
(Penurunan) Kenaikan Beban ymh dibayar	-	(46.340.179)
(Penurunan) Kenaikan Hutang Pajak	-	(2.711.233)
(Penurunan) Kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka	(56.169.256)	(48.910.368)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(448.013.638)	(254.236.009)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	**709.356.285**	**3.975.893.790**
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(2.360.460.304)	(3.709.090.813)
Penurunan (Kenaikan) Aset dalam Penyelesaian	3.080.224.189	(1.033.727.882)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain	(209.439.000)	
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	**510.324.885**	**(4.742.818.695)**
C. ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penurunan (Kenaikan) Penyertaan Pemda	-	2.620.537
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan	**-**	**2.620.537**
D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETARA KAS	**1.939.239.479**	**1.853.612.095**
E. SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**12.610.091.070**	**10.756.478.975**
F. SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**14.549.330.549**	**12.610.091.070**

Pasuruan, 26 Januari 2023

Dewan Pengawas	Direktur	Kabag. Adm. & Keuangan
[illegible], AP, MM	Yoyok Widiyono, SE, MM	IGA Alit Arioka, S. Sos

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1) Gambaran Umum Perusahaan

(1) Pendirian Perusahaan

PDAM Kota Pasuruan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan nomor 2 Tahun 1982 tanggal 30 Maret 1982 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pasuruan. Perda tersebut disahkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1982, dan dicantumkan dalam Lampiran Daerah Kota Pasuruan seri : B 4 tanggal 29 Nopember 1982. Kemudian pada Peraturan Daeah Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan, nama perusahaan diubah dari "PDAM Kota Pasuruan" menjadi PERUMDAM Tirta Umbulan

(2) Tempat Kedudukan

Perumdam Tirta Umbulan berkedudukan di Jalan Erlangga No. 4, Pasuruan.

(3) Fungsi dan Kegiatan Perusahaan

Perumdam Tirta Umbulan Kota Pasuruan berfungsi mengusahakan penyediaan air bersih sesuai kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi:

a) Menyelenggarakan pelayanan umum/jasa di bidang penyediaan dan pelayanan air minum;

b) Pengelolaan terhadap sumber air bersih dan mengatur pemanfaatannya;

c) Penyelenggaraan kemanfaatan umum;

d) Peningkatan pendapatan daerah.

(4) Struktur Organisasi Perusahaan

a) Struktur organisasi PDAM ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota nomor 13 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Struktur Organisasi PDAM terdiri dari:

- Dewan Pengawas
- Direktur
- Kepala Bagian
- Kepala Sub Bagian

b) Badan Pengawas Perumdam Tirta Umbulan Kota Pasuruan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/151/423,011/2023. tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perumdam Tirta Umbulan Kota Pasuruan, dan sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah: Lucky Danardono, AP, MM.

c) Perumdam Tirta Umbulan Kota Pasuruan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi tiga bagian, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 188/153/423.011/2023 Menunjuk Yoyok Widoyoko, SE, MM sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan terhitung sejak tanggal 5 Juli 2023

(5) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi PDAM Kota Pasuruan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dasar akuntansi yang digunakan dalam penghitungan hasil usaha dan penentuan posisi keuangan dilakukan dengan metode akrual basis.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Beberapa kebijakan akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan PDAM pada suatu tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

b) Laporan Laba (Rugi)

Laporan Laba (Rugi) menyajikan informasi pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi dan informasi Laba (Rugi) PDAM pada periode yang bersangkutan.

c) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perkembangan Ekuitas baik penambahan maupun pengurangan selama periode akuntansi.

d) Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar selama periode akuntansi meliputi arus kas dari aktivitas operasional, investasi dan pendanaan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam Neraca dan Laporan Laba (Rugi). Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1) Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi yang berlaku adalah kelangsungan usaha dan akrual. Kelangsungan usaha diartikan bahwa suatu entitas akan terus melakukan suahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan. Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (laporan keuangan) periodik dan penentuannya dilakukan dengan metode akrual.

2) Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

3) Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan PDAM Kota Pasuruan dibagi menjadi periode-periode laporan sehingga kinerja PDAM dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah Laporan Tahunan, digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam tahun sebelumnya.

4) Prinsip Konsistensi

Perlakuakn akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode (tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metoe akuntansi lainnya).

5) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka *(on the face)* laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

6) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan diarahkan untuk menyajikan dengan wajar Neraca, Laporan Laba (Rugi), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan.

Beberapa kebijakan akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Pengakuan Pendapatan

- Pendapatan penjualan air diakui pada saat penerbitan rekening air yang dicatat dalam Daftar Rekening Ditagih (DRD);
- Pendapatan non air atas sambungan baru diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyelesaian pekerjaan instalasi;
- Pendapatan denda diakui pada saat terjadinya penerimaan kas.

B. Pengakuan Beban

Pengakuan beban (biaya) berdasarkan sistem *Accrual Basis* dimana beban diakui dalam periode terjadinya transaksi. Biaya yang belum dilaksanakan pengeluaran embayarannya dicatat dalam pos biaya yang masih harus dibayar dan pengeluaran biaya yang belum mempunyai nilai prestasi dicatat sebagai biaya dibayar di muka.

Untuk keperluan cut off periode akuntansi, beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti, jumlahnya dicatat dengan estimasi yang wajar.

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban-beban yang terjadi sebelum tanggal neraca yang belum diketahui secara pasti jumlahnya, dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi yang wajar.

C. Penilaian Piutang

Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan piutang usaha dihitung berdasarkan persentasi rata-rata piutang tak tertagih dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Piutang yang berumur di atas tiga tahun diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan dapat diusulkan kepada Badan Pengawas untuk dihapus bukukan dan dicatat secara ekstra komtabel.

Apabila terdapat pembayaran atas piutang yang telah dihapus (piutang tak tertagih) dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

D. Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Perseiaan dinilai berdasarkan harga perolehan dan pemakaian persediaan dinilai dengan meode *First In First Out (FIFO)*.

Metode pencatatan terhadap persediaan bahan operasi menggunakan metode *"Physical Inventory Method"* sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menggunakan metode *"Perpetual Method"*.

Persediaan bahan operasi berupa bahan kimia, bahan operasi lainnya, bahan instalasi (pipa-pipa dan *accessories*, rupa-rupa suku cadang, dan water meter) dan lain-lain dikelompokkan sebagai aset lancar.

Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

E. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan.

Penyusutan aset tetap digolongkan menjadi 4 (empat) dan disusutkan menggunakan metode Garis Lurus *(Straight Line Method)* terinci sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Penyusutan / Tahun
I. Bukan Bangunan	
a. Kelompok I	25% dari perolehan
b. Kelompok II	12,5% dari perolehan
c Kelompok III	6,25% dari perolehan
d. Kelompok IV	5% dari perolehan
II. Bangunan	
a. Permanen	5% dari perolehan
b. Non Permanen	10% dari perolehan

Pengeluaran pembelian aset tetap dan instalasi yang bernilai di atas Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dikapitalisasi.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat berdasarkan nilai perolehannya beserta semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh/membangun aset tersebut dan diakui sesuai dengan persentase bobot penyelesaiannya pada akhir tahun dan belum dapat disusutkan sampai aset tetap yang bersangkutan dinyatakan beroperasi komersial.

Perusahaan menelaah nilai tercatat aset terhadap penurunan dan kemungkinan penurunan nilai aset tetap ke nilai wajar, apabila terdapat kejadian atau perubahan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam SAK ETAP Bab 15, yang mengidikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Selisih lebih antara nilai tercatat aset dengan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

F. Imbalan Kerja

PDAM Kota Pasuruan dalam memberikan imbalan kerja kepada karyawanannya selain memberikan imbalan yang bersifat rutin berupa gaji dan jainan kesehatan lain, juga diikutsertakan dalam program pensiun pada Dapenma Pamsi.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam Bab No.24 tentang "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada keryawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, PDAM Kota Pasuruan mengikutsertakan dalam program pensiun pada Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

2) Penjelasan Pos-pos Neraca

1 Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Kas	87.329.198,00	164.695.542,00
- Bank	14.462.001.351,00	12.445.395.528,12
	14.549.330.549,00	**12.610.091.070,12**

Saldo Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

- Bank Jatim Cabang Pasuruan	2.261.203.825,00	1.257.889.143,16
- BPR Kota Pasuruan	2.966.350.857,00	917.986.211,00
- Bank BRI Cabang Pasuruan	9.116.025.754,00	10.202.618.214,96
- Bank BNI Cabang Pasuruan	118.420.915,00	66.901.959,00
	14.462.001.351,00	12.445.395.528,12

2 Deposito

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
Deposito Berjangka pada BPR Pasuruan	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**

3 Piutang Usaha

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
Piutang Usaha		
- Piutang Rekening Air	11.314.093.991,00	10.591.892.976,00
- Piutang Tanki Air	23.090.000,00	23.090.000,00
- Piutang Rekening Non Air	5.986.625,00	23.458.625,00
	11.343.170.616,00	10.638.441.601,00
Penyisihan Piutang Usaha		
- Akumulasi Penyisihan Piutang Rekening Air	(7.873.096.252,00)	(7.345.755.796,00)
- Akumulasi Penyisihan Piutang Rekening Non Air	(16.896.555,00)	(16.896.555,00)
	(7.889.992.807,00)	(7.362.652.351,00)
Piutang usaha netto	**3.453.177.809,00**	**3.275.789.250,00**

Penyisihan piutang dihitung berdasarkan persentase rata-rata piutang yang tidak tertagih 3 (tiga) tahun terakhir.

4 Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Bahan Pembantu	-	1.721.270,00
- Oli	-	-
- Alat Tulis Kantor	3.934.708,00	5.898.764,00
- Materai	-	-
- Bahan Operasional Lainnya	954.760,00	92.000,00
- Bahan Instalasi	1.112.295.926,00	1.080.649.179,00
	1.117.185.394,00	**1.088.361.213,00**

5	**Biaya.Dibayar Di Muka**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- Biaya Dibayar di muka	47.839.726,00	72.839.726,00
	- Sewa Dibayar di Muka	7.592.400,00	-
	- Uang Muka PPN	-	534.496,00
	- Uang Muka Pajak	265.828.798,00	232.945.392,00
		321.260.924,00	**306.319.614,00**

6	**Aset Tetap**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- Harga Perolehan	117.034.992.503,00	115.921.430.963,00
	- Akumulasi Penyusutan	(64.626.823.422,00)	(61.152.801.578,00)
		52.408.169.081,00	**54.768.629.385,00**

Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo 31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	1.293.574.510,00	-	-	1.293.574.510,00
Instalasi Sumber	2.361.233.163,00	192.254.200,00	-	2.553.487.363,00
Instalasi Pompa & Pengolahan	8.347.743.625,00	24.975.000,00	-	8.372.718.625,00
Instalasi Trans. & Dist.	93.760.155.084,00	1.238.140.621,00	548.736.451,00	94.449.559.254,00
Bangunan/Gedung	5.391.280.431,00	126.168.250,00	-	5.517.448.681,00
Peralatan & Perlengkapan	736.996.615,00	19.100.250,00	-	756.096.865,00
Kendaraan & Angkutan	1.897.150.000,00	-	-	1.897.150.000,00
Inventaris Kantor	2.133.297.535,00	61.659.670,00	-	2.194.957.205,00
	115.921.430.963,00	1.662.297.991,00	548.736.451,00	117.034.992.503,00
Akumulasi				
Instalasi Sumber	490.770.383,00	117.680.048,00		608.450.431,00
Instalasi Pompa & Pengolahan	5.394.824.059,00	313.142.505,00		5.707.966.564,00
Instalasi Trans. & Dist.	49.214.002.259,00	4.011.832.228,00	1.452.659.927,00	51.773.174.560,00
Bangunan/Gedung	1.917.190.085,00	258.714.069,00	-	2.175.904.154,00
Peralatan & Perlengkapan	720.307.130,00	8.944.408,00	-	729.251.538,00
Kendaraan & Angkutan	1.481.050.241,00	96.716.125,00	-	1.577.766.366,00
Inventaris Kantor	1.934.657.421,00	119.652.388,00	-	2.054.309.809,00
	61.152.801.578,00	4.926.681.771,00	1.452.659.927,00	64.626.823.422,00
Nilai Buku	54.768.629.385,00			52.408.169.081,00

7	**Aset Dalam Penyelesaian**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- Instalasi Transmisi & Distribusi	-	3.080.224.188,72
		-	**3.080.224.188,72**

8	**Aset Tidak Berwujud**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari :		
	- Aplikasi Cetak Tagihan Rekening	9.750.000,00	-
	- Pengadaan Software Integrated & Accounting	199.689.000,00	-
		209.439.000,00	

9	**Hutang Usaha**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- CV Alam Indah	-	7.992.000,00
	- CV Nusantara Pasuruan	-	7.825.500,00
	- TK Purnama	-	3.080.000,00
	- PT Air Bersih Jawa Timur (Persero)	-	101.707.389,00
	- CV Scala	-	16.250.000,00
	- CV Pully Makmur	-	2.550.000,00
	- Service Station Makmur	-	500.000,00
	- Pasang Baru	-	2.616.975,00
	- Mega Jaya AC	3.441.000,00	-
	- CV Warna Indah	8.042.500,00	-
	- CV Wahid	89.950.000,00	-
		101.433.500,00	**142.521.864,00**

10	**Hutang Non Usaha**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- Lembur	3.531.050,00	1.889.450,00
	- Ongkos Kerja	65.964.867,00	59.122.134,00
	- Retribusi ABT	-	4.272.100,00
	- Honor Tim	8.700.000,00	-
	- Perjalanan Dinas	983.000,00	1.504.000,00
	- Pasang Baru	-	8.754.995,00
	- PDAM	-	1.208.984,00
	- Insentif	-	43.025.445,00
	- Gaji/Honorarium	26.200.000,00	68.660.677,00
	- Lainnya	2.371.000,00	48.914.100,00
		107.749.917,00	**237.351.885,00**

11	**Beban Yang Masih Harus Dibayar**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- Ongkos Kerja		-
	- Hutang Jasa Produksi 2021	-	-
	- Hutang Jasa Produksi 2022	5.148.903,50	5.148.903,50
		5.148.903,50	**5.148.903,50**

12	**Hutang Pajak**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Terdiri dari:		
	- PPh Pasal 29	-	-
	- PPN	-	-
		-	-

13 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Uang Muka Rekening TNI	-	-
- Uang Muka Rekening POLRI	108.840,00	37.280.265,00
- Titipan Rekening Umum	110.840,00	9.715.542,00
- Titipan Retribusi Kebersihan	451.000,00	1.826.000,00
- Uang Titipan	-	8.018.129,00
	670.680,00	**56.839.936,00**

14 Kewajiban Imbalan Kerja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Kewajiban Imbalan Kerja	**1.094.301.156,00**	**1.094.301.156,00**

Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022. Jumlah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahu 2003. PDAM Kota Pasuruan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan yang minimal sama dengan imbalan pensiun yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Berdasarkan manfaat pensiun sesuai dengan Undang-undang tersebut dengan manfaat pensiun dari program pensiun yang ada serta imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya, perusahaan membukukan selisih kurang (jika ada) dan imbalan kerja tersebut sebagai kewajiban imbalan kerja.

15 Ekuitas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Penyertaan Pemprov Jatim	5.016.960.939,00	5.016.960.939,00
- Penyertaan Pemda	42.811.766.043,00	42.811.766.043,00
- Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	38.591.404.336,00	38.591.404.336,00
- Modal Hibah	973.531.962,00	973.531.962,00
- Cadangan	2.421.658.409,00	2.421.658.409,00
	89.815.321.689,00	**89.815.321.689,00**
Laba (Rugi) Ditahan		
- Laba (Rugi) Ditahan	(16.249.391.869,00)	(13.153.801.878,00)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(816.671.220,00)	(1.068.268.835,00)
	(17.066.063.089,00)	**(14.222.070.713,00)**
	72.749.258.600,00	**75.593.250.976,00**

Modal Hibah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Terdiri dari:		
- Tahun 2002	24.462.112,00	24.462.112,00
- Tahun 2003	148.042.535,00	148.042.535,00
- Tahun 2004	53.351.861,00	53.351.861,00
- Tahun 2005	224.419.730,00	224.419.730,00
- Tahun 2007	217.184.153,00	217.184.153,00
- Tahun 2008	306.071.571,00	306.071.571,00
	973.531.962,00	**973.531.962,00**

3) Penjelasan Pos-pos Laba (Rugi)

16 Pendapatan Usaha	2023	2022
Terdiri dari:		
- Pendapatan Air	20.555.099.711,00	20.150.756.556,00
- Pendapatan Non Air	957.618.734,00	1.147.220.882,00
	21.512.718.445,00	**21.297.977.438,00**

Pendapatan Air tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:		
- Harga Air	16.928.181.079,00	16.551.806.797,00
- Baban Tetap	3.250.557.432,00	3.246.312.759,00
- Penjualan Air tangki	376.361.200,00	352.637.000,00
	20.555.099.711,00	20.150.756.556,00

Pendapatan Non-Air tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:		
- Pendapatan Sambungan Baru	257.623.000,00	262.179.500,00
- Pendapatan Sambungan Kembali	105.427.500,00	241.004.500,00
- Pendapatan Denda	323.854.160,00	344.439.500,00
- Pendapatan Perluasan Jaringan	225.104.990,00	161.152.843,00
- Pendapatan Ganti Meteran Rusak	1.320.000,00	2.280.746,00
- Pendapatan Balik Nama	2.398.000,00	2.376.000,00
- Pendapatan Non Air Lainnya	41.891.084,00	133.786.793,00
	957.618.734,00	1.147.219.882,00

17 Beban Langsung Usaha		
Terdiri dari:		
- Beban Pegawai	9.052.545.147,00	9.098.691.104,00
- Beban Pemakaian Bahan Bakar	149.831.500,00	54.574.724,00
- Beban Bahan Pembantu	3.994.000,00	20.955.368,00
- Beban Retribusi Air Baku (ABT dan AP)	52.644.125,00	60.858.625,00
- Beban Air Curah	1.979.585.644,00	1.128.333.100,00
- Beban Listrik	4.473.333.710,00	4.882.547.884,00
- Beban Pemeliharaan	1.009.520.612,00	881.427.179,00
- Beban Penyusutan	4.377.945.320,00	4.866.282.257,00
- Beban Penyisihan	527.340.456,00	420.000.000,00
- Beban Usaha Lainnya	1.015.821.649,00	1.290.768.453,00
	22.642.562.163,00	**22.704.438.694,00**

	2023	2022
Beban Pegawai selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:		
- Beban Pegawai Sumber Air	239.267.140,00	267.853.392,00
- Beban Pegawai instalasi Pompa	287.876.976,00	314.491.168,00
- Beban Pegawai Transmisi & Distribusi	1.066.993.730,00	1.207.630.455,00
- Beban Pegawai Umum & Administrasi	7.458.407.301,00	7.308.716.089,00
	9.052.545.147,00	9.098.691.104,00

Beban BBM selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:		
- Beban BBM Sumber Air	87.800.000,00	25.123.000,00
- Beban BBM Instalasi Pompa	12.361.500,00	12.500.000,00
- Beban BBM Transmisi & Distribusi	49.670.000,00	16.951.724,00
	149.831.500,00	54.574.724,00

Beban Listrik selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

- Beban Listrik Sumber Air	3.808.368.020,00	3.853.135.949,00
- Beban Listrik Instalasi Pompa	551.805.131,00	934.275.917,00
- Beban Listrik Kantor	113.160.559,00	95.136.018,00
	4.473.333.710,00	4.882.547.884,00

Beban Pemeliharaan selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

- Beban Pemeliharaan Sumber Air	21.046.500,00	18.491.100,00
- Beban Pemeliharaan Instalasi Pompa	4.604.271,00	20.999.900,00
- Beban Pemeliharaan Trandis	887.452.402,00	710.668.349,00
- Beban Pemeliharaan Umum	96.417.439,00	131.267.830,00
	1.009.520.612,00	881.427.179,00

Beban Penyusutan selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

- Beban Penyusutan Sumber Air	117.680.048,00	106.160.573,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pompa	313.142.505,00	317.094.386,00
- Beban Penyusutan Trandis	3.463.095.777,00	3.915.770.911,00
- Beban Penyusutan Umum & Administrasi	484.026.990,00	527.256.387,00
	4.377.945.320,00	4.866.282.257,00

Beban Usaha Lainnya selama tahun 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut:

- Beban Kantor	182.529.323,00	173.045.183,00
- Beban Hubungan Langganan	61.571.978,00	169.567.283,00
- Beban Keuangan	7.610.675,00	39.471.568,00
- Beban Penelitian & Pengembangan	11.449.100,00	99.450.650,00
- Rupa-rupa Beban Umum & Administrasi	687.015.153,00	688.263.028,00
- Rupa-rupa Beban Operasional	65.645.420,00	120.970.741,00
	1.015.821.649,00	1.290.768.453,00

18 Pendapatan Lain-lain

	2023	2022
Terdiri dari:		
- Jasa Giro	220.780.954,00	169.052.104,00
- Bunga Tabungan	57.616.462,00	51.854.317,00
- Bunga Deposito	88.999.992,00	92.999.992,00
- Penerimaan Piutang yang dihapus buku	-	-
- Pendapatan Lainnya	156.500,00	66.560.000,00
	367.553.908,00	**380.466.413,00**

19 Beban Lain-lain

	2023	2022
Terdiri dari:		
- Administrasi Bank	54.381.411,00	42.273.993,00
- Kerugian Penghapusan Aset	-	-
	54.381.411,00	**42.273.993,00**